

RINGKASAN

**ANALISIS EKONOMI GULA:
SUATU PENDEKATAN KONSEP EKONOMI
KELEMBAGAAN DAN MATRIKS ANALISIS KEBIJAKAN
(Studi Kasus di PG. Krebet Baru dan PT.PG. Kebon Agung, Kabupaten Malang)**

YUSTITIA ASRI ERTANINGRUM



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2007**

**ANALISIS EKONOMI GULA:
SUATU PENDEKATAN KONSEP EKONOMI
KELEMBAGAAN DAN MATRIKS ANALISIS KEBIJAKAN
(Studi Kasus di PG. Krebet Baru dan PT.PG. Kebon Agung, Kabupaten Malang)**

Oleh
YUSTITIA ASRI ERTANINGRUM
0210440091-44

**RINGKASAN
SKRIPSI**

**Disampaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian Strata-1 (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2007**

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup.....	6
BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN.....	8
3.1 Kerangka Pemikiran.....	12
3.2 Hipotesis.....	13
3.3 Pembatasan Masalah.....	13
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	14
BAB IV METODE PENELITIAN.....	17
4.1 Penentuan Daerah Penelitian.....	17
4.2 Penentuan Sampel.....	17
4.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
4.4 Metode Analisis Data.....	19
BAB V KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	32
5.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian.....	32
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
6.1 Karakteristik Petani Contoh.....	66
6.2 Kelembagaan Pada Industri Gula di Malang.....	69
6.3 Biaya Produksi dan Biaya Transaksi Pada Petani Tebu.....	86
6.4 Biaya Transaksi pada Pabrik Gula.....	117
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	142
7.1 Kesimpulan.....	142



7.2 Saran.....	146
LAMPIRAN.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	xii



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul *Analisis Ekonomi Gula: Suatu Pendekatan Konsep Ekonomi Kelembagaan dan Matriks Analisis Kebijakan* dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti.

Laporan penelitian ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu (S-1) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dari pihak-pihak yang terkait dan yang utama adalah perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Syafril, MS, selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan dan saran mulai dari awal hingga laporan ini selesai
2. Rahman Hartono, SP, MP, selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan atas proses pembelajaran yang tak ternilai.
3. Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
4. Ir. Ratya Anindita, MS, PhD selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan sumbangan dan masukan-masukan yang membangun demi pnyempurnaan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Ir. H. Muslich M, MSc selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan sumbangan dan masukan-masukan yang membangun demi pnyempurnaan skripsi ini.
6. Heri Toiba, SP , MP yang ikut memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Pihak P.G Kebon Agung, khususnya Bapak Thomas selaku staff TUK, yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan data tentang pelaksanaan kemitraan.
8. Pihak P.G Krebet Baru, khususnya Bapak Gatot selaku pimpinan bagian TUK, yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan data tentang pelaksanaan kemitraan
9. Pengurus KUD Subur Kecamatan Kedungkandang, khususnya Bapak Sutikno, Bapak Djunaedi dan Bapak Cholil yang bersedia membantu perolehan data dan informasi tambahan yang berguna untuk menunjang penyusunan laporan ini.
10. Pengurus KUD Sari Bumi Bululawang, Khususnya Bapak Djauzi yang bersedia membantu perolehan data dan informasi tambahan yang berguna untuk menunjang penyusunan laporan ini.
11. Seluruh mahasiswa Agribisnis angkatan 2002, atas indahnya kenangan selama 5 tahun masa studi serta segala bantuannya dalam penyelesaian laporan ini.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan demi kelancaran dunia pendidikan.

Malang, Juli 2007

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan 22 tahun silam tepatnya tanggal 10 Oktober 1984, penulis merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Moch. Erwanto dan Titik Tjatur Budi Lestari

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1997 di SDN Cemara Dua 13 Surakarta, selanjutnya penulis melanjutkan studinya di SMPN I Salatiga hingga tahun 1999. dan kemudian penulis melanjutkan ke jenjang SMU hingga akhirnya lulus dari SMU Labschool Rawamangun Jakarta pada tahun 2002.

Di tahun yang sama, penulis melanjutkan studinya di Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi, Program Studi Agribisnis Universitas Brawijaya melalui jalur PSB. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa kegiatan kemahasiswaan. Diantaranya, Panitia Krida Maba tahun 2003, panitia PLA PERMASETA tahun 2003, 2004 dan 2005, Panitia POSTER 2006, serta beberapa kegiatan lainnya. Penulis juga menjabat sebagai Bendahara FARMERS dari tahun 2005-2007. Penulis juga pernah menjadi asisten praktikum pada mata kuliah mata kuliah *Speaking* di program Diploma-III Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Sewaktu menjadi mahasiswa, penulis pernah menjuarai Lomba Debat Bahasa Inggris tingkat Universitas se Jawa Timur.

RINGKASAN**YUSTITIA ASRI 0210440091-44. Analisis Ekonomi Gula: Suatu Pendekatan Konsep Ekonomi Kelembagaan dan Matrik Analisis Kebijakan (Studi Kasus di PG Kregbet Baru dan PG Kebon Agung, Kabupaten Malang). Dibawah bimbingan Dr. Ir. Syafrial, MS dan Rahman Hartono, SP, MP**

Dampak krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan penurunan produksi gula Indonesia, dalam hal ini rata-rata produksi tahun 1992 – 1997 sebesar 2 juta ton sedangkan tahun 1998 – 2003 sebesar 1,4 juta ton. Permintaan gula dalam negeri sangat tinggi sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut tidak cukup hanya dipenuhi oleh produksi gula dalam negeri tetapi harus ditambah dengan mengimpor gula dari luar negeri. Indonesia adalah salah satu negara pengimpor gula terbesar dunia, tapi pada tahun 1998 Indonesia menerapkan tarif impor yang sangat rendah, yaitu Rp 700/kg (32 persen) untuk gula pasir, dan Rp 550/kg (43 persen) untuk gula kasar, hal ini merupakan tarif spesifik yang sangat rendah.

Dalam perkembangan dewasa ini pergulaan nasional diarahkan pada pendekatan swasembada gula “sugar self sufficiency” yang merupakan tekad pemerintah pada tahun 2007. Tampaknya tekad pemerintah untuk mencapai target swasembada gula pada tahun 2007 sangat sulit dicapai mengingat terjadinya ketidakefisienan produksi dan kelembagaan di hampir semua level pada industri gula. Adapun salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefisienan tersebut adalah aturan main (rules of the game) baik itu aturan formal (kontrak, lembaga, hukum, sistem politik, pasar), maupun aturan informal (tradisi, sistem nilai, norma) dan prosedur penegakan yang melingkupinya kurang mendukung. Hal tersebut menyebabkan membengkaknya biaya produksi dan biaya transaksi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: (1). Mendeskripsikan aspek ekonomi kelembagaan pada industri gula Malang mulai dari kelembagaan petani tebu sampai dengan pabrik gula; (2). Menganalisis perbedaan biaya usahatani dan biaya transaksi dari petani tebu kredit dan petani tebu bebas serta tingkat keunggulan komparatif dan kebijakan usahatani tebu; (3). Menganalisis biaya produksi dan biaya transaksi dari pabrik gula BUMN dan pabrik gula swasta yang terdiri dari produksi, pasar, manajerial dan biaya transaksi politik.

Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonomi kelembagaan industri gula dan Policy Analysis Matrix (PAM). Penelitian ini mengambil contoh dua pabrik gula di Jawa Timur yaitu pabrik gula BUMN yang diwakili oleh Pabrik Gula Kregbet Baru dan pabrik gula swasta yang diwakili oleh Pabrik Gula Kebon Agung yang keduanya berlokasi di Kabupaten Malang. Responden petani ditentukan secara kelompok (cluster) berdasarkan jenis modal yaitu petani kredit dan petani bebas dari masing-masing pabrik gula.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : (1). Ketidakefisienan kelembagaan pada industri gula disebabkan karena besarnya biaya transaksi; (2). Usahatani tebu petani kredit lebih mempunyai keunggulan komparatif dibanding usahatani tebu petani bebas; (3). Kebijakan pemerintah mampu meningkatkan keunggulan komparatif industri gula; (4). PG BUMN (Kregbet Baru) memiliki efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan PG Swasta (Kebon Agung).

Hasil dan kesimpulan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sumber kredit petani tebu di Kabupaten Malang untuk petani kredit didapatkan dari koperasi atau pabrik gula, sedangkan untuk petani bebas dari pedagang perantara/tengkulak dan tetangga atau keluarga. Pengembalian kredit dilakukan setelah masa panen. Untuk petani kredit dan bebas dibawah pabrik gula Krebet Baru mendapatkan rendemen 4,4 dengan sistem pembagian 65:35. Untuk petani kredit dan bebas pada pabrik gula Kebon Agung mendapatkan rendemen 4,9 dengan sistem pembagian 65:35.
2. Biaya Produksi di daerah penelitian ada enam macam, yaitu: Upah tenaga kerja, Sewa traktor, Bibit, Pupuk, Sewa lahan, dan Irigasi. Biaya produksi petani bebas lebih besar daripada petani kredit. Secara keseluruhan, usahatani tebu di Kabupaten Malang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan tidak efisien untuk diusahakan yang ditunjukkan dengan keluaran $DRC > 1$. Subsidi dan proteksi dari pemerintah sangat diperlukan oleh petani tebu di Kabupaten Malang. Subsidi dan proteksi tertinggi diperlukan oleh petani bebas dibawah pabrik gula Krebet Baru dan yang terendah diperlukan oleh petani kredit dibawah pabrik gula Kebon Agung. Biaya Transaksi pada petani tebu dapat dikategorikan menjadi komponen seperti berikut: Pajak Tanah, Tebang-Muat-Angkut dan karung, fee dan sumbangan untuk koperasi, sumbangan untuk kelompok tani, fee Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA), fee untuk pedagang perantara dan tengkulak, makan pesta adat, bunga kredit, selisih(marjn) bunga, kertas kerja, biaya korbanan, dan keterlambatan kredit
3. Biaya Transaksi di pabrik gula Kebon Agung lebih tinggi daripada pabrik gula Krebet baru, hal ini dikarenakan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk biaya transaksi pasar agar pasokan bahan baku tebu berkesinambungan. Bukan berarti bahwa pabrik gula Kebon Agung tidak efisien dibanding pabrik gula Krebet Baru, karena pabrik gula Krebet Baru mengeluarkan hampir 90 persen biaya transaksi untuk manajerialnya. Bisa disimpulkan bahwa besarnya biaya tersebut dikarenakan sifat birokrasi PG BUMN masih sentralistik sehingga biaya transaksi yang dikeluarkan sangat besar.

SUMMARY

YUSTITIA ASRI 0210440091-44. Sugar Economic Analysis: An Approach of Institutional Economic Concept and Policy Analysis Matrix (Case Study at Kribet Baru Sugar Mill dan Kebon Agung Sugar Mill, Malang Regency). Advisors: Dr. Ir. Syafrial, MS dan Rahman Hartono, SP, MP

Economical Crisis in 1998 significantly causes the decline of sugar production in Indonesia. The Domestic sugar demand is very high, so to fulfill that high demand, not only from sugar domestic production but also Indonesia has to import the sugar from foreign.

Nowadays, National Sugar Industry is being pointed to reach “sugar self sufficiency” in 2007. Unfortunately it is very difficult considering inefficiency occurred in most of production and institutional sector that causes the magnitude of production and transactions cost. One of factors that caused the inefficiency is rules of the game in sugar industry, either formal rules (contract, institution, law, political system, market) or informal rules (traditions, conventions, norms).

The objectives of this research is: (1). To describe the whole structure of institutional arrangements of the sugar industry Malang – East Java – Indonesia, especially between sugarcane farmers and sugar mills; (2). To describe the differences of sugarcane farming between credit sugarcane farmers and non-credit sugarcane farmers and also to analyses the comparative advantages in sugarcane farmers level; (3). To describe the transactions cost differences between state-owned and privately-owned sugar mills, consisting market, managerial, and political transactions cost.

This research use Institutional Economic Approach to analyze the institutional arrangement in sugar industry and also use Policy Analysis Matrix (PAM) to analyze the government policy in sugar industry in Indonesia. This research is carry out in Malang Region, East Java. The research location is purposely determine. From the sugarcane producer point of view, Malang region is one of the biggest producers of sugarcane in East Java. This research use cluster sampling for farmers (credit and non credit) and sugar mill (state owned and privately owned) which is Kribet Baru as state owned sugar mill and PT.Kebon Agung as privately owned sugar mill. For determine the amount of samples, researcher use 10 percent amount from population. Cluster I, 42 farmers is for credit farmers from KB SM; Cluster II, 28 farmers is for non-credit farmers from KB SM; Cluster III, 39 farmers is for credit farmers from KA SM; Cluster IV, 19 farmers is for non-credit farmers from KA SM.

Hypothesis of this research is : (1). The Institutional Inefficiency of Sugar Industry caused by the Magnitude of Transaction Cost; (2). Credit Sugarcane Farming have higher comparative advantage compare to non credit sugarcane farming; (3). Government Policy and Regulation can develop the sugar Industry comparative advantage ; (4). State Owned Sugar Mill (Kribet Baru) have lower efficiency compare to Privately Owned Sugar Mill (Kebon Agung).

The result and conclusion of this research: (1). There are 3 important institusional arrangement in sugar industry: (A).Credit Sources and Repayment System; (B). Roles of Cooperatives and Middleman; (C). Contractual Arrangements between Sugarcane Farmers and Sugar Mill; (2). The Result From

The PAM analysis shows that Sugarcane farming is not efficient in using of Domestic Resources, it can be seen from the output that has $DRC > 1$; (3). Transaction cost of the sugar mill has huge contribution in sugar mill total cost (about 10%-60%), so it can be stated that institution of sugar mill is not efficient.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dampak krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan penurunan produksi gula Indonesia, dalam hal ini rata-rata produksi tahun 1992 – 1997 sebesar 2 juta ton sedangkan tahun 1998 – 2003 sebesar 1,4 juta ton. Permintaan gula dalam negeri sangat tinggi sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut tidak cukup hanya dipenuhi oleh produksi gula dalam negeri tetapi harus ditambah dengan mengimpor gula dari luar negeri. Produksi dalam negeri relatif rendah dibandingkan dengan total konsumsi, sehingga diperlukan impor gula pasir yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1996, impor mencapai 976 ribu ton menjadi 1,3 juta ton pada 1997. Pada tahun 1998 Indonesia mengimpor 1,7 juta ton dan pada tahun 1998 juga, 55 persen kebutuhan gula pasir Indonesia berasal dari impor. Pada tahun 2006, pemerintah memutuskan untuk mengimpor gula sebesar 300 ribu ton, dengan perincian sebanyak 190 ribu ton didistribusikan ke ke pasar dan 110 ribu ton digunakan untuk stok penyangga.

Indonesia adalah salah satu negara pengimpor gula terbesar dunia, tapi pada tahun 1998 Indonesia menerapkan tarif impor yang sangat rendah, yaitu Rp 700/kg (32 persen) untuk gula pasir, dan Rp 550/kg (43 persen) untuk gula kasar. Hal ini merupakan tarif spesifik yang sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand dan Filipina dengan tarif “ad valorem” hampir 100 persen, Amerika dengan tarif 150 persen, dan Uni Eropa yang dengan tarif 240 persen (Departemen Pertanian,2002). Pada tahun 2000, dengan dinaikkannya tarif bea impor dari 0 persen menjadi 25 persen, areal lahan tebu di Jawa Timur (sentra produksi tebu) mengalami kenaikan dari 140.000 hektar menjadi 164.296 hektar. Tarif tersebut masih terlalu rendah, akan tetapi menurut pemerintah tarif yang terlalu tinggi akan menyebabkan makin maraknya penyelundupan gula impor. Masuknya gula impor menyebabkan persaingan antar gula dalam negeri dengan gula impor.

Dalam perkembangan dewasa ini pergulaan nasional diarahkan pada pendekatan swasembada gula “sugar self sufficiency” yang merupakan tekad pemerintah pada tahun 2007. Tampaknya tekad pemerintah untuk mencapai target swasembada gula pada tahun 2007 sangat sulit dicapai mengingat terjadinya ketidakefisienan produksi dan kelembagaan di hampir semua level pada industri gula. Adapun salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefisienan tersebut adalah aturan main (rules of the game) baik itu aturan formal (kontrak, lembaga, hukum, sistem politik, pasar), maupun aturan informal (tradisi, sistem nilai, norma) dan prosedur penegakan yang melingkupinya kurang mendukung. Hal tersebut menyebabkan membengkaknya biaya produksi dan biaya transaksi.

Penurunan kinerja industri gula dipengaruhi oleh ketidakefisienan kinerja pada tingkat petani yang menyebabkan penurunan produktivitas tebu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku petani dalam bertanam tebu dari “High input” menjadi “Low input” sebagai reaksi rasional dari perubahan rasio harga output-input. Sistem kelembagaan yang tidak efisien karena kecenderungan keberpihakan mekanisme kelembagaan terhadap pabrik gula juga dinilai sebagai salah satu faktor pemicu menurunnya produktivitas tebu. Disamping itu, adanya perbedaan biaya dan kinerja produksi antara petani tebu kredit dan petani tebu bebas juga mempengaruhi produktivitas tebu pada tingkat petani.

Pada tingkat pabrik gula, Produktivitasnya pun sangat rendah dikarenakan teknologi yang digunakan oleh pabrik gula masih dapat dikatakan konvensional karena masih ada yang menggunakan mesin-mesin dan lori-lori peninggalan Belanda yang kurang layak pakai sehingga menyebabkan biaya produksi sangat besar dan tidak efisien. Menurut penelitian Sumodihardjo (1985) dalam Hafshah (2002), sebagian besar dari 17 pabrik gula di pulau Jawa memiliki BSD (Biaya Sumberdaya Domestik) yang lebih besar dari satu, yang berarti biaya produksi gula pabrik gula tersebut lebih besar dibanding harga gula impor. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi mis-alokasi sumber daya. Adanya perbedaan karakteristik dan ketidakefisienan sistem manajemen, praktik manajemen, dan kelembagaan antara pabrik gula BUMN dan Pabrik gula swasta juga sangat berpengaruh terhadap penurunan produktivitas industri gula nasional.

Ketergantungan yang begitu tinggi terhadap gula impor adalah salah satu indikasi dari lemahnya kedaulatan pangan gula.

Berdasarkan kenyataan tersebut dipandang penting untuk dilakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefisienan pada industri gula untuk dapat mencapai swasembada gula, melalui pendekatan teknis analisis kebijakan pangan dan melalui pendekatan kelembagaan industri gula dengan instrumen analisis biaya produksi dan biaya transaksi.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang dialami industri gula di Indonesia akhir-akhir ini menjadi semakin kompleks baik itu sisi eksternal dan internal dari industri gula. Apabila dapat dikategorikan, industri gula mengalami tiga masalah dasar : (1) Tidak efisiennya produksi pada tingkat petani tebu, (2) Tidak efisiennya produksi pada tingkat pabrik gula, (3) Kebijakan pemerintah yang tidak efektif dalam pemberian insentif terhadap pertumbuhan industri gula nasional.

Ketidak efisienan produksi pada tingkat petani tebu yang menyebabkan penurunan produktivitas tebu disebabkan oleh sistem budidaya yang tidak optimal yang ditunjukkan oleh beberapa faktor antara lain (1) Sistem keprasan yang digunakan oleh petani tebu, (2) Sistem bagi hasil produksi yang tidak adil sehingga tidak ada insentif untuk petani memproduksi tebu yang berkualitas baik, (3) Sistem tanam dan sistem panen yang tidak terkoordinasi dengan baik, dan (4) Lahan budidaya yang di dominasi oleh lahan kering. Faktor-faktor tersebut yang secara signifikan mempengaruhi produktivitas gula, kualitas gula yang buruk, dan kandungan rendemen yang rendah.

Disamping faktor-faktor tersebut, kita juga harus melihat tentang struktur ekonomi dan kelembagaan yang tidak efisien pada hubungan antara petani kredit dan petani bebas dengan pabrik gula, yang ditunjukkan dengan sistem bagi hasil panen dan penanganan pasca panen yang cenderung merugikan petani sehingga biaya produksi dan biaya transaksi yang harus ditanggung petani sangat tinggi.

Ketidak efisienan produksi pada tingkat pabrik gula diindikasikan dengan penggunaan teknologi yang masih tradisional dan ketidakefisienan manajemen yang digunakan pada pabrik gula. Apabila kita bandingkan teknologi yang digunakan pabrik gula BUMN dan swasta, maka dapat diketahui bahwa pabrik gula swasta menggunakan teknologi yang lebih baik karena kebanyakan pabrik gula swasta lebih muda usianya dibandingkan pabrik gula BUMN. Disamping itu, perbedaan sistem manajemen pada pabrik gula BUMN dan pabrik gula swasta yang ditunjukkan dengan adanya sistem birokrasi yang berbeda pada keduanya dan juga praktik manajemen yang berbeda pula. Umumnya pabrik gula swasta lebih efisien dari pabrik gula BUMN dikarenakan tidak adanya sistem birokrasi yang berbelit-belit dan juga pabrik gula swasta diatur oleh manajemen yang lebih baik dan lebih profesional. Contohnya apabila pabrik gula BUMN ingin mengganti mesin produksi, maka manajemen dari pabrik gula BUMN harus membuat proposal kepada PTPN dan biasanya keputusan untuk realisasinya membutuhkan proses dan waktu yang sangat lama, yang mana akan mengganggu proses produksi. Masalah ini menyangkut birokrasi dan sistem kelembagaan pabrik gula di Indonesia yang perlu diteliti karena menyebabkan biaya produksi dan biaya transaksi yang harus ditanggung pabrik gula menjadi bertambah tinggi dan menyebabkan ketidak efisienan kinerja pabrik gula.

Permasalahan industri gula Indonesia tidak hanya berasal dari petani dan pabrik gula saja, tetapi juga disebabkan karena kebijakan pemerintah yang tidak mendukung perkembangan industri gula Indonesia. Selama ini pemerintahlah yang berwenang untuk mengontrol industri gula nasional melalui serangkaian kebijakan yang dikeluarkan, antara lain kebijakan input, tata niaga, penentuan harga, dan perdagangan internasional. Sayangnya, tidak semua kebijakan membawa dampak yang menguntungkan bagi industri gula nasional dan khususnya pada petani gula.

Melalui Kepres No. 8 tahun 1998, pemerintah mengeluarkan pencabutan kebijakan input dalam hal ini adalah pencabutan subsidi pupuk. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menyehatkan anggaran negara dan industri pupuk juga untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian, tetapi yang terjadi adalah harga

pupuk naik dan bukan efisiensi produksi pertanian yang dicapai tetapi malah penurunan produksi pertanian karena penggunaan pupuk yang menurun sehingga mempengaruhi produktivitas.

Pada tata niaga impor gula, Indonesia adalah salah satu negara pengimpor gula terbesar dunia, tapi Indonesia menerapkan tarif impor yang sangat rendah, yaitu Rp 700/kg (32 persen) untuk gula pasir, dan Rp 550/kg (43 persen) untuk gula kasar. Pada tahun 2000 pemerintah menaikkan tarif bea impor dari 0 persen menjadi 25 persen, tarif tersebut masih terlalu rendah akan tetapi menurut pemerintah tarif yang terlalu tinggi akan menyebabkan makin maraknya penyelundupan gula impor.

Pemerintah dalam hal ini gagal untuk merumuskan kebijaksanaan yang menjamin dan mendukung industri gula nasional agar beroperasi secara efisien. Hal ini juga berpengaruh terhadap industri gula di Malang yang merupakan sentra produksi gula di Jawa Timur. Permasalahan ketidakefisienan kelembagaan pada industri gula disebabkan oleh ketidakefisienan pada tingkat politis strategis (kebijakan pemerintah), tingkatan organisasi (institusi dan aturan main) dan tingkat implementasi di lapang. Ketidakefisienan ini dicerminkan dari tingginya biaya produksi dan biaya transaksi yang menjadi beban pabrik gula dan petani gula. Dari uraian masalah diatas secara umum masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Sejauh mana pabrik industri gula di Kab. Malang dapat mendorong tercapainya swasembada gula”

Dilatarbelakangi oleh permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana susunan aspek ekonomi kelembagaan yang ada pada industri gula di Malang? Apakah susunan kelembagaan tersebut dapat menguntungkan terutama untuk petani?
2. Bagaimana keadaan biaya produksi dan biaya transaksi pada petani tebu? Apakah ada perbedaan biaya antara petani tebu kredit dan petani tebu bebas? Apakah saat ini usahatani tebu mempunyai keunggulan komparatif dan kebijakan yang tepat?
3. Bagaimana keadaan biaya produksi dan biaya transaksi pada pabrik gula? Apakah ada perbedaan biaya transaksi pasar, manajerial, dan politik antara pabrik gula BUMN dan pabrik gula swasta?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mendeskripsikan aspek ekonomi kelembagaan pada industri gula Malang mulai dari kelembagaan petani tebu sampai dengan pabrik gula.
2. Menganalisis perbedaan biaya usahatani dan biaya transaksi dari petani tebu kredit dan petani tebu bebas serta tingkat keunggulan komparatif dan kebijakan usahatani tebu .
3. Menganalisis biaya produksi dan biaya transaksi dari pabrik gula BUMN dan pabrik gula swasta yang terdiri dari produksi, pasar, manajerial dan biaya transaksi politik.

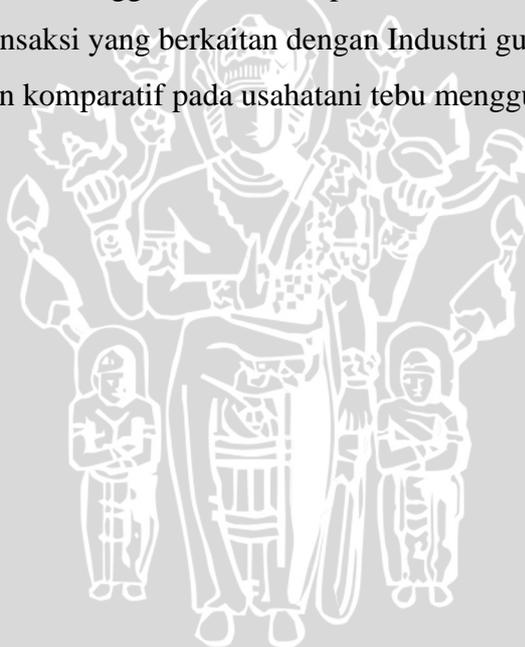
1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pergulaan agar tercapai target swasembada gula tahun 2007 dan merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan petani tebu, pabrik gula, dan konsumen agar tidak ada yang dirugikan.
2. Bagi Petani untuk memberikan informasi dan stimulus kepada petani agar tetap menanam tebu dengan input produksi dan budidaya yang tepat dengan dasar tingginya konsumsi tingkat domestik terhadap gula dan juga untuk mewujudkan swasembada gula pada tahun 2007.
3. Bagi Pabrik Gula agar dapat meningkatkan produktivitas, kapasitas, dan kualitas teknis, kelembagaan dan manajerial pabrik agar dapat memproduksi dengan maksimal dan juga untuk mewujudkan swasembada gula pada tahun 2007.
4. Bagi Peneliti untuk mengetahui kondisi terkini pergulaan di Indonesia, tentang dinamika teknis sproduksi dan kelembagaan gula di Indonesia. Juga sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup upaya mempelajari industri gula di Malang melalui pendekatan teknis dan kelembagaan dengan instrumen biaya produksi dan biaya transaksi pada pabrik gula dan petani.

1. Pabrik gula yang diteliti dibedakan menjadi pabrik gula BUMN dan pabrik gula swasta di Kabupaten Malang.
2. Petani yang diteliti dibedakan menjadi petani tebu kredit dan petani tebu bebas di Kabupaten Malang.
3. Komoditi yang dianalisis adalah gula pasir, bukan jenis bahan pemanis lainnya.
4. Analisis Kelembagaan menggunakan Konsep Ekonomi Kelembagaan dengan instrumen biaya transaksi yang berkaitan dengan Industri gula di Malang.
5. Analisis keunggulan komparatif pada usahatani tebu menggunakan PAM.



III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Salah satu industri penting yang didukung oleh sektor pertanian adalah industri gula. Didalam pengadaan gula melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, pengusaha, pabrik gula dan petani. Keberpihakan pemerintah terhadap industri gula sangat beralasan karena gula mempunyai peranan yang sangat strategis terutama sebagai bahan makanan sumber kalori masyarakat seperti halnya beras, jagung dan umbi-umbian. Di Indonesia, gula merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat yang penting setelah beras, yang mana keberadaannya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak dan kas negara melalui pajak dan cukai. Keterkaitan gula dengan industri sekunder terutama dari aspek investasi dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mendorong tumbuhnya industri makanan dan minuman, perubahan dalam produksi, konsumsi dan pemasaran dapat mengundang timbulnya bermacam gejolak dalam masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politis

Dalam perkembangan dewasa ini pergulaan nasional diarahkan pada pendekatan swasembada gula pada tahun 2007 yang merupakan tekad dan kebijakan pemerintah. Akan tetapi peningkatan permintaan akan gula pasir tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas lahan tebu dan pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia. Selain itu sistem kelembagaan yang tidak efisien juga merupakan faktor penentu tidak maksimalnya kinerja industri gula, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumen masih perlu ditunjang dengan gula impor.

Tahun 2003 kebutuhan gula Indonesia mencapai 2,5 juta ton (gula pasir) untuk konsumsi rumah tangga dan 0,7 juta ton (gula rafinasi) untuk industri. Diperkirakan kebutuhan meningkat menjadi total 4,2 juta ton tahun 2020, bahkan bisa mencapai 8,0 juta ton apabila menggunakan asumsi terjadinya peningkatan konsumsi per kapita dari 15 kg/tahun menjadi 30 kg/tahun akibat adanya kenaikan pendapatan. Sedangkan produksi gula dalam negeri tahun 2003 berkisar 1,8 juta ton hanya mencukupi 60 persen kebutuhan. Kekurangannya sekitar 1,5 juta

ton/tahun masih harus diimpor. Di lain pihak, sekitar separuh kapasitas giling (terpasang) pabrik gula belum dimanfaatkan karena kurangnya pasokan bahan baku tebu. Menurunnya minat petani menanam tebu disebabkan harga gula yang kurang menguntungkan mereka sementara insentif yang diberikan pemerintah belum memadai. Faktor budidaya yang tidak optimal contohnya penggunaan sistem keprasan merupakan salah satu sebab menurunnya produksi gula nasional.

Sejak dua dekade terakhir sudah menjadi perdebatan perlu atau tidaknya Indonesia mempertahankan industri gula, karena dinilai impor gula lebih murah dan efisien dibanding memproduksi gula secara mandiri. Tetapi mengingat gula merupakan komoditas yang strategis akan sangat membahayakan apabila kita menggantungkan diri pada impor, dikarenakan pasaran gula internasional yang sering fluktuatif maka apabila terjadi gejolak kekosongan persediaan gula dampaknya bukan hanya masalah ekonomi saja tetapi juga politik dan internasional, maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan peningkatan efisiensi pada industri gula.

Adanya ketidakefisienan kelembagaan pada Industri Gula Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya kegagalan pasar (Market Failure). Pasar dikatakan gagal apabila tidak mampu menciptakan harga yang kompetitif, yang mencerminkan “social opportunity cost”, yang menciptakan sumberdaya produk yang efisien (Ellis, 1989). Ketidakefisienan kelembagaan pada Industri Gula Indonesia ditunjukkan dengan tidak adanya lembaga yang dapat memberikan pelayanan yang kompetitif dan informasi yang lengkap. Koperasi unit Desa (KUD), Pedagang Perantara, adalah lembaga-lembaga yang menghubungkan Petani tebu dan Pabrik Gula, tetapi untuk mendapatkan pelayanan yang kompetitif dan informasi yang lengkap membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya yang timbul akibat dari penerapan dan pembentukan susunan kelembagaan disebut biaya transaksi.

Pengukuran besarnya biaya transaksi diperoleh dari pendekatan ekonomi biaya transaksi. Pertama-tama dengan mengidentifikasi susunan aspek ekonomi kelembagaan pada industri gula. Beberapa kelembagaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah Sistem kredit dan pengembalian,

Peranan Koperasi dan Perantara, Sistem kontrak dan Penentuan kandungan gula, Sistem bagi hasil dan Model pemasaran gula. Ekonomi biaya transaksi digunakan untuk menganalisis hubungan antara pabrik gula dan petani gula (biaya transaksi eksternal) dan besarnya biaya transaksi yang terjadi dalam pabrik gula itu sendiri atau petani tebu itu sendiri (biaya transaksi internal). Diantara para petani tebu, analisis biaya transaksi terdiri dari beberapa variabel seperti pajak tanah, Tebang – Muat – Angkut (TMA), Keamanan, Sumbangan ke Koperasi, Bunga kredit, Pajak desa, Pembuatan kontrak, Biaya Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA), biaya untuk koperasi, bunga marginal, sumbangan kelompok, ongkos perantara, kertas kerja dan “opportunity cost”. Variabel-variabel tersebut bersifat eksplisit dan implisit. Analisis pada level petani dibedakan menjadi petani tebu kredit dan petani tebu bebas pada masing-masing pabrik gula, baik BUMN maupun swasta.

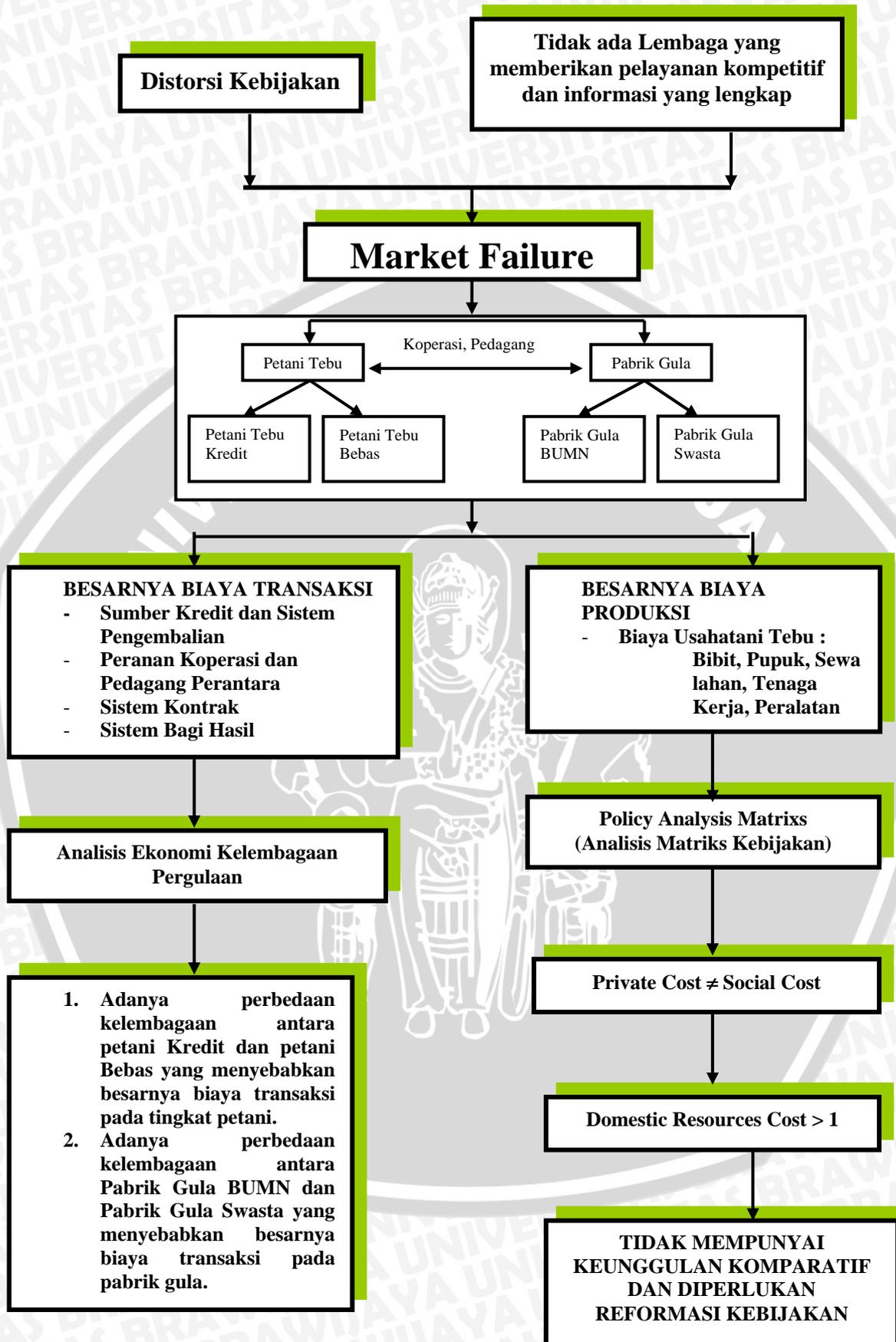
Pada level pabrik gula, biaya transaksi yang dianalisis terdiri dari beberapa variabel seperti gaji pabrik gula, perluasan, transportasi, telekomunikasi, fasilitas perusahaan, asuransi, peralatan, listrik, pelengkap, kesehatan, perawatan dan pemeliharaan, biaya khusus, pemadam kebakaran, proses pengambilan keputusan, “overlapping”, pajak (penghasilan, air, polusi, tanah, dll), iuran untuk P3GI (Pusat Penelitian Perusahaan Gula Indonesia). Variabel-variabel tersebut juga bersifat sebagai biaya transaksi eksplisit dan implisit. Analisis pada level pabrik gula dibedakan menjadi pabrik gula BUMN dan pabrik gula swasta. Pada akhirnya, untuk menganalisis variabel-variabel tersebut secara lebih mendalam, maka baik untuk petani tebu maupun pabrik gula dibedakan menjadi tiga jenis biaya transaksi, yaitu biaya transaksi pasar, managerial dan politik. Diharapkan dari analisis tersebut segala bentuk biaya transaksi yang terjadi di industri gula Indonesia dapat terlihat.

Perhitungan besarnya biaya produksi pada level petani tebu (usahatani) diperoleh dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu input (bibit dan pupuk) peralatan, tenaga kerja, dan sewa lahan. Sedangkan pada level pabrik gula, biaya produksi yang dianalisis antara lain yaitu persiapan mesin giling, pompa air, upah buruh (buruh tidak tetap), bahan bakar minyak, Honor lembur, bahan kimia dan peralatan, minyak pelumas, pom bahan bakar, karung dan pengepakan, “spare

parts” mesin, bibit pabrik atau bibit negara, pemrosesan lahan, biaya penanaman (pupuk dan bahan lainnya), biaya pelengkap.

Perhitungan besarnya biaya produksi dan pengujian dari efisiensi produksi, efisiensi teknis, dan keunggulan komparatif pada petani tebu dapat dikur dengan Matriks Analisis Kebijakan (MAK) atau Policy Analysis Matrix (PAM). Untuk waktu-waktu mendatang, setiap komoditas pertanian akan menghadapi persaingan yang semakin ketat karena perdagangan antar negara cenderung semakin bebas. Analisis keunggulan komparatif berusaha mencari apakah harga-harga input dan output yang berlaku terdistorsi oleh struktur pasar dan atau oleh kebijakan pemerintah seperti subsidi, pajak, kebijakan harga dan sebagainya. Untuk itu diperlukan estimasi harga bayangan (shadow price), yaitu estimasi harga apabila semua distorsi tersebut tidak ada. Perhitungan besarnya biaya produksi dan pengujian dari efisiensi produksi dapat dikur dengan Biaya Sumberdaya Domestik (BSD) atau “Domestic Resources Cost” (DRC) yaitu besarnya biaya sumber-sumber nasional untuk mendapatkan atau menghemat satu satuan devisa.

Kriteria DRC bertitik tolak pada prinsip bahwa efisien atau tidaknya suatu produksi jenis barang atau jasa “treadable” tergantung pada daya saingnya di pasar dunia, artinya apakah biaya produksi riil yang terdiri dari pemakaian sumber-sumber nasional terutama modal dan tenaga kerja cukup rendah sehingga harga jualnya dalam rupiah (setelah dipotong segala macam pajak) tidak melebihi “border price” yang relevan (dinyatakan dalam Dollar dikalikan dengan “shadow price”. Pada analisis BSD, usahatani di tingkat petani dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya domestiknya apabila $BSD < \text{harga bayangan nilai tukar}$, hal ini berarti Koefisien Sumberdaya Domestiknya ($KBSD < 1$) yang artinya sumberdaya domestik yang harus dikorbankan untuk menghemat atau memperoleh devisa dari kegiatan tersebut lebih kecil dari sumberdaya domestik yang bersedia dikorbankan. Sebaliknya jika $KBSD > 1$ maka produksi tebu (usahatani) di tingkat petani tidak efisien dalam penggunaan sumberdaya domestiknya, jika $KBSD = 1$ maka produksi tebu (usahatani) di tingkat petani bersifat netral.



Gambar 4. Skema Kerangka Pemikiran

3.2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : Sumber Inefisiensi pada Industri gula diduga karena aktivitas “High Cost Economy” yang menyebabkan terjadinya “market failure” sehingga :

1. Ketidakefisienan kelembagaan pada industri gula disebabkan karena besarnya biaya transaksi.
2. Usahatani tebu petani kredit lebih mempunyai keunggulan komparatif dibanding usahatani tebu petani bebas.
3. Kebijakan pemerintah mampu meningkatkan keunggulan komparatif industri gula.
4. PG BUMN (Krebet Baru) memiliki efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan PG Swasta (Kebon Agung).

3.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan pada petani yang membudidayakan tebu selama masa tanam 2005 / 2006 yang berlokasi di Malang.
2. Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan Pabrik Gula Krebet Baru dan Pabrik Gula Kebon Agung pada tahun 2003/2004
3. Penelitian ini membahas biaya produksi yang berkaitan dengan biaya transaksi.
4. Petani tebu yang menjadi obyek penelitian adalah : (1) Petani Kredit pada pabrik gula Krebet Baru dan pabrik gula Kebon Agung yang keduanya berlokasi di Kabupaten Malang (2) Petani Bebas yang menggilingkan tebunya di Pabrik gula Krebet Baru dan pabrik gula Kebon Agung yang keduanya berlokasi di Kabupaten Malang.
5. Pabrik gula yang menjadi obyek penelitian adalah Pabrik gula Krebet Baru (mewakili pabrik gula BUMN) dan pabrik gula Kebon Agung (mewakili pabrik gula swasta) yang keduanya berlokasi di Kabupaten Malang.

3.4. Definisi Operasional

Beberapa definisi serta asumsi yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Petani kredit adalah petani yang mempunyai perjanjian kontrak dengan Pabrik Gula (melalui koperasi), yang mana petani gula mendapatkan tambahan modal untuk pengusahaan lahan, alat produksi, perluasan dan bimbingan, fasilitas terbang dan angkut.
2. Petani bebas adalah petani yang mengusahakan lahannya dengan modal, alat produksi, dan teknologi sendiri. Kerjasama dengan pabrik gula dan perantara hanya jika mereka ingin menggiling tebu.
3. Pabrik Gula BUMN adalah pabrik gula yang kepemilikan dan manajemennya ditangani oleh negara.
4. Pabrik gula swasta adalah pabrik gula yang kepemilikan dan manajemennya ditangani oleh pribadi atau kelompok.
5. Biaya produksi tebu adalah biaya yang secara langsung terkait dengan produksi tebu dan budidaya lahan pada masa tanam (Rp)
6. Input usahatani tebu adalah semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dari awal produksi sampai panen .
7. Lahan adalah luas lahan dalam satuan hektar yang digarap oleh petani baik sebagai pemilik atau penyewa, dimana besarnya nilai lahan dihitung dengan sewa lahan di tiap lokasi penelitian yaitu luas lahan yang digunakan (ha) dikalikan rata-rata sewa lahan dalam (Rp/ha) untuk setiap musim tanam.
8. Biaya Tenaga kerja (buruh) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang terlibat pada pengusahaan lahan tebu di satu masa tanam diukur berdasarkan hari orang kerja (HOK).
9. Biaya bibit terdiri dari harga bibit yang digunakan sekali pada musim tanam diukur dalam Rp/Ha/musim tanam.
10. Biaya pupuk adalah jumlah biaya yang dihabiskan untuk pupuk pada sekali musim tanam dan diukur dalam Rp/Ha/musim tanam.
11. Peralatan adalah Alat yang digunakan selama proses produksi (pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai pasca panen), nilainya dihitung dari penyusutan dalam satu kali musim tanam (Rp)

12. Harga Sosial adalah harga yang terjadi pada saat perekonomian dalam keadaan seimbang (tanpa distorsi dari pemerintah), harga sosial didekati dengan menggunakan harga bayangan (“shadow price”) (Rp)
13. Harga bayangan merupakan penyesuaian yang dibuat terhadap harga pasar dari beberapa faktor produksi atau hasil produksi tertentu, karena harga pasar tidak mencerminkan biaya atau nilai sosial yang sebenarnya dari unsur-unsur atau hasil produksi tersebut (Rp)
14. Barang-barang yang diperdagangkan (“tradeable goods”) di pasar internasional harganya didasarkan pada harga pasar dunia, harga c.i.f untuk barang dan jasa yang diimpor sedangkan harga f.o.b untuk yang diekspor di tingkat pelabuhan yang terdekat (Rp)
15. Harga c.i.f (“cost, insurance, freight”) adalah cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional dimana seluruh biaya angkutan, biaya pemuatan, dan biaya asuransi sampai pelabuhan bongkar ditanggung penjual (Rp)
16. Harga fob (“free on board”) adalah cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional dimana biaya angkutan dan biaya asuransi dari pelabuhan sampai gudang pembeli ditanggung pembeli (Rp)
17. Harga bayangan nilai tukar uang (“shadow exchange rate”) adalah harga uang domestik berdasarkan mata uang asing yang terjadi pada pasar nilai tukar uang yang dinyatakan dengan rupiah per-dollar (Rp/US\$)
18. Biaya transaksi perusahaan lahan berkaitan dengan pemrosesan informasi, mengadakan negosiasi, membuat kontrak, dan merumuskan kebijakan selama musim tanam dan sesudah panen. Biaya transaksi tetap meliputi : pajak bumi dan bangunan, biaya Surat Perintah Tebang Angkut, Biaya dan sumbangan koperasi, kertas kerja, dan “opportunity cost”. Biaya transaksi variabel meliputi : Tebang – Muat – Angkut (TMA) dan karung, ongkos perantara, bunga kredit, bunga marginal, dan penanggungan kredit.

19. Keuntungan petani tebu dihitung dalam satuan Rupiah dari bagi hasil yang telah disetujui bersama. Keuntungan petani bisa dirumuskan sebagai berikut :

$$TR = P \times Q$$

Dimana :

- TR = Total Penerimaan (“Total Revenue”)
- P = Harga Gula
- Q = Total Gula dan produksi tetes tebu setelah bagi hasil.

21 . Pendapatan petani tebu adalah keuntungan petani tebu pada satu musim tanam dikurangi biaya produksi dan transaksi yang dikeluarkan oleh petani gula selama budidaya sampai pasca panen dan diukur dengan Rp/Ha/musim tanam. Pendapatan petani bisa dirumuskan sebagai berikut :

$$Pd = TR - TC (PC+TC)$$

Dimana :

- Pd = Pendapatan Pengusahaan lahan (Rp)
- TR = Total Penerimaan (“Total Revenue”) (Rp)
- TC = Biaya Total (“Total Cost”)
- PC = Biaya Produksi (“Production Cost”)
- TC = Biaya transaksi (“Transaction Cost”)

22. Jumlah keluarga adalah jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga petani tebu yang biaya konsumsinya menjadi tanggung jawab kepala keluarga.

23. Pendidikan adalah pendidikan formal yang telah ditempuh oleh petani tebu sampai mendapat ijazah.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kabupaten Malang di Jawa Timur. Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja “purposive” yaitu di Pabrik Gula Krebbe Baru dan Pabrik Gula Kebon Agung dengan petani tebu masing-masing di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang (Petani contoh PG Krebbe Baru) dan di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang (Petani contoh PG Kebon Agung). Pengambilan daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di daerah tersebut merupakan produsen terbesar tebu di Jawa Timur yang mempunyai kontribusi sekitar 28 persen dari total produksi gula di Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan mulai April 2006 sampai dengan November 2006

4.2. Penentuan Sampel

Penelitian ini mengambil contoh dua pabrik gula di Jawa Timur yaitu pabrik gula BUMN yang diwakili oleh Pabrik Gula Krebbe Baru dan pabrik gula swasta yang diwakili oleh Pabrik Gula Kebon Agung yang keduanya berlokasi di Kabupaten Malang. Pengambilan Pabrik Gula Krebbe Baru dan Pabrik Gula Kebon Agung menjadi sampel dikarenakan keduanya mempunyai skala produksi yang hampir sama. Responden pada Pabrik Gula Krebbe Baru dan Pabrik Gula Kebon Agung adalah para pegawai pabrik gula pada Divisi Administrasi dan Keuangan, Divisi Perkebunan, Divisi Teknis dan Divisi Pabrikasi yang mempunyai pemahaman mendalam di bidang masing-masing. Responden petani ditentukan secara kelompok (cluster) berdasarkan jenis modal yaitu petani kredit dan petani bebas, dengan petani kredit pada PG BUMN (PG Krebbe Baru) sebagai Kelompok (cluster) I, petani kredit pada PG Swasta (PG Kebon Agung) sebagai kelompok II, petani bebas pada PG BUMN (PG Krebbe Baru) sebagai kelompok III, petani bebas pada PG Swasta (PG Kebon Agung) sebagai kelompok IV. Hal ini dilakukan supaya petani yang terpilih sebagai contoh benar-benar mewakili seluruh populasi dan bukan mewakili satu kelompok saja. Sampel dalam

penelitian ini adalah petani tebu di desa Tlogowaru sebagai sampel dari PG Krebbe Baru dan petani tebu di desa Arjowinangun sebagai sampel dari PG Kebon Agung, keduanya di Kecamatan Kedung Kandang.

Menurut Arikunto (2006) pada metode pengambilan contoh acak, jumlah contoh minimal yang harus diambil dapat mengikuti petunjuk sebagai berikut:

Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10 - 15% atau 20 – 25% atau lebih, tergantung setidaknya tidaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana.
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik

Pada penelitian ini digunakan metode pengambilan sampel 10% dari jumlah populasi. Penentuan jumlah sampel sebanyak 10% ini didasarkan pada pertimbangan biaya, waktu dan tenaga. Populasi di desa Tlogowaru berjumlah 706 orang petani tebu dengan rincian 421 petani tebu kredit dan 285 petani tebu bebas dan sampel yang diambil dari rumus diatas diperoleh hasil: petani kredit (N_1) sebanyak 42 orang, dan petani bebas sebanyak 28 orang (N_3). Populasi di desa Arjowinangun berjumlah 583 orang petani tebu dengan rincian 398 petani tebu kredit dan 185 petani bebas dan sampel yang diambil dari rumus diatas diperoleh hasil: petani kredit (N_2) sebanyak 39 orang dan petani bebas (N_4) sebanyak 19 orang. Sehingga jumlah keseluruhan sampel petani tebu adalah $42+28+39+19 = 128$ orang.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, meliputi:
 - (a). Data Usahatani pada petani kredit dan petani bebas; (b). Data Sistem Kredit, Sistem Kontrak dan Sumber Input pada petani kredit yang diperoleh dari Koperasi Unit Desa (KUD).; (c). Data penegakan prosedur kerja, sistem kontrak, pemasaran dan proses produksi pada PG Krebet Baru dan PT. PG. Kebon Agung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diusahakan sendiri melainkan diperoleh dari institusi yang berwenang, meliputi:
 - (a). Data Ekspor – Impor yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik);
 - (b). Produksi dan Produktivitas Tebu dari P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula); (c). Data Nilai Tukar dari Bank Indonesia; (d). Data Pabrik Gula di Indonesia dari DGN (Dewan Gula Nasional); (e). Laporan tahunan PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung mengenai kegiatan produksi; (f). Data mengenai jumlah tenaga kerja, data produksi dan penjualan; (g). Dan lain-lain.

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengambilan data penelitian adalah :

1. Wawancara, penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data yang diinginkan dengan jalan komunikasi langsung dengan responden, yaitu para petani dan pihak perusahaan khususnya pemimpin pabrik selaku pengambil kebijakan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak tersedia secara tertulis.
2. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengambilan data yang dibutuhkan yang mana data tersebut tersedia dalam bentuk tertulis.

4.4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan susunan kelembagaan yang ada pada industri gula di Indonesia dan mendalami keadaan kelembagaan. Tujuan dari metode analisis kualitatif ini juga untuk mengetahui perspektif mendalam dari para pelaku ekonomi dalam proses penyusunan kontrak

pada industri gula. Biaya transaksi dapat dibandingkan antara dua struktur yang berbeda, tetapi sulit untuk diukur, tetapi tetap saja mungkin untuk dihitung (Williamson,1985).

4.4.1. Analisis Data Petani Tebu dan Pengukuran Variabel

Dalam kasus petani tebu, biaya transaksi dapat diklasifikasikan menjadi : (1). Biaya Transaksi pasar (Fee dan sumbangan untuk KUD, biaya SPTA (Surat perintah Tebang Angkut), biaya pedagang perantara, bunga kredit, bunga margin, kertas kerja, biaya korbanan); (2). Biaya Transaksi Manajerial (TMA(tebang-muat-angkut) dan biaya karung); (3) Biaya Transaksi Politik (Pajak Tanah). Dalam kenyataannya variabel biaya transaksi yang lain masih banyak yang terjadi pada tingkat petani tebu seperti, biaya keamanan, sumbangan ke desa, biaya membuat kontrak, biaya perayaan adat, dan fee untuk kelompoknya. Tetapi karena hanya sedikit petani yang mengeluarkan biaya pada variabel-variabel tersebut, maka variabel-variabel tersebut tidak dimasukkan dalam analisis. Umumnya, variabel pada biaya transaksi yang telah disebutkan diatas bersifat eksplisit (petani atau KUD mempunyai data tertulis), jadi tidak begitu sulit untuk mengukur biaya transaksi yang terjadi. Namun begitu, beberapa variabel, seperti kertas kerja, biaya korbanan, dan keterlambatan kredit, harus didekati dengan pengukuran yang berbeda karena sifatnya yang implisit (petani atau KUD tidak punya data) yang mana petani biasanya tidak menghitung hal-hal tersebut. Secara detail, pengukuran biaya transaksi pada petani tebu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Tanah / Lahan : Pajak resmi untuk Tanah / Lahan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah setiap tahun (Rp/ha) (eksplisit).
2. Tebang-Muat-Angkut : Biaya yang dikeluarkan petani tebu untuk melaksanakan aktivitas Tebang-Muat-Angkut (TMA), termasuk biaya sewa truk, biaya operasi pabrik gula, upah (uang rokok dan uang makan) untuk supir truk. Untuk petani kredit, biaya-biaya ini dapat dilihat pada laporan yang diberikan pabrik gula untuk petani (Rp) (eksplisit).

3. Karung : Biaya yang dikeluarkan petani tebu untuk membeli karung, biasanya petani tidak tahu menahu tentang hal ini, dapat dilihat dari laporan yang diberikan pabrik gula untuk petani. (Rp) (eksplisit).
4. Fee dan Sumbangan untuk KUD : Untuk petani kredit, mereka secara otomatis menjadi anggota KUD dan mereka harus memenuhi kewajiban mereka dengan membayar simpanan pokok (hanya dibayarkan 1 kali) dan simpanan wajib (dibayarkan setiap bulan). (Rp) (eksplisit).
5. Fee SPTA : Biaya untuk memperoleh SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) dari pegawai pabrik gula; namun terkada SPTA ini diperjualbelikan secara bebas oleh oknum-oknum pada pabrik gula yang akan sangat merugikan petani (data ini didapat dari wawancara dengan petani). (Rp) (eksplisit).
6. Bunga Kredit : Bunga kredit yang dibayarkan kepada KUD (untuk petani kredit) berdasarkan keputusan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia (16,8%/tahun) atau untuk pedagang perantara (tebu bebas). (Rp) (eksplisit).
7. Bunga Marjin : Pembayaran untuk KUD berdasarkan bunga marjinal antara keputusan pemerintah dan koperasi, termasuk marjin dalam bagi hasil gula petani. (Rp) (eksplisit).
8. Fee untuk Pedagang Perantara : Biaya yang dikeluarkan oleh petani tebu bebas untuk pedagang perantara untuk memproses tebu mereka di pabrik gula. (Rp) (eksplisit).
9. Kertas kerja : Biaya untuk melengkapi semua berkas dan persyaratan yang dibutuhkan oleh KUD atau pabrik gula, seperti fotocopy, foto, dan lain-lain. Biasanya para petani tebu tidak menghitung pengeluaran ini. Biaya transaksi ini terjadi hanya pada petani tebu kredit. (Rp) (implicit).
10. Biaya Korbanan (opportunity cost) : Biaya dan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang disediakan oleh KUD atau Pabrik gula. Biaya korbanan ini mencapai kira-kira Rp 35.000 per petani. Perhitungan ini dari :
 - (1). Petani kredit membutuhkan setidaknya 2 hari untuk mengumpulkan informasi, apabila kita bandingkan dengan upah rata-rata mereka apabila mereka bekerja di lahan (Rp 15.000/hari), maka biaya korbanan untuk

mengumpulkan informasi sebesar Rp 30.000/ petani kredit; (2). Biaya transportasi untuk pergi ke KUD atau Pabrik gula Rp 5000. (Rp) (implisit).

Pendekatan biaya transaksi berkaitan erat dengan perusahaan dan produksi organisasi. Perlakuan integrasi vertikal sebagai respon dari teknologi yang tidak dapat dipisahkan; biaya transaksi menjelaskan integrasi vertikal sebagai respon karena sulitnya mengatur hubungan kontrak yang berlangsung secara berkelanjutan (Pollak, 1985). Perusahaan umumnya menghindari kontrak dengan struktur yang kompleks, karena hubungan yang berkelanjutan dengan struktur yang kompleks sangat beresiko. Untuk menghindari resiko kontrak ini, perusahaan sering bergantung pada sesuatu bentuk yang lebih komplis yaitu integrasi secara internal seperti merger. Jadi, kesulitan kontrak (masalah dalam negosiasi, penulisan, monitoring, dan penegakan) adalah fokus utama dari biaya transaksi dan biaya transaksi juga menyatakan determinan yang signifikan dari produksi organisasi. Karenanya, pendekatan biaya transaksi difokuskan pada peranan kelembagaan pada struktur yang kompleks, hubungan jangka panjang. Pada perusahaan, penerapan biaya transaksi mempelajari tentang batasan, struktur, dan organisasi internal pada unit produksi (Pollak, 1985).

Analisis efisiensi ekonomi (keunggulan komparatif) serta dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap industri gula dilakukan melalui Policy Analysis Matrix (PAM) yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson (1989). Dalam tulisan ini, PAM didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut: (1) harga pasar yang berlaku dipergunakan sebagai analisis finansial; (2) harga bayangan yang dipandang mencerminkan kelangkaan sumber daya digunakan untuk analisis ekonomis ; (3) output dapat diperdagangkan (tradeable) dan input dapat dipisahkan kedalam input yang dapat diperdagangkan dan faktor domestik (domestic factor): eksternalitas positif dan negatif dianggap saling meniadakan.

Pada dasarnya perhitungan PAM terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) penentuan masukan keluaran fisik secara lengkap dari aktivitas ekonomi yang

akan dianalisis; (2) penaksiran harga bayangan (shadow price) dari masukan dan keluaran; (3) pemisahan seluruh biaya ke dalam komponen domestik dan asing, serta menghitung besarnya penerimaan, dan (4) menghitung dan menganalisis berbagai indikator yang bisa dihasilkan oleh PAM. Karena itu ada dua hal pokok yang perlu dijelaskan, yaitu penaksiran harga bayangan dan pemisahan biaya kedalam komponen domestik dan asing.

Metode Policy Analysis Matrix (PAM) dalam menghitung tingkat keunggulan komparatif dan tingkat proteksi nominal atau optimal baik input maupun output menggunakan sebuah tabel yang terdiri dari harga individu, harga sosial, dan pengaruh divergensi pada baris horizontal dan pendapatan serta biaya input treadable maupun faktor domestik maupun profit pada kolom vertikal. Tabel di bawah ini akan menjelaskan setiap variabel yang terdapat dalam matriks PAM.

Uraian	Revenue	Biaya		Profit
		Input Treadable	Faktor Domestik	
Harga Pasar	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Pengaruh Divergensi dan Kebijakan	I	J	K	L

Sumber : Sjaiful, dkk (2005)

Dimana :

$$I = A - E$$

$$J = B - F$$

$$K = C - G$$

A = Revenue individual (total produksi x harga pasar)

B = Input treadable x harga

C = Input domestik x harga

D = Profit individual

E = Revenue sosial (total produksi x harga sosial)

$F = \text{Input treadable} \times \text{harga sosial}$

$G = \text{input domestik} \times \text{harga sosial}$

$H = \text{Profit sosial}$

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis Domestic Resources Cost (DRC) atau Biaya Sumberdaya Domestik. Analisis biaya sumberdaya domestik ini pada dasarnya menganalisa apakah suatu komoditi pertanian mempunyai keunggulan komparatif atau dengan kata lain analisis biaya sumberdaya domestik dipakai untuk mengukur berapa besar devisa yang dihemat apabila komoditi tersebut diproduksi di dalam negeri.

Dalam matriks PAM, nilai DRC dapat dicari sebagai berikut:

$$\text{DRC} = G / E - F \dots\dots\dots(1)$$

Untuk mengetahui tingkat proteksi kebijakan yang seharusnya diterapkan dapat dilihat dengan cara membandingkan perhitungan menurut harga pasar dan harga sosial. Perbedaan nilai merupakan akibat dari perbedaan harga pasar dan harga sosial. Perbedaan harga dapat disebabkan monopoli dan monopsoni, positive dan negative externalities, pasar faktor domestik yang kurang sempurna (tidak adanya lembaga yang dapat memberikan pelayanan yang kompetitif serta informasi yang lengkap).

Interpretasi dari matriks analisis kebijakan pada pengaruh divergensi dilakukan dengan menghitung transfer input atau output dan net transfer. Transfer output didefinisikan sebagai perbedaan antara harga pasar dan harga aktual dari komoditi yaitu A, dan nilai efisiensi dari komoditi (E). Sedangkan transfer input diukur dari faktor treadable dan didefinisikan sebagai perbedaan antara total biaya dari input treadable dalam harga individu (B) dan total biaya dari input yang sama diukur dari harga sosial (F). Net transfer (L) diukur dari transfer output (I) dikurangi transfer input (J) dikurangi transfer faktor (K).

Masing-masing analisis untuk transfer input/output dan net transfer adalah sebagai berikut :

- 1) Nominal Protection Coefficient dari treadable output (NPCO)

$$\text{NPCO} = (A/E - 1) \times 100\%$$

- 2) Nominal Protection Coefficient dari treadable input (NPCI)

$$\text{NPCI} = (B/F - 1) \times 100\%$$

- 3) Effective Protection Coefficient (EPC)

$$\text{EPC} = \frac{A - B}{E - F} - 1$$

1. Penentuan Harga Sosial atau Bayangan

Untuk menentukan harga bayangan dari tiap variable dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Harga Sosial Gula

$$\text{HSG} = \frac{\text{HPIG} + \text{HPEG}}{2}$$

Dimana :

HSG = Harga Sosial Gula

HPIG = Harga Paritas Impor Gula

HPEG = Harga Paritas Ekspor Gula

HPIG = (H CIF - PM_G + BAM) SER - BG - BAPG - MP - BAUP

HPEG = (H FOB - PM_G + BAM) SER - BG - BAPG - MP - BAUP

H CIF = Harga cif gula di Bangkok

H FOB = Harga fob gula di Bangkok

PM_G = Penyesuaian muatan gula dalam negeri dengan gula London
15%

BAM = Biaya Asuransi dan Muatan

SER = Shadow Exchange Rate

BG = Biaya Gudang

BAPG = Biaya Angkutan Pabrik ke Gudang

BAUG = Biaya Angkutan Usahatani ke Pabrik

2 . Harga Sosial Pupuk Urea

Sejak tahun 1977 pupuk Urea masih diekspor hingga saat ini, sehingga harga sosial pupuk Urea adalah :

$HSU = (H\text{ FOB} - \text{BAM})\text{ SER} + \text{BAP} + \text{BAG} + \text{BG} + \text{BAU}$

BAM = Biaya Asuransi dan Muatan

BAP = Biaya Angkutan sampai penyalur (Rp/ton)

BAG = Biaya angkutan sampai grosir (Rp/ton)

BG = Biaya Gudang

BAU = Biaya angkutan sampai usahatani (Rp/ton)

3 . Harga Sosial ZA

Karena sejak tahun 1992 Indonesia mengimpor ZA dari Jepang dan mengekspor ZA ke Vietnam, maka :

$$HSza = \frac{HPIza + HPEza}{2}$$

Hsza = Harga Sosial Pupuk ZA

4 . Harga Sosial Tanah

Nilai tanah di daerah penelitian cukup ekonomis sehingga persaingan harga tanah sangat kompetitif. oleh karena itu harga sosial tanah dapat ditentukan sebesar harga sewa tanah.

5 . Harga Sosial Tenaga Kerja

Tidak ada sistem sambatan/bawon dan permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja sehingga upah riil dapat dipakai sebagai harga sosial.

6 . Harga Sosial Nilai Tukar / “Shadow Exchange Rate” (SER)

$$SER = \frac{R(-Em(1 + \frac{Tm}{N})) + Nx(1 + \frac{Tx - Sx}{X})}{-Em + Nx}$$

Dimana :

Em = Elastisitas Permintaan Impor

Ex = Elastisitas Penawaran Ekspor

R = Nilai Tukar Resmi

Tm = Bea cukai dan pajak terhadap impor

Tx = Bea cukai dan pajak terhadap ekspor

N = CIF impor

X = FOB impor

Sx = Subsidi Ekspor.

2. Penentuan Profit Idividu, Profit Sosial, dan Faktor Domestik Usahatani tebu.

1 . Profit Individual

$$D = A - B - C$$

Dimana :

D = Profit individual

A = Revenue individual

B = Biaya input treadable individual

C = Biaya faktor domestik usahatani individual

2 . Profit Sosial

$$H = E - F - G$$

H = Profit Sosial

E = Revenue Usahatani yang dihitung dengan harga sosial

F = Input treadable yang dihitung dengan harga sosial

G = Faktor domestik yang dihitung dengan harga sosial

3. Faktor Domestik

$C_p = Utk + St$

Dimana :

C_p = Faktor domestik (Rp)

Utk = Upah tenaga kerja

St = Sewa tanah

4.4.2. Analisis Data Pabrik Gula dan Pengukuran Variabel

Pada pabrik gula, biaya transaksi bisa diklasifikasikan sebagai berikut :

(1). Biaya Transaksi Pasar (Subsidi Transportasi, Bonus dan Penyuluhan); (2). Biaya Transaksi Manajerial (Gaji/upah untuk para pegawai, makan, fasilitas, peralatan, biaya special, listik, bonus staf, kesehatan, “spare part”, telekomunikasi, perawatan, kendaraan dinas, pensiun, pemadam kebakaran, pembuatan keputusan, dan kegiatan yang “overlapping”); (3). Biaya Transaksi Politik (Pajak, duplikasi Pajak, Sumbangan, Keamanan, dan biaya tidak terduga). Kebanyakan dari variabel tersebut eksplisit (peneliti bisa mendapatkan datanya dari laporan tahunan pabrik gula). Tetapi, beberapa variabel seperti biaya pembuatan keputusan, biaya duplikasi pajak, dan biaya kegiatan yang “overlapping” harus didekati dengan perhitungan yang berbeda karena pegawai pabrik gula biasanya tidak menghitung besarnya variabel-variabel tersebut (implisit). Untuk pengukuran variabel yang implisit bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembuatan keputusan : Biaya keterlambatan pembuatan keputusan. Biaya proses pembuatan keputusan diambil dari dua sumber: (1). Berhentinya pengoperasian mesin pada pabrik gula secara sementara karena

keterlambatan “spare part”. Dari Pemberhentian Pengoperasian ini, pabrik gula kehilangan kesempatan untuk memproduksi gula. Besarnya biaya karena berhentinya pengoperasian mesin dapat dihitung dengan gula yang hilang dikali dengan harga gula; (2). Pekerja yang telah dikontrak tidak bisa bekerja selama mesin berhenti. Para pekerja tersebut diberikan upah per hari, dan upah ini dikalikan dengan jumlah pekerja untuk mendapatkan besarnya biaya transaksi yang terjadi (implisit).

2. Penduplikasian Pajak : Biaya penduplikasian pajak dihitung dari pajak air selama musim giling (untuk 6 bulan/180 HOK) di tarik pajak oleh dua instansi yang berbeda yaitu Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) dan Perum Jasa Tirta. Setiap instansi menarik pajak sebesar Rp 62,5 juta per bulan. Dari duplikasi pajak ini pabrik gula menanggung total biaya Rp 375 juta (implisit).
3. Kegiatan yang “overlapping” : Biaya ini terjadi karena satu aktivitas ditangani oleh dua unit kerja. Pengukurannya berdasarkan perhitungan pada unit akuntansi di pabrik gula (implicit).

Menurut Williamson (1985), ada beberapa keterbatasan dalam teori biaya transaksi. Dia menjelaskan ada 3 hal penting., yaitu kekasaran, instrumentalisme dan ketidaklengkapan. Biaya transaksi kasar karena modelnya primitif, masalah pengukurannya sangat vulgar dan derajat bebasnya terlalu banyak. Biaya transaksi menganut instrumentalisme karena pada satu sisi diasumsikan ada batasan rasionalitas tetapi ditekankan juga bahwa para pelaku ekonomi tanggap terhadap kesempatan “opportunism”. Begitu juga dengan ketidaklengkapan yang disebabkan karena model biaya transaksi adalah parsial (sebagian), yang mana teori tentang birokrasi belum berkembang dan teori yang digunakan untuk menganalisis situasi sebelum dan sesudahnya belum berkembang juga. Oleh sebab itu, pemahaman yang lebih mendalam dan lebih terbuka tentang organisasi ekonomi membutuhkan perhatian yang lebih pada masalah tersebut. Maka ditekankan pada adanya perumusan standart kelembagaan yang komparatif.

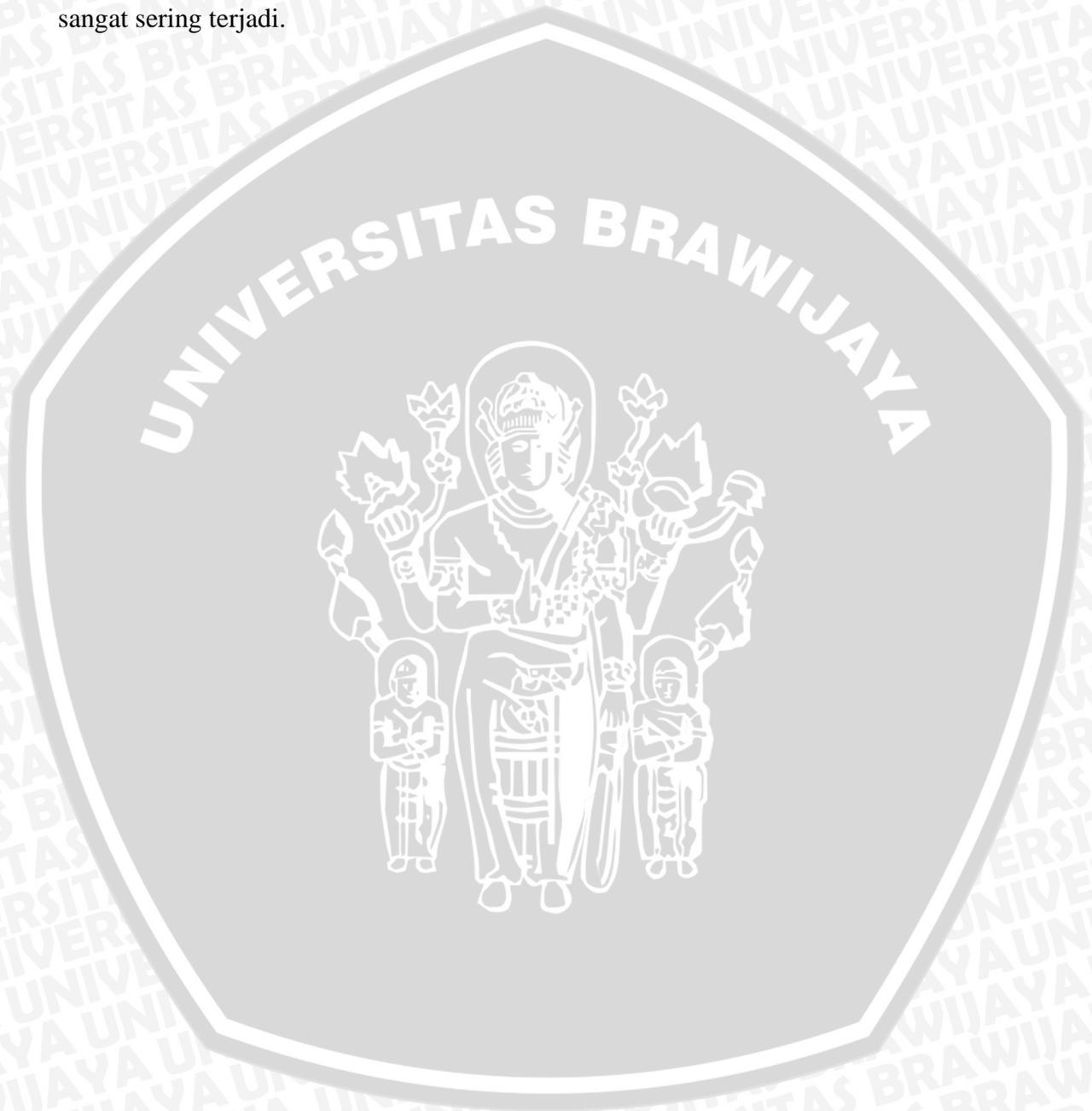
Keterbatasan dalam pengukuran ini juga dikarenakan sulitnya pengukuran pada beberapa data. Pada level petani tebu, biaya transaksi belum meliputi

perhitungan komponen-komponen berikut ini : (1). Repaksasi , yang memperbolehkan pabrik gula untuk mengurangi penerimaan petani apabila tebu petani dinilai campuran atau kotor (tanah, daun, dan lain-lain). Pabrik gula melaksanakan hal ini secara sepihak sehingga berpotensi besar untuk merugikan petani; (2). Penurunan Berat pada Volume Tebu. Petani tebu tidak dapat mengontrol proses ini karena semua proses dilakukan oleh pabrik gula; (3). Transportasi dari truk ke lori. Banyak tebu yang jatuh ke tanah dikarenakan adanya palang yang dipasang oleh pabrik gula pada pintu masuk untuk membatasi ketinggian muatan tebu, sehingga mengurangi berat tebu petani; (4). Biaya transaksi dalam bentuk potongan terselubung oleh KUD. Contohnya pemotongan dan pengurangan biaya transaksi dan fee oleh koperasi yang tidak terperinci sehingga berpotensi merugikan petani; (5). Biaya Transaksi dalam bentuk pengurangan rendemen. Hasil dari lambannya pabrik gula dalam memproses tebu petani menjadi gula. Tebu diproses 24 jam setelah panen, menurut pabrik gula, akan menurunkan kandungan gula sebesar 1 %. Adapun demikian, biaya transaksi total yang dihitung dalam penelitian ini lebih rendah dari kenyataan di lapang.

Pada level pabrik gula, beberapa biaya transaksi yang dikeluarkan pabrik gula untuk tujuan lain belum dihitung. Contohnya, pabrik gula diduga memberi bantuan dan dukungan kepada APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) yang berbentuk moril dan materiil untuk menghimbau pemerintah agar menghentikan impor gula atau menaikkan pajak impor. Pabrik gula (melalui direksinya) juga diduga memberi “uang pelicin” kepada pemerintah untuk dapat izin mengimpor gula. Apabila beberapa informasi dapat tergal dengan baik, bisa dikatakan bahwa besarnya biaya transaksi politik aktual yang terjadi lebih besar dari pada hasil penelitian ini.

Untuk metode analisis kuantitatif, contohnya tabel distribusi frekuensi, digunakan untuk menganalisis data empiris. Beberapa pertanyaan pada kuisisioner mengandung pertanyaan semi struktural yang digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh informasi pada sebab (alasan), opini, komentar, dan respon tentang susunan kelembagaan pada industri gula di Indonesia. Dari dua metode analisis ini

diharapkan untuk didapatkan deskripsi yang komprehensif pada “background” kelembagaan pada industri gula di Indonesia. Kombinasi dari dua analisis ini diharapkan dapat menjembatani “gap” antara tipe analisis makro dan mikro yang sangat sering terjadi.



V. KEADAAN UMUM

5.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

5.1.1 Profil Pabrik Gula Krebet Baru Malang

5.1.1.1. Sejarah Perusahaan

PG. Krebet Baru Malang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908 yang kemudian menjadi milik Oei Tiong Ham. Pada masa revolusi fisik pada tahun 1945-1947, PG. Krebet Baru ini mengalami kerusakan yang cukup parah akibat peperangan, sehingga pabrik menghentikan sementara semua kegiatan produksinya. Petani yang semula menggilingkan tebuinya ke pabrik mengalihkan penggilingannya secara tradisional yang menghasilkan gula mentah. Pada tahun 1954, atas desakan petani yang tergabung dalam IMA-PERTAMAS (Indonesia Maskapai Andil-Pertanian Tebu Rakyat Selatan), PG. Krebet Baru melakukan rehabilitasi sehingga dapat beroperasi lagi dengan kapasitas giling 1600 TCD (Ton Cane per Day atau tebu yang biasa digiling per hari dalam ton).

Pada tahun 1961, semua harta kekayaan milik Oie Tiong Ham, termasuk PG. Krebet Baru diambil alih oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan kegiatan usahanya diawasi oleh Menteri/Jaksa Agung. Tanggal 20 Juli 1963 semua perusahaan beserta pengelolaan atas harta kekayaan diserahkan kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (UP3), yang sekarang dikenal sebagai Menteri Keuangan RI. Jadi sejak tahun 1963, PG. Krebet Baru Malang telah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah naungan Departemen Keuangan RI.

Untuk melanjutkan aktivitas usaha, perusahaan-perusahaan bekas milik Oei Tiong Ham ini, maka pada tahun 1964 Departemen Keuangan RI membentuk PT.Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Indonesia, yang disingkat PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Jadi sejak itu PG. Krebet Baru Malang menjadi salah satu anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, maka budidaya tanaman tebu di sekitar PG. Kregbet Baru Malang terus berkembang. Hal ini mengakibatkan kapasitas giling dalam pabrik, yang besarnya 2000 TCD , tidak mampu mengolah pasokan tebu rakyat. Oleh karena itu pada tahun 1976 dibangun lagi pabrik gula yang diberi nama PG. Kregbet Baru II Malang, dengan kapasitas giling 3000 TCD, sehingga total kapasitas gilingnya mencapai 500 TCD. Pada tahun 1987 kapasitas giling ditingkatkan lagi menjadi 6000 TCD. Saat ini kapasitas giling PG. Kregbet Baru Malang telah menjadi 7200 TCD, yaitu 3200 TCD untuk PG. Kregbet Baru I dan 4000 TCD untuk PG. Kregbet Baru II.

5.1.1.2. Bentuk Badan Usaha

PG. Kregbet Baru Malang merupakan BUMN dibawah naungan Departemen Keuangan RI, yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Sebagai SBU PG. Kregbet Baru Malang diberi otonomi untuk mengelola SBU nay, dengan catatan segala strategi dan kebijakan yang dijalankan tidak bertentangan dengan strategi utama yang dibuat perusahaan induk.

5.1.1.3. Lokasi dan Data Teknis Perusahaan

PG. Kregbet Baru Malang terletak \pm 13 km di selatan Kota Malang, tepatnya di Desa Kregbet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi di daerah ppinggiran kota Malang ini dinilai cukup strategis dan ekonomis. Hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Lingkungan masyarakat yang semakin mendukung, artinya pada saat itu banyak masyarakat di daerah Malang Selatan yang sudah berusahatani tebu.
2. Bahan baku mudah diperoleh.
3. Tenaga kerja mudah diperoleh.
4. Listrik, air, dan transportasi mudah diperoleh.

5.1.1.4. Karakteristik Usaha

Pabrik gula merupakan perusahaan musiman yang pendapatan utamanya diperoleh pada musim giling. Musim giling ini berlangsung beberapa bulan dalam setahun, biasanya bulan Juni sampai bulan Desember. Hasil produksi utama PG. Kregbet Baru Malang menjadikan tetes sebagai produk utama sejak tahun 1989. Faktor pendorong yang membuat perusahaan menjadikan tetes sebagai produk

utama adalah karena harga jual tetes ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan harga jual ini disebabkan karena meningkatnya permintaan tetes antara lain dari perusahaan alcohol, spirtus, makanan. Setiap satu minggu sekali, semua gula yang telah selesai di produksi dijual ke BULOG dan pembayarannya dilakukan secara tunai sesuai dengan harga resmi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5.1.1.5. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan PG. Kribet Baru Malang dibedakan menjadi dua yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang PG. Kribet Baru Malang sama dengan tujuan jangka panjang induk perusahaannya yaitu PT. Rajawali Nusantara Indonesia, seperti tercantum dalam Tri Perusahaan Pertanian. Tujuan jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas guna meningkatkan atau menghemat devisa negara.
2. Membantu merealisasikan delapan jalur pemerataan baik akibat dari pengembangan usaha sendiri maupun akibat penugasan perkebunan besar sebagai usaha inti dalam membantu perkembangan perkebunan rakyat.
3. Memanfaatkan dan meningkatkan kelestarian sumber daya alam.

Dalam mendukung tercapainya tujuan jangka panjang diatas diperlukan adanya tujuan jangka pendek. Adapun tujuan jangka pendek PG. Kribet Baru Malang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kelancaran jalannya proses produksi.
2. Mencapai target produksi yang telah ditetapkan.
3. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas kerja melalui pengendalian di segala bidang.

5.1.1.6. Pelaksanaan Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara petan tebu rakyat dengan PG Kribet Baru sampai dengan penelitian berlangsung sama-sama mendapatkan keuntungan. Bias dilihat dari pihak petani yang mendapatkan jaminan pasar dan harga jual tebu yang tinggi diatas rata-rata pasar, sedangkan dari pihak PG Kribet

Baru mendapatkan ketersediaan bahan baku. Pada pelaksanaan pola kemitraan ini sebagian besar petani memperoleh informasi tentang kemitraan dari ketua kelompok tani. Hal ini dikarenakan petani tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak PG Kreet Baru, karena pihak PG Kreet Baru memberikan semua kepercayaan pada kelompok tani dalam kemitraan ini.

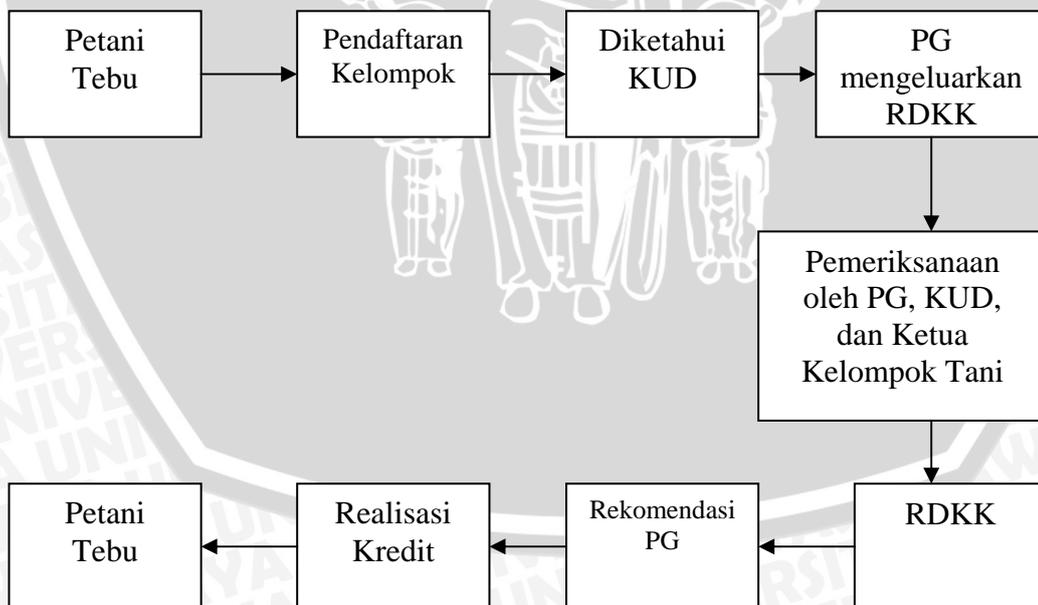
Pada pelaksanaan kemitraan ini petani harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PG Kreet Baru. Dalam mengajukan kemitraan dengan PG Kreet Baru setiap petani harus mengajukan daftar nominatif dan biaya kebun tebu rakyat kemitraan secara kolektif dan dikoordinir oleh ketua kelompok tani. Setelah itu ditandatangani oleh semua pihak yang tergabung dalam kelompok diketuai oleh kelompok tani dan KUD, setelah mengetahui hasilnya maka diserahkan ke PG Kreet Baru. Kemudian dari pihak PG Kreet Baru diwakili oleh kepala rayon dan sinder mengadakan survei administrasi dan kenyataan areal untuk menguji kebenaran daftar normative dan biaya kebun yang diajukan tersebut. Setelah memenuhi syarat, maka daftar normative dan biaya kebun diajukan pada pihak bank sebagai penyalur kredit sesuai wilayah KUD berada. Berdasarkan surat kuasa limpaan pencairan kredit yang dibuat KUD atas nama petani ke pihak PG Kreet Baru maka pengolahan keuangan ditampung pihak PG Kreet Baru sebagai *avalist* (pinjaman kredit).

Proses kemitraan antara petani tebu dengan PG Kreet Baru di Kecamatan Tlogowaru berawal dari beberapa petani yang dipanggil ke kantor desa oleh pihak PG Kreet Baru, ini dilakukan oleh PG Kreet Baru untuk memberikan uraian tentang permasalahan tebu dan gula. Di pihak PG Kreet Baru permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya ketersediaan bahan baku tebu dikarenakan terbatasnya lahan, sedangkan di pihak petani permasalahan yang paling mendasar adalah keterbatasan modal. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, PG Kreet Baru menawarkan suatu kerja sama dengan petani tebu Tlogowaru. Kerjasama ini dikenal dengan Tebu Rakyat Kemitraan (TRK), dimana petani memperoleh kredit dari PG Kreet Baru. Beberapa petani yang diundang ke pertemuan dijadikan kelompok tani. Nama kelompok tani disesuaikan dengan nama ketua kelompoknya. Karena syarat menjadi peserta kemitraan adalah

tergabung dalam satu kelompok tani, maka setiap kelompok berusaha mencari anggota dengan cara mendatangi petani satu per satu. Syarat yang lain yaitu minimal lahan yang dimiliki 20 Ha, apabila lahan kurang dari 20 Ha maka akan dilakukan penggabungan untuk beberapa kelompok tani.

Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan petani untuk mendapatkan kredit dari petani tebu rakyat kemitraan yaitu:

1. Petani didaftar oleh ketua kelompok, berdasarkan daftar tersebut PG Krebet Baru membuat RDK (Rencana Definitif Kebutuhan) yang diketahui oleh KUD, kemudian diajukan ke PG Krebet Baru.
2. Atas dasar RDK tersebut, PG Krebet Baru melakukan pemeriksaan areal diwakili oleh SKW (Sinder Kepala Wilayah) dan petugas lapang serta disaksikan oleh pihak KUD dan ketua kelompok tani yang bersangkutan.
3. Dari hasil lahan dibuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan) oleh PG Krebet Baru.
4. Setelah disetujui oleh PG Krebet Baru maka diajukan rekomendasi dan sebagai tindak lanjut adalah realisasi kredit yang dilaksanakan oleh KUD.



Gambar 5 . Skema Petani TRK Memperoleh Pinjaman Kredit dari PG Krebet Baru

Hak dan Kewajiban antar petani tebu dan PG Krebbe Baru

Hak petani tebu kemitraan

Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh petani dan harus dipenuhi oleh PG Krebbe Baru Malang sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Hak-hak yang diterima oleh petani dan PG Krebbe Baru Malang adalah:

1. Memeroleh pinjaman bibit sesuai dengan luas lahan

Hak petani peserta kemitraan adalah memperoleh bibit sesuai dengan luas lahan yang dimiliki petani. Hak dalam pinjaman bibit ini diberikan oleh PG Krebbe Baru pada awal penanaman tebu tetapi pada penanaman-penanaman selanjutnya petani cenderung tidak mau mengambil bibit dari PG Krebbe Baru, petani lebih memilih membeli bibit dari petani yang menjual bibit tebu. Ini disebabkan karena petani beranggapan bahwa bibit yang dibeli dari petani lain lebih murah dan hasilnya lebih terbukti.

2. Memeroleh pinjaman uang

Hak petani kemitraan yang keuangannya sulit mendapat pinjaman uang dari PG Krebbe Baru. Biasanya pinjaman uang ini diberikan pada petani kemitraan dengan memberikan agunan. Agunan ini digunakan oleh PG Krebbe Baru sebagai baranga jaminan apabila petani lalai dalam mengambalikan uang, maka PG Krebbe Baru berhak mengambil barang yang di agunkan. Agunan yang biasanya dipakai oleh petani adalah: sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB kendaraan (motor arau mobil).

3. Memeroleh pinjaman pupuk sesuai dengan luas lahan

Hak ketiga yang diperoleh petani kemitraan dari PG Krebbe Baru adalah memperoleh pinjaman pupuk sesuai dengan luasan lahan. Kebutuhan pupuk untuk tebu adalah Za, Urea, dan Kompos. Pupuk yang disediakan oleh PG Krebbe Baru untuk Za 8 ku/ha, Urea 3 ku/ha, dan Kompos 6 ton/ha. Pinjaman pupuk ini sangat diperlukan oleh petani, apalagi pupuk mengalami kelangkaan. Dengan adanya pinjaman pupuk maka petani tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pupuk, karena sudah mendapat

pinjaman dari PG Kribet Baru, walaupun kadang-kadang mengalami keterlambatan.

4. Memperoleh bimbingan teknis dari PG Kribet Baru

Hak keempat yang diperoleh petani kemitraan adalah memperoleh bimbingan teknis dan penyuluh pertanian yang ditugaskan oleh PG Kribet Baru. Bimbingan teknis diberikan kepada petani pada saat akan masa penanaman, yang baik sampai dengan pemanenan.

5. Mendapat jaminan pasar

Hak kelima yang diperoleh petani tebu kemitraan adalah mendapat jaminan pasar dan hasil usahatani tebunya. Jaminan pasar yang diperoleh petani ini sangat menguntungkan karena petani tidak perlu susah-susah untuk menjual hasil usahatannya.

6. Memperoleh pembagian uang dan gula

Hak terakhir yang diperoleh petani tebu kemitraan adalah memperoleh pembagian gula dari PG Kribet Baru Malang, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya gula yang dibagikan pada petani kemitraan itu diberikan 10 hari setelah giling.

Kewajiban Petani Tebu Kemitraan

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh petani kepada pihak PG Kribet Baru. Kewajiban-kewajiban petani yang harus dipenuhi oleh petani kemitraan ke PG Kribet Baru adalah :

1. Menanam tebu pada semua lahan kemitraan

Kewajiban yang harus dipenuhi petani tebu adalah menanam semua lahan pertanian kemitraan dengan tanaman tebu. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi oleh petani PG Kribet Baru berhak menuntut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2. Melaksanakan bimbingan teknis yang telah diberikan oleh PG Kribet Baru.

Kewajiban kedua yang harus dipenuhi oleh petani adalah melaksanakan bimbingan teknis dari pihak penyuluh PG Kribet Baru. Penyuluhan ini berguna bagi petani agar mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Menggilingkan semua tebu kemitraan ke PG Krebet Baru

Kewajiban petani yang terakhir adalah menggilingkan hasil usahatani kemitraan seluruhnya ke PG Krebet Baru. Penggilingan tebu kemitraan ini biasanya diatur oleh Pabrik Gula agar tidak ada penumpukan di PG Krebet Baru. Pengaturan penggilingan diatur dengan adanya SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut). Tanpa adanya SPTA ini tebu dari petani tidak diterima oleh PG Krebet Baru Malang.

Hak PG Krebet Baru

Selain hak dan kewajiban petani kemitraan yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini juga dijelaskan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi PG Krebet Baru. Ada 4 hal yang menjadi hak PG Krebet Baru, yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap petani kemitraan.

Dalam hal ini pabrik gula berhak melakukan pengawasan mulai dari penanaman, pemupukan, sampai dengan tebang angkut. Hal ini dilakukan oleh PG Krebet Baru untuk mengetahui apakah petani melakukan budidaya yang benar sesuai dengan penyuluhan yang telah diberikan.

2. Memperoleh tebu dengan standar manis, bersih, segar

Dalam hal ini pihak pabrik gula mempunyai hak untuk memperoleh tebu dari petani kemitraan sesuai yang telah ditetapkan PG Krebet Baru yaitu standar MBS. Apabila tebu petani kemitraan tidak memenuhi MBS akan terkena sanksi rafaksi/potongan. Rafaksi tersebut adalah kotoran akar, turah, pucuk, bogolan, dan dadok. Akar rafaksinya 20%; pucuk rafaksinya 15%; bogolan rafaksinya 10%; akar rafaksinya 5%; dan dadok rafaksinya 5%.

3. PG Krebet Baru memperoleh bagi hasil gula

Seperti halnya dari sisi petani, pihak PG Krebet Baru juga memperoleh bagi hasil gula sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Berhak memotong pendapatan petani kemitraan sesuai dengan pinjaman

Dalam hak yang terakhir ini PG Krobot Baru mempunyai kekuasaan penuh untuk memotong pendapatan yang diperoleh petani sesuai dengan kredit yang dipinjam petani ditambah jumlah kredit. Besarnya pemotongan sesuai dengan nota gula yang akan dicairkan oleh pabrik.

Kewajiban PG Krobot Baru

Disamping memiliki hak, PG Krobot Baru juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada petani. Kewajiban tersebut adalah :

1. Memberi pinjaman bibit kepada petani kemitraan

Salah satu kewajiban PG Krobot Baru pada perjanjian kontrak kemitraan dengan petani kemitraan adalah memberi pinjaman bibit kepada petani sesuai dengan luas lahan yang didaftarkan pada kontrak kerja tersebut, tetapi kenyataannya petani cenderung membeli bibit dari luar atau dari petani lain yang mereka anggap hasilnya lebih baik dan terbukti.

2. Memberi pinjaman berupa uang kepada petani kemitraan]

Kewajiban PG Krobot Baru yang lain adalah memberikan pinjaman uang kepada petani kemitraan. Biasanya pinjaman uang ini diberikan oleh PG Krobot Baru apabila petani memberikan agunan pada pabrik gula.

3. Memberikan pinjaman pupuk kepada petani

Dalam peminjaman pupuk kepada petani kemitraan itu, PG Krobot Baru memberkan pinjaman pupuk sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian sesuai dengan lahan yang ada dalam kontrak.

4. Memberikan bimbingan teknis kepada petani

Kewajiban yang terakhir adalah menyediakan petugas penyuluh lapang yang menguasai masalah tebu. Ini diperlukan unuk memberikan pengarahan atau petunjuk kepada petani tebu terutama tentang budidaya tanaman tebu yang meliputi (1) waktu tanam, (2) penggunaan bibit unggul, (3) pengolahan lahan, (4) pemupukan berimbang, (5) pengairan, (6) perlindungan tanaman, (7) tebang angkut, (8) pengolahan hasil.

5.1.2. Sampel Wilayah Kerja PG. Kregbet Baru Malang

5.1.2.1. Letak Geografis

Desa Tlogowaru terletak di wilayah Kecamatan Kedung Kandang Kotamadya Malang, Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah kelurahan Tlogowaru adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Wonokoyo
Sebelah Selatan	: Tanggilsari
Sebelah Timur	: Sumpersuko
Sebelah Barat	: Arjowinangun

Apabila ditinjau dari segi orbitrasi Kelurahan Tlogowaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 . Orabitrase Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang

Orbitrase	Jarak (km)
Jarak ke Ibukota Kecamatan	3
Jarak ke Ibukota Propinsi	100
Jarak ke Ibukota Kotamadya	10
Jarak ke PG. Kregbet Baru Malang	7

Sumber : Data Statistik Desa Tahun 2005

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa jarak antara daerah penelitian dengan ibukota maupun dengan PG. Kregbet Baru Malang tidak terlalu jauh. Dengan jarak tersebut maka biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk pemasaran maupun pembayaran saprodi dapat diminimumkan. Selain itu petani dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari luar dengan cepat, sehingga petani di lokasi penelitian lebih responsif pada pola kemitraan yang ada.

5.1.2.2. Keadaan Penduduk

Pengelompokan penduduk juga dilaukan berdasarkan jenis mata pencahariannya. Mata pencaharian disini yang dimaksud adalah yang memberikan pendapatan yang berguna sebagai pemenuhan kebutuhan rumah yangga sehari-hari.

Komposisi penduduk Kelurahan Tlogowaru berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
Petani	748	18,3
Buruh Tani	1599	39,1
Pengrajin/industri kecil	8	0,2
Buruh Industri	247	6,0
Buruh Bangunan	380	9,3
Pedagang	433	10,6
Penjahit	-	-
Montir	-	-
PNS	8	0,2
ABRI	4	0,01
Pensiunan (PNS/ABRI)	7	0,17
Peternak Sapi Perah	1	0,02
Peternak Sapi Biasa	150	3,7
Peternak Kambing	120	2,9
Peternak Ayam	351	8,5
Peternak Itik	32	0,7
Jumlah	4088	100

Sumber : Data Statistik Desa Tahun 2005

Sebagian besar penduduk kelurahan Tlogowaru berprofesi sebagai buruh tani, petani, dan pedagang, yaitu mencapai (39,1%), (13,3%), dan (10,6%). Sementara mata pencaharian yang lain cukup variatif dengan prosentase yang relatif lebih kecil. Diantaranya pengrajin/industri kecil (0,2%), Buruh industri (6,0%), buruh bangunan (9,3%), pedagang (10,6%), PNS (0,2%), ABRI (0,01%), pensiunan PNS/ABRI mencapai (0,17%), sedangkan di bidang peternakan prosentasenya untuk sapi perah mencapai (0,02%), peternak sapi biasa (3,7%), peternak kambing (2,9%), peternak ayam (8,5%), dan peternak itik (0,7%). Dapat dilihat bahwa komposisi mata pencaharian beternak sapi biasa lebih banyak. Hal ini dikarenakan dengan beternak sapi biasa dapat disewakan kepada petani untuk membajak sawah, sehingga dapat menambah pendapatan petani.

Berdasarkan data monografi terakhir, diketahui jumlah penduduk Kelurahan Tlogowaru adalah 4266. dari jumlah tersebut terbagi menjadi 1317 Kepala Keluarga (KK). Bila dilihat jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan di kelurahan Tlogowaru ini lebih banyak penduduk laki-lakinya.

Jumlah penduduk laki-laki 2136 atau (50,5%), sedangkan perempuannya 2090 jiwa atau (49,5%). Selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 49 jiwa.

Berdasarkan kelompok umur pendidikan, penduduk kelurahan Tlogowaru dikelompokkan seperti pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Pendidikan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang.

Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
0-6 tahun	659	26,1
7-12 tahun	840	33,2
13-18 tahun	715	28,3
19 tahun keatas	314	12,4
Jumlah	2528	100

Sumber : Data Statistik Desa Tahun 2005

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa prosentase penduduk yang paling kecil ada pada usia 0-6 tahun yaitu sejumlah 659 jiwa (26,1%). Sedangkan prosentase paling besar berada pada usia pendidikan 7-12 tahun yaitu 840 atau (33,2%). Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih tergolong rendah, ini bias dilihat pada usia 19 tahun keatas yang seharusnya ke jenjang universitas hanya mencapai 314 jiwa atau (12,4%).

Ada beberapa kelompok kerja yang terbagi dalam beberapa kriteria umurnya. Adapun pembagian penduduk berdasarkan kelompok tenaga kerja dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Kerja di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang

Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
10-14 tahun	527	18,0
15-19 tahun	402	13,7
20-24 tahun	300	10,3
25-29 tahun	813	27,7
30-31 tahun	354	12,1
35-39 tahun	346	11,8
40 tahun keatas	185	6,3
Jumlah	2927	100

Sumber: Data Statistik Desa Tahun 2005

Berdasarkan Tabel 7 diatas diketahui bahwa angkatan kerja terbesar pada umur 25-29 tahun yaitu 813 jiwa atau (27,7%). Selanjutnya 10-14 tahun sejumlah

527 jiwa (18,0%), usia 15-19 tahun sejumlah 402 jiwa (13,7%), usia 30-31 tahun sejumlah 354 jiwa (12,1%), usia 35-39 tahun sejumlah 346 jiwa (11,8%), usia 20-24 tahun 300 jiwa (10,3%), dan usia 40 tahun keatas 185 jiwa (6,3%). Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang jumlahnya relatif merata antara tenaga kerja produktif.

Berdasarkan tingkat pendidikannya penduduk Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang dapat dikelompokkan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang

Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
Belum Sekolah	700	22,7
Tidak tamat SD	2152	69,6
Tamat SD	25	0,8
Tamat SLTP	23	0,7
Tamat SLTA	49	1,6
Tamat Akademi	12	0,4
Tamat S1	22	0,7
Buta Huruf	94	3,1
Jumlah	3077	100

Sumber : Data Statistik Desa Tahun 2005

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang untuk mengikuti pendidikan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari prosentase jumlah masyarakat yang tidak tamat SD mencapai 2152 jiwa atau (69,6%), dan penduduk yang buta huruf prosentasenya mencapai 3,1 %. Hal ini dapat diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang akan pentingnya pendidikan.

5.1.2.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang sudah baik. Ini bisa dilihat dari kondisi jalan yang sudah beraspal dan aliran listrik yang sudah masuk desa, serta fasilitas telephone juga sudah masuk bahkan banyak dari masyarakat yang juga sudah menggunakan ponsel (HP), radio, televisi yang berguna sebagai sarana informasi dari luar. Untuk sarana transportasi relatif lebih mudah terjangkau karena dilewati jalur angkutan umum.

5.1.3. Kondisi Umum PG. Kebon Agung

5.1.3.1. Sejarah Perusahaan

Pabrik Gula Kebon Agung Malang berdiri pada tahun 1905. Perusahaan ini bersifat perseorangan dan didirikan oleh Tan Tjwan Bie yang merupakan pemilik tunggal. Pada tahun 1917 Pabrik Gula Kebon Agung Malang dijual kepada Javasche Bank yang sekarang dikenal dengan nama Bank Indonesia. Untuk pengelolaannya ditangani oleh Firma Tiedens Van Kirchen (TVK) dan pengelolaan ini dihentikan ketika Jepang masuk ke wilayah Indonesia.

Ketika masa pendudukan Jepang, Pabrik Gula Kebon Agung tetap menjadi milik Bank Indonesia walaupun yang mengelola adalah pemerintah pada masa pendudukan Jepang. Pada masa itu aktivitas giling pabrik sempat terhambat karena kekurangan bahan baku yang disebabkan oleh penggunaan lahan yang dipakai untuk penanaman tanaman non tebu. Demikian juga pada masa revolusi fisik antara tahun 1945 hingga 1949, aktivitas pabrik sempat terhenti. Pada tahun 1949 pengelolaan pabrik ini dikembalikan kepada Firma Tiedens Van Kirchen (TVK), kemudian oleh Bank Indonesia kepemilikannya diserahkan kepada Yayasan Dana Tabungan Pegawai Indonesia Unit I (YDTPBN I) dan Yayasan Dana Pensiunan dan Tunjangan Bank Indonesia Unit I (YDP dan TBN I). Kedua badan ini yang bertindak sebagai pemilik dan pemegang saham tunggal, sehingga usaha ini berubah dari sifat perseorangan menjadi Perseroan Terbatas.

Tabel 9. Badan Hukum yang Mengelola PG Kebon Agung Malang Sejak Awal Berdiri hingga Sekarang

Periode	Pemilik	Badan Hukum Pengelola
1905-1917	Tan Tjan Bie	TanTjan Bie
1917-1940	Bank Indonesia	Firma Tiedens Van Kitchen (TVK)
1940-1945	Bank Indonesia	Pemerintah Jepang
1945-1949	Bank Indonesia	Pemerintah RI
1949-1957	Bank Indonesia	TVK
1957-1968	Bank Indonesia	Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan
1968-1993	Bank Indonesia	PT Triguna Bina
1993-kini	Bank Indonesia	PT Kebon Agung

Sumber : PG Kebon Agung Malang, 2005

5.1.3.2. Lokasi dan Tata Letak Pabrik Gula Kebon Agung

Pabrik Gula Kebon Agung terletak di Desa Kebon Agung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan berbatasan dengan:

Sebelah Utara dengan Kec. Kebonsari, Kec. Sukun Kota Malang

Sebelah Selatan dengan Desa Genengan, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.

Sebelah Timur dengan Kec. Lowokwaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.

Sebelah Barat dengan Desa Sitirejo, Kec. Wagir, Kabupaten Malang.

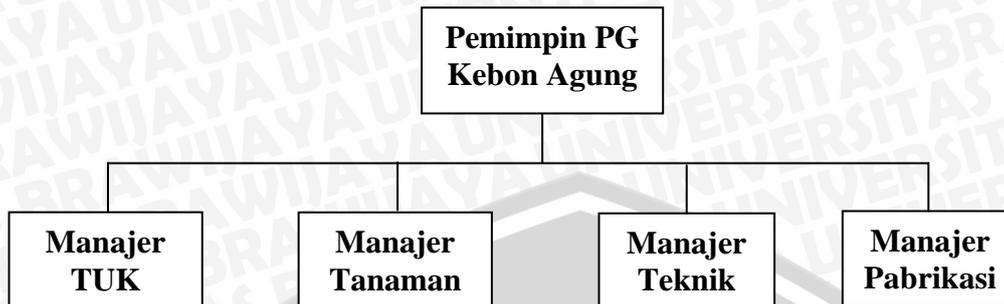
Pabrik Gula Kebon Agung terletak di wilayah yang tergolong strategis karena mempunyai areal tanah yang cocok untuk ditanami tanaman tebu, sebab Pabrik Gula Kebon Agung terletak 2,5 km dari aliran sungai Brantas. Hal ini memudahkan pemenuhan kebutuhan air bagi pabrik dan tanaman tebu. Hal lain yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung adalah letak PG Kebon Agung yang tidak jauh dari kota Malang yang memudahkan akses tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Tata letak PG Kebon Agung merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan di dalam proses produksi. Di dalam produksi, diperlukan peralatan, perlengkapan, mesin-mesin bahkan fasilitas produksi sebagai penunjang. Untuk tipe tata letak peralatan yang digunakan oleh PG Kebon Agung adalah tipe *lay out product* karena pengaturan fasilitas produksi berurutan sesuai dengan jalannya proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Produk utama yang dihasilkan di Pabrik Gula Kebon Agung hanya satu jenis dan diproduksi dengan jumlah yang cukup besar.

5.1.3.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Pabrik Gula Kebon Agung Malang menggunakan sistem garis. Setiap bagian struktur organisasi mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab terhadap masing-masing bagian yang dipegang.

Di Pabrik Gula Kebon Agung pemimpin pabrik membawahi empat orang kepala bagian, yang dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 6. Struktur Organisasi PG Kebon Agung Malang Tahun 2005

Sumber : PG Kebon Agung Malang, 2005

Adapun tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah:

1. Pemimpin PG Kebon Agung (Administrasi)

- a. Bertanggungjawab kepada kepala cabang kantor Surabaya.
- b. Melaksanakan keputusan dan kebijakan perusahaan dalam mengelola pabrik gula sesuai dengan ketentuan direksi.
- c. Melakukan pengawasan dan kontrol pelaksanaan pekerjaan dari berbagai bagian dalam pabrik.
- d. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pencapaian tujuan perusahaan serta standar pelaksanaan pekerjaan dan target-target lainnya.
- e. Mengusulkan kenaikan gaji dan tingkat, pemberhentian sementara dan seterusnya terhadap karyawan.
- f. Mengevaluasi hasil kerja pabrik setiap tahun dan mengambil keputusan untuk mencapai efisiensi keseluruhan terhadap tahun berikutnya.

2. Manajer Tata Usaha dan Keuangan (TUK)

- a. Membantu administrasi dalam keuangan pabrik.
- b. Bertanggung jawab langsung pada pemimpin mengenai ketertiban di bidang administrasi dan keuangan.
- c. Membuat analisa-analisa biaya di pabrik dan melaporkannya bila ada penyimpangan terhadap keuangan.
- d. Mengawasi pekerjaan akuntansi dan bertanggungjawab agar laporan akan selesai tepat pada waktunya.
- e. Membuat pertimbangan-pertimbangan permodalan kerja.

- f. Kepala bagian secara berkala mengontrol pekerjaan karyawan bagian.

3. Manajer Tanaman

- a. Bertanggung jawab kepada pemimpin pada bidang yang menyangkut tanaman.
- b. Mengkoordinasikan dan memimpin semua kegiatan yang mengelola bagian tanaman.
- c. Mengkoordinasikan pengawasan rencana areal tanam tebu untuk tahun giling yang akan datang meliputi luas dan letak.
- d. Menyiapkan bahan baku setiap tahun sesuai dengan kapasitas gilingan.
- e. Menyusun RAB (Rencana Anggaran Belanja) kegiatan tanaman, tebang dan angkut dengan memperhatikan data-data yang diterima dari sub kerja tanaman, sub kerja angkutan dan sinder-sinder kebun wilayah.
- f. Membuat rencana kebutuhan produksi pemakaian alat-alat pertanian.
- g. Mengawasi dan mengadakan evaluasi pembiayaan di bidang-bidang tanaman, tebang dan angkut.

4. Manajer Teknik

- a. Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan dalam bidang teknik.
- b. Mengkoordinir rencana kerja di bidang instalasi.
- c. Mengawasi pekerjaan ketel pembangkit tenaga listrik.
- d. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan/pemakaian work order dan mempersiapkan alat-alat produksi.
- e. Bertanggung jawab atas perusahaan dalam bidang teknik.
- f. Membuat evaluasi atas perusahaan tahun lalu sebagai pedoman dalam rencana yang akan datang.
- g. Bekerjasama dengan bagian tanaman dan pabrikasi dalam menentukan waktu buka dan tutup giling.
- h. Mengawasi dan mengontrol seksi-seksi yang berhubungan bagian teknik.

5. Manajer Pabrikasi

- a. Bertanggung jawab kepada pimpinan dalam proses pabrikasi.
- b. Merencanakan, mengawasi dan mengkoordinir pengelolaan pabrikasi.

- c. Menentukan kecepatan giling dan menjamin hasil pemerahan tebu yang optimal.
- d. Mengawasi pengolahan nira tebu untuk memperoleh gula yang maksimal dan pembungkus gula yang efisien untuk menekan biaya serendah mungkin.
- e. Mengawasi kegiatan laboratorium.
- f. Mengawasi penimbangan tebu dan kebersihan tebu yang diterima dari petani.
- g. Bekerjasama dengan bagian tanaman dan bagian teknik untuk menentukan masa giling.

Bagian tanaman adalah bagian yang melakukan kerja teknik di lapangan sehingga langsung berhubungan dengan petani tebu. Oleh sebab itu perlu diketahui tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh tiap-tiap bagian tanaman, seperti tertulis di bawah ini :

1. Tugas dan tanggung jawab Kepala Bina Wilayah :

- a. Melaksanakan tugas-tugas dari kepala seksi bina wilayah untuk kepentingan perusahaan.
- b. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan membimbing karyawan bawahan di wilayah kerjanya dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Melakukan langkah-langkah perbaikan di setiap waktu yang bermanfaat bagi petani maupun perusahaan demi kelangsungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam koordinasi kepala seksi bina wilayah.
- d. Bersama-sama dengan seksi tebang angkut dalam menyusun/mengatur program tebang pilih yang mengarah pada kualitas tebu manis, bersih dan segar (MBS). Memelihara hubungan baik dengan petani, kelompok tani, organisasi/asosiasi petani, KUD, Perbankan, Dinas Perkebunan, pejabat desa dan kecamatan.
- e. Menyelesaikan semua permasalahan kemitraan yang timbul dengan sebaik-baiknya.
- f. Membina dan membimbing petani/ kelompok tani menuju pelaksanaan budidaya tanaman tebu yang tepat.

- g. Meneliti kebenaran inventarisasi dan melakukan pendaftaran TR (Kemitraan/mandiri) serta mengupayakan keberadaan rencana Definitif Kelompok (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan kelengkapan persyaratan lainnya untuk pengurusan kredit.
- h. Membuat peta kebun lengkap dengan data luas kebun, varietas, masa tanam, taksasi dan realisasi produksi.
- i. Membuat laporan perkembangan kemajuan pekerjaan kebun tanaman TR.
- j. Menyelenggarakan sistem pelaporan yang efektif sesuai kebutuhan manajemen informasi sistem (MIS) bagian tanaman.
- k. Menyelenggarakan KBD (Kebun Bibit Dataran)
- l. Mengatur administrasi dalam penyaluran saprodi KKPTR (Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat) guna mencegah tunggakan kredit.
- m. Ikut memasarkan Biokompos.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Malang merupakan daerah sentra tebu yang didukung oleh Pabrik Gula Kebon Agung Selaku Mitra Kerja dalam pengelolaan tebu menjadi gula. Dimana saat ini terdapat 32 Kecamatan penghasil tebu yaitu Kecamatan Donomulyo, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, Dampit, Tirtoyudo, Ampel Gading, Dampit, Wajak, Poncokusumo, Turen, Bulu Lawang, Gondang Legi, Pagelaran, Kepanjen, Sumber Pucung, Kromengan, Ngajum, Wonosari, Wagir, Jabung, Lawang, Singosari, Karang Ploso, Dau, Ngantan dan Kasembon yang menjadi wilayah penyuplai bahan baku tebu.

Diantara wilayah-wilayah tersebut hanya beberapa yang menjadi penyuplai tebu pada PG. Kebon Agung, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Daftar Wilayah Binaan (Binwil) PG. Kebon Agung dari tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten dan Kota Malang.

(Binaan Wilayah) Binwil		Wilayah
Binwil Utara	Binwil 1	Lawang, Singosari, Karang Ploso
	Binwil 2	Pakis, Jabung
	Binwil 3	Tumpang, Poncokusumo
	Binwil 4	Kedung Kandang
Binwil Tengah	Binwil 5	Wagir
	Binwil 6	Tajinan, Bulu Lawang
	Binwil 7	Pakisaji
Binwil Selatan	Binwil 8	Kepanjen, Sumber Pucung
	Binwil 9	Ngajum, Wonosari, Kromengan
	Binwil 10	Kalipare

Sumber: PG Kebon Agung Malang, 2005

2. Tugas dan tanggung jawab kepala sub seksi tebang dan angkutan tebu
 - a. Melaksanakan tugas-tugas dari kepala seksi tebang angkut dengan berpedoman pada Perencanaan Kerja- Rencana Anggaran Tahunan (PK-RAT) yang telah disusun dan disetujui oleh perusahaan.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana tenaga tebang dan angkutan yang diperlukan sejak dini, agar dicapai kelancaran pasokan bahan baku dalam musim giling.
 - c. Menyiapkan tenaga tebang, alat angkut dan melakukan koordinasi pelaksanaan penebangan sesuai rencana serta memberi petunjuk tebang.
 - d. Mempersiapkan sejak dini rencana tebangan dengan melakukan pendekatan dan kesepakatan yang diperlukan dengan kelompok/ petani pemilik tebu.
 - e. Melaksanakan perintah tebang pilih dengan standar mutu tebu MBS.
 - f. Bekerja sama dengan bina wilayah secara baik dalam memenuhi pasokan tebu sesuai kapasitas giling dan target bahan baku dengan mutu MBS bagi PG.
 - g. Melaksanakan perubahan setiap saat ke arah perbaikan pelayanan kepada petani tebu atas koordinasi Kepala Seksi Tebang Angkut.
 - h. Menyusun sistem pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan MIS Bagian Tanaman.

3. Tugas dan tanggung jawab kepala subseksi penerimaan tebu
 - a. Melakukan pengaturan penerimaan tebu sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan tenaga kerja yang diperlukan dalam koordinasi Kepala Seksi Tebang dan Angkutan Tebu.
 - b. Menjamin tata laksana pengaturan antrian bahan baku serta selalu menjaga ketertiban di segala bidang dalam lingkup tebu emplasemen/areal penerimaan.
 - c. Melaksanakan perbaikan-perbaikan yang dipandang perlu demi perusahaan atas ijin Kepala Seksi Tebang dan Angkutan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Seksi Tebang dan Angkut tebu demi kepentingan perusahaan.
4. Tugas dan tanggung jawab kepala subseksi bina sarana
 - a. Melaksanakan tugas penyelenggaraan tebu sendiri dengan varietas unggul (baru) dengan berpedoman pada PK-RAT dalam koordinasi Kepala Seksi Bina Sarana.
 - b. Merencanakan, memilih dan melaksanakan persewaan lahan untuk Tebu Sendiri (TS) dengan harga yang sesuai dengan pedoman AD-2 (Anggaran Dasar).
 - c. Mengikuti, melakukan pengawasan pekerjaan kebun sejak awal dan mengamati pertumbuhan tanaman sampai dengan persiapan pelaksanaan tebang.
 - d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan kebun, biaya dan realisasi hasil produksi yang dicapai sesuai format NIS (Nilai Indeks Standar) bagian Tanaman.
 - e. Menyusun program tebang TS dan merencanakan pengaturan penyaluran bibit yang berkualitas baik sesuai dengan kondisi lahan.
 - f. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan mutu budidaya tanaman TS atas koordinasi Kepala Seksi Bina Sarana.
 - g. Melaksanakan kerja sama dengan sebaik-baiknya terhadap pihak-pihak lain yang terkait demi tercapainya hasil akhir seperti harapan perusahaan.

- h. Melaksanakan tugas lain dari atasan yang dipandang perlu.
 - i. Mengatur penggunaan traktor tanaman dan pemeliharaan serta membuat laporan kegiatan traktor dan realisasi biaya penggunaan biaya.
5. Tugas dan tanggung jawab biro tanaman
 - a. Melaksanakan tugas dan kebijakan Manajer Bagian Tanaman dalam bidang tata administrasi data baik untuk kepentingan intern maupun ekstern dengan melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaannya terhadap karyawan bawahannya.
 - b. Biro Tanaman merupakan pusat informasi Bagian Tanaman Unit Produksi yang bertanggungjawab atas keteraturan bidang administrasi.
 - c. Membantu manajer Bagian Tanaman dalam menyusun PK-RAT, PMK (Perencanaan Mitra Kerja), Laporan bulanan dan tahunan, prognosa produksi dan evaluasi tugas rutin lainnya.
 - d. Mendistribusikan data atau hal-hal yang dipandang perlu oleh perusahaan kepada masing-masing seksi.
 - e. Merencanakan langkah-langkah perbaikan lain di bidang yang dipandang perlu untuk kepentingan perusahaan.
6. Tugas dan tanggung jawab litbang tanaman
 - a. Membantu manajer bagian tanaman dalam rangka aplikasi/inovasi teknik budidaya tanaman tebu.
 - b. Dari waktu ke waktu selalu mengkaji kemungkinan dilakukannya rasionalisasi teknik budidaya tananam tebu agar dicapai efisiensi biaya kebun di setiap jenis lahan di sekitar PG Kebon Agung.
 - c. Menyusun kerangka penelitian bidang tanaman dan melaksanakannya.
 - d. Mengupayakan terwujudnya varietas unggul bagi yang berkadar sabut rendah dan memiliki potensi hasil hablur/gula yang tinggi.
 - e. Menyampaikan saran-saran yang konstruktif berdasarkan pengalaman empiris maupun hasil penelitian untuk kemauan perusahaan di bidang tanaman.
7. Tugas dan tanggung jawab Petugas Petugas Lapangan Pabrik Gula (PLPG)

- a. Membantu Kasubsi Bina Wilayah dalam menjalankan kebijakan perusahaan.
- b. Menjalin kerja sama yang harmonis dan menjaga citra baik dengan para pihak terkait.
- c. Membantu Kasubsi Bina Wilayah melakukan taksasi produksi dan menyusun program tebang pilih areal tebu di wilayahnya.
- d. Melakukan pemantauan tebang meliputi luas tertebang dan sisa yang belum ditebang.
- e. Melakukan inventarisasi dan pendaftaran areal TR lengkap dengan kategori kebun/ blok gambar kebun, luas, varietas, masa tanam.
- f. Membimbing kelompok/ petani tebu khususnya budidaya yang benar dan bidang lain yang berkaitan dengan pola kemitraan.
- g. Mengurus kebutuhan dan penyaluran saprodi bagi kelompok/ petani dan melaksanakan tertib administrasi serta melakukan langkah-langkah pencegahan tunggakan kredit.
- h. Menyusun data laporan kemajuan pekerjaan di wilayah kerjanya sebagai bahan untuk menyusun laporan di Bagian tanaman.

5.1.3.4. Pelaksanaan Kemitraan

Kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan, karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak- pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Hal itu pula yang dilaksanakan oleh Pabrik Gula Kebon Agung dengan petani tebu binaan di wilayah Kedungkandang sebagai mitra kerjanya dalam usaha memenuhi kebutuhan konsumsi gula di Indonesia, khususnya di wilayah Malang Raya.

Dalam kegiatan kemitraan ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Etika-etika bisnis dalam pelaksanaan kemitraan antara PG Kebon Agung dan petani tebu diwujudkan secara konkrit dengan tata tertib perjanjian sebagai berikut:

Hak petani :

1. Mendapatkan fasilitas kredit berupa uang ataupun sarana produksi dengan mudah.
2. Mendapatkan pembinaan atau penyuluhan dari pihak PG Kebon Agung.
3. Mendapatkan informasi tentang hasil FTK, FMPW dan lelang gula.
4. Mendapatkan kemudahan fasilitas tebang angkut.
5. Memberikan saran dan pendapat kepada perusahaan.
6. Berhak untuk melanjutkan atau menghentikan hubungan kerjasama dengan PG Kebon Agung.
7. Melaporkan kepada pemerintah bila perusahaan melanggar kesepakatan yang telah disepakati.

Kewajiban petani :

1. Menyediakan lahan untuk budidaya tebu.
2. Memelihara dan mengelola tanaman dengan baik.
3. Mematuhi peraturan yang telah disepakati oleh perusahaan.
4. Menjual seluruh hasil panen ke pihak PG kebon Agung.

Untuk menunjang pelaksanaan hak dan kewajiban petani tebu maka terdapat pula hak dan kewajiban yang mengikat bagi PG Kebon Agung selaku pihak inti:

Hak perusahaan :

1. Menentukan harga beli bersama-sama dengan petani tebu.
2. Mendapatkan bahan baku tebu dengan kualitas yang baik dari petani.
3. Memberikan sanksi kepada petani bila terjadi pelanggaran.

Kewajiban perusahaan :

1. Memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi petani.
2. Melakukan pembinaan kepada petani berupa : penyuluhan pertanian, pembinaan teknis, FTK (Forum Temu Kemitraan), FMPW (Forum Musyawarah Pelaksanaan Wilayah), fasilitas kredit berupa uang, peminjaman sarana produksi, fasilitas lelang gula dan kemudahan SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut).

Uraian di bawah ini akan menjelaskan tentang teknik pembinaan yang dilakukan oleh pihak PG Kebon agung terhadap petani tebu mitra kerjanya yang tergabung dalam kelompok tani “Tani Makmur” di Desa Arjowinangun.

1. Penyuluhan Pertanian

Musim giling di wilayah binaan PG Kebon agung serentak dilakukan pada akhir bulan April hingga awal bulan November tiap tahunnya dengan periode giling 1 kali 1 tahun. Pelaksanaan penyuluhan pertanian biasanya dilakukan sebelum musim giling antara bulan November hingga bulan Maret. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan istilah TURBA yang merupakan akronim dari istilah turun ke bawah, yang memiliki arti sama dengan pola *top down*. Materi dalam penyuluhan lebih ditekankan pada teknik budidaya tebu mulai dari pemilihan bibit hingga penyampaian inovasi baru yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tanaman tebu.

Pada umumnya kegiatan penyuluhan pertanian melibatkan Penyuluh Lapangan Pabrik Gula (PLPG), penyuluh lapang dari Binwil (Sinder) dan perwakilan penyuluh dari pihak KUD, dimana disini wilayah Desa Arjowinangun masuk dalam wilayah kerja KUD Subur yang beralamat di JL Mayjen Sungkono No 56 Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Di desa penelitian, penyuluhan yang sering dilakukan menggunakan pendekatan terhadap ketua kelompok tani dan selanjutnya informasi yang diterima oleh ketua kelompok tani akan disebarkan kepada para anggotanya. Di bawah ini adalah daftar nama penyuluh di wilayah Desa Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Periode 2005-2006.

Tabel 11. Nama Petugas Penyuluh Lapang Wilayah Kerja Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Periode 2005- 2006

No	Jabatan	Nama
1	Penyuluh Lapangan Pabrik Gula (PLPG)	Puguh H. Bandi
2	Seksi Bina Wilayah	Samudji
3	KUD	Cholik

Sumber: Data Primer Tahun 2006

2. Pembinaan Teknis

Pembinaan teknis yang disampaikan ke petani menyangkut penerapan hasta usahatani agar petani mampu menghasilkan tebu yang berkualitas tinggi dan tepat waktu. Berbeda dengan kegiatan penyuluhan pertanian sebelumnya, untuk pembinaan teknis dihadiri oleh perwakilan dari pabrik Gula, Perwakilan dari KUD dan seluruh petani anggota kelompok tani “Tani Makmur”. Ada kalanya dalam pelaksanaan pembinaan teknis pihak PG Kebon Agung menyediakan lahan percontohan sendiri atau TS tetapi untuk desa Arjowinangun tidak terdapat TS, namun hanya menggunakan lahan milik petani peserta kemitraan. Lahan percobaan di wilayah ini menggunakan lahan milik H. Nurcholis yang merupakan salah satu anggota kelompok tani di wilayah kedungkandang. Maksud dari kegiatan peragaan petak contoh ini adalah untuk tempat latihan penerapan budidaya dan sebagai tolak ukur penerapan teknologi pada kelompok tani. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani tebu.

3. Forum Temu Kemitraan (FTK)

Forum Temu Kemitraan (FTK) merupakan pertemuan rutin yang diadakan selama musim giling yang bertujuan mengantisipasi permasalahan yang timbul selama musim giling. Secara garis besar FTK terdiri dari dua bagian yaitu persiapan giling dan evaluasi giling. Persiapan giling diadakan beberapa kali menjelang musim giling dan dihadiri oleh pengurus KUD se-wilayah kerja PG Kebon Agung, perwakilan petani, bank pelaksana, perwakilan PG Kebon Agung, Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi. Dalam pertemuan ini dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan pasokan tebu yang akan masuk ke PG Kebon Agung, diantaranya adalah :

- a. Rencana dan estimasi gambaran giling.
- b. Metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku tebu.
- c. Ketentuan awal tebang.
- d. Ketentuan premi dan bantuan peningkatan mutu tebang.
- e. Subsidi angkutan truk.

- f. Nilai ganti tetes.
- g. Biaya-biaya komponen terbang angkut.
- h. Cara yang aman dan efektif menanggulangi persaingan tataniaga gula secara bebas.
- i. Cara-cara pemulihan struktur tanah/kesuburan tanah.
- j. Pembahasan bank mana yang siap bermitra dengan PG Kebon Agung dan petani.
- k. Biaya keamanan jalan.

Sedangkan pertemuan evaluasi giling diadakan setelah musim giling dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan jalannya giling yang telah berjalan guna mengoreksinya. Pertemuan ini dihadiri oleh pengurus KUD sewilayah kerja PG Kebon Agung, perwakilan petani, Tim Lima dan PG Kebon Agung. Dalam pertemuan ini biasanya membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Animo petani terbang dan pengirim tebu ke PG Kebon Agung.
2. Dampak-dampak yang kurang mendukung dalam proses produksi dan penyaluran bahan baku.
3. Akibat-akibat yang dapat terjadi bila tebu yang masuk tidak memenuhi syarat.
4. Langkah-langkahantisipasi oleh PG Kebon Agung, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
5. Melakukan koreksi guna mempertahankan kemitraan yang telah terjalin antara PG Kebon Agung dengan petani dan KUD.

Anggota tim lima adalah gabungan perwakilan Pengurus KUD dan Kelompok tani se-wilayah Kerja Pabrik Gula Kebon Agung. Dimana untuk tim lima Periode 2005-2006 kali ini salah satunya diwakili oleh H. Sutikno selaku Ketua KUD Subur yang menjabat sebagai bendahara tim lima.

4. Forum Musyawarah Pelaksanaan Wilayah (FMPW)

Secara rutin sebulan sekali, yaitu pada minggu ketiga, PG Kebon Agung menyelenggarakan pertemuan yang disebut Forum Musyawarah Pelaksanaan Wilayah (FMPW). Dalam rencana kerja seksi bina wilayah FMPW ini diadakan mulai bulan Februari hingga November yaitu sejak tanaman tebu ditanam hingga akhir masa giling. Pertemuan ini dihadiri oleh Kasubsi wilayah, PLPG, wakil

KUD serta kelompok tani dan dipimpin oleh Kasubsi bina wilayah di setiap wilayah kerja masing-masing.

Peran pertemuan ini adalah sebagai wadah atau forum musyawarah antara petani, KUD dan PG Kebon Agung untuk menyepakati program peningkatan produksi dan kegiatan operasional di lapangan, menemukan langkah-langkah tindak lanjut pemecahan masalah yang timbul sekaligus sebagai pusat informasi dan forum temu usaha. Ruang lingkup dalam kegiatan ini menitikberatkan pada usaha untuk peningkatan produksi gula. Di dalam kegiatan ini dibicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani di lahan. Untuk selanjutnya dicari jalan keluar secara bersama-sama dengan melalui musyawarah.

FMPW memiliki wewenang dan tanggungjawab :

- a. Melaksanakan keputusan-keputusan FTK, yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
- b. Menjabarkan lebih terperinci tentang kegiatan operasional di lapangan, antara lain kebutuhan bibit dan pelaksanaan tebang angkut.
- c. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan.

Selain pembinaan yang meliputi penyuluhan pertanian, Pembinaan teknis dan penyelesaian masalah melalui forum-forum resmi maka pihak Pabrik Gula Kebon Agung juga melakukan pembinaan yang menyangkut permasalahan produksi yaitu:

1) Pembinaan Kredit

Bantuan kredit ditujukan bagi petani yang membutuhkan bantuan dana dalam pengolahan dan budidaya tanaman tebu sebelum masa giling. Pada dasarnya terdapat dua jenis kredit yang disalurkan pada petani peserta kemitraan, yaitu Kredit SPTRK (Simpan Pinjam Tebu rakyat kemitraan) dan kredit yang diberikan dari KUD. Untuk SPTRK merupakan kredit yang langsung diberikan PG Kebon agung melalui pihak bank pelaksana yang ditunjuk yaitu BRI dan BUKOPIN. Pengajuan kredit SPTRK mempertimbangkan luas areal lahan yang dimiliki serta pinjaman-pinjaman periode sebelumnya. Pembayaran kredit dilakukan dengan cicilan yang langsung dipotong dari nota gula yang diterimakan pada pihak petani. Nota gula yang diserahkan dari PG Kebon agung ke KUD

sudah dipotong cicilan SPTRK, selanjutnya apabila petani tersebut memiliki pinjaman pada pihak KUD maka sebelum diterimakan akan dipotong dulu sesuai kesepakatan cicilan dengan pihak KUD.

2) Pembinaan Sarana Produksi

Sarana produksi ini meliputi pengadaan bibit, alat pengolahan tanah (bajak atau traktor), serta sarana tebang angkut. Pembayaran peminjaman sarana tersebut dilakukan pada saat giling tebu yaitu dengan melakukan pemotongan hasil yang diterima oleh petani. Hal ini bertujuan agar PG Kebon Agung mendapat jaminan bahwa tebu para petani mitra benar-benar dimasukkan ke PG Kebon Agung.

3) Permudahan Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA)

Untuk memasukkan tebunya ke PG Kebon Agung, petani berkewajiban mengurus SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut). Sebelum memperoleh surat perintah tebang angkut petani tebu akan mengalami tahap cek lahan yang dilakukan oleh pihak PPL yang bertujuan melihat tingkat kematangan dan rendemen tebu yang ditanam petani, apabila nilai Brik kurang dari 15 maka tidak diperbolehkan tebang tetapi harus menunggu hingga matang terlebih dahulu. Selanjutnya PPL akan menyampaikan surat rekomendasi yang diberikan pada pihak PG Kebon Agung yang mendasari turunnya Surat Ijin Tebang (SIT). Turunnya SIT ini menandakan tebu sudah siap ditebang dan diangkut untuk proses giling. Pelaksanaan pengangkutan dikoordinir langsung oleh masing-masing ketua kelompok tani dimana di kelompok tani "Tani Makmur" langsung dipimpin oleh H. Ismail dan masalah transportasi pengangkutan nantinya akan mendapat dana plafon dari pihak KUD.

4) Fasilitas Lelang Gula

Pelaksanaan lelang gula dilakukan secara tertutup yaitu melalui fax, yang diadakan setelah gula terkumpul dalam satu periode (biasanya dalam satu periode sama dengan dua minggu). Dalam pelaksanaan lelang gula pasir ini layaknya prosedur lelang pada umumnya, dimana landasan dari sistem ini adalah bahwa penawaran dimulai dari harga ekspektasi terendah kemudian terus bertambah sampai salah satu pembeli menerima harga tertinggi. Gula yang terkumpul berasal dari gula milik petani yang mengambil hasil penjualan tebunya berupa uang.

Ketentuan yang digunakan petani adalah dengan mendaftarkan gulanya untuk dijual dengan lelang, sehingga pihak pabrik mengikutsertakannya dalam lelang gula. Untuk kesepakatan harga yang diambil dalam suatu lelang berdasarkan pada harga yang diajukan oleh para broker untuk diseleksi oleh tim lelang gula yang terdiri dari: tim lima (3 orang wakil dari KUD, 2 wakil dari petani), petani umum, dan pihak lain yang berkepentingan untuk membeli. Segala informasi hasil dari lelang gula akan segera diterima oleh ketua kelompok tani yang selanjutnya menyampaikannya kepada anggota kelompok.

Melihat uraian hak dan kewajiban antara petani tebu dan pihak PG Kebon Agung yang tertulis diatas, maka secara tidak langsung telah mematahkan pendapat umum yang beranggapan bahwa pelaksanaan kemitraan adalah wujud eksploitasi perusahaan terhadap petani tebu sebagai mitra kerja yang sering dianggap sebagai pihak yang lemah. Pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan oleh PG Kebon Agung dan Kelompok tani "Tani Makmur" lebih didasarkan pada prinsip keadilan yang bertujuan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

5.1.4. Sampel Wilayah Kerja PG. Kebon Agung Malang

5.1.4.1. Tata Letak

Arjowinangun adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang. Kelurahan Arjowinangun yang terletak 7 Km dari Ibukota Kotamadya Daerah Tingkat II, 4 Km dari Pusat pemerintahan Kecamatan Kedungkandang dan berjarak 5 km dari PG Kebon Agung. Wilayah yang memiliki luas areal 266 Ha ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kelurahan Bumiayu
Sebelah Selatan	: Desa Tambak Rejo
Sebelah Timur	: Sungai Brantas
Sebelah Barat	: Kelurahan Tlogowaru

Ditinjau dari segi geografis, Kelurahan Arjowinangun terletak 414 Km dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1.833 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 28⁰ C. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa jarak antara daerah penelitian dengan ibukota maupun dengan PG. Kebon Agung tidak terlalu jauh.

Dengan jarak tersebut maka biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk pemasaran maupun pembayaran saprodi dapat diminimumkan. Selain itu petani dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari luar dengan cepat, sehingga petani di lokasi penelitian lebih responsif pada pola kemitraan yang ada.

Komposisi jumlah penduduk Kelurahan Arjowinangun yang mencapai 7.284 jiwa (sensus tahun 2004) terbagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.521 jiwa, dan 3.763 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah Kepala keluarga adalah 1.628 KK.

Tabel 12. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2005

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	3.521	48.33
Perempuan	3.763	51.66
Total	7.284	100.00

Sumber : Kantor Kelurahan Arjowinangun, 2005

5.1.4.2. Distribusi Penduduk Menurut Golongan Umur

Distribusi penduduk berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13. Distribusi Penduduk Menurut Umur di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2005

Golongan Umur	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
0 - 6	789	10.83
7 - 12	719	9.87
13 - 18	906	12.43
19 - 25	1.220	16.74
26 - 40	1.817	24.94
41 - 56	1.012	13.89
Lebih dari 57	821	11.27
Total	7.284	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Arjowinangun, 2005

Berdasarkan distribusi jumlah penduduk Kelurahan Arjowinangun menurut golongan umur, diketahui komposisi penduduk terbanyak ditempati oleh golongan usia kerja/usia produktif antara 26–40 tahun yaitu sebanyak 1817 jiwa sedangkan Komposisi penduduk terkecil ditempati oleh golongan umur 7-12 tahun, yaitu sebanyak 719 jiwa.

Ditinjau dari jumlah distribusi penduduk yang mayoritas adalah usia kerja/ produktif, maka sangat menguntungkan dalam memunculkan nilai positif dan modernitas dalam segala hal terutama dalam hal budidaya dan kelembagaan tebu. Hal ini didasarkan pada keadaan lapang yang menunjukkan bahwa mereka yang usianya muda lebih mudah menerima dan menerima pembaharuan yang ada. Selain itu didukung juga bahwa mereka yang lebih muda umumnya juga memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Keadaan ini akan lebih menguntungkan bila mereka yang usianya lebih muda mau melibatkan dan bertukar pikiran dengan pihak yang lebih tua, karena dengan cara ini kedua pihak dapat saling bertukar pikiran dalam mengatasi semua permasalahan dan mencapai keputusan terbaik berdasar pengetahuan dan pengalaman yang ada dari keduanya.

5.1.4.3. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat pendidikan

Distribusi penduduk Kelurahan Arjowinangun berdasarkan latar belakang pendidikan, urutan pertama ditempati oleh SD/ sederajat, dengan jumlah penduduk sebesar 1.482 jiwa. Urutan selanjutnya adalah SMU dengan jumlah penduduk sebanyak 1.273 jiwa dan urutan selanjutnya adalah tidak tamat SD, tidak pernah sekolah, SMP, dan akademi D1-D3 dengan jumlah masing-masing secara berurutan adalah 564 jiwa, 186 jiwa, 806 jiwa dan 244 jiwa. Secara rinci Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Arjowinangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2005

Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Tidak tamat SD	564	12.40
Tamat SD	1.482	32.53
Tamat SLTP	806	17.69
Tamat SLTA	1.273	27.94
Tamat D1 – D III	244	5.35
Tidak pernah sekolah	186	4.08
Total	4.555	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Arjowinangun, 2005

Tingkat pendidikan seseorang ikut menentukan bagaimana seseorang bersikap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka filter terhadap baik buruknya suatu nilai yang

berkembang juga semakin tinggi. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka berkembangnya sistem kelembagaan dan perekonomian akan sangat baik apabila dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Terlebih bila tingkat pendidikan yang tinggi ini didominasi oleh petani tebu sebagai responden dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan bahwa modal sosial yang ada akan berkembang dan mampu membangun jaringan strategis yang menguntungkan, tidak hanya bagi komunitas mereka tetapi juga bagi wilayah Kelurahan Arjowinangun.

5.1.4.4. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Kelurahan Arjowinangun bergerak dalam bidang pertanian/bermata pencaharian pada sektor pertanian, yaitu sebesar 2043 jiwa, sedangkan sisanya, bermata pencaharian di luar sektor pertanian yang meliputi Karyawan (Pegawai Negri Sipil, ABRI/Polri dan swasta) sebanyak 783 jiwa, wiraswasta/pedagang sebanyak 347 jiwa, dan sisanya bergerak di bidang pertukangan, pensiunan, dan usaha kecil lain dengan jumlah masing-masing secara berurutan adalah 56 jiwa, 88 jiwa dan 50 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tebu yang mana sangat tepat untuk dijadikan responden pada penelitian ini, karena fokus penelitian ini adalah petani tebu. Jumlah anggota komunitas yang banyak secara tidak langsung menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan. Sebagaimana layaknya komunitas mahasiswa, polisi ataupun dosen pasti secara tidak langsung memiliki kecintaan terhadap organisasi atau korps nya. Diharapkan dengan adanya perasaan senasib dan sepenanggungan dapat menciptakan iklim kerjasama yang erat dan mampu memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2005

Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	1.665	47.50
Buruh tani	378	10.78
Wiraswasta/ pedagang	347	9.90
ABRI/ POLRI	90	2.56
Pegawai Negeri	346	9.87
Swasta	485	13.83
Pertukangan	56	1.59
Pensiunan	88	2.51
Lain-lain	50	1.42
Total	3.505	100

Sumber : Kantor Kelurahan Arjowinangun, 2005



VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Karakteristik Petani Contoh

6.1.1. Karakteristik Petani Contoh PG. Kregbet Baru Malang dan Petani Contoh PG. Kebon Agung Malang

Faktor Sosial Ekonomi dalam kegiatan usahatani tebu berpengaruh pada keputusan berusahatani. Pada bagian ini akan disajikan karakteristik petani contoh yang meliputi: jumlah anggota keluarga, luas penguasaan lahan, akses kredit, dan harga jual tebu. Sebelum menganalisis data primer yang diperoleh dari 70 petani contoh PG. Kregbet Baru dan 58 petani contoh PG. Kebon Agung, pada bagian ini dibahas karakteristik petani contoh tersebut.

6.1.1.1. Luas penguasaan lahan

Tanah merupakan modal yang terpenting bagi kelangsungan produksi usahatani tebu. Distribusi petani contoh menurut luas penguasaan lahan disajikan pada Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16 . Distribusi Petani Contoh PG. Kregbet Baru dan PG Kebon Agung, Kabupaten Malang Menurut Luas Penguasaan Lahan

Luas Penguasaan Lahan (Ha)	Jenis Petani							
	Kredit				Bebas			
	PG Kregbet Baru		PG Kebon Agung		PG Kregbet Baru		PG Kebon Agung	
	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)
< 0,5	1	2,38	1	2,56	1	3,57	1	5,26
0,5 – 1,5	24	57,14	21	53,84	13	46,43	13	68,42
> 1,5	17	40,47	17	43,6	14	50	5	26,32
Jumlah	42	100	39	100	28	100	19	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Berdasarkan Tabel 16 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar petani contoh dari PG Kregbet Baru memiliki lahan dengan luasan antara 0,5 – 1,5 Ha yaitu sebanyak 24 jiwa atau 57,14 %. Dari jumlah tersebut petani mengambil keputusan untuk bermitra menjadi petani kredit, sedangkan untuk luasan lahan yang lebih besar > 1,5 Ha lebih cenderung untuk menjadi petani bebas. Sedangkan petani contoh dari PG Kebon Agung menunjukkan bahwa sebagian besar petani contoh memiliki lahan dengan luasan antara 0,5 – 1,5 Ha yaitu sebanyak 21 jiwa

atau 53,84 %. Dari jumlah tersebut petani mengambil keputusan untuk bermitra menjadi petani kredit, sedangkan untuk luasan lahan yang lebih besar > 1,5 Ha lebih cenderung untuk menjadi petani bebas.

Petani dengan penguasaan lahan yang lebih luas cenderung tidak bermitra dan menjadi petani bebas dengan alasan mereka lebih memiliki modal yang besar. Sedangkan dengan lahan yang relatif sempit lebih cenderung untuk bermitra menjadi petani kredit karena modal yang dimiliki petani untuk mengolah tanahnya cenderung rendah.

6.2.1.2. Akses kredit

Akses kredit digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan petani tentang kredit yang dapat diperoleh oleh petani contoh dalam berusahatani tebu, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Dalam hal ini adalah pihak yang mau memfasilitasi kegiatan usahatani mulai dari modal, bibit serta saprodi. Distribusi petani tebu menurut pengetahuan adanya akses kredit disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Distribusi Petani Contoh PG. Kretet Baru dan PG Kebon Agung, Kabupaten Malang Menurut Pengetahuan Tentang Akses Kredit

Akses Kredit	Jenis Petani							
	Kredit				Bebas			
	PG Kretet Baru		PG Kebon Agung		PG Kretet Baru		PG Kebon Agung	
	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)						
Tahu	23	54,76	25	64,1	16	57,14	11	57,89
Tidak Tahu	19	45,24	14	45,9	12	42,86	8	42,11
Jumlah	42	100	39	100	28	100	19	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa jumlah petani contoh PG. Kretet Baru yang mengetahui akses kredit sudah banyak, yaitu sebesar 23 atau 54,76% dan sebagian besar memutuskan untuk bermitra. Petani contoh PG. Kretet Baru yang tidak mengetahui akses kredit memilih untuk tidak bermitra sebesar 12 atau 42,86%. Sedangkan jumlah petani contoh PG Kebon Agung yang mengetahui akses kredit juga sudah banyak, yaitu sebesar 25 atau 64,1% dan sebagian besar memutuskan untuk bermitra. Petani contoh PG. Kebon Agung yang tidak mengetahui akses kredit memilih untuk tidak bermitra sebesar 8 atau 42,11%. Ini dikarenakan petani yang tidak tahu menahu akses kredit lebih memilih bermitra

karena dengan bermitra jaminan akan diperoleh bisa dipertanggung jawabkan, misalnya jaminan akan modal, saprodi serta jaminan pasar.

6.2.1.3. Harga jual tebu

Harga jual tebu berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh oleh petani contoh. Jika harga jual tebu tinggi maka pendapatan yang diperoleh juga tinggi. Sebaliknya semakin rendah harga jual tebu maka semakin rendah pendapatan yang diperoleh petani tebu. Distribusi petani contoh menurut harga jual tebu didaerah penelitian disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18 , Distribusi Petani Contoh PG. Kribet Baru dan PG Kebon Agung, Kabupaten Malang Menurut Harga Jual Tebu

Harga Jual Tebu (Rp/kg)	Jenis Petani							
	Kredit				Bebas			
	PG Kribet Baru		PG Kebon Agung		PG Kribet Baru		PG Kebon Agung	
	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)						
198-220	13	30,96	11	28,20	22	78,57	22	78,57
>220	29	69,04	28	71,80	6	21,43	6	21,43
Jumlah	42	100	39	100	28	100	28	100

Sumber : Analisa Data Primer, 2006

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa harga jual tebu tertinggi pada petani contoh PG Kribet Baru adalah lebih besar dari 220 sebanyak 29 jiwa atau 69,04% dan sebagian besar mengambil keputusan untuk bermitra. Sedangkan petani contoh PG Kribet Baru yang tidak bermitra harga jual cenderung rendah yaitu 198-220 sebanyak 22 jiwa atau 30,96%. Sedangkan petani contoh PG Kebon Agung adalah lebih besar dari 220 sebanyak 28 jiwa atau 71,80% dan sebagian besar mengambil keputusan untuk bermitra. Sedangkan petani contoh PG Kebon Agung yang tidak bermitra harga jual cenderung rendah yaitu 198-220 sebanyak 11 jiwa atau 28,20%. Banyaknya petani contoh yang memutuskan untuk bermitra adalah harga jual yang tinggi dan pihak I dengan ketentuan yang telah disepakati. Ini berbeda dengan harga jual tebu yang tidak bermitra yang rendah, karena rata-rata petani contoh menjual ke pihak penebas.

6.2. Deskripsi Ekonomi Kelembagaan Pada Industri Gula

Industri gula di Malang khususnya dan di Indonesia pada umumnya mempunyai susunan kelembagaan yang kompleks. Banyak pihak yang terlibat di dalamnya yang merupakan pelaku dari “set of working rules”. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pabrik gula itu sendiri, petani tebu yang dibedakan menjadi dua macam yaitu petani kredit dan petani bebas, KUD, dan pedagang perantara. Ada di beberapa daerah di Jawa Timur yang juga terdapat APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) yang terlibat dalam kesepakatan kelembagaan tersebut. Tetapi di lokasi penelitian daerah Kabupaten Malang dimana terdapat PG Kerebet Baru dan PG Kebon Agung tidak ada APTR.

Dua pabrik gula di Kabupaten Malang, yaitu pabrik gula Kerebet Baru dan pabrik gula Kebon Agung mempunyai “Corporate Governance” berbeda karena perbedaan manajemen yang menaungi. Pabrik gula Kerebet Baru sebagai pabrik gula dibawah PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah pabrik gula yang berbentuk BUMN dan pabrik gula Kebon Agung sebagai pabrik gula di bawah PT. Kebon Agung adalah pabrik gula swasta. Dilihat dari perbedaan manajemen yang menaungi, maka bisa disimpulkan juga terdapat perbedaan pada kelembagaannya dan perbedaan bentuk hubungan dengan pihak lain yang terlibat dalam industri gula.

Pihak lain yang sangat penting dalam kelembagaan industri gula adalah petani tebu. Dalam penelitian ini petani tebu dibedakan menjadi petani tebu kredit dan petani tebu bebas. Disebut petani tebu kredit apabila petani tersebut terikat kontrak kredit dengan pabrik gula yang difasilitasi oleh KUD untuk mendapatkan modal usaha, sedangkan disebut petani bebas apabila modal usahatannya diusahakan sendiri melalui modalnya sendiri atau meminjam ke pihak lain. Dalam kegiatan usahatannya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua jenis petani tersebut karena perbedaan kelembagaan yang mereka pilih.

6.2.1. Sumber kredit dan sistem pengembalian

Produksi Pertanian -termasuk tebu- ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya tersedianya suplai input (bibit dan pupuk), sewa lahan, dan harga produksi. Petani sangat memperhatikan faktor-faktor tersebut pada saat memilih

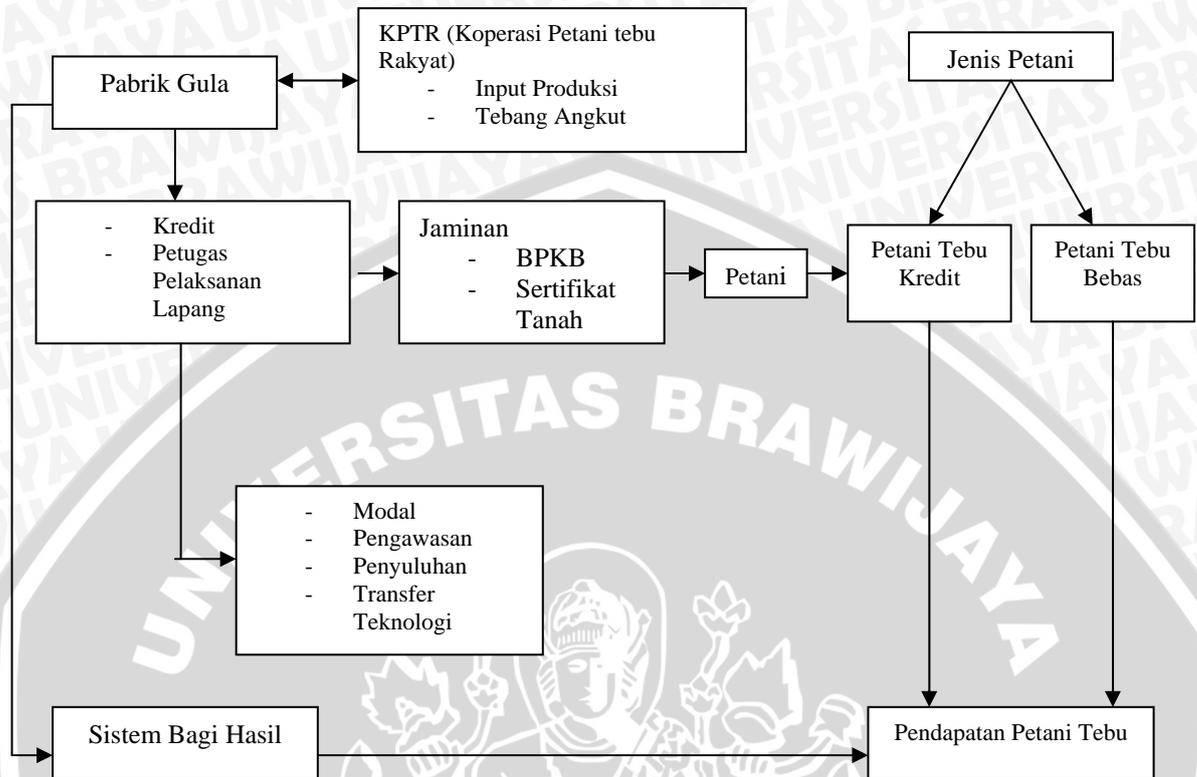
komoditas yang akan mereka budidayakan. Pada kasus petani tebu, faktor ketersediaan suplai input tersebut sangatlah penting karena masa tanam tebu relatif panjang (12 bulan). Dengan masa tanam yang relatif panjang tersebut, maka petani harus diyakinkan bahwa selama masa tanam tersebut semua input tersedia dengan baik dan ada jaminan harga jual yang pantas. Sehingga petani tidak ditempatkan dalam posisi yang beresiko tinggi.

Ada banyak cara untuk petani tebu mendapatkan input produksi, seperti bibit dan pupuk. Petani tebu bisa mendapatkan bibit dan pupuk dari koperasi (KUD/Koperasi Unit Desa), Pabrik Gula (melalui KUD), toko pertanian, dan lain-lain. Disamping itu, petani tebu umumnya membina hubungan baik dengan sesama petani tebu lain untuk mendapatkan bibit atau pupuk. Pada penelitian ini, kebanyakan para petani tebu memperoleh bibit atau pupuk dari toko pertanian. Hal ini dikarenakan jumlah toko pertanian di Malang lebih banyak daripada jumlah koperasi. Dan juga, akses ke koperasi lebih sulit dan membutuhkan persyaratan yang rumit. Kenyataan yang lain juga karena tidak semua petani tebu adalah anggota koperasi sehingga mereka tidak punya kewajiban untuk membeli bibit dan pupuk di koperasi.

Salah satu pilar penting yang mendukung proses produksi petani adalah tersedianya kredit. Pada kasus petani tebu di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan khususnya di Malang, pemerintah daerah sudah merancang bantuan kredit untuk petani. Pemerintah juga telah menyediakan kredit untuk petani tebu termasuk pabrik gula dan koperasi sebagai lembaga yang menerima uang (kredit). Petani tebu yang terikat urusan kredit sesuai dengan program pemerintah dikenal dengan petani tebu kredit. Sebagai konsekuensi dari terbatasnya jumlah modal dan persyaratan kredit yang rumit untuk petani, maka tidak semua petani tebu mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah ini. Mereka yang tidak mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah menggantungkan biaya produksi mereka pada modal pribadi atau meminjam dari rentenir. Petani tersebut dikenal sebagai petani tebu bebas.

Skema hubungan kontrak (kredit) antara pabrik gula dan petani tebu akan dijelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke penjelasan susunan biaya-biaya

untuk petani tebu. Pertama adalah bentuk hubungan antara pabrik gula dan petani tebu kredit. Dalam hal ini pemerintah menjembatani hubungan antara pabrik gula dan petani tebu melalui skema kredit. Melalui program akselerasi produksi, pemerintah menugaskan beberapa bank yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit bagi petani tebu. Pabrik gula dan koperasi membantu bank-bank yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit tersebut. Petani tebu dapat terlibat dan mendapatkan kredit dari pemerintah tersebut jika sudah mempunyai kontrak dengan pabrik gula ataupun koperasi dan sudah memberikan jaminan sebagai persyaratan dalam mendapatkan kredit. Jaminan yang diminta berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atau sertifikat tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa hanya petani yang relatif kaya yang mampu mengakses kredit ini. Petani miskin/petani gurem tidak akan bisa terlibat dalam program kredit ini karena mereka tidak punya jaminan. Petani yang terikat kontrak (kredit) dengan sistem ini akan mendapat beberapa keuntungan seperti pinjaman modal, pengawasan budidaya / produksi, bimbingan dan transfer teknologi. Tetapi secara praktek, hanya pinjaman modal saja yang diterima petani, hal-hal lain tidak pernah dilakukan. Setelah panen, tebu petani langsung diantar ke pabrik gula selanjutnya petani tebu mendapat bagi hasil gula menurut sistem bagi hasil yang telah disepakati. Kedua adalah hubungan antara pabrik gula dan petani tebu bebas. Pada bentuk hubungan ini, petani tebu bebas melakukan kontak langsung dengan pabrik gula tanpa campur tangan institusi atau lembaga lain (koperasi). Hal ini dikarenakan petani tebu bebas tidak terikat kontrak dengan skema kredit, sehingga mereka juga tidak pernah menerima bimbingan dan transfer teknologi dari pabrik gula. Seperti halnya petani tebu kredit, petani tebu bebas juga menerima bagi hasil gula dari kesepakatan awal dengan pabrik gula. Pada kenyataannya sangat sulit untuk petani tebu bebas menjual gulanya ke pabrik gula, sehingga mereka harus meminta bantuan pedagang perantara/tengkulak.

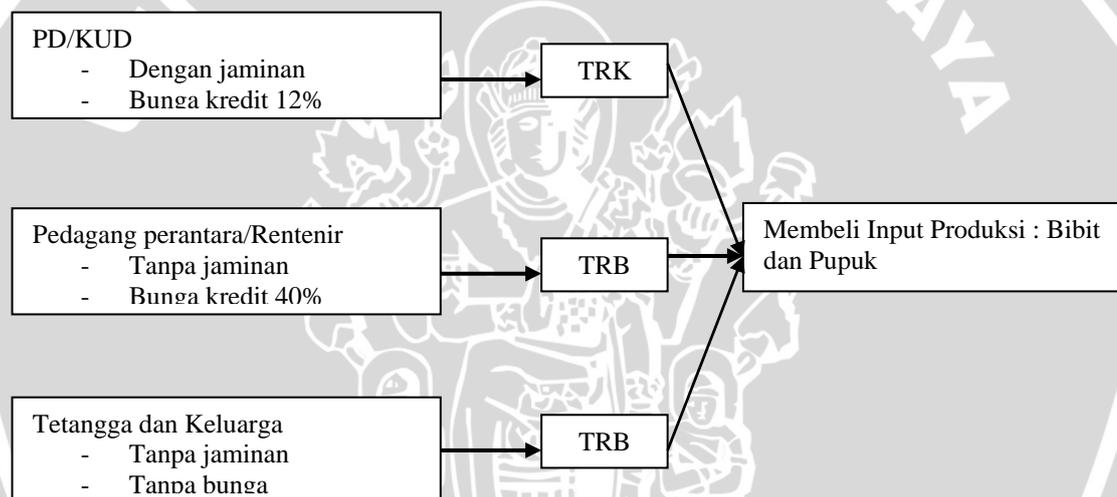


Gambar 7. Skema Hubungan antara Pabrik Gula dan Petani Tebu berdasarkan Jenis Petani

Sumber : Data Primer, 2006

Bisa dilihat pada gambar 8 , kredit untuk petani tebu bisa dikategorikan menjadi 3 jenis : (1) Kredit yang diperoleh dari koperasi atau pabrik gula, dimana kredit modal diperoleh dari program pemerintah yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk. Penyaluran KKP-TR (Kredit Ketahanan Pangan – Tebu Rakyat) untuk sekali musim tanam 2005/2006 disalurkan oleh tujuh bank dengan level kredit per hektarnya Rp 1.400.000 dalam bentuk natura dan Rp. 1.000.000 dalam bentuk tunai untuk biaya garap. Bank yang menentukan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pabrik gula dan koperasi untuk menyalurkan kreditnya. Koperasi atau pabrik gula yang memilih petani yang diberi hak untuk menerima kredit dan secara bersama-sama menyerahkan jaminan kreditnya. Kredit ini menggunakan patokan bunga 12 persen; (2) Kredit yang diperoleh dari pedagang perantara atau juga rentenir . Pedagang perantara juga merupakan pedagang tebu (banyak dari mereka juga menanam tebu), disamping mereka menyediakan kredit

mereka juga membeli tebu dari petani bebas. Kredit yang diperoleh dari pedagang perantara atau juga rentenir tidak memerlukan jaminan kredit, tetapi mereka mematok bunga sangat tinggi (40 persen/tahun). Petani yang memperoleh kredit dari pedagang perantara atau rentenir biasanya merasa sangat terbantu, karena pencairan kredit yang bisa sewaktu-waktu, walaupun dengan bunga yang sangat tinggi ; (3) Kredit yang diperoleh dari tetangga dan keluarga. Kredit jenis ini umumnya sangat kecil (< 1.000.000) dan tidak memerlukan jaminan dan bunga kredit, sehingga sebenarnya sangat menguntungkan bagi petani tebu. Tetapi umumnya, sumber kredit seperti ini sangat sulit ditemukan karena terbatasnya jumlah orang yang mampu menyediakan kredit seperti ini.



Gambar 8. Sumber Kredit Petani Tebu

Keterangan : PG/KUD : Pabrik Gula/ Koperasi Unit Desa
 TRK : Tebu Rakyat Kredit
 TRB : Tebu Rakyat Bebas

Sumber : Data primer, 2006

Penelitian ini mengungkap informasi tentang kredit petani tebu di Malang (Gambar 8). Dari hasil penelitian, petani contoh mengambil kredit dari Koperasi di Malang. Tidak seperti kredit lainnya, kredit untuk petani umumnya dan petani tebu khususnya tidak dicicil per bulan, melainkan dilakukan pembayaran setelah panen. Mereka baru mampu mengembalikan kredit setelah mereka menerima hasil panen, karena selama membudidayakan tanaman tebu mereka mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar dan tidak mendapatkan pemasukan sama sekali.

Hal ini juga terjadi pada petani bebas yang meminjam uang dari pedagang perantara/tengkulak.

Tabel 19. Kredit, Bunga Kredit, dan Modal Yang Diperoleh Petani Tebu per hektar

Uraian	PG Kreet Baru		PG Kebon Agung	
	Petani Kredit	Petani Bebas	Petani Kredit	Petani Bebas
Jumlah Kredit rata-rata (Rp)	Natura 1.400.000 Biaya Garap 1.000.000	4.000.000	Natura 1.400.000 Biaya Garap 1.000.000	4.000.000
Bunga Kredit/tahun	12%	40%	12%	40%
Keterlambatan Kredit (bulan)	2	-	1	-

Sumber : Data Primer, 2006 (diolah)

Kredit yang diperoleh petani kredit apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dari koperasi tidak dikurangi atau dipotong, rata-rata petani kredit dari PG Kreet Baru (57,14%) menguasai 0,5 – 1,5 ha lahan, sehingga dari tabel 19 dapat dilihat bahwa 42 petani memperoleh kredit Rp 1.400.000 untuk natura dan Rp 1.000.000 diberikan dalam biaya garap sesuai dengan luas lahannya. Begitu juga dengan kredit yang diperoleh petani bebas dari pedagang perantara/tengkulak, mereka semua menerima kredit sesuai dengan yang mereka minta. Petani tebu kredit dari PG. Kebon Agung (53,84%) rata-rata menguasai 0,5 – 1,5 ha lahan, sehingga dapat dilihat dari tabel 19 bahwa 39 petani memperoleh kredit Rp. 1.400.000 dalam bentuk natura dan Rp. 1.000.000 untuk uang tunai biaya garap sesuai luas lahannya. Petani tebu tidak diharuskan memberi komisi kepada koperasi atau pedagang perantara/tengkulak untuk dapat memperoleh kredit. Dari penelitian lebih lanjut, petani memegang peranan yang sangat penting pada proses transaksi dengan petani tebu. Contohnya dengan kredit, koperasi biasanya tidak meminta komisi, tetapi mereka membebani petani tebu dengan bunga yang sedikit lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Seperti halnya pada saat koperasi memberikan bantuan kepada petani tebu berupa bibit atau pupuk, biasanya tidak dilakukan secara transparan. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem kredit yang tersedia untuk petani tebu tidak diatur dengan baik. Sementara itu, fee yang dibayarkan oleh petani tebu kepada koperasi pada saat mereka mengajukan

kredit selalu dalam bentuk biaya administratif dan biaya notaris. Biaya administrasi besarnya beragam, berkisar antara Rp 15.000 dan apabila dengan biaya notaris besarnya menjadi berkisar Rp 25.000. Biaya administrasi dan biaya notaris tidak ditetapkan secara seragam untuk semua petani, sehingga bisa dikatakan bahwa biaya administratif dan biaya notaris adalah biaya yang ilegal dalam skema perkreditan. Menurut Williamson (1981), situasi seperti ini bisa disebut “perilaku oportunistis”, dimana seorang individu ataupun badan usaha berlaku tidak jujur dengan cara mengubah pilihan, memanipulasi data, mengacaukan informasi dan lain-lain.

Bunga kredit adalah isu yang sangat sensitif dalam sistem distribusi kredit untuk petani. Tidak seperti pelaku ekonomi lain yang secara langsung berinteraksi dengan bank untuk mendapat kredit, petani tebu harus menjalin kontrak dengan institusi lain yaitu koperasi untuk dapat memperoleh kredit sehingga petani tebu kredit sangat rentan terhadap tindakan penyimpangan bunga kredit. Pemerintah telah menetapkan bunga kredit yaitu 12 persen per tahun, tetapi banyak koperasi yang menetapkan bunga kredit lebih dari 12 persen, paling tinggi bunga kredit yang dipakai adalah 24 persen. Perbedaan suku bunga yang ditetapkan menjadi “penerimaan ilegal” bagi koperasi, dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan informasi, yang mana petani tebu tidak punya sarana untuk mengaksesnya. Hal ini juga bisa disebut “perilaku oportunistis”, dimana salah satu pihak mencoba untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak jujur dalam transaksi. Tetapi tampaknya petani tebu kredit lebih beruntung dibanding petani tebu bebas, karena petani tebu bebas memperoleh kredit dari pedagang perantara/tengkulak dengan suku bunga 40 persen per tahun. Dengan tingginya suku bunga ini, keuntungan yang diperoleh dari budidaya tebu berkurang sangat banyak hanya untuk membayar bunga kredit.

Pada saat mengajukan kredit, petani tebu kredit harus memberi jaminan untuk memperoleh kredit sebagai bagian dari aturan yang telah disepakati. Nilai jaminan akan menentukan banyaknya kredit yang akan diterima. Secara teknis, jaminan akan dikumpulkan oleh koperasi dan pabrik gula. Sebaliknya, petani tebu bebas tidak memerlukan jaminan untuk memperoleh kredit. Hubungan antara

petani tebu dan pedagang perantara/tengkulak telah terjalin selama beberapa tahun, sehingga sudah terbentuk suatu kepercayaan diantara mereka. Tetapi dalam prosesnya pedagang perantara/tengkulak juga meminta jaminan untuk kredit yang diberikannya, umumnya juga berupa surat-surat berharga (BPKB dan sertifikat tanah). Pencairan kredit bisa diperoleh kapanpun petani membutuhkan, tanpa harus menunggu beberapa hari seperti apabila mereka mengajukan kredit ke koperasi.

Beberapa petani tebu mengatakan bahwa sering terjadi keterlambatan dalam penyaluran kredit dari koperasi, sebaliknya kredit dari pedagang perantara/tengkulak selalu tepat waktu. Sehingga banyak petani tebu yang lebih memilih untuk mengajukan kredit kepada pedagang perantara/tengkulak (selain faktor tidak adanya jaminan), walaupun suku bunga kredit yang ditetapkan tinggi. Inilah yang menyebabkan beberapa petani tebu komplain produksi mereka tidak optimal karena keterlambatan penyaluran kredit. Pada PG Kreet Baru, terjadi keterlambatan selama 2 bulan, sedangkan di PG Kebon Agung terjadi keterlambatan penyaluran kredit selama 1 bulan. Terkadang petani tidak dapat memupuk tanah mereka pada saat periode sebelum tanam karena belum ada penyaluran kredit. Konsekuensi dari keterlambatan kredit ini sehingga pemupukan terlambat adalah kualitas tebu yang tidak optimal, yang mengurangi keuntungan yang diterima petani. Tidak ada alasan yang jelas keterlambatan realisasi kredit, tetapi alasan umum adalah pemerintah terlambat menyalurkan kredit pada bank yang ditunjuk, atau bank tersebut juga enggan untuk menyediakan kredit untuk petani karena insentif keuntungan yang diterima oleh bank lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan pada pelaku ekonomi lain atau sektor ekonomi lain.

6.2.2. Peranan Koperasi dan Pedagang Perantara/Tengkulak

Pada sektor pertanian ada banyak sekali organisasi yang didirikan oleh pemerintah bekerja sama dengan petani, dengan maksud untuk membantu produksi, distribusi dan pemasaran komoditas pertanian. Pada Industri gula, ada beberapa organisasi yang berkaitan langsung dengan petani tebu, seperti koperasi, Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), dan lain-lain. Organisasi tersebut berkaitan langsung dan tidak langsung dengan petani tebu pada beberapa macam aktivitas

didalamnya. Tetapi organisasi yang diharapkan mampu membantu petani tebu tidak bekerja selancar yang diharapkan. Banyak organisasi yang tidak berfungsi secara optimal, beberapa malahan bubar karena mereka tidak mampu memberikan kemudahan dan keuntungan buat petani. Kebanyakan petani tebu enggan terlibat dengan organisasi karena tidak jelas keuntungannya. Oleh karena itu, agar koperasi bisa berfungsi dengan baik, maka harus ada sedikitnya empat pihak yang harus diperhatikan dan dipenuhi : Anggota (petani tebu), konsumen, Pasar (input/output), dan institusi lain (Pabrik gula) (Lampiran 1).

Mayoritas petani tebu bukan merupakan anggota koperasi sebagai salah satu institusi yang ditunjuk untuk membantu petani tebu. Mayoritas petani tebu yang bukan anggota koperasi menyatakan bahwa tidak ada untungnya menjadi anggota koperasi, disamping itu juga karena tingginya iuran yang diminta. Bahkan ada juga kekerasan yang terjadi pada saat penyediaan “Kredit Ketahanan Pangan – Tebu Rakyat (KKP – TR)”, penyediaan input produksi usahatani, pada saat terbang – angkut, dan pada saat bagi hasil dari budidaya tebu yang didistribusikan oleh pabrik gula melalui koperasi.

Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai agen pemerintah untuk menyalurkan kredit untuk petani (melalui bank) karena keterbatasan pemerintah dalam menyalurkan kredit sendiri. Koperasi didirikan sebagai organisasi yang mengendalikan distribusi kredit karena diasumsikan koperasi lah yang sangat mengetahui kehidupan petani. Koperasi juga mempunyai bermacam-macam aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan petani tebu, contohnya, penjualan bibit atau pupuk, dan pengaturan penjualan tebu ke pabrik gula. Beberapa koperasi mewajibkan anggotanya untuk membeli bibit atau pupuk dan menjual tebunya ke koperasi. Koperasi mewajibkan anggota mereka untuk menjual tebunya ke koperasi karena koperasi membantu mereka mendapatkan Surat Perintah Tebang – Angkut (SPTA) sebagai jaminan bahwa pabrik gula akan menerima tebu mereka. Posisi koperasi dalam hal ini bukan sebagai pembeli tebu, melainkan memfasilitasi pertemuan antara petani tebu dan pabrik gula di dalam lingkup penjualan tebu.

Petani tebu kredit sebagai anggota dari koperasi menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima informasi dari koperasi, baik dari koperasi PG Kreet Baru maupun dari Koperasi PG Kebon Agung. Informasi yang dimaksud disini adalah informasi yang berkaitan dengan perluasan atau informasi yang berkaitan dengan proses produksi tebu. Koperasi biasanya hanya mengadakan pertemuan pada saat musim giling akan tiba yang mana koperasi akan menerangkan tentang mekanisme pemotongan dan manajemen, sistem bagi hasil, harga, dan lain-lain. Selain dari pada itu, koperasi hampir tidak pernah memberi tahu informasi kepada anggotanya.

Mayoritas anggota koperasi menyatakan bahwa keuntungan menjadi anggota koperasi hanya dalam hal kemudahan mendapatkan kredit. Mereka menyatakan bahwa apabila mereka menjadi anggota koperasi, informasi tentang kredit lebih awal diterima dan mereka mendapatkan prioritas dalam memperoleh kredit. Petani tebu kredit secara otomatis mendapatkan jaminan bahwa tebu mereka digiling di pabrik gula. Petani tebu bebas yang tidak terikat dalam skema kredit koperasi umumnya mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan pabrik gula dan memperoleh SPTA, karena pemberian SPTA diatur oleh koperasi dan PPL (Petugas Pelaksana Lapangan) dari pabrik gula itu sendiri. Sangat mustahil bagi petani tebu untuk memproses tebunya di pabrik gula apabila mereka tidak terlibat atau tergabung dalam skema kredit, satu-satunya pilihan hanya menjual tebu mereka ke pedagang perantara/tengkulak.

Petani tebu bebas umumnya menjalin hubungan dengan pedagang perantara/tengkulak untuk memuluskan jalan mereka dalam proses produksi dan pemasaran tebu. Pada umumnya, pedagang perantara/tengkulak mempunyai dua peranan penting : (1) Sebagai penyedia kredit; (2) Sebagai pembeli tebu. Petani tebu bebas menyatakan bahwa mereka menjalin hubungan dengan pedagang perantara/tengkulak pada saat musim tanam. Sebaliknya, petani tebu kredit menyatakan bahwa mereka tidak pernah berhubungan dengan pedagang perantara/tengkulak karena kredit dan penjualan tebu mereka telah di layani oleh koperasi.

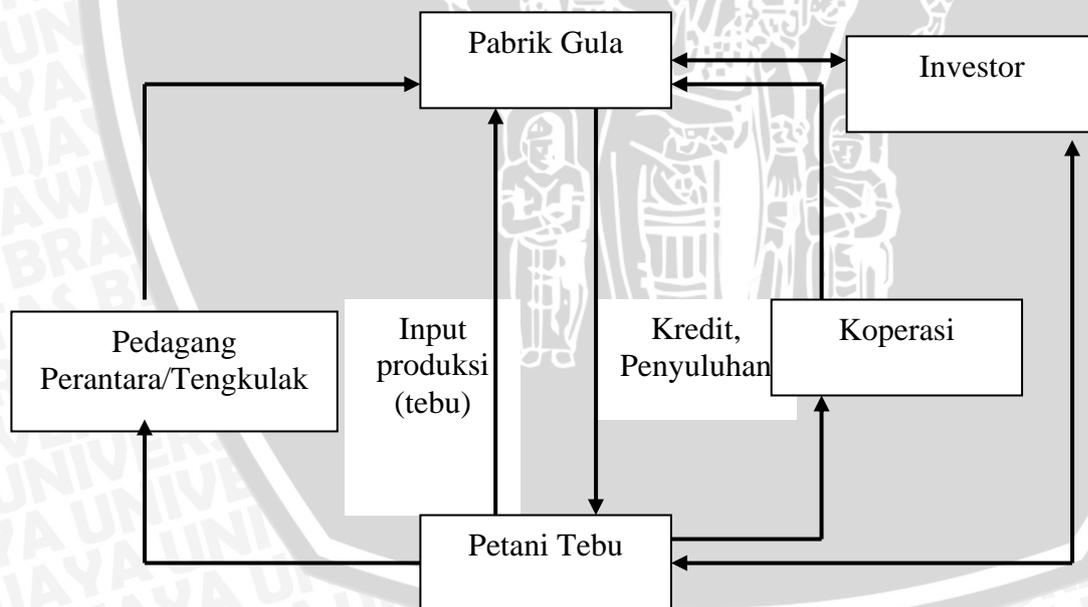
6.2.3. Susunan kontrak antara petani tebu dan pabrik gula

6.2.3.1. Sistem kontrak dan penetapan kandungan gula (rendemen)

Hubungan antara petani tebu dan pabrik gula merupakan topik yang sangat abadi pada sejarah industri gula di Indonesia, sayangnya hubungan ini tidak didasari rasa saling percaya. Di satu sisi, petani tebu menganggap pabrik gula tidak jujur dalam hal penghitungan kandungan gula (rendemen) dan berat tebu petani. Para pegawai pabrik gula juga dianggap telah mengeksploitasi petani tebu dengan menarik biaya tambahan yang tidak berguna. Di sisi lain, pabrik gula juga menganggap petani berbuat curang dengan melumuri tebu mereka dengan tanah sehingga beratnya meningkat. Budidaya yang dilakukan petani tebu juga masih tradisional sehingga kualitas tebu yang dihasilkan masih jauh dari standart praktis manajemen. Konsekuensi dari praktek yang menyimpang tersebut, pabrik gula tidak hanya mendapat kualitas tebu yang sangat rendah, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan mesin. Dilihat dari latar belakangnya, maka hubungan antara pabrik gula dan petani tebu diwarnai dengan ketidakpercayaan, kecurigaan terhadap satu sama lain. Hal ini sering menimbulkan konflik diantara petani tebu dan pabrik gula yang mengganggu proses distribusi produksi. Konflik ini bisa terjadi karena hakikat hubungan dari petani tebu dan pabrik gula adalah eksklusif terhadap satu sama lain. Contohnya apabila kita menaikkan porsi bagi hasil, akan mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian bagi salah satu pihak. Pada jangka waktu yang lama, tanpa perbaikan dan perubahan pada pola hubungan seperti ini akan sangat sulit untuk industri gula Indonesia maju.

Gambar 9, menerangkan pola kemitraan antara pabrik gula dan petani tebu. Gambar tersebut menunjukkan bahwa petani tebu dapat langsung menjalin hubungan dengan pabrik gula tanpa melalui perantara. Di satu sisi, pabrik gula memberi kredit (melalui program akselerasi produksi tebu yang dicanangkan pemerintah) dan penyuluhan sistem produksi yang baik bagi para petani tebu. Di sisi lain, petani tebu dapat langsung menjual tebu mereka ke pabrik gula apabila telah memenuhi prosedur, yaitu mendapat SPTA. Tetapi pada prakteknya, banyak petani tebu yang tidak dapat menjual tebu mereka langsung ke pabrik gula (umumnya petani tebu bebas). Pada kasus petani tebu bebas, biasanya mereka

menggunakan jasa pedagang perantara/tengkulak untuk menjual tebu mereka ke pabrik gula. Secara pasti, hal ini akan menurunkan penerimaan petani tebu dan meningkatkan besarnya biaya transaksi yang terjadi. Interaksi dan hubungan antara pabrik gula dan petani tebu masih dikombinasikan dengan pelaku ekonomi lain yaitu koperasi dan investor. Peranan koperasi adalah sebagai agen kredit melalui skema kredit pemerintah, sehingga hanya petani tebu kredit yang dapat menjalin hubungan dengan koperasi. Peranan dari investor sendiri adalah sebagai pembeli dari tebu bagian petani dari proses bagi hasil dengan pabrik gula dalam proses pelelangan. Oleh investor, produk gula akan dilelang lagi di PTPN (Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara). Apabila harga lelang lebih tinggi dari harga dasar gula yang ditentukan, maka keuntungan dibagi antara petani tebu (60%) dan investor (40%), tetapi apabila harga lelang lebih rendah daripada harga dasar gula (walaupun belum pernah terjadi sebelumnya) maka kerugian seutuhnya ditanggung oleh investor.



Gambar 9. Pola Hubungan antara Petani Tebu dan Pabrik Gula

Sumber : Data Primer, 2006

Pada kasus petani tebu kredit, umumnya petani tebu telah membuat kontrak dengan pabrik gula di awal masa budidayanya. Umumnya kontrak dibuat pada saat umur tanaman tebu 3 bulan dan SPTA akan diberikan pada saat tebu

sudah siap dipanen dan di bawa ke pabrik gula, hanya petani tebu bebas yang tidak terikat dengan pabrik gula. Para petani tebu bebas ini menjual tebu mereka dengan bermacam-macam cara, contohnya, bergabung dengan petani tebu yang mempunyai kontrak dengan pabrik gula atau menjual ke pedagang perantara/tengkulak. Bagi petani yang terikat kontrak dengan pabrik gula, proses yang harus dilalui yaitu Petugas Pelaksana Lapangan (PPL) dari pabrik gula datang ke petani tebu untuk mengundang mereka dalam proses pembuatan kontrak. Apabila petani tebu bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diminta, maka kontrak bisa dipenuhi dan diselesaikan. Pembuatan kontrak tidak membebani petani tebu dengan biaya apapun, oleh karena itu petani seharusnya mendapatkan keuntungan dari sistem seperti ini. Cara lain adalah petani tebu datang ke koperasi dan meminta bantuan kredit, yang artinya petani ini terikat kontrak dengan pabrik gula untuk menjual tebu mereka ke pabrik gula. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hampir semua petani tebu mendapat kontrak mereka atau SPTA dari pabrik gula, dan hanya beberapa dari mereka yang mendapatkannya melalui koperasi. Dengan sistem seperti ini, maka petani tebu kredit yang terikat kontrak dengan pabrik gula mempunyai jaminan yang lebih pasti dalam hal pemrosesan tebu mereka di pabrik gula dibanding petani tebu bebas yang terkadang menghadapi kendala dalam menjual tebu mereka. Umumnya petani tebu bebas mengatakan bahwa mereka sulit untuk mengakses pabrik gula karena mereka tidak terikat kontrak dengan pabrik gula untuk memproses tebu mereka.

Isu yang paling sensitif dalam hubungan petani tebu dan pabrik gula adalah penentuan kandungan gula (rendemen). Hanya para ahli yang dapat menentukan rendemen, karena dibutuhkan test laboratorium untuk mengetahui kandungan gula dalam tebu sehingga hanya staff ahli pabrik gula yang dapat menentukan rendemen. Sebagai konsekuensinya, sangat sulit bagi petani tebu untuk mengontrol proses penentuan rendemen. Petani tebu jelas tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai untuk menghitung rendemen mereka sendiri, sehingga mereka menganggap penghitungan rendemen sangat rawan untuk dimanipulasi oleh pabrik gula. Hampir semua petani menyatakan tidak

terlibat dalam penentuan rendemen karena mereka tidak punya keahlian dalam bidang tersebut, disamping itu pabrik gula juga sangat berhati-hati dalam hal penentuan rendemen ini. Nilai rendemen ditentukan pada saat tebu masuk ke pabrik gula, baik di PG. Kreet Baru maupun di PG. Kebon Agung tetapi sistem bagi hasil agak berbeda di kedua pabrik gula. Di Pabrik Gula Kreet Baru, rendemen ditentukan terlebih dahulu, tetapi penentuan rendemen dilakukan secara acak dan hasilnya digunakan sebagai basis untuk menilai rendemen pada periode tersebut. Pada Pabrik Gula Kebon Agung, rendemen juga ditentukan terlebih dahulu (65% bagian petani dan 35% bagian pabrik gula). Tes penentuan rendemen dilakukan 2 minggu sekali dan selanjutnya hasil tersebut dijadikan standart. Dengan metode semacam ini, petani yang kualitas tebunya jelek akan mendapat keuntungan, sedangkan petani yang kualitas tebunya baik akan mengalami kerugian.

Disamping rendemen, petani tebu juga sering terlibat konflik dengan pabrik gula tentang biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Sejauh ini, pabrik gula menggunakan 2 mekanisme untuk mengambil tebu dari petani, yaitu : (1) Biaya tenaga kerja dan biaya transportasi dikoordinir oleh pabrik gula, dan mekanisme pembayaran biaya-biaya tersebut akan dipotong dari penerimaan petani tebu (dari bagian sistem bagi hasil); (2) Petani mengatur sendiri biaya tenaga kerja dan biaya transportasi, sehingga pabrik gula hanya tinggal menerima tebu saja. Petani tebu yang terikat kontrak dengan pabrik gula (petani tebu kredit) diwajibkan untuk mengikuti model yang pertama, sementara petani tebu yang tidak terikat kontrak dengan pabrik gula (petani tebu bebas) umumnya mengatur proses tebang angkut secara pribadi. Pada posisi ini, petani tebu kredit seringkali tidak mengerti bahwa mereka mengeluarkan biaya tambahan untuk pabrik gula (biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya karung, dan biaya lain-lain); sehingga banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak dibebani dengan biaya-biaya, karena pabrik gula langsung memotong biaya-biaya tersebut dari penerimaan mereka pada saat bagi hasil, dan biasanya petani kredit tidak mengerti besarnya biaya riil yang mereka keluarkan, karena pabrik gula

menghitung secara keseluruhan. Dengan posisi seperti ini, manipulasi biaya sangat mungkin dilakukan oleh pabrik gula.

Dalam hal penyuluhan, umumnya petani tebu kredit di PG.Krebet Baru dan PG. Kebon Agung menyatakan bahwa pabrik gula memberikan penyuluhan kepada petani tebu kreditnya. Sementara petani tebu bebas menyatakan bahwa pabrik gula tidak pernah memberikan penyuluhan kepada mereka. Penemuan ini sangat masuk akal, mengingat petani tebu kredit lah yang terikat kontrak dengan pabrik gula, sehingga pabrik gula ingin memastikan bahwa tebu yang ditanam oleh petani kreditnya mempunyai kualitas dan produktivitas yang baik, sehingga diberikanlah penyuluhan agar target yang diharapkan dapat terealisasi. Tampaknya persoalan program penyuluhan ini masih sangat terbatas pada petani kredit saja, padahal faktanya adalah kelangsungan pabrik gula tergantung pada petani tebu baik itu yang kredit atau bebas.

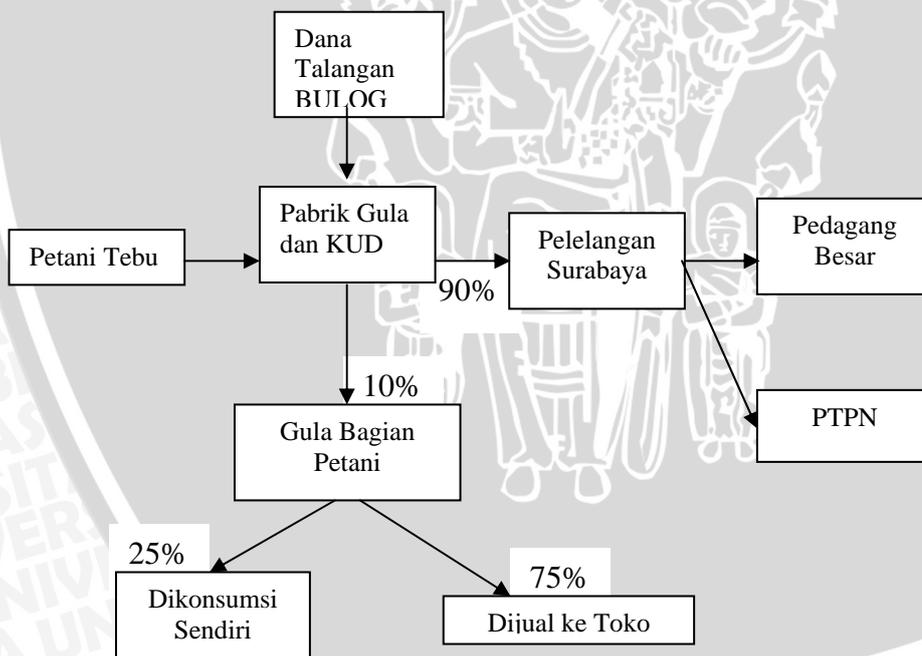
6.2.3.2. Sistem bagi hasil dan model pemasaran gula

Sistem bagi hasil adalah salah satu mekanisme pada hubungan kontrak antara pabrik gula dan petani tebu, disamping SIPRAB (sistem Penentuan Rendemen yang Adil dan Berimbang) dan SPT (Sistem Pembelian Tebu). Petani tebu tidak hanya menanam tebu saja, tetapi setelah mereka menyerahkan tebu mereka ke pabrik gula, petani tebu harus memikirkan tentang sistem bagi hasil dan tentang pemasaran gula. Dari kesepakatan yang telah dicapai, bagian petani adalah 65% dan pabrik gula 35% dari hasil tebu yang digiling. Umumnya para petani menyerahkan bagian mereka untuk dibeli oleh pabrik gula, tetapi beberapa dibawa pulang baik untuk dijual lagi atau untuk konsumsi pribadi. Sistem bagi hasil yang diperkenalkan oleh petani tebu sangat menarik untuk dianalisis karena dapat diketahui bagaimana sistem tersebut sebenarnya berjalan. Sama halnya dengan sistem marketing yang juga isu penting yang dihadapi oleh industri gula di Indonesia dan usaha-usaha juga telah dilakukan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada sejak 1969.

Proses pemasaran gula harus melalui beberapa prosedur (lampiran 2). Skenario pertama : Pabrik gula membeli gula petani dengan menggunakan dana talangan. Dana talangan ini bisa diperoleh dari investor atau dari pemerintah

melaui Perum Bulog. Harga jual bergantung dari kesepakatan yang dibuat oleh pabrik gula dan petani tebu. Selanjutnya pabrik gula menjual melalui lelang di PTPN (Perseroan Terbatas Perusahaan Negara). Apabila proses lelang berjalan lancar dan keuntungan berhasil didapat, maka keuntungan tersebut dibagi (dengan aturan tertentu) untuk mereka yang memberikan dana talangan. Skenario kedua : Investor membeli gula bagian petani pada harga yang telah disepakati.

Di daerah penelitian yaitu di Kabupaten Malang, Sistem pemasaran gula petani yaitu melalui koperasi. Pabrik gula mengumpulkan bagian gulanya ke koperasi dan setelah itu dijual lewat pelelangan di Surabaya. Sementara gula bagian petani, 75% dijual ke toko dan sisanya 25% dikonsumsi sendiri. Dengan pola seperti ini, kebanyakan petani tebu mengaku bahwa keuntungan yang didapat lebih tinggi dibanding dengan apabila dijual lewat pelelangan.



Gambar 10. Sistem Pemasaran Gula di Kabupaten Malang

Sumber : Data Primer, 2006

Pada saat gula di proses di pabrik gula, paling sedikit menghasilkan dua produk, yaitu gula dan molase. Bagi hasil gula didasarkan pada kesepakatan antara beberapa pihak, sementara bagi hasil molase ditentukan oleh pabrik gula

sendiri. Aturan yang umumnya diterapkan adalah untuk setiap 1 kwintal gula, petani akan mendapatkan 2,5 kg molase. Walaupun harga molase adalah sepersepuluh harga gula, tetapi jumlah ini cukup signifikan untuk meningkatkan pendapatan petani tebu. Hanya petani tebu kredit yang biasanya menerima bagi hasil molase. Hal ini dikarenakan petani tebu kredit telah membuat kontrak dengan pabrik gula atau koperasi, petani tebu kredit telah memperoleh informasi tentang sistem bagi hasil yang akan diterima. Situasi yang memprihatinkan dialami oleh petani tebu bebas karena hampir semua petani tebu bebas tidak pernah menerima bagi hasil molase. Ada dua skenario yang bisa menjelaskan apa yang terjadi : (1) Molase diambil oleh pedagang perantara/tengkulak (atau petani lain yang mempunyai SPTA) sebagai “ongkos” karena mereka telah membantu petani tebu lain memasukkan tebu ke pabrik gula; (2) Molase diambil oleh pegawai pabrik gula sebagai kompensasi dalam memberikan kesempatan untuk petani tebu bebas mengakses pabrik gula.

Petani tebu mendapat bagian 65 persen dari pabrik gula, tetapi petani tebu biasanya tidak mengambil semua bagian bagi hasilnya dalam bentuk gula. Kebanyakan petani memilih untuk menjual gulanya ke pabrik gula sehingga mereka mendapat uang tunai. Umumnya, petani mengaku kesulitan apabila mereka harus membawa semua gula mereka ke rumah, karena selain kesulitan tempat penyimpanan, mereka juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi dan kuli angkut. Dengan pertimbangan seperti ini, petani tebu lebih memilih untuk menjual gula mereka ke pabrik gula walaupun harga yang diterima lebih rendah dari harga pasar.

Petani tebu tidak melibatkan mediator untuk menjual bagian gula mereka. Petani tebu biasanya mempunyai jaringan dengan toko yang bersedia menerima gula mereka. Toko tempat para petani tebu menjual tebusnya biasanya berada di dekat rumah mereka. Hal ini berbeda dengan petani yang mempunyai jumlah gula yang sangat besar, mereka membutuhkan bantuan pelaku ekonomi lain untuk membantu menjual gula mereka. Umumnya petani tebu tidak pernah bekerja sama satu sama lain dalam menjual gula mereka. Mereka lebih memilih menjual gula mereka secara individu, padahal jika mereka mau menjual gula secara kolektif

maka harga yang ditawarkan lebih tinggi karena mempunyai posisi tawar lebih tinggi pula. Untuk jangka panjang, petani harus diberi saran agar menjual bagian gulanya secara kolektif atau melalui koperasi sehingga mendapatkan harga yang lebih tinggi.

6.3. Biaya Produksi dan Biaya Transaksi Pada Petani Tebu

Dari sudut pandang ilmu ekonomi kelembagaan, umumnya biaya yang timbul dari aktivitas ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya produksi (termasuk biaya provisi input) dan biaya transaksi (termasuk biaya pemasaran). Biaya produksi didefinisikan sebagai biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi, contohnya pembelian input dan biaya tenaga kerja. Biaya transaksi didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pelaku pada transaksi secara finansial baik yang eksplisit maupun implisit. Biaya transaksi diklasifikasikan menjadi 3 jenis, biaya transaksi pasar, biaya transaksi manajerial, dan biaya transaksi politik. Dengan melihat definisi dan jenisnya, maka bisa dikatakan bahwa kategori biaya transaksi lebih luas dari biaya produksi. Tidak seperti biaya produksi yang variabel dan proses secara kuantitatifnya relatif mudah untuk dihitung, biaya transaksi mempunyai variabel yang sangat kompleks untuk dirumuskan dan penghitungan secara kuantitatifnya sangat sulit dilakukan. Perhitungan biaya produksi dan biaya transaksi pada industri gula di Indonesia sangat sulit dilakukan dikarenakan biaya-biaya tersebut sangat tidak sistematis dan terlalu kompleks, sehingga sangat sulit untuk menentukan biaya tersebut secara jelas. Selain itu ada permasalahan antara biaya eksplisit dan biaya implisit Hal ini juga menjadi masalah dengan penghitungan modal usahatani, karena beberapa faktor seperti tenaga kerja keluarga dan biaya korbanan (opportunity cost) dari modal, bukan merupakan pengeluaran yang eksplisit atau nyata. Penentuan jam kerja dan memberikan nilai yang sesuai untuk jam kerja tersebut adalah teknik standar untuk menghitung tenaga kerja keluarga. Penentuan nilai yang sesuai untuk jam kerja petani juga mengalami masalah, petani kemungkinan menikmati penyuluhan yang diberikan atau mengalami biaya korbanan yang sangat kecil untuk waktu/jam kerja pada tahun tersebut. Salah satu

cara untuk memecahkan masalah tersebut yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini adalah dengan mengelompokkan biaya sesuai dengan masalah yang mempunyai relevansi signifikan. Biaya produksi maupun biaya transaksi dapat kedua-duanya terjadi pada (1) Sebagai biaya tetap atau biaya variable; (2) Sebagai biaya investasi atau biaya operasi; dan (3) Sebagai biaya langsung atau biaya korbanan.

6.3.1. Biaya Produksi Petani Tebu

Salah satu definisi produksi adalah segala aktifitas yang mengubah kegunaan faktor-faktor produksi menjadi output. Input yang biasanya dimasukkan adalah lahan, tenaga kerja dan modal. Biaya-biaya produksi yang biasanya dikeluarkan oleh petani tebu biasanya ada enam macam, yaitu: Upah tenaga kerja, Sewa traktor, Bibit, Pupuk, Sewa lahan, dan Irigasi.

Tabel 20. Variabel Biaya Produksi pada Petani Tebu (Bebas dan Kredit)

Variabel	Keterangan	Pengeluaran
Tenaga kerja	Biaya yang dikeluarkan oleh petani tebu untuk mempekerjakan buruh tani selama masa tanam	Implisit dan Eksplisit
Sewa Traktor	Biaya yang dikeluarkan oleh petani tebu untuk menyewa traktor, khususnya pada saat awal masa tanam untuk membajak sawah.	Eksplisit
Bibit	Biaya yang dikeluarkan oleh petani tebu untuk membeli bibit apabila mereka tidak menggunakan sistem ratoon (keprasan)	Eksplisit
Pupuk dan Pestisida	Biaya yang dikeluarkan oleh petani tebu untuk membeli pupuk dan pestisida selama masa tanam	Eksplisit
Sewa Lahan	Biaya yang dikeluarkan oleh petani tebu untuk menyewa lahan selama satu tahun (satu kali masa tanam)	Eksplisit
Irigasi	Biaya yang dikeluarkan oleh petani tebu untuk menyewa atau bergabung dengan fasilitas irigasi	Eksplisit

Sumber : Data Primer, 2006

6.3.2. Deskripsi Usahatani Tebu

Usahatani tebu yang ada di Desa Tlogowaru dan Desa Arjowinangun dapat digolongkan menjadi dua yaitu Tebu Rakyat Kemitraan (TRK/Kredit) dan

Tebu Rakyat Bebas (TRB/Bebas). Usahatani tebu yang diusahakan sebagian besar merupakan usahatani turun temurun yang diteruskan dari generasi ke generasi.

Tanaman tebu diusahakan pada lahan sawah dan lahan kering (tegal) dengan sistem ungaran dan sistem keprasan. Namun mayoritas petani saat penelitian berlangsung mengusahakan tebu di lahan kering (tegal) dengan sistem ungaran. Produktivitas tebu di lahan kering (tegal) mencapai 700-900 ku/ha per satu kali masa tanam.

Ada beberapa varietas yang digunakan oleh petani seperti Br 194, BZ 132, Triton, dan CU 617. Penggunaan masing-masing varietas tergantung dari kondisi lahan yang mereka miliki karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan untuk tiap-tiap kondisi lahan, seperti CU 617 karena mampu bertahan di lahan tandus, Br 194 karena cepat tumbuh dan menghasilkan rendemen yang tinggi, Triton hampir sama dengan Br 194 namun batang tebunya lemas. Jumlah bibit yang digunakan lahan tegal adalah 8-9 ton per hektar per satu musim tanam.

Jenis pupuk yang biasa digunakan oleh petani yaitu Urea dan ZA, sedangkan Kompos dan TSP hanya digunakan oleh sebagian kecil petani saja. Penggunaan pupuk Urea yang lebih banyak digunakan pada sistem ungaran yaitu pertamakali bibit ditanam dengan dosis pemberian 0,6-0,8 kg/leng karena pupuk ini lebih cepat diserap oleh tanah, mempercepat pertumbuhan, merangsang perbanyakan jumlah anakan. Penggunaan pupuk ZA lebih banyak digunakan untuk sistem keprasan yang berkisar antara 1 – 1,5 kg/leng dengan frekuensi pemberian 1 – 2 kali karena akan memberikan pengaruh yang baik terhadap bobot dan rendemen tebu yang dihasilkan serta tanaman tidak mudah roboh.

Penggunaan pestisida dapat dikatakan tidak pernah diberikan oleh petani karena sifat dari tebu sendiri yang jarang terkena hama dan penyakit. Cara manual yang dilakukan jika tanaman ini terserang hama dan penyakit adalah dengan meroges setiap kali akan melakukan pemupukan.

Kebutuhan tenaga kerja untuk usahatani tebu ini tidak mengalami kesulitan, karena permintaan jumlah tenaga kerja dipenuhi dari masyarakat setempat. Sebagian besar tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja pria

dengan sistem pengupahan borongan per leng yang nilai variasinya tidak jauh, dan dikonversikan ke dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK).

Tabel 21. Input-Output Usahatani tebu di Desa Tlogowaru di bawah wilayah kerja PG Krebbe Baru dan Desa Arjowinangun di bawah wilayah kerja PG Kebon Agung

Input – Output	Keterangan	Kuantitas	
		Petani Kredit	Petani Bebas
Input Treadable	Pupuk Urea	7 Ku	7 - 8 Ku
	Pupuk Za	9 Ku	9 Ku
Input Domestik	Bibit	9 ton	9 ton
	Persiapan Lahan	4 HOK	4 HOK
	Sewa Lahan	1 Ha	1 Ha
	Pajak	-	-
	Irigasi	-	-
	Sewa Traktor	-	-
	Tenaga Kerja		
	• Gulud	20 HOK	10 – 20 HOK
	• Penanaman	4 HOK	4 HOK
	• Penyiangan	4 HOK	4 HOK
	• Roges I	16 HOK	16 HOK
• Pupuk	10 HOK	10 HOK	
• Roges II	10 HOK	10 HOK	
• Pupuk	10 HOK	10 HOK	
Tebang Angkut	Borongan	Borongan	
Output	• Rendemen 4,40 % untuk PG Krebbe Baru dan 4,9 % untuk PG Kebon Agung		
	• Produksi Tebu/ha=	900 ku tebu	900 ku tebu
	• Bagi Hasil 65:35		
	• Gula Petani PG Krebbe Baru	25,74 ku	25,74 ku
	• Gula Petani PG Kebon Agung	28,665 ku	28,665 ku
• Tetes			

Sumber : Data Primer, 2006

Output yang dihasilkan oleh usahatani tebu di Desa Tlogowaru dan Desa Arjowinangun adalah tebu dengan produktivitas rata-rata 900 ku per hektar. Kandungan rendemen yang dikeluarkan oleh PG Krebbe Baru dan PG Kebon Agung adalah masing-masing 4,40% dan 4,90% dengan sistem bagi hasil 65% bagian petani dan 35% bagian pabrik yang diasumsikan sebagai biaya proses

produksi tebu menjadi gula. Selain gula, petani juga mendapat tetes dari produksi tebu mereka, biasanya tetes tidak diberikan sebagai natura petani tetapi PG mengganti tetes petani dengan uang sejumlah nilai tetes.

6.3.3. Analisis Pendapatan Usahatani

Biaya usahatani dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen yaitu biaya individu dan biaya sosial. Biaya individu merupakan biaya riil yang dikenakan kepada petani yang diperoleh dari harga pasar di tingkat petani. Sedangkan biaya sosial adalah biaya yang diperoleh dari harga yang terdapat dalam perekonomian apabila ada keseimbangan pada kondisi pasar sempurna (Gittinger, 1986). Karena dalam kondisi pasar sesungguhnya, persaingan sempurna sulit ditemukan, maka akan terdapat perbedaan dalam perhitungan harga riil dengan harga sosial.

1 . Bibit

Harga bibit yang dikenakan kepada petani pada saat penelitian dilakukan adalah sebesar Rp 22.000 - Rp 25.000 per kuintalnya. Bibit yang ditanam oleh petani setempat adalah jenis BR. Bibit ini dibeli petani dari pabrik gula atau instansi pemerintah yang menyediakan bibit ini, juga bisa diperoleh dari petani lain yang melakukan pembibitan. Untuk petani kredit harga bibit yang dipakai adalah Rp 22.000 per kuintal, sedangkan untuk petani bebas Rp. 25.000 per kuintal

Harga sosial benih adalah sama dengan harga pasar/individu yaitu sebesar Rp 22.000 untuk petani kredit dan Rp 25.000 untuk petani bebas. Hal ini dikarenakan bibit yang ditanam petani merupakan bibit yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.

2 . Pupuk Urea

Harga pasar pupuk urea yang diterima petani di daerah penelitian sebesar Rp 120.000/ku. Sementara harga sosial pupuk urea dihitung berdasarkan f.o.b. dikurangi biaya asuransi dan muatan pada nilai tukar bayangan karena pupuk urea merupakan komoditi ekspor. Dari perhitungan harga sosial pupuk urea sebesar Rp 112.655 /ku

Perbedaan harga pasar dan harga sosial pupuk urea ini menandakan bahwa terdapat penyimpangan pasar dalam perdagangan pupuk urea. Penyimpangan ini dapat dikarenakan tataniaga pupuk urea memiliki rantai pemasaran yang panjang dari pabrik ke agen, sub agen, pengecer dan terakhir ke petani. Masing-masing rantai pemasaran ini tentunya mengambil margin penjualan sehingga harga yang sampai di petani menjadi tinggi. Untuk menganalisis saluran pemasaran ini diperlukan penelitian lebih lanjut.

3. Pupuk ZA

Pemakaian pupuk ZA sebagai komplemen terhadap pupuk urea mengakibatkan penggunaan ZA sebanding dengan pemakaian urea yaitu sebanyak 7 - 9 kuintal per hektar per musim tanam. Dari perhitungan harga pupuk ZA diperoleh harga individu sebesar Rp 105.000,00. Sementara harga sosial pupuk ZA dihitung dari harga c.i.f. ditambah biaya asuransi dan muatan dalam nilai tukar rupiah bayangan. Harga sosial pupuk ZA diperoleh sebesar Rp 80.781/ku perhitungan harga sosial pupuk ZA berdasarkan harga c.i.f. karena pupuk ZA merupakan komoditas impor dan kebutuhan terhadap pupuk ZA masih dipenuhi dari impor.

4 . Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sumber daya domestik karena tersedia di daerah penelitian dan bukan merupakan sumber daya langka. Tenaga kerja di daerah penelitian juga tidak memenuhi kriteria sebagai faktor tradable seperti yang dikemukakan oleh Gittinger (1986) antara lain :

1. Sekarang diimpor atau diekspor
2. Bersifat pengganti yang erat hubungannya dengan jenis lain yang diimpor atau diekspor, atau
3. Jenis barang atau jasa yang tidak memenuhi syarat diatas, oleh karena adanya Kebijakan dari pihak pemerintah yang menghindari diimpor ataupun diekspornya jenis barang dan jasa tersebut, kebijakan ini entah berupa pembatasan atau pelarangan atau penetapan bea masuk atau berupa subsidi kepada produsen dalam negeri yang agak tinggi, dan lain sebagainya.

Kebutuhan tenaga kerja untuk usahatani padi di daerah penelitian dapat dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja di daerah penelitian itu sendiri, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja untuk usahatani padi dapat dipenuhi oleh penawaran tenaga kerja di daerah setempat. Oleh sebab itu harga sosial tenaga kerja sama dengan harga individunya. Harga individu maupun harga sosial tenaga kerja di daerah penelitian pria sebesar Rp 10.000,00 per hari dan upah untuk wanita Rp 7.500,00 per hari.

5. Sewa Lahan

Biaya sewa lahan di daerah penelitian memiliki nilai yang sangat kompetitif bila dibandingkan dengan biaya sewa tanah di tempat lain yang lebih mahal. Artinya, sewa tanah untuk usahatani padi di daerah penelitian dapat digunakan sebagai nilai sosialnya.

Sewa lahan untuk usahatani padi per hektar per musim tanam di daerah penelitian adalah Rp 4.500.000 untuk tanah tegal dan Rp 9.000.000 untuk tanah sawah. Dengan demikian nilai sewa tanah tersebut disamping dipakai sebagai biaya individu/pasar juga dipakai sebagai biaya sosialnya.

6. Irigasi dan Traktor

Biaya irigasi merupakan biaya yang dibebankan kepada petani atas jasa distribusi air yang dilakukan oleh jogotirto. Biaya irigasi dikeluarkan oleh petani setiap satu musim tanam. Sementara biaya traktor merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa traktor pada saat pembukaan dan pengolahan lahan.

Biaya irigasi per hektar selama satu musim tanam adalah sebesar Rp 200.000, sementara biaya sewa traktor per hektarnya untuk sekali pengolahan sebesar Rp 1.100.000. Biaya sosial irigasi dan biaya sosial traktor dihitung sesuai dengan biaya riil yang ditanggung oleh petani yaitu Rp 200.000 untuk biaya sosial irigasi dan Rp 1.100.000 untuk biaya sosial traktor.

7. Tebang Angkut

Tebang angkut juga digolongkan sebagai biaya sumber daya domestik karena tebang angkut adalah biaya yang dibebankan petani untuk menebang dan mengangkut tebunya dari lahan ke pabrik gula. Biasanya dalam proses tebang angkut petani kredit khususnya mendapat subsidi dari pabrik gula. Biaya untuk

tebang angkut yang dibebankan kepada petani berbeda-beda. Untuk petani kredit PG Kreet Baru biaya tebang angkutnya Rp 2.961.840; untuk petani kredit PG Kebon Agung biaya tebang angkutnya sebesar Rp 2.781.840, jumlah ini lebih rendah dibanding petani kredit PG Kreet Baru dikarenakan pihak PG Kebon Agung mensubsidi biaya tebang angkut petani kreditnya; untuk petani bebas baik di PG Kreet Baru maupun PG Kebon Agung dikenakan biaya tebang angkut sebesar Rp 4.000.000

6.3.4. Nilai Tukar Sosial

Nilai tukar sosial atau nilai tukar bayangan merupakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akibat perdagangan internasional. Artinya, nilai tukar sosial dihitung berdasarkan penerimaan dan pengeluaran negara dalam perdagangan internasional. Nilai tukar sosial dihitung dari rasio standar konversi faktor terhadap nilai tukar resmi. Standar Konversi Faktor (SKF) sendiri merupakan jumlah antara selisih total penerimaan ekspor terhadap pajak ekspor dan selisih total pembelanjaan impor terhadap pajak impor. Standar Konversi Faktor (SKF) terhadap nilai tukar di Indonesia adalah berkisar antara 98% - 99%, sehingga diasumsikan bahwa harga sosial nilai tukar antara SER (Shadow Exchange Rate) di Indonesia sama dengan nilai tukar resmi.

Dalam analisis anggaran usahatani menurut harga sosial dihitung berdasarkan nilai tukar bayangan/Shadow Exchange Rate (SER). Nilai tuka resmi (NTR) sendiri diambil dari kurs tengah atau rata-rata nilai tukar yairu sebesar Rp 9000,- (Bank Indonesia, September 2006), sehingga Shadow Exchange Rate (SER) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$SER = \frac{NTR}{SKF} \text{ dimana}$$

$$SKF = \frac{X + M}{(X - TE) + (M + TM)}$$

Keterangan :

- NTR = Nilai Tukar Resmi
- SKF = Standart Konversi Faktor
- X = Total Ekspor

M = Total Impor

TE = Total Pajak Ekspor

TM = Total Pajak Impor

Dari rumus diatas dapat ditentukan bahwa nilai Shadow Exchange Rate (SER) sebesar Rp 8940,98,- (Lampiran 4)

6.3.5. Analisis Pendapatan Usahatani Petani Tebu Kelurahan Tlogowaru di bawah PG. Krebet Baru dan Petani Tebu Kelurahan Arjowinangun di bawah PG. Kebon Agung

Analisis biaya, penerimaan, dan pendapatan digunakan untuk menghitung besarnya imbalan yang diterima dari usahatani tebu yang dilakukan oleh petani bebas dan petani kredit. Melalui analisis inilah nantinya akan diketahui apakah kegiatan usahatani tebu antara petani bebas dan kredit sama atau berbeda. Input yang digunakan dalam usahatani tebu kredit dan bebas di daerah penelitian meliputi: lahan, pupuk Za, pupuk Urea, bibit, dan tenaga kerja baik itu manusia maupun ternak.

Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani tebu di daerah penelitian adalah tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita. Dalam melakukan usahatani tebu upah yang diperoleh setiap harinya untuk pria sebesar Rp 10.000,00 per hari dan upah untuk wanita Rp 7.500,00 per hari, dengan jam kerja mulai pukul 06.30 – 10.30 WIB. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja pria adalah sebagai berikut : persiapan lahan, pembuatan gulud, tebang. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja pria dan wanita adalah: penanaman, penyiangan, pemupukan, roges awal, dan roges akhir.

Bibit yang digunakan oleh petani di daerah penelitian sebagian kecil diperoleh dari pabrik gula baik PG. Krebet Baru maupun PG. Kebon Agung dan yang lainnya dibeli dari petani di daerah sekitar yang menjual bibit tebu. Harga bibit per kuintal mencapai Rp 21.500,00 sampai dengan Rp 25.000,00 tergantung pada jenis bibit itu sendiri. Petani kredit pada umumnya membeli bibit sendiri tidak mengambil dari PG. Krebet Baru maupun PG. Kebon Agung, dikarenakan akan terlalu lama jika melalui Pabrik gula, tetapi dengan ketentuan petani harus meminta ijin dulu kepada Pabrik gula.

Pupuk Za yang digunakan di daerah penelitian diperoleh dari pinjaman PG Kreet Baru maupun PG. Kebon Agung bagi petani kredit dan bagi petani bebas diperoleh dari kios-kios pertanian yang ada di daerah sekitar. Untuk harga pupuk Za berbeda antara petani kredit dan petani bebas, untuk petani kredit harga pupuk Za per kuintalnya mencapai Rp 105.000,00 sedangkan petani bebas mencapai Rp 160.000,00 per kuintalnya. Perbedaan harga pupuk ini dikarenakan petani kredit pupuknya sudah disubsidi oleh pemerintah, sedangkan petani bebas tidak. Dosis yang digunakan untuk pupuk Za ini per hektarnya 8-12 ku/ha. Untuk petani kredit, rata-rata penggunaan pupuk Za ini mencapai 9 ku/ha sedangkan untuk petani bebas rata-rata penggunaan pupuknya 9 ku/ha.

Selain menggunakan pupuk Za dalam usahatani tebu menggunakan pupuk urea. Di daerah penelitian pupuk urea untuk petani kredit diperoleh dari PG. Kreet Baru dan PG. Kebon Agung sebagai pinjaman, sedangkan petani bebas memperolehnya dari kios-kios pertanian yang ada di daerah sekitar. Harga yang diperoleh petani kredit untuk pupuk urea adalah Rp 120.000,00 per kuintal dan untuk petani bebas Rp 140.000,00 per kuintal. Dosis rata-rata penggunaan pupuk urea adalah 7 ku/ha.

Hasil dari petani tebu kredit semuanya dijual ke PG. Kreet Baru maupun PG. Kebon Agung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sedangkan hasil dari usahatani tebu petani bebas dijual ke PG. Kreet Baru maupun PG. Kebon Agung atau ke pabrik gula yang lain maupun ke pedagang perantara/tengkulak. Pendapatan usahatani yang diperoleh dari usahatani tebu merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya total yang dikeluarkan selama satu kali proses produksi. Penerimaan usahatani tebu merupakan besarnya produksi yang dihasilkan dan dinyatakan dalam rupiah, sedangkan biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Tingginya penerimaan petani disertai dengan biaya produksi yang rendah akan memberikan tingkat pendapatan yang lebih besar. Biaya produksi merupakan penambahan dari seluruh komponen biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Biaya-biaya produksi itu meliputi biaya tenaga kerja, biaya sewa dan pajak.

Penerimaan yang diterima petani tebu kredit adalah nilai gula, nilai tetes, pembagian gula, bantuan peningkatan mutu tebunya, dan subsidi angkutan. Sedangkan penerimaan petani tebu bebas meliputi dua macam, yaitu : pertama mereka yang menjual tebunya ke pabrik gula akan mendapatkan nilai gula dan tetes, sedangkan yang kedua adalah petani yang menjual tebunya ke tengkulak atau penebas maka akan memperoleh hasil tebasan yang tentunya sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang menjual dan pembeli.

Dari perhitungan anggaran usahatani tebu di Desa Tlogowaru musim Juli 2006 – Desember 2006 diperoleh tingkat pendapatan pada masing-masing harga yaitu harga individu dan harga sosial. Perolehan nominal pendapatan usahatani berdasarkan harga individu dan harga sosial dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Penerimaan, Total Biaya Produksi, dan Pendapatan Usahatani Tebu Petani Kredit dan Petani Bebas di Desa Tlogowaru pada Harga Individu dan Harga Sosial

Petani Kredit		
Input – Output	Harga Individu	Harga Sosial
Penerimaan	Rp. 17.556.300	Rp. 13.150.436
Total Biaya Produksi	Rp. 16.741.840	Rp. 16.462.454
Pendapatan	Rp. 814.460	Rp. - 3.312.015
Petani Bebas		
Input – Output	Harga Individu	Harga Sosial
Penerimaan	Rp. 17.556.300	Rp. 13.150.436
Total Biaya Produksi	Rp. 18.525.000	Rp. 17.150.614
Pendapatan	Rp. - 968.700	Rp. - 4.000.178

Sumber : Data Primer, 2006

Dari perhitungan anggaran usahatani tebu di Desa Arjowinangun musim Juli 2006 – Desember 2006 diperoleh tingkat pendapatan pada masing-masing harga yaitu harga individu dan harga sosial. Perolehan nominal pendapatan usahatani berdasarkan harga individu dan harga sosial dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 23. Penerimaan, Total Biaya Produksi, dan Pendapatan Usahatani Tebu Petani Kredit dan Petani Bebas di Desa Arjowinangun pada Harga Individu dan Harga Sosial

Petani Kredit			
Input – Output	Harga Individu		Harga Sosial
Penerimaan	Rp.	19.396.800	Rp. 14.463.269
Total Biaya Produksi	Rp.	16.516.840	Rp. 16.268.000,5
Pendapatan	Rp.	2.852.960	Rp. -1.804.731,5
Petani Bebas			
Input – Output	Harga Individu		Harga Sosial
Penerimaan	Rp.	19.396.800	Rp. 14.463.269
Total Biaya Produksi	Rp.	18.500.000	Rp. 17.736.160,5
Pendapatan	Rp.	896.800	Rp. - 3.272.891,5

Sumber : Data Primer, 2006

6.3.6. Analisis Efisiensi Usahatani Tebu dengan Metode Matrik Analisis Kebijakan

Setelah dilakukan analisis secara finansial dan social usahatani tebu yang meliputi total penerimaan, total biaya dan profit maka untuk selanjutnya dikelompokkan menjadi komponen penerimaan (revenue), input treadable, faktor domestic dan profit untuk kemudian dibuat dalam matriks analisis kebijakan (PAM).

Matriks Analisis Kebijakan (PAM) usahatani tebu disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 24. Matriks Analisis Kebijakan (PAM) Usahatani Tebu Satu Masa Tanam Per Hektar Tahun 2005/2006

Analisis	Penerimaan	Biaya		Profit
		Input Treadable	Faktor Domestik	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Usahatani Tebu Petani Kredit PG Krebet Baru				
Harga Pasar	17.556.840	1.785.000	14.956.840	814.460
Harga Sosial	13.150.436	1.505.614	14.876.840	- 3.312.015
Selisih	4.406.404	279.386	80.000	4.046.478
Usahatani Tebu Petani Bebas PG Krebet Baru				
Harga Pasar	17.556.300	2.280.000	16.245.000	- 968.700
Harga Sosial	13.150.436	1.505.614	15.565.000	- 3.920.178
Selisih	4.405.864	774.386	80.000	2.951.478
Usahatani Tebu Petani Kredit PG Kebon Agung				
Harga Pasar	19.396.800	1.740.000	14.776.840	2.852.960
Harga Sosial	14.463.269	1.491.160,5	14.696.840	- 1.742.731,5
Selisih	4.932.731	248.839,5	80.000	4.577.691,5
Usahatani Tebu Petani Bebas PG Kebon Agung				
Harga Pasar	19.396.800	2.255.000	16.245.000	896.800
Harga Sosial	14.463.269	1.491.160,5	16.165.000	- 3.192.891,5
Selisih	4.933.531	763.839,5	80.000	4.089.691,5

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Pada matriks pada tabel 24 dapat dilihat bahwa penerimaan usahatani tebu per hektar yang dihitung pada harga private adalah Rp 17.556.840; Rp 17.556.300; Rp 19.396.800; Rp 19.396.800, sekitar lebih tinggi 32 % dari nilai sosialnya yaitu Rp 13.150.436; Rp 13.150.436; Rp 14.463.269; Rp 14.463.269. Output transfer per hektar yaitu Rp 4.406.404; Rp 4.405.864; Rp 4.932.731; Rp 4.933.531 disebabkan oleh kebijakan *specific import tariff* sebesar Rp 700/kg gula atau setara dengan tarif sebesar 32%.

Biaya input treadable (pupuk Urea dan pupuk Za) pada tabel 24 di tingkat harga private (Rp 1.785.000; Rp 2.280.000; Rp 1.740.000; Rp 2.255.000) lebih besar daripada biaya input treadable pada harga sosial (Rp 1.505.614; Rp 1.505.614; Rp 1.491.160,5; Rp 1.491.160,5) seluruh transfer positif input treadable disebabkan oleh pajak dan kebijakan pengurangan subsidi pupuk sebesar 20 – 50 % yang dilakukan pemerintah pada tahun 2004. Transfer faktor domestik sebesar Rp 80.000 timbul akibat kebijakan pajak yang dibebankan kepada usahatani yaitu pajak tanah.

Transfer bersih (profit) dari usahatani tebu diatas menunjukkan bahwa sistem usahatani tebu di Kabupaten Malang harus disubsidi dan diproteksi oleh pemerintah sebesar Rp 4.046.478; Rp 2.951.478; Rp 4.577.691,5; Rp 4.089.691,5 apabila ingin menguntungkan dan bisa mempunyai keunggulan komparatif.

6.3.6.1. Analisis Keunggulan Komparatif

Pemanfaatan sumberdaya ditinjau dari sudut pembangunan ekonomi secara keseluruhan (makro) selain memperhitungkan keuntungan secara individual juga harus memperhitungkan keuntungan secara makro atau secara sosial. Keunggulan komparatif bertujuan untuk mengukur keuntungan atau manfaat secara makro (sosial) yang dilihat dari sisi konsumen (masyarakat). Keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian dalam keadaan seimbang dan didekati dengan harga bayangan (“shadow price”).

Analisis terhadap tingkat keunggulan komparatif usahatani tebu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah akan lebih baik jika memantapkan produksi gula pasir sebagai output usahatani tebu dengan kata lain memproduksi sendiri yang berarti jika diukur secara ekonomi usahatani tersebut efisien dalam penggunaan

sumberdaya nasional atau lebih baik mengimpor karena telah terjadi pemborosan dalam sumberdaya nasional. Analisis ini sangat penting mengingat pemerintah masih menerapkan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik akan komoditi gula pasir sebagai output dari usahatani tebu. Walaupun dalam jangka pendek kebijakan ini menguntungkan namun tidaklah bijaksana karena didasari tiga alasan utama, yaitu :

1. Keperluan gula Indonesia sebagai output dari usahatani tebu relatif besar dan dapat mempengaruhi harga gula dunia.
2. Pasar gula dunia tidak stabil dan harga gula cenderung meningkat dalam jangka panjang jika semua kesepakatan GATT/WTO diimplementasikan secara efektif. Sementara Indonesia berkepentingan menciptakan pasar gula yang stabil dengan harga yang terjangkau rakyat karena merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok.
3. Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan industri dalam negerinya.

Hasil matriks analisis kebijakan (PAM) menunjukkan bahwa pada nilai tukar rupiah sebesar Rp 9000, dan tingkat suku bunga 12 % per tahun serta “shadow exchange rate” sebesar Rp 8940,98 perusahaan tebu tidak efisien dalam penggunaan sumber daya ekonomi secara makro. Hal ini ditunjukkan dari nilai profit sosial yang lebih kecil dari nol (< 0) yang artinya usahatani ini tidak akan bertahan tanpa bantuan dari pemerintah.

Dari hasil matriks analisis kebijakan (PAM) diperoleh nilai biaya sumberdaya domestik (DRC) usahatani tebu secara keseluruhan lebih besar dari satu (> 1), artinya usahatani ini tidak mempunyai efisiensi secara ekonomi dalam pengalokasian sumberdaya atau tidak memiliki keunggulan komparatif dan akan lebih baik melakukan impor daripada memproduksi di dalam negeri. Suatu aktivitas dikatakan efisien secara ekonomi bila nilai sumberdaya domestiknya (DRC) lebih kecil dari satu ($DRC < 1$) dan jika nilainya lebih besar dari satu berarti terjadi pemborosan sumberdaya pada aktivitas ekonomi atau usaha tersebut, sedangkan bila sama dengan satu ($= 1$) berarti netral. Nilai biaya sumberdaya domestik (DRC) berbanding terbalik dengan nilai profit sosial, semakin kecil nilai biaya sumberdaya domestiknya (DRC) akan semakin besar profit sosial yang diperoleh. Analisis keunggulan komparatif

menunjukkan bahwa usahatani tebu ungaran baik petani kredit maupun petani bebas di lahan tegal tidak komparatif. Hal ini berdasarkan nilai sumberdaya domestik yang rata-rata lebih besar dari 1. Untuk petani kredit PG Kreet Baru sebesar 1,277; untuk petani bebas PG Kreet Baru sebesar 1,344; untuk petani kredit PG Kebon Agung sebesar 1,132; untuk petani bebas PG Kebon Agung sebesar 1,25. Untuk mendapatkan tambahan keuntungan atau menghemat devisa sebesar 1 US \$ (“shadow exchange rate” sebesar Rp 8940,98), diperlukan pengorbanan masing-masing sebesar 1,277 US \$ atau Rp 11.417,63 ; 1,345 US \$ atau Rp 12.016,67; 1,132 US \$ atau Rp 10.121,18 dan 1,25 US \$ atau Rp 11.176,22 untuk perusahaan tebu ungaran di lahan tegal.

Perbedaan nilai pada petani kredit dan bebas pada dua pabrik gula tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan manajemen dan kebijakan masing-masing pabrik gula, dimana PG Kebon Agung lebih sering mengeluarkan rendemen yang nilainya lebih tinggi daripada PG Kreet Baru, sehingga keuntungan yang didapat petani yang bernaung dibawah manajemen PG Kebon Agung lebih tinggi dibanding PG Kreet Baru.

Tabel 25. Hasil Analisis Keunggulan Komparatif Usahatani Tebu Satu Masa Tanam Per Hektar Tahun 2005/2006

Kriteria Pengukuran	Matriks Analisis Kebijakan (PAM)			
	PG Kreet Baru		PG Kebon Agung	
	Petani Kredit	Petani Bebas	Petani Kredit	Petani Bebas
Profit Sosial	- 3.312.015	- 4.000.178	- 1.804.731,5	- 3.272.891,5
DRC (Ratio)	1,277	1,345	1,132	1,25
DRC (Rp)	11.417,63	12.016,67	10.121,18	11.176,22

Keterangan : Nilai Profit Sosial dinyatakan dalam jutaan rupiah

DRC dinyatakan dalam ratio dan rupiah

Keunggulan komparatif dari suatu komoditas dapat juga dinyatakan dengan membandingkan harga perbatasan (“border price”) dengan harga sosial (“opportunity cost”). Jika harga sosial (“opportunity cost”) lebih rendah dari harga batas (“border price”) maka komoditas tersebut dikatakan mempunyai keunggulan komparatif. Tabel 26 berikut ini menyajikan perbandingan antara harga sosial tebu (setelah dikonversi ke dalam gula pasir) per kilogram dalam rupiah dibandingkan dengan tingkat border price yang relevan.

Tabel 26. Perbandingan Harga Sosial Tebu Dengan Tingkat Border Price Dinyatakan Dalam Rupiah Per Kilogram

Kriteria Pengukuran	Matriks Analisis Kebijakan (PAM)			
	PG Kreet Baru		PG Kebon Agung	
	Petani Kredit	Petani Bebas	Petani Kredit	Petani Bebas
Border Price	197,48	197,48	219,92	219,92
Harga Sosial	198,79	198,79	221,38	221,38

Keterangan : 1 Kilogram tebu setara dengan 0,044 kg untuk petani PG Kreet Baru dan 0,049 kg gula pasir petani PG Kebon Agung

Dari hasil perbandingan antara harga sosial (opportunity cost) dengan harga perbatasannya (border price) pada tabel 26 diketahui bahwa usahatani tebu secara keseluruhan tidak mempunyai keunggulan komparatif yang ditunjukkan dengan nilai harga sosial yang lebih tinggi daripada harga perbatasan (border price).

Hasil matriks analisis kebijakan yang menerima hipotesa kedua yang disusun sebagai dugaan sementara tentang keunggulan komparatif dapat terjadi karena:

1. Tenaga kerja sebagai komponen penting dari daya saing memiliki tingkat produktivitas yang rendah, hal ini jelas terlihat dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini juga merupakan cirri umum dari tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah akan menyebabkan total biaya dari proses produksi per satu orang tenaga kerja dan berarti juga per satu unit output yang dihasilkan menjadi tinggi. Akibatnya harga jual output tersebut lebih tinggi jika dibandingkan harga internasional (daya saing lebih rendah).
2. Tingkat produktivitas hasil produksi yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya kuantitas tebu/ha maupun jumlah rendemen yang dihasilkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :
 - a) Mayoritas tebu yang diusahakan telah bergeser dari lahan sawah ke lahan tegal (kering) yang tingkat kesuburan tanahnya lebih rendah dibandingkan dengan lahan sawah dan pergeseran lahan ini tidak

- diikuti dengan teknologi yang tepat untuk mengembangkan tebu khusus di lahan tegal (kering).
- b) Teknis budidaya yang diterapkan oleh petani yang belum lengkap dan tepat seperti contohnya pemberian dosis pupuk yang tidak sesuai dengan anjuran karena tingginya harga pupuk, penggunaan pupuk yang terbatas hanya pada Urea dan Za sedangkan pupuk KCL tidak diberikan padahal berguna untuk meningkatkan nilai rendemen tebu, pemberantasan hama dan penyakit yang dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan pestisida bahkan sering diabaikan, pemeliharaan tanaman yang terkadang kurang intensif dan keprasan yang berulang kali dilakukan dan hal-hal tersebut dilakukan untuk meminimumkan biaya produksi.
 - c) Kurangnya pemberian informasi teknologi secara menyeluruh terutama dalam penggunaan benih tebu unggul dan penerapan teknis budidaya tebu kepada para petani, sehingga sulit untuk meningkatkan produktivitas hasil. Keberhasilan memanfaatkan penggunaan benih tebu unggul dan penerapan yang tepat akan teknis budidaya yang sesuai dengan karakteristik lahan akan sangat penting dalam menjaga efisiensi perusahaan tebu dalam jangka panjang.
3. Adanya kebijakan pemerintah saat ini yang mengarah kepada mekanisme pasar dengan dikeluarkannya Inpres No. 5 tahun 1998 dan dicabutnya Inpres No. 9 tahun 1975 (tentang TRI) bahwa petani tidak lagi dipaksa untuk menanam tebu apabila pendapatan dari bertanam tebu lebih rendah dibanding tanaman padi. Kebijakan ini akan semakin mempertinggi tingkat persaingan antara tanaman tebu dengan tanaman padi pada lahan sawah dan memperbesar persentase jumlah areal lahan tegal (kering) akibat pergeseran lahan sari lahan sawah ke lahan tegal (kering) yang tingkat produktivitasnya rendah.
 4. Berlakunya persaingan bebas dimana produksi gula sebagai output dari usahatani tebu tidak lagi dibeli oleh pemerintah dengan fixed price, tetapi

diserahkan kepada mekanisme pasar dan jalur tataniaga gula yang bebas dari monopoli BULOG sejak tahun 1971 dengan diberlakukannya Keputusan Menperindag No. 25/MPP/Kep/1/1998 yang memperbolehkan importir umum untuk melakukan impor gula dari yang sebelumnya hanya dibatasi untuk produsen akan menjadikan alokasi lahan untuk tanaman tebu dalam lingkungan kebijakan baru ini tergantung pada mekanisme pasar. Jika harga yang berlaku dipasar tinggi maka akan meningkatkan kegairahan petani dalam menanam tebu sehingga akan memperluas lahan yang akan ditanami, begitu pula sebaliknya jika harga yang berlaku rendah maka tidak akan memberikan motivasi bagi petani untuk menanam tebu. Kebijakan tersebut mrmicu banjirnya gula impor karena pada saat yang sama pasar gula dunia mengalami collapse dengan tingkat harga terendah sepanjang sejarah. Kenyataan ini menyebabkan pasar gula domestik juga ikut collapse dengan harga gula yang merosot tajam, baik petani maupun pabrik gula terancam bangkrut total.

5. Pemerintah menanggapi situasi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan baru dengan diterbitkannya Kepmenhutbun No.28/KPTS-IX/1999 tanggal 7 Mei 1999 yang mengatur tentang harga provenue gula, sementara impor gula kembali diatur dengan Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/6/1999 yang menetapkan harus dilakukan oleh produsen. Ketetapan terakhir tersebut tidak berlangsung lama karena dua bulan kemudian diganti dengan Kepmenperindag No. 363/MPP/Kep/8/1999 yang menetapkan pembebanan tariff impor untuk melindungi industri gula dalam negeri, sedang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh importer umum.
6. Pada tahun 2002 pemerintah menegaskan dukungannya untuk industri gula domestik dengan mengeluarkan SK Menperindag No. 643/MPP/Kep/9/2002, yang menyatakan bahwa impor gula hanya boleh dilakukan oleh importer terdaftar yang terdiri dari perusahaan-perusahaan gula (PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PT. RNI) dan perusahaan swasta yang ditunjuk (PT.Kebon Agung). Regulasi impor tersebut kemudian diperbaharui dengan SK No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang ketentuan

impur gula. Impor dilakukan oleh perusahaan gula yang memperoleh minimal 75% pasokan tebu rakyat.

7. Dengan kebijakan baru tersebut ternyata industri gula nasional belum dapat bangkit kembali. Salah satunya karena kebijakan perlindungan tidak terlaksana dengan efektif. Sementara kebijakan di bidang produksi tidak memberi insentif untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Oleh karena itu pada tahun 2002 pemerintah meluncurkan Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2003. program ini menyangkut 3 kegiatan yaitu : (1) Rehabilitasi tanaman melalui bongkar ratoon, (2) Penguatan kelembagaan, dan (3) Rehabilitasi/peningkatan kinerja pabrik gula. Tetapi dalam kenyataannya program akselerasi baru menyentuh sebagian kecil aspek on-farm, yakni berupa bongkar ratoon, pembangunan kebun bibit dan bantuan pengairan sederhana. Hasil evaluasi program akselerasi menunjukkan bahwa produktivitas gula pada kebun bongkar ratoon terbukti lebih tinggi dibanding produktivitas gula rata-rata pada lahan keprasan. Akan tetapi, peningkatan produktivitas gula pada lahan bongkar ratoon ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas rata-rata tebu secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa peningkatan produktivitas gula pada kebun bongkar ratoon tidak diikuti peningkatan produktivitas pada lahan secara keseluruhan. Program akselerasi yang menyangkut bidang off-farm yang berupa upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan efisiensi teknis pabrik juga belum tersentuh sama sekali.

Faktor-faktor tersebut diatas sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat produktivitas dan tingkat rendemen, sehingga dengan tingkat rendemen yang rendah sebesar kurang lebih 4 % sehingga gula pasir per kg sebagai output yang dihasilkan per kuintal tebu menjadi rendah. Faktor-faktor tersebut juga merupakan beberapa contoh yang dapat diangkat sebagai hal-hal yang mempengaruhi ketidakefisienan petani tebu sehingga biaya-biaya yang dikorbankan dalam penggunaan sumberdaya untuk mendapatkan atau menghemat satu satuan devisa menjadi lebih besar daripada "shadow exchange rate" (Rp

8940,89/ US \$), sehingga akan lebih menguntungkan untuk mengimpor komoditi gula pasir sebagai output usahatani tebu daripada mengusahakan sendiri di dalam negeri sebagai substitusi impor. Selain itu fluktuasi harga gula dunia gula pasir sebagai output dari bahan baku tebu (gula pasir domestik) yang tinggi akibat tingginya biaya produksi yang dikeluarkan tidak akan mampu untuk bersaing.

6.3.6.2. Analisis Pengaruh Kebijakan

Pada analisis keunggulan kompetitif dan komparatif terlihat adanya perbedaan nilai yang diperoleh. Hal ini dikarenakan pada analisis keunggulan komparatif berlaku pada perekonomian yang berada dalam keadaan seimbang, dimana tidak ada distorsi dari pemerintah. Untuk melihat sejauh mana pengaruh tersebut dapat dilihat pada koefisien proteksi output nominal (Nominal Protection Coefficient Output/NPCO), koefisien proteksi input nominal (Nominal Protection Coefficient Input/ NPCI), dan koefisien proteksi efektif (Effective Protection Coefficient). Analisis pengaruh kebijakan pada usahatani tebu disajikan pada tabel 27 dibawah ini.

Tabel 27. Analisis Pengaruh Kebijakan Pada Usahatani Tebu

Jenis Usahatani Tebu Lahan Tegal (Kering) Sistem Ungaran	Analisis		
	NPCO	NPCI	EPC
1. PG Krebet Baru			
• Petani Kredit	1,335	1,185	1,354
• Petani Bebas	1,335	1,514	1,311
2. PG Kebon Agung			
• Petani Kredit	1,341	1,166	1,359
• Petani Bebas	1,339	1,512	1,319

Sumber : Data Primer, 2006

6.3.6.2.1. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO)

Hasil matriks analisis kebijakan (PAM) tentang koefisien proteksi output nominal (NPCO) pada tabel 27 menunjukkan nilai lebih besar dari 1 untuk perusahaan tebu ungaran di lahan kering (tegal). Nilai ini mengindikasikan bahwa dalam kegiatan perusahaan tebu telah terjadi transfer output kepada petani baik dari konsumen maupun dari pemerintah. Nilai koefisien output nominal usahatani tebu secara keseluruhan sama setelah nilai tersebut dibulatkan karena selisih yang relative kecil yaitu sebesar 1,337. Dari nilai tersebut terlihat

bahwa telah terjadi transfer kepada produsen dalam hal ini petani tebu sebesar 33,7 %.

Dari hasil penelitian transfer output kepada petani tebu sebagian besar diperoleh dari konsumen, yaitu pada saat penelitian, harga gula pasir yang merupakan output tebu diketahui harga aktual (harga pasar) yang diterima konsumen lebih tinggi yaitu sebesar Rp 6200 dibandingkan dengan harga sosialnya (CIF) yang hanya sebesar Rp 4.488,32 untuk setiap 1 kilogram. Dalam hal ini konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi (harga aktual) daripada yang seharusnya mereka terima (harga sosial) atau dengan perkataan lain produsen dalam hal ini petani tebu menerima harga lebih tinggi dari yang seharusnya (harga sosial), dengan demikian kesejahteraan konsumen lebih kecil yang terlihat dari keunggulan komparatif yang lebih kecil dari keunggulan kompetitif (profit finansial lebih besar daripada profit sosial).

Transfer output sebesar 33,7 % terjadi sebagai akibat dari harga tebu yang secara aktual yang lebih tinggi dari harga sosialnya. Keadaan ini tidak terlepas dari beberapa hal diantaranya :

1. Salah satu biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi adalah pupuk. Sejak dihapuskannya kebijakan subsidi untuk pupuk maka harga input ini menjadi lebih tinggi sehingga akan mempengaruhi pembentukan harga output di pasar. Penghapusan subsidi untuk input bagi output merupakan salah satu penyebab penyimpangan keatas harga jualnya dari harga batas ("border price")
2. Kebijakan sistem nilai tukar yang digunakan adalah sistem nilai tukar mengambang sehingga besarnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dalam hal ini Dollar AS yang mengikuti mekanisme pasar akan sangat mempengaruhi harga komoditi atau impor barang-barang treadable.
3. Berlakunya kebijakan pemerintah tentang bea masuk impor sebesar 20 – 25 % dan berbagai pungutan liar di pelabuhan (Ppn, PPh) bagi komoditi gula pasir yang merupakan output dari usahatani tebu sehingga akan meningkatkan harga jualnya di pasar domestik dan memperbesar penyimpangannya dari harga perbatasannya ("border price"). Dengan pemberlakuan kebijakan ini akan sangat mempengaruhi harga tebu secara tidak langsung (setelah

dikonversi berdasarkan harga gula pasir baik secara aktual maupun sosial) mengingat tebu merupakan bahan baku bagi komoditi gula pasir.

Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu memberi proteksi minimal 33,7% dari harga pasar gula agar distorsi yang terjadi tidak dibebankan sepenuhnya kepada konsumen.

6.3.6.2.2. Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI)

Hasil analisis koefisien input nominal dari matriks analisis kebijakan yang ditunjukkan pada tabel 27 menunjukkan nilai lebih besar dari 1 (>1). Hal ini mengindikasikan bahwa pada kegiatan pengusahaan tebu keprasan lahan kering (tegal) pemerintah masih membebaskan produsen terhadap penggunaan input, hal ini terlihat pada input pupuk yang saat ini subsidi pupuk yang sangat membantu petani sejak tanggal 2 Desember 1998 telah menetapkan penghapusan subsidi pupuk sehingga sumbangan pemerintah terhadap harga input pupuk sudah tidak ada lagi. Nilai koefisien input tertinggi jika diusahakan di lahan tegal (kering) sistem ungaran oleh petani bebas PG Krebbe Baru yaitu sebesar 1,514 dan terendah jika diusahakan di lahan tegal (kering) dengan sistem ungaran oleh petani kredit PG Kebon Agung yaitu sebesar 1,166. Nilai ini mengindikasikan bahwa telah terjadi transfer input sebesar 51,4 % pada nilai tertinggi dan 16,6 % pada nilai terendah dari petani tebu selaku produsen kepada masyarakat. Artinya petani tebu harus membayar harga treadable lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar pada harga sosialnya. Hal ini terlihat dari input treadable harga aktual (pasar) sedikit lebih tinggi dibanding harga sosial yang menunjukkan tidak adanya subsidi untuk input treadable. Input treadable dalam penelitian ini adalah pupuk Urea dan ZA. Harga aktual untuk pupuk Urea per kuintal adalah sebesar Rp 120.000 lebih tinggi dibandingkan harga sosial yang hanya sebesar Rp 112.655 . Demikian pula untuk pupuk ZA harga per kuintal secara aktual sebesar Rp 105.000 lebih tinggi dibanding harga sosialnya yang hanya sebesar Rp 80.781

Perbedaan nilai koefisien proteksi input nominal antara lahan tegal petani kredit dan lahan tegal petani bebas disebabkan oleh perbedaan harga input treadable. Terlihat bahwa nilai NPCI pada lahan tegal petani kredit lebih kecil dibandingkan lahan tegal petani bebas. Hal ini berkaitan erat dengan harga input

treadable pupuk Urea dan pupuk ZA yang lebih rendah pada tingkat petani kredit dibandingkan harga pada petani bebas, dikarenakan petani kredit mendapat subsidi harga dari pemerintah dan juga KUD.

Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu memberi subsidi input minimal 16,6% - 51,4% dari harga input produksi agar distorsi yang terjadi tidak dibebankan sepenuhnya kepada produsen.

6.3.6.2.3. Koefisien Proteksi Efektif

Efektivitas kebijakan yang bersifat melindungi usahatani yang diperhatikan dapat dilihat dari kriteria “Effective Protection Coefficient” (koefisien proteksi efektif). EPC merupakan kriteria yang menjelaskan perlu tidaknya suatu proyek diberi proteksi efektif terhadap persaingan internasional agar mampu bertahan. Pengukuran koefisien proteksi efektif tersebut bertitik tolak sebagai kelebihan proporsional harga jual yang diterima produsen dalam negeri di atas “border price” dikali “shadow price” yang diperlukan produsen dalam negeri untuk dapat bersaing, setelah segala jenis pajak yang membebani proses produksi tersebut dihilangkan. Nilai EPC dapat digunakan untuk melihat kombinasi efek dari kebijakan harga output dan harga input treadable yang digunakan. Dari hasil matriks analisis kebijakan (PAM) seperti ditunjukkan pada tabel 27 diketahui bahwa usahatani tebu sebagai bahan baku gula pasir secara keseluruhan baik yang diusahakan oleh petani tebu kredit maupun bebas di lahan tegal dengan sistem ungaran tidak layak atau tidak menguntungkan karena usahatani tersebut memerlukan proteksi dari pemerintah yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari nilai EPC yang lebih besar dari 1 ($EPC > 1$) yaitu berkisar 1,311 – 1,359. Nilai ini mengindikasikan bahwa produsen dalam negeri (petani tebu) menerima tingkat pengembalian hasil atau nilai tambah sebesar 31,1% - 35,9% lebih tinggi dari sumberdaya yang telah dikorbankan akibat adanya kebijakan pemerintah dengan mempengaruhi harga yang sifatnya melindungi produsen seperti penerapan bea masuk, berbagai pajak pungutan terhadap gula pasir sebagai output usahatani tebu yang secara langsung akan sangat mempengaruhi harga tebu bila dibandingkan dengan nilai tambah yang akan diperoleh jika kondisi perekonomian Negara dalam keadaan seimbang. Artinya usahatani tebu ini

mebutuhkan tingkat proteksi dari pemerintah sebesar 31,1% - 35,9% dari nilai tambahnya secara ekonomi agar mampu bersaing dalam perekonomian nasional.

Dari hasil analisis matriks kebijakan secara keseluruhan, ternyata usahatani tebu pada lahan tegal sebagai bahan baku komoditi gula pasir masih belum mampu bersaing secara internasional (liberalisasi perdagangan) karena produktivitasnya masih rendah dan diperlukan biaya ekonomi yang masih tinggi. Hal ini terbukti masih diperlukan proteksi dari pemerintah sebesar 31,1% - 35,9% agar usahatani ini dapat bersaing dalam persaingan internasional dan usahatani ini tidak memiliki keunggulan komparatif yang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh satu negara dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan kriteria DRC dengan nilai keseluruhan lebih besar dari 1 ($DRC > 1$) yang berarti usahatani tebu secara keseluruhan tidak mempunyai keunggulan komparatif karena telah terjadi pemborosan devisa negara dalam penggunaan sumberdaya nasional pada usahatani tersebut. Hal ini terbukti bahwa untuk mendapat tambahan keuntungan atau menghemat devisa sebesar 1 US \$ (Rp 9000/US \$) diperlukan pengorbanan sebesar Rp 10.183,77 – Rp 12.025,49

Dalam prinsip perdagangan bebas semua bentuk hambatan perdagangan internasional baik yang bersifat “Tariff Barrier” maupun “Non Tariff Barrier” akan dihilangkan atau dikurangi sehingga menggantungkan kebutuhan domestik gula pasir yang merupakan output dari usahatani tebu pada impor bukanlah alternative hal yang baik karena akan berbahaya bagi kelangsungan hidup agroindustri gula nasional mengingat fluktuasi harga gula dunia komoditi gula pasir cenderung menurun dan hal ini akan ditransmisikan kedalam harga domestik ketika liberalisasi perdagangan terjadi. Hal ini akan membawa konsekuensi buruk bagi perkembangan usahatani tebu di Indonesia sebagai bahan baku gula pasir.

Untuk menghadapi hal tersebut diatas maka pemantapan produksi domestik perlu segera dilakukan dengan alasan antara lain dapat menghemat devisa, membuka kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan pengaruh ganda pendapatan dan kesempatan kerja terhadap struktur perekonomian wilayah. Untuk meningkatkan produksi domestik dapat dilakukan dengan cara :

1. Untuk menekan biaya produksi dapat dilakukan dengan perbaikan teknologi dan manajemen seperti penggunaan benih unggul dengan produktivitas tinggi dalam meningkatkan daya saing tebu menghadapi padi. Keberhasilan memanfaatkan benih tebu unggul sangat penting dalam menjaga efisiensi perusahaan tebu jangka panjang karena tidak menimbulkan distorsi sebagaimana apabila kenaikan produksi dirangsang oleh subsidi pupuk atau penetapan harga dasar.
2. Pengembangan tebu pada lahan tegalan harus didukung oleh penerapan teknologi baik mengenai penyediaan varietas tebu, pembibitan, pengolahan tanah, pengairan, perawatan hingga tebang angkut.
3. Penyuluhan yang intensif kepada para petani khususnya dari PKOL (Pimpinan Kerja Operasional Lapangan) terutama mengenai cara teknis budidaya yang tepat, penggunaan bibit varietas unggul serta pengendalian terhadap sistem keprasan yang dilakukan berulang kali.
4. Mempermudah prosedur dalam permodalan serta dalam penyediaan sarana produksi (bibit, pupuk) serta sarana dan prasarana transportasi (perbaikan jalan).

6.3.7. Biaya Transaksi pada petani tebu

Berbeda dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, biaya transaksi biasanya lebih mengarah kepada biaya yang dikeluarkan oleh kelembagaan petani tebu dengan industri gula. Beberapa persyaratan yang berhubungan langsung dengan kegiatan petani tebu diketahui dari sistem kontrak yang dibuat, dan telah dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu biaya transaksi pasar, manajerial dan politik. Pada penelitian ini biaya transaksi yang diambil hanyalah biaya yang berkaitan langsung dengan pertukaran secara ekonomi (transfer hak milik) antara petani tebu (kredit dan bebas) dengan pelaku ekonomi lain seperti koperasi, pedagang perantara/tengkulak dan pabrik gula. Untuk secara jelas mengetahui biaya transaksi, sangat penting bagi peneliti untuk melihat arsip laporan keuangan tahunan koperasi untuk mendapatkan biaya transaksi yang aktual pada beberapa variabel, seperti perbedaan biaya bibit atau pupuk diantara koperasi dengan toko pertanian. Sayangnya tidak semua koperasi mau memberikan data yang jelas mengenai hal ini. Sehingga beberapa biaya transaksi tidak dapat dihitung dalam penelitian ini, contohnya biaya yang berkaitan dengan

sesuatu yang ilegal seperti biaya pelicin. Sebagai hasilnya, biaya transaksi yang sesungguhnya bisa lebih besar dari yang telah dihitung.

Komponen biaya transaksi lebih kompleks untuk dirumuskan daripada komponen biaya produksi. Tetapi tidak berarti bahwa biaya transaksi tidak bisa dihitung secara jelas. Penelitian ini menggunakan rumus dari Collins and Fabozzi (1991) dan Williamson (1981) untuk mengidentifikasi variabel biaya transaksi. Dari rumusan Collin and Fabozzi, biaya transaksi didefinisikan sebagai berikut:

Biaya Transaksi	= Biaya Tetap + Biaya Variabel
Biaya Tetap	= Komisi + Fee transver + Pajak-pajak
Biaya Variabel	= Biaya Pelaksanaan + Biaya Korbanan
Biaya Pelaksanaan	= Dampak Harga + Biaya Waktu Pasar
Biaya Korbanan	= Hasil yang Diharapkan – Pengembalian Aktual – Biaya Pelaksanaan– Biaya Tetap

Williamson menyatakan bahwa biaya transaksi adalah biaya yang berkaitan dengan transfer barang dan jasa yang terpisah. Sesuai dengan definisinya, pada kasus petani tebu, biaya transaksi dapat dikategorikan menjadi komponen seperti berikut pada Tabel 28 : Pajak Tanah, Tebang-Muat-Angkut dan karung, fee dan sumbangan untuk koperasi, sumbangan untuk kelompok tani, fee Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA), fee untuk pedagang perantara dan tengkulak, makan pesta adat, bunga kredit, selisih(marjn) bunga, kertas kerja, biaya korbanan, dan keterlambatan kredit. Dengan rumus Collin dan Fabozzi, pajak tanah dimasukkan dalam biaya tetap (pajak); Fee dan sumbangan untuk koperasi, sumbangan untuk kelompok tani, fee Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA), fee untuk pedagang perantara dan tengkulak termasuk biaya tetap (fee komisi dan transver); Tebang-Muat-Angkut dan karung termasuk didalam biaya transaksi manajerial, dan bersama dengan biaya makan pesta adat, bunga kredit, selisih(marjn) bunga, kertas kerja, biaya korbanan, dan keterlambatan kredit menjadi biaya variabel. Pada semua komponen, para petani tebu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Contohnya, petani kredit tidak harus membayar fee untuk SPTA, sebaliknya petani bebas harus membayar fee untuk bergabung

dengan petani yang mempunyai SPTA. Sebagian petani juga mengaku mengeluarkan uang untuk makanan pesta adat pada awal akan memasuki musim giling, tetapi sebagian lagi mengaku tidak.

Tabel 28. Variabel Biaya Transaksi pada Petani Tebu Kredit dan Petani tebu Bebas

Kategori	Keterangan	Pengeluaran
Tebang – Muat – Angkut (TMA)	Biaya yang dikeluarkan oleh petani tebu untuk melaksanakan TMA, termasuk biaya sewa truk, biaya operasi pabrik gula, upah/rokok/uang makan supir truk	Eksplisit
Karung	Biaya yang dikeluarkan petani tebu untuk membeli karung	Eksplisit
Kemananan	Biaya yang dikeluarkan petani tebu untuk mempekerjakan mandor tebang selama masa panen	Eksplisit
Fee dan Sumbangan untuk Koperasi	Biaya yang dikeluarkan petani tebu untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi	Eksplisit
Bunga Kredit	Tingkat bunga kredit yang dibayarkan kepada koperasi (untuk petani kredit)/ kepada pedagang perantara atau tengkulak (untuk petani bebas) .	Eksplisit
Pajak dan Sumbangan Desa	Pajak yang dibayarkan untuk desa, termasuk pajak air (PDAM), pajak jalan (DLLAJR), sumbangan untuk masjid, dan lain-lain.	Eksplisit
Pembuatan Kontrak	Biaya yang dikeluarkan petani tebu kredit untuk membuat kontrak dengan KUD atau pabrik gula, termasuk biaya administrasi, notaries, komisi, dan pemotongan kredit.	Eksplisit
Fee Surat Perintah Terbang Angkut (SPTA)	Pembayaran untuk mendapatkan SPTA, termasuk biaya pelelangan	Eksplisit
Biaya Makanan Upacara Adat	Biaya yang dikeluarkan petani tebu untuk menyelenggarakan upacara adat, biasanya sebelum memasuki masa giling.	Eksplisit
Marjin Bunga	Biaya yang dikeluarkan petani tebu untuk membayar kepada koperasi berdasarkan selisih bunga antara keputusan pemerintah dan kesepakatan koperasi, termasuk marjin bagi hasil gula	Implisit

Sumbangan kelompok tani untuk	Fee legal dan ilegal yang dibayarkan untuk kelompok tani, juga sumbangan untuk ketua kelompok tani	Eksplisit
Fee KUD	Fee ilegal yang dibayarkan kepada KUD dalam bentuk komisi dan pemotongan kredit	Implisit
Fee Pedagang perantara / tengkulak	Biaya yang dikeluarkan petani tebu bebas untuk pedagang perantara/tengkulak untuk memproses tebu mereka ke pabrik gula	Eksplisit
Kertas Kerja	Biaya untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta koperasi/pabrik gula, termasuk fotokopi, biaya transportasi, biaya korbanan, foto, dan lain-lain.	Implisit
Biaya Korbanan	Biaya waktu yang dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi dari koperasi/pabrik gula	Implisit
Keterlambatan Kredit	Biaya karena keterlambatan kredit (terutama untuk petani kredit)	Implisit

Sumber : Data Primer, 2006

Berdasarkan lokasi dan jenis petani akan dijelaskan kontribusi setiap variabel terhadap total biaya transaksi yang akan disajikan pada tabel 29. Biaya TMA (Tebang-Muat-Angkut, termasuk biaya karung) memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap besarnya biaya transaksi yaitu sebesar 70% dari total biaya transaksi. Kontributor terbesar kedua adalah fee untuk pedagang perantara/tengkulak, yang rata-rata sekitar 16% dari total biaya transaksi. Hanya para petani kredit yang tidak mengeluarkan biaya fee untuk pedagang perantara/tengkulak ini karena mereka telah terikat kontrak dengan pabrik gula dan koperasi. Tiga variabel, bunga kredit, margin bunga, dan fee SPTA, mempunyai kontribusi sekitar 3-6 % terhadap total biaya transaksi. Variabel sumbangan untuk koperasi sangat kecil sekali kontribusinya terhadap total biaya transaksi, hanya lebih kecil dari 3%.

Tabel 29. Kontribusi Variabel terhadap Biaya Transaksi/ha Berdasarkan Lokasi dan Jenis Petani (Rp 000,%)

Variabel	PG Krebet Baru		PG Kebon Agung	
	Petani Kredit	Petani Bebas	Petani Kredit	Petani Bebas
TMA dan Biaya Karung	3.024 (75,8)	2.942 (68,2)	2.931 (75,87)	2.831 (67,5)
Fee dan Sumbangan Koperasi	38 (1,06)	40 (0,92)	38 (0,98)	40 (0,954)
Bunga Kredit *	636 (15,96)	224 (5,19)	636 (16,46)	230 (5,436)
Fee SPTA	148 (3,7)	148 (3,43)	148 (3,75)	148 (3,53)
Marjin Bunga**	139 (3,48)	224 (5,14)	110 (2,74)	224 (5,43)
Fee Pedagang Perantara/Tengkulak	-	739 (17,12)	-	719 (17,15)
Total	3.986 (100,0)	4.315 (100,0)	3.863 (100,0)	4.192 (100,0)

Catatan : Variabel keamanan, sumbangan desa, pembuatan kontrak, biaya makanan upacara adat, fee KUD, dan sumbangan untuk kelompok tani tidak dimasukkan dalam tabel ini, karena jumlah petani yang membayar hanya 2 persen dari petani contoh.

* Bunga Kredit pada kasus petani kredit termasuk didalamnya adalah biaya kertas kerja, biaya korbanan, dan keterlambatan kredit

** Marjin Bunga termasuk didalamnya biaya marjin bagi hasil gula

Sumber : Data Primer, 2006

Apabila kita menganalisa secara detail, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- (1) Biaya TMA yang tertinggi dibayarkan oleh petani kredit dan biaya paling kecil dibayarkan oleh petani bebas. Hal ini dikarenakan kegiatan TMA pada petani kredit ditangani oleh pabrik gula yang dalam pelaksanaannya terkadang ada manipulasi, contohnya biaya transportasi dan upah buruh yang mana petani tidak dapat mengontrolnya;
- (2) Fee pedagang perantara/tengkulak yang terbesar dibayarkan oleh petani bebas dan mencapai 17 %; petani kredit tidak terbebani dengan fee pedagang perantara/tengkulak. Petani bebas memerlukan pedagang perantara/tengkulak dikarenakan mereka tidak mempunyai kontrak dengan pabrik gula. Fee pedagang perantara/tengkulak ini dibagi menjadi dua jenis, molase (tetes) diambil pedagang perantara/tengkulak atau petani bebas harus membayar uang untuk setiap kuintal tebu yang digiling;
- (3) Jumlah bunga kredit petani kredit

terhadap total biaya transaksi sangat tinggi (15%) karena biaya kertas kerja, biaya korbanan, dan biaya keterlambatan kredit. Walaupun bunga kredit untuk petani bebas sangat tinggi, karena mereka tidak dibebani oleh biaya kertas kerja, biaya korbanan, dan biaya keterlambatan kredit, maka jumlah total bunga kredit mereka lebih rendah daripada petani kredit; dan (4) Walaupun secara teori SPTA diberikan secara cuma-cuma oleh koperasi atau pabrik gula kepada petani tebu, tetapi fakta dilapang menunjukkan bahwa hampir semua petani tetap harus membayar SPTA. Petani biasa membeli SPTA seharga banyaknya tebu yang mereka punya, untuk setiap kuintal mereka harus membayar Rp 500,00.

Pada saat prosentase kontribusi kepada biaya transaksi dibedakan berdasarkan tipe biaya transaksi (biaya transaksi pasar, biaya transaksi manajerial, biaya transaksi politik), maka proporsi besarnya kontribusi didominasi oleh biaya transaksi manajerial (sekitar 70%). Dari variabel diatas, hanya pajak (termasuk pajak tanah, pajak desa dan pajak jalan) yang dikategorikan sebagai biaya transaksi politik, dengan kontribusi yang sangat kecil ($<1,5\%$). Pada saat analisisnya dibedakan menurut jenis petani, maka proporsi biaya transaksi manajerial petani kredit lebih tinggi daripada petani bebas. Hal ini disebabkan karena aktivitas TMA (Tebang-Muat-Angkut) dari petani kredit dikelola oleh koperasi dan pabrik gula yang dalam penyelenggaraannya terkadang ada manipulasi (biaya transportasi dan upah buruh yang tidak bisa dikontrol petani). Sebaliknya, proporsi biaya transaksi pasar untuk petani bebas lebih tinggi dari petani kredit, dikarenakan petani bebas harus membayar fee pedagang perantara/tengkulak.

Ada beberapa penemuan yang menarik mengenai biaya transaksi ini, pertama apabila analisa biaya transaksi berdasarkan lokasi, maka biaya transaksi/hektar di PG Krebet Baru lebih tinggi dibandingkan dengan PG Kebon Agung. Ada 2 alasan untuk hal ini, (1). Hampir semua molasses (tetes) dari petani bebas di PG Krebet Baru diperoleh oleh pedagang perantara/tengkulak, sehingga molasses (tetes) hilang termasuk dalam biaya transaksi; (2). Penentuan rendemen di PG Krebet Baru lebih tidak transparan dibandingkan dengan PG Kebon Agung, dengan adanya perlakuan yang sama terhadap semua tebu petani.

Apabila analisa didasarkan pada jenis petani, maka biaya transaksi per hektar untuk petani tebu bebas sedikit lebih tinggi daripada petani tebu kredit. Tingginya biaya transaksi pada petani tebu bebas karena mereka tidak mendapatkan jaminan bahwa tebu mereka akan diproses di pabrik gula. Sehingga, mereka harus meminta kepada pedagang perantara/tengkulak atau petani tebu lain yang mempunyai SPTA untuk memasukkan tebu mereka ke pabrik gula. Apabila petani tebu bebas menggunakan jasa pedagang perantara/tengkulak, maka petani tebu bebas tidak akan mendapat molasses (tetes) karena tetes diambil oleh pedagang perantara/tengkulak sebagai balas jasa telah memasukkan tebu mereka ke pabrik gula. Apabila petani kredit memakai jasa petani tebu lain yang mempunyai SPTA, pembayaran didasarkan pada berat tebu yang digiling oleh pabrik gula (biasanya petani tebu bebas harus membayar Rp 5000/ku). Disamping itu, petani tebu bebas harus membayar bunga kredit yang tinggi (40%) untuk mendapat pinjaman dari pedagang perantara/tengkulak selama masa tanam tebu. Hal tersebutlah yang menyebabkan biaya transaksi pada petani tebu bebas lebih tinggi dibanding petani kredit walaupun mereka tidak berinteraksi dengan lembaga-lembaga seperti pabrik gula dan koperasi.

Tingginya biaya transaksi untuk petani kredit disebabkan karena banyaknya praktek manipulasi, baik di koperasi maupun pabrik gula, seperti tingkat suku bunga yang illegal, penghitungan rendemen yang sangat rendah, fee koperasi, harga bibit dan pupuk yang lebih tinggi, dan lain-lain. Dengan keterangan ini, bias dikatakan bahwa kelembagaan petani tebu kredit lebih baik daripada petani bebas, tetapi petani kredit tidak mempunyai posisi tawar "bargaining position" yang cukup kuat dalam menghadapi koperasi dan pabrik gula, sehingga banyak kemungkinan untuk dilakukan praktek manipulasi.

Petani tebu yang bergabung dengan program kredit (petani kredit) mempunyai keuntungan dalam hal kepastian. Tanpa kepastian, sangat sulit untuk para pelaku ekonomi mengambil keputusan. Tetapi kepastian saja tidak cukup, karena pelaku ekonomi juga ingin mendapat susunan kelembagaan yang efisien. Efisiensi kelembagaan ini dilihat dari rendahnya biaya transaksi yang terjadi. Tetapi pada beberapa bagian, susunan kelembagaan petani kredit tidak efisien sehingga biaya transaksi yang terjadi tinggi. Sebaliknya, pada kelembagaan petani tebu bebas lebih sederhana, karena petani tebu tidak harus berinteraksi dengan banyak pelaku

ekonomi. Tetapi kolusi yang terjadi antara pedagang perantara/tengkulak dengan staff pabrik gula menyulitkan petani tebu bebas untuk memasukkan tebu mereka ke pabrik gula. Sehingga bisa dikatakan bahwa kelemahan kelembagaan petani tebu bebas adalah dalam ketidakpastiannya, yang menyebabkan tingginya biaya transaksi. Oleh sebab itu, kepastian dan efisiensi kelembagaan adalah dua hal penting yang harus diperhatikan dalam merombak susunan kelembagaan di industri gula.

Sumber dari masalah kelembagaan adalah ketidaklengkapan kontrak dan kurangnya kekuatan ketegasan. Kita dapat menganalisa ketidaklengkapan kontrak dengan dua pendekatan. Pertama, dari versi Teori Ketidaklengkapan Kontrak, dimana ketidaklengkapan kontrak diasumsikan sebagai akibat dari ketidaksimetrian informasi antara pelaku kontak dengan pihak lain. Kedua, dari versi Biaya Transaksi Ekonomi, dimana ketidaklengkapan kontak diasumsikan karena adanya perilaku oportunistik. Pada kasus petani tebu, ketidaklengkapan kontrak dikarenakan adanya perilaku oportunistik dari pelaku ekonomi yang terlibat didalamnya. Kita bisa mengidentifikasi kurangnya kekuatan ketegasan sebagai kekurangan dari sistem kontrak yang seharusnya mempunyai kekuatan yang tegas “self-enforcing contracts”. Kontrak bisa dikatakan “self-enforcing” apabila didalamnya terdapat mekanisme klausa untuk diterapkan, untuk memecahkan masalah, dan untuk menghukum (penalty) pelaku ekonomi apabila ingkar dari kontrak. Pada kasus kontrak petani tebu, kontrak “self-enforcing” sangat kurang dikarenakan tidak ada susunan yang mendetail diantara para pelaku, dan juga tidak adanya hukuman apabila ada pelaku yang melanggar kesepakatan.

6.4. Biaya Transaksi pada Pabrik Gula

6.4.1. Biaya-biaya pada Pabrik Gula

Ekonomi Kelembagaan (Ekonomi Biaya Transaksi) melihat suatu perusahaan sebagai satu susunan kelembagaan, menggantikan sudut pandang Ekonomi Neoklasik yang melihat perusahaan sebagai fungsi produksi. Pada saat satu jenis input sudah ditentukan untuk digunakan dalam proses produksi, teknologi yang eksogen akan memperbaiki jumlah output yang dihasilkan. Dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, derajat penyebaran “sunkness” dari input

yang berbeda akan mempengaruhi perilaku pemiliknya, tidak diawasinya kualitas atau usaha akan mempengaruhi keefektifan input lain, kualitas manajerial dan usaha akan menentukan seberapa baik kombinasi inputnya, dan lain sebagainya. Mekanisme yang digunakan untuk mengatasi masalah biaya transaksi, contohnya, pemberian insentif, juga akan berpengaruh terhadap perilaku pihak-pihak lain. Dengan kata lain, struktur organisasi dan pemerintahan dalam suatu perusahaan akan memegang peranan penting atas apa yang dilakukan perusahaan tersebut. Dalam menjelaskan biaya transaksi pada suatu perusahaan, akan sangat membantu apabila dipahami terlebih dahulu istilah “pertukaran” sebagai “susunan kontrak”. Transaksi perusahaan mencakup dalam susunan kontrak dari faktor produksi, sedangkan pasar mencakup susunan kontrak dari output.

Pola kemitraan adalah alat yang digunakan pabrik gula untuk mendapatkan bahan baku tebu yang berkualitas baik dan dalam jumlah yang besar. Sebagai latar belakang, pada Lampiran 3 dicantumkan gambaran pola kemitraan antara pabrik gula (PG Kebon Agung) dan pihak lain yang terkait langsung dengan proses produksi gula : petani, kelompok petani, dan koperasi. Apabila bahan baku tebu yang berkualitas baik dan dalam jumlah yang besar didapatkan, bukan hanya pabrik gula yang menerima keuntungan tetapi juga para petani tebu. Pola kemitraan seperti ini menaikkan biaya transaksi, terutama untuk pabrik gula. Melalui pola kemitraan ini, pabrik gula diwajibkan untuk memberikan subsidi transportasi, penyuluhan, serta bonus-bonus. Proses tersebut diatas menimbulkan biaya transaksi dan beberapa dibebankan ke pabrik gula. Tetapi tidak semua biaya transaksi disebabkan karena pola kemitraan dibebankan kepada pabrik gula, beberapa dibebankan kepada petani tebu. Contohnya, petani harus membayar bunga kredit, biaya tebang-muat-angkut, dan potongan pendapatan untuk beberapa kebutuhan (karung, pajak, dsb).

Dalam konteks perusahaan, biaya transaksi dapat diidentifikasi sebagai biaya pengaturan pekerja dan pengguna; pemrosesan informasi; koordinasi supplier; biaya akuisisi; memotivasi konsumen; pengaturan distribusi; penyesuaian terhadap hukum dan peraturan; memuaskan para pemegang saham; fee; komisi, pungutan, dan pajak; dan penelitian dan pengembangan. Dapat kita

kategorikan biaya transaksi menjadi tiga bentuk, yaitu : Pertama, biaya administrasi, biaya ini timbul dari input sumberdaya yang dibutuhkan untuk transaksi. Biasanya termasuk administratif “overheads”, yaitu waktu staff. Kedua, biaya tidak langsung, biaya ini ditimbulkan dari pengaruh mekanisme pengantaran pada proses pencapaian tujuan, yaitu subsidi transportasi dan tebung-muat-angkut. Ketiga, biaya korbanan, biaya ini mengukur keuntungan dari penerapan alternative pada proses pengambilan keputusan, terutama perbedaan antara manajemen terpusat dan tidak terpusat.

Sumber data untuk menganalisis biaya produksi dan biaya transaksi pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan pabrik gula. Beberapa variable seperti biaya pengambilan keputusan tidak ada dalam laporan keuangan tahunan pabrik gula, akan dihitung menggunakan analisis yang lain yaitu dengan pendekatan biaya korbanan. Dengan melihat definisi diatas, biaya transaksi pada pabrik gula terutama biaya transaksi manajerial lebih rumit, karena biaya transaksi tersebut biasanya hanya ada di perusahaan yang mempunyai asset, sumberdaya manusia, dan hirarki dalam pengambilan keputusan. Karakteristik-karakteristik tersebut menimbulkan biaya transaksi. Disamping itu, dalam konteks biaya transaksi pasar, pabrik gula juga mempunyai keterkaitan erat dengan berbagai pihak seperti petani, kelompok tani, koperasi, distributor, notaris (badan hukum), bank, dan lain-lain. Hubungan tersebut berkaitan dengan proses untuk mendapatkan bahan baku mentah dan distribusi gula. Pabrik gula juga harus berurusan dengan kebijakan pemerintah (biaya transaksi politik) agar bisnis/usaha bisa berjalan dengan lancar. Biaya transaksi yang termasuk biaya transaksi politik dalam hal ini adalah pembayaran pajak, keamanan, sumbangan, penduplikasian pajak, dan biaya tidak terduga.

Biaya transaksi manajerial pada pabrik gula bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : Biaya transaksi manajerial internal dan Biaya transaksi manajerial eksternal. Biaya transaksi manajerial internal bisa diartikan sebagai biaya transaksi yang timbul dari model internal manajemen perusahaan, contohnya kebijakan tingkat upah, fasilitas, dan perawatan. Pada level ini, besarnya biaya transaksi tergantung dari seberapa efisien institusi manajemen mendukung proses

produksi. Biaya transaksi manajerial eksternal adalah biaya transaksi yang berhubungan dengan kewenangan pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Pada kasus pabrik gula di Kabupaten Malang, manajemen pabrik gula yang dipimpin oleh Direktur/CEO (Chief Executive Officer) tidak mempunyai kewenangan penuh untuk memutuskan sesuatu karena semua proposal harus mendapat persetujuan dari Dewan Direksi (PTPN/PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk Pabrik Gula BUMN (PG Krebet Baru) dan PT. Kebon Agung untuk Pabrik Gula Swasta PT.PG. Kebon Agung). Masalah yang sering terjadi adalah Dewan direksi biasanya tidak mengetahui secara pasti kebutuhan yang dibutuhkan pabrik gula (jenis yang dibutuhkan atau kapan membutuhkannya) sehingga yang terjadi Dewan direksi sering mengganggu proses produksi. Dalam kasus ini, manajemen yang terpusat menimbulkan biaya transaksi yang sangat besar untuk pabrik gula, yang menunjukkan ketidakefisienan pada manajemen perusahaan.

Direktur dari Pabrik Gula Krebet Baru adalah Administratur yang membawahi enam divisi, yaitu : Divisi Tata Usaha Keuangan, Divisi Tanaman, Divisi Instalasi (KB I dan KB II), Divisi Pabrikasi (KB I dan KB II). Divisi TUK bertanggung jawab dalam administrasi, keuangan, dan akuntansi; Divisi Tanaman bertanggung jawab dalam tanam menanam, penyuluhan, tebang angkut; Divisi instalasi bertanggung jawab dalam alat-alat pabrik (mesin-mesin), kendaraan, bangunan, keamanan; Divisi Pabrikasi bertanggung jawab dalam hal pengolahan tebu menjadi gula, laboratorium, analisa dan limbah.

Direktur/CEO dari Pabrik Gula Kebon Agung membawahi empat divisi, yaitu : Divisi Tata Usaha, Divisi Tanaman, Divisi Teknik, dan Divisi Pabrik, masing-masing divisi mempunyai sub-divisi. Divisi tata usaha bertanggung jawab dalam pengaturan administrasi, keuangan, staff, computer, dan logistik; Divisi Tanaman mengatur tentang waktu atau jadwal menanam dan memanen, penyuluhan, dan pengembangan bibit; Divisi teknik mempunyai tugas dalam hal pemrosesan tebu menjadi gula dan alat-alat pabrik; dan Divisi pabrik mempunyai tugas dalam hal proses penimbangan gula, laboratorium, pengemasan gula, dan lingkungan

Tabel 30 . Kategori Biaya Transaksi di Pabrik Gula Krebet Baru

Kategori	Keterangan	Pengeluaran
Biaya Transaksi Pasar		
Biaya Angkut	Biaya Transportasi untuk mengangkut tebu ke pabrik gula	Eksplisit
Biaya Promosi	Biaya untuk promosi	Eksplisit
Stuffing/loading container	Biaya pengisian dan pengemasan	Eksplisit
Biaya Transaksi Manajerial		
Gaji/Upah	Pembayaran untuk aktivitas kepala dan administrasi, Pembayaran untuk kesejahteraan buruh tidak tetap.	Eksplisit
Transportasi dan Administrasi	Biaya untuk tunjangan Transportasi dan administrasi pegawai	Eksplisit
Utilitas	Biaya untuk perawatan kendaraan (mobil, bis), lori dan lokomotif, sepeda motor, traktor, dan lain-lain.	Eksplisit
Pemeliharaan	Biaya perbaikan mesin giling, ketel, kantor dan pabrik, Biaya Rumah dinas, Klinik, dan bangunan umum	Eksplisit
Asuransi	Biaya jaminan sosial dan asuransi karyawan/pekerja	Eksplisit
Kantor dan Umum	Biaya jalan, jembatan, kanal, rel lori permanent, Biaya listrik untuk kantor, pabrik, dan listrik penunjang lainnya retribusi air, instalasi sampah	Eksplisit
Entertainment	Biaya untuk jamuan atau acara hiburan	Eksplisit
Jasa Profesional	Biaya untuk membayar jasa konsultan dan akuntan	Eksplisit
Jasa Produksi Karyawan	Pembayaran untuk upah giling lembur, terutama pada musim giling	Eksplisit
Administrasi PRB	Pembayaran untuk tenaga kerja (administrasi dan manajemen) tetap	Eksplisit
Penjualan gula kontrak A dan tetes	Biaya penjualan kontrak gula dan tetes	Eksplisit
Bunga pinjaman modal kerja	Biaya Bunga dari modal kerja	Eksplisit
Penghapusan pinjaman gilingan	Biaya penghapusan pinjaman gilingan	Eksplisit
Biaya pengurusan jemaah haji	Biaya untuk pengurusan karyawan/pegawai yang ingin berangkat haji	Eksplisit

Lain-lain	Biaya yang tidak tercatat secara detail pada laoparan keuangan tahunan	Eksplisit
Pengambilan Keputusan	Biaya keterlambatan pengambilan keputusan	Eksplisit
Biaya Transaksi Politik		
Pajak-pajak	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPH) pada penyewaan tanah, dan lain-lain	Eksplisit
Komisi Ekspor (pakan ternak)	Biaya komisi ekspor untuk produk sampingan dari tebu (pakan ternak)	
Lain-lain	Biaya yang selalu muncul di setiap pos/pengeluaran divisi	Implisit

Sumber : Data Primer, 2006

Biaya Transaksi Politik yang dibayarkan pabrik gula berkaitan dengan kebijakan pemerintah ada yang legal dan ada yang ilegal. Biaya transaksi politik yang legal misalnya, pembayaran pajak (listik, air, tanah, dan lain-lain), kontribusi kepada P3GI, dan lain-lain. Biaya transaksi politik yang ilegal adalah sumbangan untuk keamanan, sumbangan untuk pemerintah daerah (untuk acara tertentu), sebenarnya sumbangan-sumbangan tersebut tidak wajib, tetapi apabila pabrik gula tidak membayarnya maka pabrik gula akan kesulitan dalam mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, contohnya perpajakan dan perijinan. Dengan pertimbangan ini, maka mau tidak mau pabrik gula harus menganggarkan sumbangan-sumbangan tersebut. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa biaya transaksi politik (legal maupun illegal) mencapai 20-30% dari total biaya korporasi di Pabrik Gula, sehingga faktor inilah yang dianggap sebagai sumber ketidakefisiensian kelembagaan di industri gula Indonesia.

Beberapa biaya transaksi bahkan tidak dilaoprkan di laporan keuangan tahunan pabrik gula. Pertama, biaya-biaya disebabkan adanya hirarki yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Misalnya pabrik gula mengajukan permohonan untuk membeli mesin baru ke Dewan Direksi (PTPN), tetapi pada prakteknya mesin yang diminta datang terlambat (sekitar 2 bulan). Biaya transaksinya dihitung dari kerugian yang ditimbulkan keterlambatan, seperti output produksi yang gagal diproduksi dan buruh yang menganggur

padahal mereka telah terikat kontrak dengan pabrik gula. Kedua, biaya transaksi yang disebabkan karena penduplikasian pajak dikarenakan adanya kebijakan otonomi daerah, setiap bulan Pabrik gula dikenakan pajak air yang double yang ditarik oleh Dispenda (Dinas Pendapatan daerah) dan Perum Jasa Tirta. Ketiga, Biaya transaksi yang dikarenakan mesin tidak berfungsi dengan baik pada saat memasuki masa giling. Umumnya mesin berhenti bekerja untuk dua alasan : (1) jadwal yang dirubah; (2) mesin rusak , pada prakteknya kejadian mesin yang rusak sangat sering, sedikitnya 100 dari 300 jam giling per musim giling. Keempat, biaya transaksi yang ditimbulkan oleh kegiatan “overlapping” karena model manajemen yang ditetapkan oleh perusahaan, contohnya pembelian barang dilakukan oleh dua divisi yaitu divisi adminbistrasi dan divisi pabrik.

Tabel 31. Kategori Biaya Transaksi di Pabrik Gula Kebon Agung

Kategori	Keterangan	Pengeluaran
Biaya Transaksi Pasar		
Penyuluhan	Biaya untuk menyelenggarakan penyuluhan bagi para petani	Eksplisit
Bonus/Premium	Pembayaran untuk tebu petani yang berkualitas premium dan bersih-segar-manis	Eksplisit
Subsidi Transportasi	Biaya untuk subsidi transportasi petani	Eksplisit
Biaya Transaksi Manajerial		
Gaji/Upah	Pembayaran untuk gaji/upah tetap para pekerja	Eksplisit
Fasilitas Perusahaan	Biaya untuk pendidikan dan pelatihan, kesehatan, olahraga dan keamanan	Eksplisit
Biaya Makan	Biaya untuk makan para pegawai	Eksplisit
Biaya Pensiun	Pembayaran untuk tunjangan para pegawai yang sudah pensiun	Eksplisit
Biaya Komunikasi	Pembayaran untuk surat-menyurat, telepon, fax, dan lain-lain.	Eksplisit
Peralatan	Biaya pembelian peralatan terbang, peralatan umum/material gedung, barang-barang, buku/koran/majalah	Eksplisit
Suku Cadang	Biaya untuk pembelian suku cadang lokomotif, lori, kendaraan, dan peralatan pertanian	Eksplisit
Biaya Khusus	Biaya perbankan/perangko, infrastruktur,	Eksplisit

	akomodasi,akuntan/konsultan, biaya operasional	
Listrik	Pembayaran untuk air, listrik dan listrik pabrik gula pada saat bukan masa giling	Eksplisit
Tunjangan Staff/buruh	Pembayaran untuk hari libur, asuransi pegawai, pensiun, jaminan social dan masa kerja	Eksplisit
Kesehatan	Biaya Kesehatan untuk staff dan bukan staff	Eksplisit
Perawatan	Biaya perawatan dan perbaikan mesin	Eksplisit
Transport Resmi	Pembayaran untuk staff/transport resmi para pegawai	Eksplisit
Pemadam Kebakaran	Biaya untuk keamanan pemadam kebakaran	Eksplisit
Pengambilan Keputusan	Biaya keterlambatan pengambilan keputusan	Implisit
Biaya Transaksi Politik		
Pajak-pajak	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) pada penyewaan tanah, dan lain-lain.	Eksplisit
Keamanan	Biaya keamanan (satpam), perkebunan dan giling.	Eksplisit
Biaya Tidak Terduga	Biaya yang selalu muncul di setiap pos/pengeluaran divisi	Eksplisit

Sumber: Data Primer, 2006

Dari tabel 30 dan tabel 31 dapat dilihat bahwa kategori biaya transaksi pada pabrik gula Kebon Agung dan pabrik gula Kribet Baru tidak terlalu jauh berbeda walaupun kedua pabrik dinaungi oleh dua perusahaan (institusi) yang berbeda. Pabrik gula Kebon Agung dinaungi oleh PT.Kebon Agung sebagai perusahaan swasta dan Pabrik gula Kribet Baru dinaungi oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia I yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Apabila kita analisa secara lebih mendalam, ada beberapa struktur biaya yang berbeda antara dua pabrik gula tersebut. Pertama, pabrik gula Kebon Agung memiliki biaya transaksi pasar yang lebih banyak dari pabrik gula Kribet baru dikarenakan adanya subsidi transportasi, bonus dan biaya penyuluhan, yang mana variable-variabel tersebut tidak terdapat di pabrik gula Kribet Baru. Sehingga dari keberadaan biaya transaksi tersebut dapat kita katakan bahwa pabrik gula Kebon

Agung lebih responsif terhadap petani daripada pabrik gula Kreet Baru. Kedua, pabrik gula Kreet Baru mempunyai biaya transaksi politik yang lebih banyak daripada pabrik gula Kebon Agung, karena adanya penduplikasian pajak, sumbangan dan pengeluaran yang illegal untuk pemerintah daerah, pengeluaran illegal ini adalah pengeluaran yang biasa untuk pabrik gula BUMN sebagai bagian dari birokrasi. Biaya transaksi manajerial antara pabrik gula Kebon Agung dan pabrik gula Kreet baru pada dasarnya tidak jauh berbeda. Tetapi, peranan direktur (CEO) pabrik gula Kebon Agung terlihat lebih menonjol dibandingkan pabrik gula Kreet Baru sehingga biaya pengambilan biaya pengambilannya lebih rendah. Pada pabrik gula Kreet Baru juga ditemukan kegiatan yang “overlapping” karena satu aktivitas dilakukan oleh dua divisi, sehingga menimbulkan biaya yang lebih besar. Dari hasil diatas, dapat diketahui bahwa biaya transaksi pada level pabrik gula cukup besar.

Biaya yang berkaitan dengan produk bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang secara langsung berkaitan dengan produk yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan produk, seperti biaya pembelian mesin, biaya perlakuan material, biaya peralatan, dan lain-lain. Penelitian ini menganggap bahwa biaya langsung dan tak langsung sama dengan biaya produksi. Dapat dilihat dari tabel 31, jenis-jenis biaya produksi lebih sederhana dari biaya transaksi. Di pabrik gula Kebon Agung, biaya produksi meliputi persiapan giling, gaji dan upah untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, upah lembur, pungutan untuk karung gula petani, proses penggilingan tebu, akuisisi suku cadang perusahaan, biaya pelengkap, dan pemrosesan lahan. Pada pabrik gula Kreet Baru, biaya produksi meliputi : proses penggilingan tebu, kebutuhan dalam kerjasama dan proses, stasiun pengisian bahan bakar, divisi teknik, upah lembur, insentif untuk buruh giling, bahan bakar, upah tenaga kerja pada divisi pabrikasi, pengemasan gula, pembelian oleh investigator peralatan, biaya tanaman, pemrosesan lahan, pupuk dan pestisida, bibit. Pada umumnya tidak ada yang berbeda dari biaya produksi baik dari pabrik gula Kebon Agung maupun pabrik

gula Krebet Baru, karena bahan baku mentah yang digunakan dan outputnya mempunyai karakteristik yang sama.

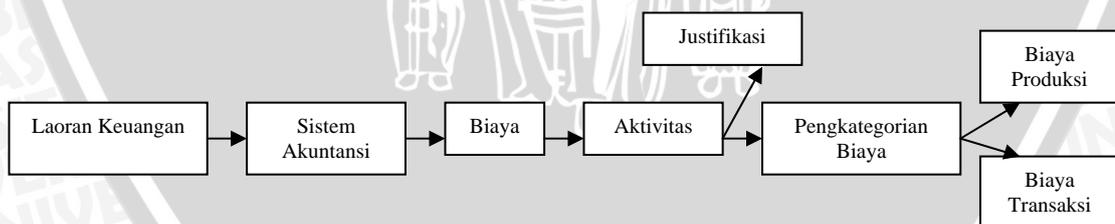
Tabel 32 , Kategori Biaya Produksi Pabrik Gula

No	Pabrik Gula Kebon Agung	Pabrik Gula Krebet Baru
1	Persiapan dan Mesin giling	Pengelolaan
2	Upah tenaga kerja (tenaga kerja tidak tetap)	Tanaman
3	Bahan bakar	Tebang dan Angkut
4	Honor lembur pekerja	Pembikinan Gula
5	Bahan kimia	Pemeliharaan
6	Minyak pelumas	Penyusutan
7	Pengemasan dan pungutan karung	Pembungkusan dan Pengangkutan Gula
8	Suku cadang mesin	
9	Bibit dari pabrik	
10	Pemrosesan lahan	
11	Biaya pelengkap	

Sumber : Data Primer, 2006

6.3.1. Klasifikasi Variabel pada Pabrik Gula

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan laporan tahunan PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung (2003-2004). Data dikategorikan menjadi dua jenis, biaya produksi dan biaya transaksi.



Gambar 11. Proses Klasifikasi Biaya Produksi dan Biaya Transaksi

Sumber : Data Primer, 2006

6.3.2.1. Biaya Produksi dan Biaya Transaksi pada PG Krebet Baru

Pengeluaran pada pabrik gula Krebet Baru dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan biaya produksi dan biaya transaksi, sama halnya dengan pabrik gula Kebon Agung. Pada komposisi biaya produksi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua pabrik gula ini, karena mereka mempunyai aktivitas produksi dan ekonomi yang sama yaitu menggiling tebu. Apabila jumlah dan besarnya biaya produksi berbeda, hal ini lebih dikarenakan kapasitas produksi yang berbeda, jumlah pekerja, dan perbedaan variable biaya produksi. Tetapi pada kasus biaya transaksi, akan sangat mungkin ditemukan perbedaan variable antara dua pabrik gula ini dikarenakan perbedaan pemegang saham dan struktur organisasi. Pabrik gula Kebon Agung adalah pabrik gula dibawah manajemen swasta tanpa proses hirarkis pengambilan keputusan yang bertele-tele. Oleh karena itu, lebih fleksible bagi CEO untuk merencanakan dan menerapkan keputusan. Sebaliknya, pada pabrik gula Krebet Baru yang dikelola oleh pemerintah melalui PT. Rajawali Nusantara Indonesia, dimana hirarki pengambilan keputusan lebih panjang. Dewan Direksi yang membuat hampir semua keputusan strategis, sehingga wewenang CEO sangat terbatas. Dengan karakteristik yang berbeda ini, maka komposisi dan besarnya biaya transaksi pada dua pabrik gula ini tentu saja berbeda.

Biaya produksi pabrik gula Krebet Baru dapat dilihat pada tabel 32. Ada beberapa hal yang menarik, yaitu : (1) Pengeluaran tertinggi dari proses produksi adalah pengeluaran pembuatan gula yang mencapai Rp 27 milyar pada tahun 2004 yaitu mencapai 38,84 % persen dari total biaya produksi, tingginya biaya pada proses pembikinan gula ini normal dikarenakan aktivitas utama dari pabrik gula adalah membikin gula, sehingga semua konsentrasi proses produksi adalah pada pembikinan gula.(2) Pengeluaran tertinggi selanjutnya adalah pengelolaan yang mencapai 11 milyar atau 19,098 % dari total biaya produksi pada tahun 2003, dan 12 milyar atau 17,4 % pada tahun 2004. Yang dimaksud pengelolaan disini adalah Persiapan dan Mesin giling, upah tenaga kerja (tenaga kerja tidak tetap), bahan bakar, honor lembur pekerja. Sedangkan pengeluaran Pemeliharaan yang mencapai 18,8% pada tahun 2003 dan 15,83 % pada tahun 2004 dari total

biaya konsumsi adalah pengeluaran untuk merawat dan memelihara mesin seperti pembelian minyak pelumas dan suku cadang mesin. (3) Pengeluaran untuk pembungkusan dan pengangkutan gula meningkat hampir 50 % dari tahun 2003 ke 2004, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah produksi gula tahun 2004.

Dari tabel 33 dapat dilihat bahwa total biaya produksi cenderung meningkat dari tahun 2003 ke 2004. Peningkatan biaya produksi ini disebabkan oleh : (a) Peningkatan harga bahan baku (tebu) dan beberapa bahan kimia untuk pembuatan gula; dan (b) Meningkatnya harga bahan bakar yang terjadi hampir setiap tahun yang berimbas pada meningkatnya biaya produksi.

Tabel 33. Biaya Produksi pada Pabrik Gula Kreet Baru (Juta Rupiah)

Pabrik Gula Kreet Baru	2003	2004
Pengelolaan	11.669 (19.098%)	12.571 (17.47%)
Tanaman	2.985 (4.84%)	3.708 (5.15%)
Tebang dan Angkut	8.085 (13.23%)	10.154 (14.11%)
Pembikinan Gula	22.370 (36.60%)	27.952 (38.84%)
Pemeliharaan	11.503 (18.82%)	11.397 (15.83%)
Penyusutan	3.126 (5.11%)	3.890 (5.43%)
Pembungkusan dan Pengangkutan Gula	1.366 (2.23%)	2.285 (3.17%)
Total Biaya Produksi	61.104 (100%)	71.957 (100%)

Sumber : Data Primer (diolah), 2006

Susunan pembentuk biaya transaksi pada pabrik gula Kreet Baru dapat dilihat pada tabel 33. Data pada tahun 2003 tidak lengkap dikarenakan dalam laporan keuangan yang diberikan kepada penulis, beban administrasi dan umum yang tercatat hanya tahun 2004. Tabel 33 tersebut dapat memberikan informasi sebagai berikut : (1) Pengeluaran tertinggi adalah dari bunga pinjaman modal yang mencapai Rp 4,1 milyar, diikuti oleh gaji dan upah yang mencapai Rp 4 milyar, lalu penjualan gula kontrak A dan tetes kemudian jasa produksi karyawan ; (2) Biaya angkut menurun Rp 20 juta pada tahun 2004, hal ini disebabkan penurunan tebu yang diproses di pabrik gula Kreet Baru; (3) Bunga pinjaman

naik Rp 1 milyar pada tahun 2004, hal ini disebabkan pada tahun 2004 pabrik gula Krebet Baru mengadakan perombakan secara besar-besaran pada pabrik dan mesin-mesinnya, sehingga modal yang digunakan cukup besar; (4) Penemuan yang menarik juga adalah adanya biaya entertainment yang mencapai Rp 47 juta, untuk apa dan pada situasi apa biaya entertainment itu dikucurkan.

Dari komposisi biaya transaksi pada pabrik gula Krebet Baru dapat dilihat sebagai berikut, Pertama, besarnya biaya lain-lain yang tidak teridentifikasi secara baik mencapai Rp 740 juta. Hampir semua pos pengeluaran menggunakan biaya lain-lain (manajemen biasanya mengambil 10 % dari total biaya pos pengeluaran). Biasanya akunting tidak mengetahui penggunaan dari biaya lain-lain tersebut. Hal ini dianggap sebagai biaya illegal dimana penggunaannya merata dari direktur, top manajer, dan pembayaran illegal kepada pemerintah daerah. Praktek seperti ini biasanya terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana perusahaan dikenakan biaya/iuran yang illegal oleh pihak legal pemerintah. Kedua, pabrik gula juga dibebani biaya administrasi yang terduplikasi (transportasi dan administrasi serta administrasi PRB), sehingga menyebabkan biaya transaksinya membengkak. Hal ini tidak rasional apabila kita lihat jumlahnya yang mencapai hampir Rp 800 juta, hal ini mengindikasikan telah terjadi proses “mark-up” yang mana tanggung jawab ada pada dewan direksi.

Apabila kita membedakan biaya transaksi menurut jenisnya, maka proporsi biaya transaksi manajerial adalah penyumbang kontribusi terbesar terhadap total biaya transaksi yaitu sekitar 90,5 %. Kemudian diikuti oleh biaya transaksi politik (7,5 %) dan biaya transaksi pasar (2 %). Komponen biaya transaksi manajerial yang paling dominan adalah bunga pinjaman modal kerja, gaji/upah, penjualan gula kontrak A dan tetes, jasa produksi karyawan, transportasi dan administrasi. Komponen terbesar dari biaya transaksi politik adalah biaya lain-lain, macam-macam EMKI, pajak-pajak. Komponen terbesar dari biaya transaksi pasar adalah biaya angkut. Dari data tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi biaya transaksi dari pabrik gula selalu berhubungan dengan manajemen mereka.

Tabel 34. Biaya Transaksi pada Pabrik Gula Kreet Baru (Juta Rupiah)

Kategori	2003	2004
Biaya Transaksi Pasar		
Biaya Angkut	243	223
Biaya Promosi	3	7
Stuffing/loading container	15	11
Sub Total	261	241
Biaya Transaksi Manajerial		
Gaji/Upah	-	4.029
Transportasi dan Administrasi	-	526
Utilitas	-	256
Pemeliharaan	-	103
Asuransi	-	6
Kantor dan Umum	-	275
Entertainment	-	47
Jasa Profesional	-	97
Jasa Produksi Karyawan	-	1.008
Administrasi PRB	-	297
Penjualan gula kontrak A dan tetes	58	1.115
Bunga pinjaman modal kerja	3.062	4.117
Penghapusan pinjaman gilingan	0,18	0
Biaya pengurusan jemaah haji	32	0
Lain-lain	0,24	111
Sub Total	3152,42	11987
Biaya Transaksi Politik		
Pajak-pajak	211	-
Komisi Ekspor (pakan ternak)	104	104
Macam-macam EMKI	257	159
Lain-lain	-	740
Sub Total	572	1003
Total Biaya Transaksi	3765,42	13231
Total Biaya (BP+BT)	64869,42	85188

Sumber : Data Primer (diolah), 2006

Fakta tersebut diatas mendukung restrukturisasi perusahaan sebagai bagian dari inovasi struktur pemerintahan pabrik gula untuk mengurangi besarnya biaya transaksi manajerial. Penjelasan “transaksi restrukturisasi perusahaan” digunakan untuk mencakup perkembangan organisasional- pengaruh penjualan, penjualan

dan pembelian manajemen, pengaruh rekapitalisasi dan uang keluar, kepemilikan saham pegawai, struktur financial dan sistem insentif perusahaan. Dengan mengubah hal tersebut, akan dapat mengamankan : pertama, penyatuan substansial dari pemegang saham dan kontrol manajer; kedua, substitusi sebagian dari beberapa jenis instrument hutang untuk keseragaman dalam struktur financial perusahaan; ketiga, pengenalan pemberian insentif yang meningkat untuk investor dan atau para peminjam untuk mengawasi manajer senior; keempat, pengenalan insentif yang lebih besar pada puncak hirarki manajerial dan juga pada level di bawahnya.

Laporan tahunan pabrik gula Kribet baru juga memberikan informasi tentang sumber pendapatan. Pertama, pendapatan tertinggi adalah dari penjualan gula (pabrik gula mendapat 35% dari gula yang diproduksi), yang besarnya 78,89 % dari total pendapatan pabrik gula. Kedua, pendapatan tertinggi kedua diperoleh dari produksi tetes, sekitar 15,07 % dari total pendapatan pabrik gula. Ketiga, adanya produksi pakan ternak hasil diversifikasi dari tebu dapat menambah pendapatan dari pabrik gula, selain itu juga ada bunga jasa giro/tabungan, penggantian biaya crane dari KUD, sewa gudang, selisih kurs, bunga pinjaman non program, penjualan bibit tebu, selisih penjualan harga karung, dan pendapatan lain-lain. Keseluruhan pendapatan yang diperoleh pabrik gula cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sekitar Rp 102 trilyun pada tahun 2003 dan meningkat menjadi Rp 105 trilyun pada tahun 2004.

6.3.2.2. Biaya Produksi dan Biaya Transaksi pada PG Kebon Agung

Untuk membandingkan biaya produksi dan biaya transaksi, terutama pada level perusahaan adalah aktivitas ekonomi yang tidak biasa. Hal ini dikarenakan asumsi ekonomi neo klasik menganggap biaya transaksi adalah nol. Didalam ekonomi kelembagaan dipercaya bahwa setiap transaksi membutuhkan biaya transaksi positif. Setiap keputusan ekonomi (pengambilan keputusan dan kontrak) selalu mengandung biaya yang bisa dirumuskan. Contohnya apabila ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan terhentinya proses produksi. Total produksi yang hilang dikarenakan keterlambatan pengambilan keputusan dapat dihitung sebagai biaya transaksi dalam pendekatan

ekonomi kelmbagaan. Keberadaan analisis biaya transaksi sangat berguna untuk merancang aturan main yang efisien pada level perusahaan. Sebaliknya, tanpa analisis biaya transaksi, suatu perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menaikkan efisiensi dikarenakan penekanannya hanya pada biaya produksi. Analisis biaya produksi dan biaya transaksi sangat berguna untuk proses peningkatan efisiensi suatu perusahaan.

Data pada Tabel 35 menunjukkan variable biaya produksi pada PG Kebon Agung. Beberapa penemuan menarik adalah : (1) Prosentase tertinggi dari biaya produksi adalah dari persiapan giling, yaitu 36 persen dari total biaya produksi pada tahun 2003. Persiapan giling termasuk didalamnya perawatan mesin, tes mesin giling, upah buruh yang terlibat dalam proses giling. Besarnya biaya persiapan giling ini menandakan dua kemungkinan, banyaknya mesin produksi yang rusak dan manajemen pabrik gula yang tidak efisien dalam mempersiapkan biaya awal giling, pengeluaran terbesar kedua adalah akuisisi dari bahan baker, bahan-bahan kimia, upah lembur, upah pekerja, dan stasiun giling; (2) Pengeluaran upah pekerja pada divisi pabrikasi, terutama untuk pekerja tidak tetap, menurun drastis pada tahun 2004 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan pengeluaran upah untuk pekerja tidak tetap ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam merestrukturisasi sistem kerja untuk mengurangi pekerja dan lemburnya; (3) pengeluaran untuk membeli bahan-bahan kimia meningkat (lebih dari 100%) sebagai dampak dari meningkatnya harga bahan kimia.

Tabel 35. Biaya Produksi pada Pabrik Gula Kebon Agung (Juta Rupiah)

Pabrik Gula Kebon Agung	2003	2004
Persiapan dan Mesin giling	8.325 (23,4%)	9.219 (36,59%)
Upah tenaga kerja (tenaga kerja tidak tetap)	6.766 (19,06%)	1.498 (5,9%)
Bahan bakar	3.948 (11,12%)	2.219 (8,81%)
Honor lembur pekerja	1.684 (4,7%)	3.606 (14,3%)
Bahan kimia	767 (2,16%)	748 (2,96%)
Minyak pelumas	6.534 (18,41%)	3.699 (14,68%)
Pengemasan dan pungutan karung	194 (0,5%)	59 (0,23%)
Suku cadang mesin	635 (1,78%)	507 (2,0%)
Bibit dari pabrik	-	-
Pemrosesan lahan	4.980 (14,03%)	2.696 (10,7%)
Biaya pelengkap	1.656 (4,6%)	939 (3,727%)
Total Biaya Produksi	35.489 (100%)	25.190 (100%)

Sumber : Data Primer (diolah), 2006

Dari susunan biaya produksi diatas, didapatkan dua hal yang sangat menarik. Pertama, tingginya proporsi biaya persiapan dan mesin giling yang mencapai 36 persen dari total biaya produksi. Hal ini sangat tidak umum karena seharusnya biaya persiapan harus lebih kecil dibanding biaya produksi itu sendiri. Kedua, manajemen pabrik gula telah berhasil dalam mengurangi upah pekerja secara drastis, termasuk upah lembur pekerja. Dapat dikatakan berhasil karena penurunan pengeluaran untuk upah pekerja ini tidak dicapai melalui pengurangan tingkat upah, tetapi melalui perencanaan produksi yang cermat yang meminimalkan lembur dan menghindari waktu “off” pekerja dikarenakan terhentinya proses produksi. Dari dua alasan penting diatas, maka penting untuk manajemen Pabrik Gula Kebon Agung untuk menurunkan besarnya proporsi biaya persiapan giling dan mesin produksi.

Pada tabel dapat dilihat susunan dan besar biaya transaksi dari pabrik gula Kebon Agung yang menunjukkan: (1) Upah tenaga kerja tetap meningkat tajam pada tahun 2004. Hal ini dikarenakan perubahan status dari banyaknya pekerja tidak tetap yang diangkat menjadi pekerja tetap. Apabila kita lihat lebih lanjut, upah pekerja tetap inilah yang mempunyai kontribusi paling besar yaitu sebesar 25 % dari total biaya transaksi. Pengeluaran terbesar selanjutnya adalah biaya pension, tunjangan staff/pekerja, dan subsidi transportasi; (2) Pengeluaran untuk peralatan juga meningkat sangat besar pada tahun 2004, yaitu lebih dari 300 %. Hal ini dikarenakan karena adanya renovasi dan pembangunan rumah dinas bagi para pegawai pabrik gula, sebagai tambahan informasi hampir sebagian besar staff pabrik gula mendapatkan fasilitas rumah dinas; (3) Pada pengeluaran pos biaya khusus (administrasi, infrastruktur, akomodasi, konsultan dan akuntan, pengujian, operasional), terdapat kenaikan yang sangat tajam (600%) pada tahun 2004. Dari total biaya khusus yang mencapai 2,4 juta, sebagian besar (1,5 juta) digunakan untuk membayar konsultan dan akuntan untuk menghitung pajak perusahaan; (4) Pengeluaran untuk insentif pekerja juga meningkat sangat signifikan, sebesar 35%. Hal ini meningkat dikarenakan banyaknya pekerja pabrik gula yang pensiun sehingga pabrik gula mempunyai kewajiban untuk membayar tunjangan pensiun mereka; (5) Biaya transportasi juga meningkat sekitar 100 % pada tahun 2004, hal ini dikarenakan pabrik gula meningkatkan subsidi transportasi dari Rp 1500/ku tebu menjadi Rp 5000/ku tebu untuk mencegah petani tebu menjual tebu mereka ke pabrik gula lain.

Besarnya komposisi biaya transaksi pada pabrik gula Kebon Agung tidak dapat mutlak menunjukkan bahwa “rules of the game” atau aturan main pabrik gula Kebon Agung tidak efisien, pada kasus tertentu biaya transaksi menjadi alat jaminan kepastian untuk pabrik gula atau kesejahteraan para pekerja pabrik gula. Contohnya pada kasus peningkatan subsidi transportasi, itu untuk memastikan bahwa pabrik gula tidak akan kekurangan pasokan tebu sebagai bahan baku utama pembuatan gula. Dengan meningkatnya subsidi transportasi, diharapkan menjadi perangsang bagi para petani tebu untuk mengirimkan tebu mereka ke pabrik gula Kebon Agung. Peningkatan kesejahteraan pegawai (melalui peningkatan

tunjangan dan renovasi rumah dinas) diharapkan mampu menumbuhkan loyalitas dan meningkatkan produktivitas pegawai. Satu hal yang harus diperhatikan dari besarnya biaya transaksi pada pabrik gula Kebon Agung yaitu perubahan status dari pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap padahal kenyataannya pabrik gula tidak butuh terlalu banyak pekerja tetap dikarenakan sebagian aktivitas terpusat pada aktivitas produksi (giling) yang hanya berlangsung kurang lebih 6 bulan per tahun.

Tabel 36. Biaya Transaksi pada Pabrik Gula Kebon Agung (Juta Rupiah)

Kategori	2003	2004
Biaya Transaksi Pasar		
Penyuluhan	69	94
Bonus/Premium	3.039	2.726
Subsidi Transportasi	2.594	4.769
Sub Total	5.702	7.589
Biaya Transaksi Manajerial		
Gaji/Upah	5.994	10.825
Fasilitas Perusahaan	448	436
Biaya Makan	20	31
Biaya Pensiun	4.671	5.240
Biaya Komunikasi	64	58
Peralatan	252	1.057
Suku Cadang	39	32
Biaya Khusus	314	2.410
Listrik	1.176	1.677
Tunjangan Staff/buruh	3.118	5.004
Kesehatan	504	606
Perawatan	4.413	3.356
Transport Resmi	55	95
Pemadam Kebakaran	6	5
Pengambilan Keputusan	-	256
Sub Total	21.074	31.088
Biaya Transaksi Politik		
Pajak-pajak	197	279
Keamanan	65	1
Biaya Tidak Terduga	742	642
Sub Total	1004	922
Total Biaya Transaksi	27.780	39.599
Total Biaya (BP+BT)	63.269	64.789

Sumber : Data Primer (diolah), 2006

Apabila komposisi biaya transaksi dibedakan berdasarkan jenisnya, maka proporsi dari biaya transaksi manajerial menyumbang prosentase terbesar

terhadap total biaya transaksi, mencapai 78,5 %. Diikuti oleh biaya transaksi pasar 19,2 % dan biaya transaksi politik 2,3 %. Komposisi ini sangat masuk akal dikarenakan aktivitas pabrik gula terpusat pada proses produksi input sehingga sebagian besar aktivitas berkaitan dengan manajemen produksi (manajerial). Biaya transaksi pasar untuk pabrik gula bergabung dengan petani tebu dan instansi yang terkait seperti koperasi dan bank. Pabrik gula berurusan dengan kebijakan pemerintah (biaya transaksi politik) pada pajak dan pengeluaran lain, seperti perbaikan jalan, aktivitas hari besar nasional, dan lain-lain. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar biaya transaksi pabrik gula berkaitan dengan aspek manajerial. Pada titik ini, model manajemen perusahaan sangat mempengaruhi besarnya biaya transaksi. Semakin efisien model manajemennya, maka semakin kecil biaya transaksi manajerialnya dan sebaliknya.

6.3.4. Perbandingan Biaya Produksi dan Biaya Transaksi pada PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung

Perbandingan biaya produksi dan biaya transaksi ini penting dilakukan karena Krebet Baru dan Kebon Agung adalah dua institusi pabrik gula yang berbeda; pabrik gula Krebet Baru adalah pabrik gula BUMN dan pabrik gula Kebon Agung adalah pabrik gula swasta. Dengan membandingkan dua institusi yang berbeda tersebut adalah metode yang terbaik untuk menganalisis efisiensi aktivitas ekonomi mereka. Beberapa literatur tentang NIE (New Institutional Economics) atau Ekonomi Kelembagaan menerangkan tentang “pendekatan kelembagaan secara komparatif”, yang secara berkala membandingkan alternatif susunan kelembagaan dengan dasar produktivitas atau efisiensi yang dinamis. Sistem efisiensi dari hak kepemilikan adalah salah satu yang memaksimalkan output sosial, atau mengurangi biaya transaksi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi menandakan ketidakefisienan pada hak kepemilikan yang muncul dari perilaku aparat negara yang menyebabkan sewa bersama dengan masalah pengukuran dan biaya transaksi. Perubahan kelembagaan yang efisien yang dapat mengurangi biaya transaksi atau

meningkatkan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi hanya dapat diterapkan pada pengeluaran individu atau kelompok saja.

Apabila kita membandingkan proporsi biaya transaksi antara pabrik gula Kreet Baru dengan pabrik gula Kebon Agung tentu saja berbeda. Di pabrik gula Kreet baru, proporsi biaya transaksi pada total aktivitasnya adalah 15,53 %. Di pabrik gula Kebon Agung, proporsi biaya transaksi pada total aktivitasnya mencapai 61,1 %. Tetapi, tingginya biaya transaksi pada pabrik gula Kebon Agung tidak bisa dikategorikan sebagai ketidakefisienan kelembagaan, karena pabrik gula Kreet baru mengeluarkan biaya yang tinggi juga untuk pengelolaan dan tanaman (tanah, tanaman dan pupuk). Hal ini dikarenakan pabrik gula Kreet Baru disamping memproses tebu dari petani juga mempunyai lahan sendiri sehingga biaya produksi membengkak dalam bentuk pengelolaan lahan, tanaman, dan pupuk, yang menurunkan proporsi biaya transaksi. Analisis yang dilakukan untuk melihat proporsi biaya pada pabrik gula Kebon Agung tahun 2003/2004 menunjukkan bahwa sebagian besar biaya juga terjadi untuk biaya produksi (sama dengan PG Kreet Baru). Komposisinya berubah dikarenakan dua hal: (1) Dari sisi biaya produksi, variable untuk gaji dan upah (untuk pegawai kontrak), bahan bakar minyak, pengelolaan tanah, dan biaya pelengkap menurun pada tahun 2004; (2) Sebaliknya, pada sisi biaya transaksi, variable subsidi transportasi, upah/gaji, tunjangan pegawai, peralatan, dan biaya special meningkat pada tahun 2004. Hasilnya proporsi biaya transaksi lebih tinggi dari biaya produksi pada tahun 2004.

Tabel 37. Persen Perbandingan dari Biaya Produksi dan Biaya Transaksi untuk PG Kreet Baru dan PG Kebon Agung, 2003 – 2004 (%)

Perbandingan	Pabrik Gula Kreet Baru	
	2003	2004
Biaya Produksi	94,1*	84,47
Biaya Transaksi	5,8*	15,53
Total	100	100
Perbandingan	Pabrik Gula Kebon Agung	
	2003	2004
Biaya Produksi	56,1	38,9
Biaya Transaksi	43,9	61,1
Total	100	100

Keterangan : * data laporan tahunan kurang lengkap sehingga nilai yang muncul tidak valid

Sumber : Data Primer (diolah) , 2006

Konfigurasi biaya produksi dan biaya transaksi pada pabrik gula Krebbe Baru dan pabrik gula Kebon Agung tidak terlalu berbeda. Hal ini disebabkan model manajemen yang digunakan pada dua pabrik gula tersebut hampir sama untuk manajemen internal dan eksternalnya. Secara internal, dua pabrik gula tersebut dipimpin oleh administratur/kepala yang mempunyai kewenangan yang terbatas. Tidak ada divisi perencanaan dan supervisi di dua pabrik gula tersebut, sehingga evaluasi tidak dapat dilakukan atas aktivitas yang dilakukan. Akibatnya, biaya transaksi bisa sangat tinggi dibanding biaya produksi. Secara eksternal, manajemen dua pabrik gula tersebut hanya menerapkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Direksi Pusat (PT. RNI untuk PG Krebbe Baru dan PT. Kebon Agung untuk PG Kebon Agung), kedua perusahaan tersebut terletak di Surabaya (ibukota Jawa Timur). Model manajemen yang sangat sentralistik ini membuat langkah pengambilan keputusan sangat lama, yang mana sangat potensial untuk menimbulkan biaya transaksi manajerial. Dan yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam pembelian bahan baku (bahan kimia dan “spare part” mesin giling) karena mereka harus menunggu keputusan Dewan Direksi sehingga proses giling bisa berhenti dan akan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi.

Harus disadari oleh manajemen pabrik gula bahwa efisiensi aktivitas ekonomi tidak hanya datang dari biaya produksi, tetapi juga dari biaya transaksi. Dalam konteks biaya transaksi pabrik gula, factor yang sangat penting yang harus direformasi adalah restrukturisasi pemerintahan perusahaan dan aspek supervise. Dari pemerintahan perusahaan, masalah utamanya adalah kewenangan yang sangat besar dari Dewan Direksi (BoD) untuk merencanakan dan menerapkan semua keputusan strategis, bahkan aktivitas teknis juga dilakukan oleh Dewan direksi (pembelian alat). Sebaliknya, manajemen (CEO) pabrik gula hampir tidak mempunyai kewenangan dalam aktivitas operasional sehari-hari, kecuali aktivitas rutin yang telah diputuskan oleh Dewan Direksi. Dengan kondisi seperti ini, aturan main perusahaan (pabrik gula) tidak akan efisien; contohnya proses pengambilan keputusan terkadang terlambat. Fungsi supervisi yang dilakukan oleh Dewan direksi juga tidak berjalan sempurna, karena lokasi mereka di

Surabaya jauh dari pabrik gula di Malang, sehingga masalah ini sangat potensial untuk menimbulkan biaya transaksi di pabrik gula.

Komposisi biaya transaksi secara mendetail baik di pabrik gula Kribet Baru maupun Kebon Agung ditunjukkan pada tabel 37. Pertama, baik di pabrik gula Kribet Baru maupun Kebon Agung biaya transaksi yang paling dominan adalah biaya transaksi manajerial. Hal ini sangat wajar karena aktivitas manajerial mencakup semua aktivitas utama perusahaan, seperti proses giling tebu, gaji pegawai, dan biaya investasi. Kedua, Biaya transaksi pasar di pabrik gula Kebon Agung lebih tinggi daripada pabrik gula Kribet baru, masing-masing 19,16 % dan 1,82%. Ada dua analisis tentang tingginya biaya transaksi pasar pada pabrik gula kebon Agung, yaitu (1) Disebabkan besarnya aktivitas yang berkaitan dengan pihak lain, khususnya petani tebu. Pabrik gula Kebon Agung mendirikan koperasi dengan petani tebu dalam bentuk pola kemitraan, yang tujuan utamanya untuk meningkatkan tebu petani. Untuk pola kemitraan ini, pabrik gula Kebon Agung mengeluarkan biaya yang tinggi. Pabrik gula Kebon Agung juga memberikan subsidi transportasi yang tinggi untuk petani agar tebu mereka dapat diantar ke pabrik gula. Pada tahun 2004, pabrik gula Kebon Agung mengalokasikan subsidi transportasi diatas Rp 5000/ku tebu, sehingga totalnya mencapai Rp 4,7 milyar; (2) Manajemen internal pabrik gula Kebon Agung lebih efisien daripada pabrik gula Kribet Baru, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi manajerial. Di pabrik gula Kribet Baru besarnya biaya transaksi manajerial mencapai 90,59 % dari total biaya transaksi, sedangkan pabrik gula Kebon Agung hanya 78,50% dari total biaya transaksi. Hal ini terjadi karena pabrik gula Kribet Baru adalah pabrik gula BUMN yang dikelola lebih terpusat dan tidak ada keinginan untuk memaksimalkan performanya.

Tabel 38. Persen Perbandingan Tipe Biaya Transaksi di PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung, 2004 (%)

No	Tipe Biaya Transaksi	PG Krebet Baru	PG Kebon Agung
1.	Biaya Transaksi Pasar	1,82	19,16
2.	Biaya Transaksi Manajerial	90,59	78,50
3.	Biaya Transaksi Politik	7,59	2,34
4.	Total	100	100

Sumber : *Data Primer (diolah), 2006*

Proporsi biaya transaksi politik tidak berkontribusi secara signifikan pada total biaya transaksi. Tetapi, biaya transaksi politik dari pabrik gula Krebet Baru lebih tinggi daripada pabrik gula Kebon Agung karena banyaknya biaya dari aktivitas yang ilegal. Sayangnya, peneliti tidak dapat menghitung biaya yang kemungkinan dikeluarkan oleh pabrik gula dalam bentuk ilegal tersebut. Contohnya, pabrik gula (melalui dewan direksi) juga diasumsikan menyuap pemerintah untuk mendapatkan izin mengimpor gula. Pengeluaran ini disebut biaya transaksi non-pasar seperti sumber daya yang dikeluarkan untuk menunggu, mendapat izin untuk berbisnis, menyuap aparat, dan lain-lain. Biaya transaksi non-pasar ini sangat merajalela dalam transisi dan perkembangan ekonomi, walaupun ukuran transaksi dalam sektor resmi itu sangat kecil. Apabila informasi seperti tersebut diatas dapat digali, maka kemungkinan besar biaya transaksi politik yang didapat dalam penelitian ini lebih tinggi.

Pada dasarnya komposisi biaya transaksi pada pabrik gula Krebet Baru dan pabrik gula Kebon Agung tidak terlalu berbeda, tetapi biaya transaksi pasar pada pabrik gula Kebon Agung lebih besar daripada pabrik gula Krebet Baru. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pabrik gula Kebon Agung adalah institusi yang cukup adaptif dalam berhubungan dengan pihak lain, yang dapat dilihat dari tingginya biaya transaksi pasar. Tingginya biaya transaksi pasar tidak dapat dikatakan sebagai ketidakefisiensian apabila dilakukan untuk jaminan kepastian. Pada kasus subsidi biaya transportasi untuk petani tebu pada pabrik gula Kebon Agung, kompensasi tingginya biaya transaksi pasar yang didapat adalah pabrik gula tidak akan kekurangan bahan baku tebu, apabila tidak ada subsidi transportasi maka input bahan baku tidak akan pasti dan akan mengganggu proses produksi. Di sisi lain, rendahnya proporsi biaya transaksi manajerial menunjukkan

bahwa manajemen internal pabrik gula Kebon Agung lebih baik daripada pabrik gula Kreet Baru. Fakta ini membuktikan bahwa perusahaan swasta meningkatkan performa manajemen perusahaan dengan memberi sedikit ruang gerak kepada para manajer (CEO) untuk membuat dan menerapkan keputusan-keputusan strategis, tentu saja, kewenangan CEO dalam hal ini juga masih terbatas disbanding dengan perusahaan modern lain. Untuk jangka panjang, pembagian kewenangan antara manajer (CEO) dan Dewan Direksi (BoD) adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pabrik gula agar menciptakan efisiensi kelembagaan yang lebih besar yang dapat dilihat dari penurunan besarnya biaya transaksi.

Dari semua analisis diatas dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Biaya transaksi mempunyai kontribusi besar terhadap biaya total pabrik gula (sekitar 10%-60 %), terutama di pabrik gula Kebon Agung sehingga dapat disimpulkan bahwa institusi pabrik gula belum efisien. Kedua, dari komposisi biaya transaksi, biaya transaksi manajerial adalah kontributor biaya transaksi yang terbesar terhadap total biaya transaksi (70%-90%); bahkan di pabrik gula Kreet Baru mencapai 90%. Hasil ini memberi informasi bahwa manajemen pabrik gula kurang efisien, dengan adanya pengambilan keputusan yang sentralistik menjadikan pabrik gula menanggung besarnya biaya transaksi. Ketiga, biaya transaksi pasar di pabrik gula Kebon Agung lebih tinggi daripada pabrik gula Kreet Baru, tetapi bukan berarti bahwa institusi pabrik gula Kebon Agung tidak efisien dibandingkan pabrik gula Kreet Baru. Tingginya biaya transaksi pasar ini dikarenakan adanya hubungan kemitraan dan subsidi transportasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tebu dan agar ada kepastian input bahan baku. Keempat, biaya transaksi politik pada pabrik gula Kreet lebih tinggi daripada pabrik gula Kebon Agung, hal ini dikarenakan pabrik gula Kreet Baru adalah pabrik gula dibawah manajemen PT. RNI (BUMN), sehingga kepentingan-kepentingan yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan pabrik gula saja, tetapi lebih mengarah ke pemerintah. Banyaknya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk berurusan dengan hal tersebut membuat biaya transaksi politik pabrik gula Kreet Baru lebih besar daripada pabrik gula Kebon Agung.



VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Aspek ekonomi kelembagaan industri gula dapat dikemukakan sebagai berikut:

(1). Sumber kredit dan sistem pengembaliannya. Petani tebu kredit dan petani tebu bebas mempunyai sumber kredit yang berbeda. Ada 3 sumber kredit:

(A). Kredit yang diperoleh dari koperasi atau pabrik gula, dimana 40 persen petani kredit memperoleh modal dari program pemerintah yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk yaitu KKP-TR (Kredit Ketahanan Pangan – Tebu Rakyat), dengan tingkat bunga 12 persen; (B) Kredit yang diperoleh dari pedagang perantara atau juga rentenir, biasanya juga merupakan pedagang tebu atau penanam tebu. Kredit yang diperoleh dari pedagang perantara atau juga rentenir tidak memerlukan jaminan kredit, tetapi mereka mematok bunga sangat tinggi (40 persen/tahun). 27 persen petani bebas yang memperoleh kredit dari pedagang perantara atau rentenir biasanya merasa sangat terbantu, karena pencairan kredit yang bisa sewaktu-waktu, walaupun dengan bunga yang sangat tinggi; (C) Kredit yang diperoleh dari tetangga dan keluarga. Kredit jenis ini umumnya sangat kecil (kurang dari 1.000.000) dan tidak memerlukan jaminan dan bunga kredit, sehingga sangat menguntungkan bagi petani tebu. Sementara itu, sistem pengembalian kredit baik untuk petani kredit maupun bebas dilakukan setelah menerima hasil panen.

(2). Peranan Koperasi dan pedagang perantara/tengkulak. Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai agen pemerintah untuk menyalurkan kredit, penjualan bibit atau pupuk, dan pengaturan penjualan tebu ke pabrik gula. Pedagang perantara/tengkulak mempunyai dua peranan penting yaitu sebagai penyedia kredit dan sebagai pembeli tebu. Petani tebu bebas umumnya menjalin hubungan dengan pedagang perantara/tengkulak dalam proses produksi dan pemasaran tebu.

(3). Susunan Kontrak antara Petani tebu dan Pabrik Gula, yang terdiri dari:

(A). Sistem Kontrak dan Penetapan Rendemen. Dengan sistem seperti ini, maka petani tebu kredit yang terikat kontrak dengan pabrik gula mempunyai jaminan yang lebih pasti dalam hal pemrosesan tebu mereka di pabrik gula dibanding petani tebu bebas yang terkadang menghadapi kendala dalam menjual tebu mereka. Adapun sistem rendemen ditentukan pada saat tebu masuk ke pabrik gula, baik di PG. Krebet Baru maupun di PG. Kebon Agung tetapi sistem bagi hasil agak berbeda di kedua pabrik gula. Di Pabrik Gula Krebet Baru, rendemen ditentukan terlebih dahulu, tetapi penentuan rendemen dilakukan secara acak dan hasilnya digunakan sebagai basis untuk menilai rendemen pada periode tersebut. Pada Pabrik Gula Kebon Agung, rendemen juga ditentukan terlebih dahulu (65 persen bagian petani dan 35 persen bagian pabrik gula). Tes penentuan rendemen dilakukan 2 minggu sekali dan selanjutnya hasil tersebut dijadikan standart. (2). Sistem Bagi Hasil dan Model Pemasaran Gula. Dari kesepakatan yang telah dicapai, bagian petani adalah 65 persen dan pabrik gula 35 persen dari hasil tebu yang digiling. Di daerah penelitian yaitu di Kabupaten Malang, Sistem pemasaran gula petani yaitu melalui koperasi. Pabrik gula mengumpulkan bagian gulanya (90 persen dari hasil keseluruhan) ke koperasi dan setelah itu dijual lewat pelelangan di Surabaya. Sementara gula bagian petani (10 persen dari hasil keseluruhan), 75 persen dijual ke toko dan sisanya 25 persen dikonsumsi sendiri.

2. Ada 2 hal penting dalam analisis biaya produksi dan biaya transaksi pada kasus petani tebu ini, yaitu: (1). Biaya Produksi di daerah penelitian ada enam macam, yaitu: Upah tenaga kerja, Sewa traktor, Bibit, Pupuk, Sewa lahan, dan Irigasi. Terdapat perbedaan yang nyata antara petani tebu kredit dan petani tebu bebas. Petani tebu bebas menghabiskan lebih banyak biaya untuk usahatani dari pada petani kredit karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli input lebih mahal akibat tidak adanya subsidi dari pemerintah. Analisis Input-Output produksi menggunakan Matriks Analisis Kebijakan (MAK) menunjukkan bahwa usahatani tebu di daerah penelitian belum memiliki keunggulan komparatif, Hasil matriks analisis kebijakan (PAM) menunjukkan bahwa pada nilai tukar rupiah sebesar Rp 9000, dan tingkat suku

bunga 12 persen per tahun serta “shadow exchange rate” sebesar Rp 8940,98 perusahaan tebu tidak efisien dalam penggunaan sumber daya ekonomi secara makro. Analisis keunggulan komparatif menunjukkan bahwa usahatani tebu ungaran baik petani kredit maupun petani bebas di lahan tegal tidak komparatif. Hal ini berdasarkan nilai sumberdaya domestik yang rata-rata lebih besar dari 1. Untuk petani kredit PG Krebet Baru sebesar 1,277; untuk petani bebas PG Krebet Baru sebesar 1,344; untuk petani kredit PG Kebon Agung sebesar 1,132; untuk petani bebas PG Kebon Agung sebesar 1,25. Untuk mendapatkan tambahan keuntungan atau menghemat devisa sebesar 1 US \$ (“shadow exchange rate” sebesar Rp 8940,98), diperlukan pengorbanan masing-masing sebesar 1,277 US \$ atau Rp 11.417,63 ; 1,345 US \$ atau Rp 12.016,67; 1,132 US \$ atau Rp 10.121,18 dan 1,25 US \$ atau Rp 11.176,22 untuk perusahaan tebu ungaran di lahan tegal. Nilai Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) usahatani tebu secara keseluruhan sama setelah nilai tersebut dibulatkan karena selisih yang relative kecil yaitu sebesar 1,337. Dari nilai tersebut terlihat bahwa telah terjadi transfer kepada produsen dalam hal ini petani tebu sebesar 33,7 persen. Harga gula pasir yang diterima konsumen lebih tinggi yaitu sebesar Rp 6200 dibandingkan dengan harga sosialnya (CIF) yang hanya sebesar Rp 4.488,32 untuk setiap 1 kilogram. Produsen dalam hal ini petani tebu menerima harga lebih tinggi dari yang seharusnya (harga sosial). Nilai Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) lebih besar dari 1 (>1). Hal ini mengindikasikan bahwa pada kegiatan perusahaan tebu ungaran lahan kering (tegal) pemerintah masih membebankan produsen terhadap penggunaan input. Nilai koefisien input tertinggi jika diusahakan di lahan tegal (kering) sistem ungaran oleh petani bebas PG Krebet Baru yaitu sebesar 1,514 dan terendah jika diusahakan di lahan tegal (kering) dengan sistem ungaran oleh petani kredit PG Kebon Agung yaitu sebesar 1,166. Nilai ini mengindikasikan bahwa telah terjadi transfer input sebesar 51,4 persen pada nilai tertinggi dan 16,6 persen pada nilai terendah dari petani tebu selaku produsen kepada masyarakat. Input treadable harga aktual (pasar) sedikit lebih tinggi dibanding harga sosial yang menunjukkan tidak adanya subsidi untuk

input treadable. Input treadable dalam penelitian ini adalah pupuk Urea dan ZA. Harga aktual untuk pupuk Urea per kuintal adalah sebesar Rp 120.000 lebih tinggi dibandingkan harga sosial yang hanya sebesar Rp 112.655 . Demikian pula untuk pupuk ZA harga per kuintal secara aktual sebesar Rp 105.000 lebih tinggi dibanding harga sosialnya yang hanya sebesar Rp 80.781. nilai EPC yang lebih besar dari 1 ($EPC > 1$) yaitu berkisar 1,311 – 1,359 . Usahatani tebu ini membutuhkan tingkat proteksi dari pemerintah sebesar 31,1 persen - 35,9 persen dari nilai tambahnya secara ekonomi agar mampu bersaing dalam perekonomian nasional. (2). Biaya Transaksi pada petani tebu dapat dikategorikan menjadi komponen seperti berikut: Pajak Tanah, Tebang-Muat-Angkut dan karung, fee dan sumbangan untuk koperasi, sumbangan untuk kelompok tani, fee Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA), fee untuk pedagang perantara dan tengkulak, makan pesta adat, bunga kredit, selisih(marjn) bunga, kertas kerja, biaya korbanan, dan keterlambatan kredit. Biaya TMA (Tebang-Muat-Angkut, termasuk biaya karung) memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap besarnya biaya transaksi yaitu sebesar 70 persen dari total biaya transaksi. Kontributor terbesar kedua adalah fee untuk pedagang perantara/tengkulak, yang rata-rata sekitar 16 persen dari total biaya transaksi. Hanya para petani kredit yang tidak mengeluarkan biaya fee untuk pedagang perantara/tengkulak ini karena mereka telah terikat kontrak dengan pabrik gula dan koperasi. Tiga variabel, bunga kredit, marjin bunga, dan fee SPTA, mempunyai kontribusi yang lumayan terhadap total biaya transaksi, yaitu sekitar 3-6 persen. Variabel sumbangan untuk koperasi sangat kecil sekali kontribusinya terhadap total biaya transaksi, hanya lebih kecil dari 3 persen.

3. Di pabrik gula Kebon Agung, biaya produksi meliputi persiapan giling, gaji dan upah untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, upah lembur, pungutan untuk karung gula petani, proses penggilingan tebu, akuisisi suku cadang perusahaan, biaya pelengkap, dan pemrosesan lahan. Pada pabrik gula Krebet Baru, biaya produksi meliputi : proses penggilingan tebu, kebutuhan dalam kerjasama dan proses, stasiun pengisian bahan bakar, divisi teknik, upah

lembur, insentif untuk buruh giling, bahan bakar, upah tenaga kerja pada divisi pabrikasi, pengemasan gula, pembelian oleh investigator peralatan, biaya tanaman, pemrosesan lahan, pupuk dan pestisida, bibit. Biaya transaksi mempunyai kontribusi besar terhadap biaya total pabrik gula (sekitar 10 persen-60 persen), terutama di pabrik gula Kebon Agung sehingga dapat disimpulkan bahwa institusi pabrik gula belum efisien. Kedua, dari komposisi biaya transaksi, biaya transaksi manajerial adalah kontributor biaya transaksi yang terbesar terhadap total biaya transaksi (70 persen-90 persen); bahkan di pabrik gula Kribet Baru mencapai 90 persen. Hasil ini memberi informasi bahwa manajemen pabrik gula kurang efisien, dengan adanya pengambilan keputusan yang sentralistik menjadikan pabrik gula menanggung besarnya biaya transaksi. Ketiga, biaya transaksi pasar di pabrik gula Kebon Agung lebih tinggi daripada pabrik gula Kribet Baru, tetapi bukan berarti bahwa institusi pabrik gula Kebon Agung tidak efisien dibandingkan pabrik gula Kribet Baru. Tingginya biaya transaksi pasar ini dikarenakan adanya hubungan kemitraan dan subsidi transportasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tebu dan agar ada kepastian input bahan baku. Keempat, biaya transaksi politik pada pabrik gula Kribet lebih tinggi daripada pabrik gula Kebon Agung, hal ini dikarenakan pabrik gula Kribet Baru adalah pabrik gula dibawah manajemen PT. RNI (BUMN), sehingga kepentingan-kepentingan yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan pabrik gula saja, tetapi lebih mengarah ke pemerintah. Banyaknya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk berurusan dengan hal tersebut membuat biaya transaksi politik pabrik gula Kribet Baru lebih besar daripada pabrik gula Kebon Agung.

7.2. Saran

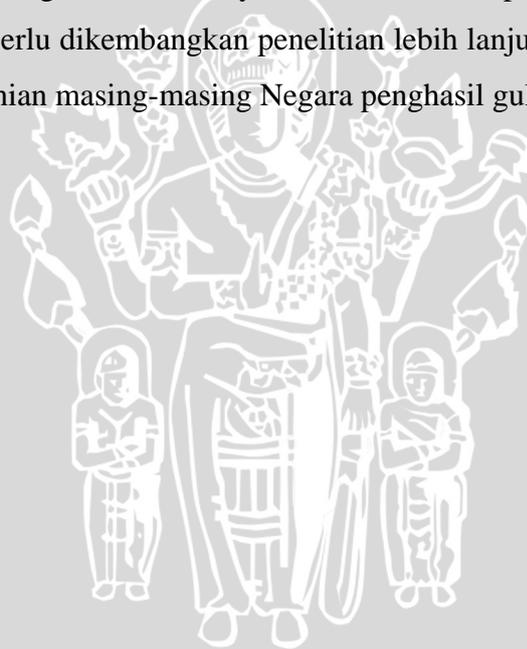
1. Hubungan antara petani dan pabrik gula harus dilandasi rasa kejujuran dan kepercayaan agar tidak merugikan satu sama lain juga harus ada lembaga yang dapat memberikan pelayanan kompetitif dan informasi yang lengkap pada

industri gula, sehingga dapat menekan besarnya biaya transaksi yang terjadi. Ada beragam metode yang diterima untuk mengestimasi biaya transaksi ini, namun tidak satupun pendekatan yang terbaik untuk semua keadaan. Oleh karena itu penting untuk memonitor perilaku harga atas keseluruhan proses transaksi.

2. Kebijakan proteksi dalam bentuk tarif dan tataniaga impor gula dapat dilanjutkan sampai tahun 2007, dengan memberikan kesempatan kepada PG untuk meningkatkan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomisnya. Pemerintah diharapkan mampu memberi proteksi minimal 33,7 persen dari harga pasar gula agar distorsi yang terjadi tidak dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Pemerintah diharapkan mampu memberi subsidi input minimal 16,6 persen - 51,4 persen dari harga input produksi agar distorsi yang terjadi tidak dibebankan sepenuhnya kepada produsen. Usahatani tebu ini membutuhkan tingkat proteksi dari pemerintah sebesar 31,1 persen - 35,9 persen dari nilai tambahnya secara ekonomi agar mampu bersaing dalam perekonomian nasional. Kebijakan ini hendaknya diikuti dengan penetapan rendemen individual atau rendemen minimum yang akan diberikan oleh setiap PG, sehingga dalam masa transisi ini petani dapat memperoleh keuntungan yang layak dari usahatani tebu. Untuk menghilangkan pengaruh inefisiensi PG BUMN dalam penetapan rendemen tebu petani, diperlukan rendemen individual atau jaminan rendemen minimum dalam bentuk peraturan khusus. Penentuan besarnya jaminan rendemen minimum itu hendaknya dilakukan secara bersama antara PG dan kelompok tani, sehingga dapat meningkatkan relasi dan sinergi antara petani dan PG.
3. Masalah utama dalam industri gula nasional terletak pada PG milik BUMN yang masih belum efisien. Untuk itu pemerintah perlu melakukan rehabilitasi, restrukturisasi dan menjadikan PG sebagai *strategic business unit*. Program ini hendaknya dapat menjadi bagian dari "reward" yang diberikan kepada PG yang mampu menurunkan harga pokok gula hablur. Untuk meningkatkan kinerja PG BUMN, ada 3 tahap yang dapat ditempuh yaitu: (1) Teknologi yang diterapkan oleh semua PG BUMN harus diaudit; (2) Perbaikan teknologi

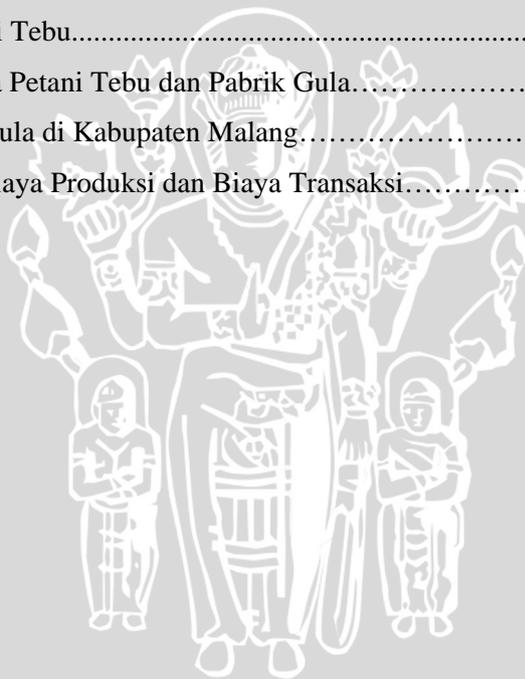
melalui rehabilitasi PG BUMN yang secara finansial dan ekonomis masih layak dipertahankan. Sementara untuk PG-PG yang tidak layak dipertahankan, pemerintah harus berani menutupnya; dan (3) Restrukturisasi PG, di mana dalam jangka panjang (sekitar 20 tahun) diarahkan untuk melakukan pengalihan pemilikan saham kepada petani tebu.

4. Perlu dikembangkan penelitian-penelitian baru mengenai biaya transaksi (*transaction cost*) dengan memahami terlebih dahulu tentang konsep *NIE* (*New Institutional Economics*), dan parameter yang pasti mengenai biaya transaksi (*transaction cost*) itu sendiri.
5. Penelitian ini disusun dengan asumsi Negara pengeksport gula tidak memproteksi industri gula domestiknya dan tidak menerapkan subsidi ekspor, dengan demikian perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan aspek politik pertanian masing-masing Negara penghasil gula di dunia.



DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Pasar VS Paradigma Hirarki.....	46
2.	Skema Tingkatan Biaya Transaksi.....	48
3.	Gambar Penetapan Biaya Transaksi.....	51
4.	Skema Kerangka Pemikiran.....	80
5.	Skema Petani TRK Memperoleh Pinjaman Kredit dari PG Kregbet Baru.....	104
6.	Struktur Organisasi PG Kebon Agung Malang Tahun 2005.....	115
7.	Skema Hubungan antara Pabrik Gula dan Petani Tebu berdasarkan Jenis Petani.....	141
8.	Sumber Kredit Petani Tebu.....	142
9.	Pola Hubungan antara Petani Tebu dan Pabrik Gula.....	149
10.	Sistem Pemasaran Gula di Kabupaten Malang.....	153
11.	Proses Klasifikasi Biaya Produksi dan Biaya Transaksi.....	196



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika.2005.Transaction Cost Economics of the Sugar Industry in Indonesia. Socio Economics Studies of Rural Development Vol.137. Institute of Rural Development Georg-August-Universitat Gottingen, Germany.
- Ali Susmiadi, Faruk Bakri. 1999. Kebijakan Gula Indonesia Saat Ini dan Implikasinya Bagi Industri Gula. Makalah versi Bahasa Indonesia yang disampaikan di AISC 99, Cebu-Filiphina, 13-17 Juli 1999. Gula Indonesia Vol XXIV (2), April-Juni 1999. Pasuruan. IKAGI
- Alchian, Armen A., and Harold Demzet. (1972). Production, Information Costs, and Economic Organization. The American Economic Review. Vol 62, Issue 5 Dec.
- Alston, and Joseph P. Ferrie,(1996). The Economics and Politics of Institutional Change. In: Lee J. Alston, Thrain Eggerstson, and Douglas C. North. (eds). Empirical studies in Institutional Change. Cambridge University Press. Cambridge.
- Bardhan. (1996). The Nature of Institutional Impediments to Economics Development. Institue of Bussines and Economics. Center for International and Development Economics Research. University of California. Berkeley. USA
- Barzel, Yoram. (2000). The State and the Diversity of Third-Party Enforces. In: Calude Menard (ed). Institusion, Contracts and Organizations: Perspective from New Instituonal Economics. Edward Elgar. Aldershoot (UK) and Vermont (USA).
- Birner, Regina.(1996).The Role of Livestock in Economics Development : Theory and Empirical Evidence (The case of Sri Lanka). PhD Thesis, Gottingen University, Germany.
- Clauge, Christopher, et al. (1997). Institutions and Economics Performance: Property Rights and Contract Enforcements. In : Christopher Clauge. (ed). Institutions and Economic Development : Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries. The John Hopkins University Press. Baltimore and London.
- Churmen, Imam. (2001). Menyelamatkan Industri Gula Indonesia. Millenium Publisher. Jakarta

- Coase, Ronald.(1998). *The Firm, The Market, The Law*. The University of Chicago Press. Chicago and London
- .(1992). *The Institutional Structure of Production*. *The American Economics Review*. Vol. 82, Issue 4, September
- .(1998). *The New Institutional Economics*. *The American Economics Review*. Vol 88, Issue 2, May
- Collins, Bruce M., and Faziozi, Frank. (1991). *A Methodology for Measuring Transaction Cost*. *Financial Analysts Journal*. March-April
- Dietrich, Michael. (1994). *Transaction Cost Economics and Beyond : Towards a New Economics of the Firm*. Routledge. New York.
- Dibyو Prabowo. 1998. *Antisipasi Industri Gula Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi*. Disampaikan pada Semiloka dan Temu Lapang IKAGI di Ujung Pandang tanggal 26-28 November 1998. *Gula Indonesia* vol XXIII (4) Oktober-Desember 1998. IKAGI. Pasuruan
- Dixit, Avinash K. (1996). *The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics Perspective*. CES and The MIT Press. Cambridge.
- Dono Iskandar D., 1995. *Masalah Gula di Tengah Dinamika Ekonomi Indonesia*. Disampaikan pada Seminar Pergulaan Nasional dalam menghadapi perdagangan bebas di Jakarta tanggal 23 Januari 1995.
- Downward, Andrew. 2001. *The Effect of Transaction Cost, Power and Risk on Contractual Arrangement: Conceptual Framework for Quantitive Analysis*. *Journal of agricultural Economics*. (53:2) may 2001: 59-73
- Fahlbeck, Erik. (1996). *Essays in Transaction Cost Economics*. Swedish University of Agricultural Science (SLU). Uppsala. Sweden.
- Frank, Robert H. (1999). *Microeconomics and Behaviour*. Fourth Edition. Irwin McGraw Hill. New York.
- Furubotn, Eirik, and Rudolf Richter. (1991). *The New Institutional Economics : An Assesment*. In : Eirik G. Furubotn and Rudolf Richter. (eds). *The New Institutional Economics: A Collection of articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economics*. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tubingen Germany.

- Gittinger, Price, J., 1986, Analisis Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian, UI Press, John Hopkins, Jakarta
- Hage, Jerald, and Kurt Finsterbusch. (1987). Organizational Change as a Development Strategy: Model and Tactics for Improving Third World Organizations. Linne Rienner Publisher. Colorado. USA.
- Hart, Oliver. (1995). Corporate Governance: Some Theory and Implications. The Economic Journal. Vol. 105, Issue 30, May
- Hira, Anil, and Ron Hira. (2000). The Institutionalism: Contradictory Notions of Change. American Journal of Economics and Sociology. Vol. 59, No 2, April
- Khan, Mustaq. (1995). State Failure in Weak States : A Critique of New Institutionalism Explanations. In : John Harris, Janet hunter, and Collin M. Lewis. (eds). The New Institutional Economics and Third World Development. Routledge. London.
- Kherrallah, Mylene, and Johann Kirsten. (2001). The New Institutional Economics : Applications for Agricultural Policy Research and Developing Countries. MSSD Discussion Paper. No. 41, June. IFPRI. Washington DC.
- Klein, Benjamin. (1980). Transaction Cost Determinant of "Unfair" Contractual Arrangement. The American Economic Review. Vol. 70, Issue 2, May
- Kadariah, Lien, Karlina & Clive Gray, 1978, Pengantar Evaluasi Proyek, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, UI, Jakarta
- Khudori, 1999. Industri Gula Nasional Menuju Ekonomi Kerakyatan. Disampaikan pada Seminar Nasional Strategi Pengembangan Industri Gula Menghadapi Era Pasar Bebas tanggal 14 februari 2000
- , 2004. APTRI dan Produksi Gula Selama Krisis. Sugar Observer. No 44, March
- Levi, Margareth. 2000. Whwn Good Defenses Make Good Neighbors: a Transaction Cost Approach to Trust, the absence of Trust and Distrust. Institutions, Contract and Organizations: Perspective from New Institutional Economics. Edward Elgar. Cheltenham, UK.

Manig, Winfried. 1991. Rural Social and Economics Structures and Social Development. In : Winfried Manig. (ed). Stability and Change in Rural Institution in North Pakistan. Socio-Economics Studies on Rural Development. Vol 85. Alano. Aachen.

----- . 1992. Structural and Institutional Changes in Rural Northwest Pakistan. The Journal of Development Studies. Vol XII.

Markus A., Djaenudin D., 1995. Mengatasi Faktor Pembatas dalam Upaya Meningkatkan Produksi Tebu di Jawa Timur. Jurnal Litbang Pertanian XIV (3) tahun 1995

Mburu, John. 2002. Collaborative Management of Wildlife in Kenya : An Empirical Analysis of Stakeholders' Participation, Cost, and Incentives. Socioeconomics Studies and Rural development. Vol 130. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG

Menard, Claude. (2000). Enforcements Procedures and Governance Structure: What Relationship?. In: Claude Menard. (ed). Institutional, Contracs and Organizations: Perspectives from New Institutional Economics. Edward Elgar. Aldershot (UK) and Vermot (USA).

Minten, Bart., and Marcel Fafchamps. 1999. Social Capital and The Firm: Evidence from Agricultural Trade. Working Paper no.21, The World Bank, Social Capital Initiatives, Washington DC.

Mubyarto. 1977. The Sugar Industry : From Estate to Smallholder Cane Productions. BIES. Vol 13, No. 2, July.

----- . 1984. Masalah Industri Gula di Indonesia. BPFE. Yogyakarta.

Mubyarto.,Daryanti., 1991. Gula dan Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media. Yogyakarta

Mubyarto, et al.1992. Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan : Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media. Yogyakarta.

Nee, Victor. (1998). Norms and Network in Economics and Organizational Performances. The American Economics Review. Vol. 88, Issue 2, May

North, Douglass C. 1990b. *Institution, Institutional Change, and Economics Performances*. Cambridge University Press. Cambridge

-----1991b. *Transaction Cost, Institutions, and Economics History*. In : Eirik G. Furubotn and Rudolf Richter. (eds). *The New Institutional Economics: A Collection of articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economics*. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen. Germany.

-----.(1994). *Economics Performances Through Time*. *The American Economic Review*. Vol.84, Issue 3, June

Pearson, SR & Monke, EA, 1989, *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*, Cornell University Press, Ithaca & London.

Pejovich, Svetozar. (1995). *Economics Analysis of Institutions and System*. Kluwer Academic Publisher. Dordrecht. The Netherlands.

Pollack, Robert A. 1985. *A Transaction Cost Approach to Families and Households*. *Journal of Economics Literature*. Vol 23. Issue 2, June

Polski, Margareth M. 2001. *Mesuring Transaction Cost and Institutional Change in US Commercial Banking Industry*. Paper Presented for Annual Confrences of the International Society for New Institutional Economics 2000 in Tübingen-Germany.

Poulton, C., et al. 1998. *A New Institutional Economics Perspective on Current Policy Debates*. In: A. Doward, J.Kydd, and Poulton, C (eds). *Smallholder Cash Crop Production under Market Liberalization : A New Institutional Economics Perspective*. CAB International. Wallingford and New York.

Pranaya Yudha, 2004, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Produksi dan Impor Gula di Indonesia*, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Singarimbun, Sofian E. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta

Singh, Sukhpal. (2002). *Contracting Out Solution: Political Economics of Contracs Farming in The Indian Punjab*. *World Developments*. Vol. 30, No. 9

Sjaiful B., Scott Pearson., Carl Gotsch., 2004. *Aplikasi Policy Analysis Matrixs pada Pertanian Indonesia*. DAI-FSDA. Jakarta

Susilawati S., Windharto, 1994. Kajian Mengenai Tanaman Tebu sebagai Tanaman Alternatif Konservasi Lahan Kering. Disampaikan dalam temu lapang Teknik Budidaya Lahan Kritis tanggal 4-5 Mei 1994.

Stone, Andrew, Brian Levy, Ricardo Paredes. (1996). Public Institutions and Private Transaction Transaction: A Comparative Analysis of the Legal and Regulatory Environment for Business transactions in Brazil and Chile. In: Alston. J. Lee, Thrain Eggertson, and Douglas C. North. (eds). Empirical Studies in Institutional Change. Cambridge University Press. Cambridge.

Thompson, Steve, and Mike Wright. (1995). Corporate Governance: The Role of Restructuring Transactions. The Economics Journal. Vol. 105, Issue 30 May

Widya, Wijaya, 2003, Analisis Kebijakan Pangan Terhadap Pendapatan Usahatani Padi di Kabupaten Malang, Skripsi Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Unibraw, Malang

Williamson. (1981a). The Modern Corporation: Origin, Evolution, Attributes. Journal of Economics Literature. Vol. 87, Issue 3 Dec

-----.(1991). A Comparison of Alternative Approaches to Economics Organization. In : Eirik G. Furubotn and Adolf Richter. (eds). The New Institutional Economics: A Collections of Articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economic Perspectives. Vol. 7, Issue 1

-----.(1997). Hierarchies, Market, and Power in the Economy: An Economic Perspectives. In : Claude Menard. (ed). Transaction Cost Economics. Edward Elgar. Aldershot (UK) and Vermont (USA).

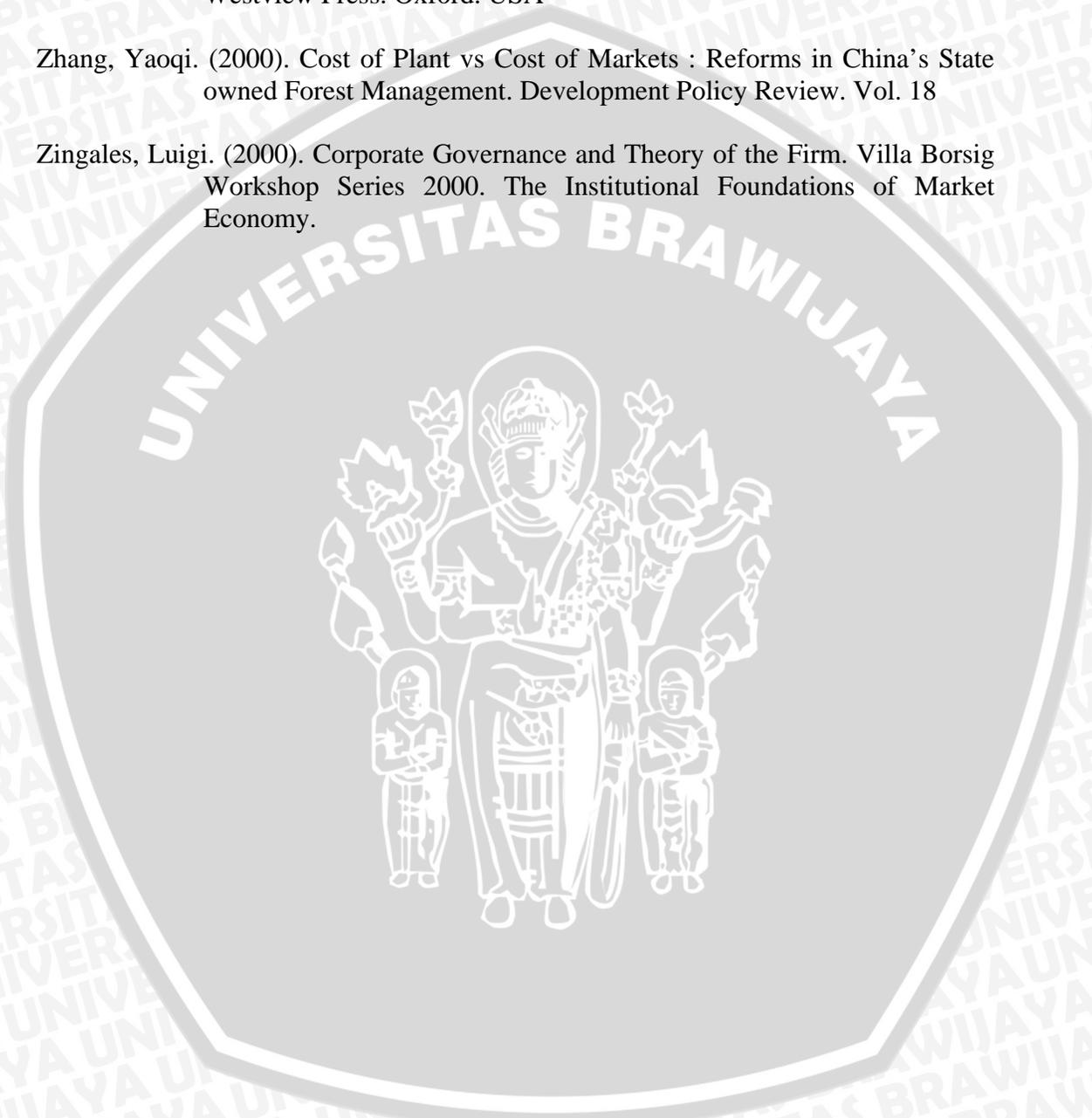
Winter, Paul., Phil Simmons., Ian Patrick. 2005. Evaluation of a Hybrid Seed Contract between Smallholder dan Multinational Company in East Java, Indonesia. The Journal of Development Studies. Vol 42, No.1, January 2005, pp.62-89.

Witte, Edwin E. (1988). Institutional Economics as Seen by Institutional Economist. In : Warren J. Samuels. (ed). Institutional Economics. Vol. 2. Edward Elgar. Aldershot (UK) and Vermont (USA).

Yeager, Timothy J. (1999). Institutions, Transition Economies, and Economics Development. The Political Economy of Global Interdependency. Westview Press. Oxford. USA

Zhang, Yaoqi. (2000). Cost of Plant vs Cost of Markets : Reforms in China's State owned Forest Management. Development Policy Review. Vol. 18

Zingales, Luigi. (2000). Corporate Governance and Theory of the Firm. Villa Borsig Workshop Series 2000. The Institutional Foundations of Market Economy.

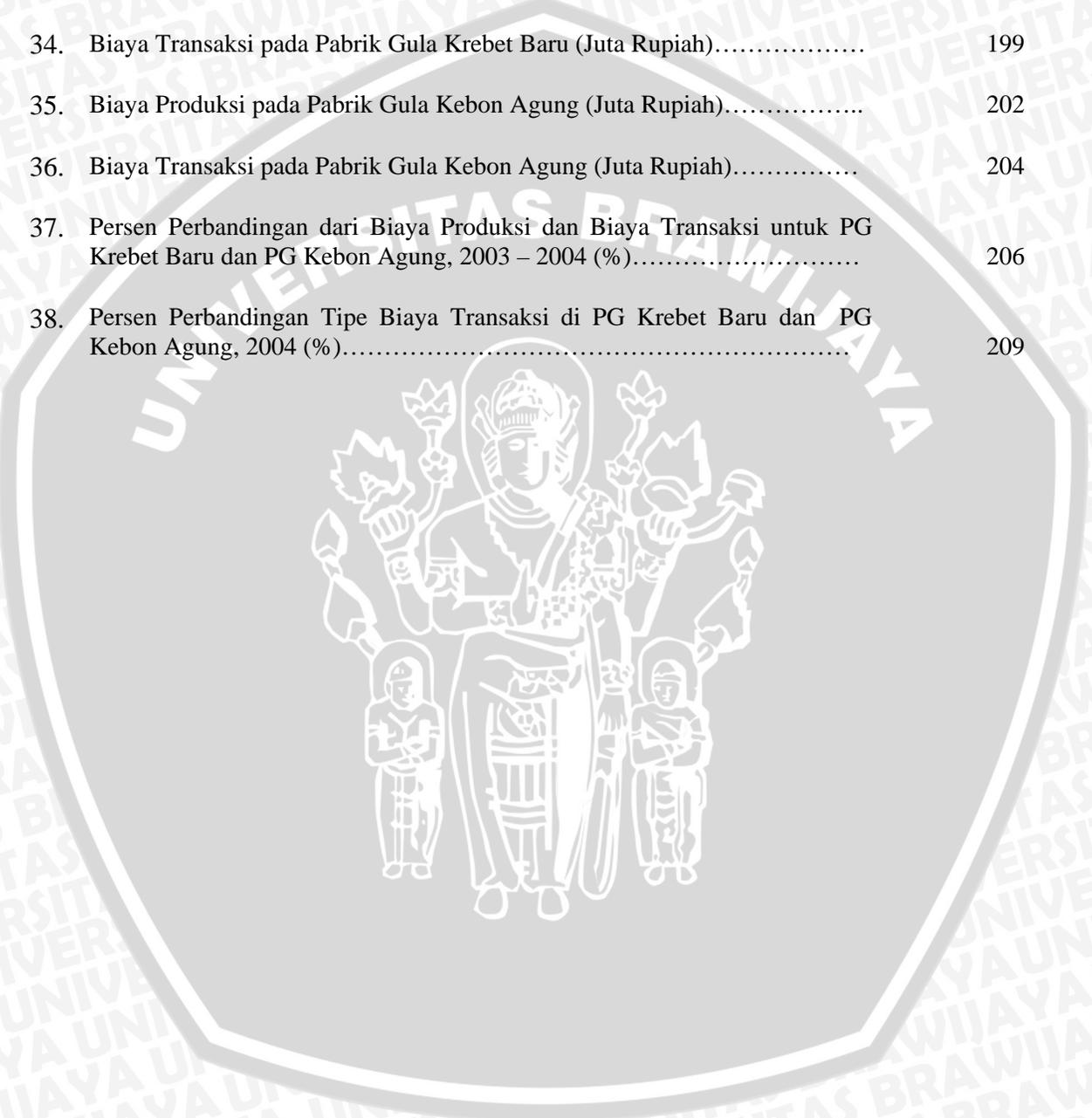


DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Produsen Gula di Indonesia.....	24
2.	Ikhtisar Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi Kelembagaan.....	40
3.	Policy Analysis Matriks.....	73
4.	Orabitasi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang.....	109
5.	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang	110
6.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Pendidikan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang.....	111
7.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Kerja di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang.....	111
8.	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang.....	112
9.	Badan Hukum yang Mengelola PG Kebon Agung Malang Sejak Awal Berdiri hingga sekarang.....	113
10.	Daftar Wilayah Binaan (Binwil) PG. Kebon Agung dari tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten dan Kota Malang.....	119
11.	Nama Petugas Penyuluh Lapang Wilayah Kerja Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Periode 2005- 2006.....	124
12.	Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2005.....	130
13.	Distribusi Penduduk Menurut Umur di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2005.....	130
14.	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2005.....	131
15.	Distribusi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2005.....	133

16. Distribusi Petani Contoh PG. Krebbe Baru dan PG Kebon Agung, Kabupaten Malang Menurut Luas Penguasaan Lahan.....	135
17. Distribusi Petani Contoh PG. Krebbe Baru dan PG Kebon Agung, Kabupaten Malang Menurut Pengetahuan Tentang Akses Kredit.....	136
18. Distribusi Petani Contoh PG. Krebbe Baru dan PG Kebon Agung, Kabupaten Malang Menurut Harga Jual Tebu.....	137
19. Kredit, Bunga Kredit, dan Modal Yang Diperoleh Petani Tebu per hektar....	143
20. Variabel Biaya Produksi pada Petani Tebu.....	156
21. Input-Output Usahatani tebu di Desa Tlogowaru di bawah wilayah kerja PG Krebbe Baru dan Desa Arjowinangun di bawah wilayah kerja PG Kebon Agung.....	158
22. Penerimaan, Total Biaya Produksi, dan Pendapatan Usahatani Tebu Petani Kredit dan Petani Bebas di Desa Tlogowaru pada Harga Individu dan Harga Sosial.....	165
23. Penerimaan, Total Biaya Produksi, dan Pendapatan Usahatani Tebu Petani Kredit dan Petani Bebas di Desa Arjowinangun pada Harga Individu dan Harga Sosial.....	166
24. Matriks Analisis Kebijakan (PAM) Usahatani Tebu Satu Masa Tanam Per Hektar Tahun 2005/2006.....	167
25. Hasil Analisis Keunggulan Komparatif Usahatani Tebu Satu Masa Tanam Per Hektar Tahun 2005/2006.....	169
26. Perbandingan Harga Sosial Tebu Dengan Tingkat Border Price Dinyatakan Dalam Rupiah Per Kilogram.....	170
27. Analisis Pengaruh Kebijakan Pada Usahatani Tebu.....	174
28. Variabel Biaya Transaksi pada Petani Tebu Kredit dan Petani tebu Bebas....	181
29. Kontribusi Variabel terhadap Biaya Transaksi/ha Berdasarkan Lokasi dan Jenis Petani (Rp 000,%).....	183
30. Kategori Biaya Transaksi di Pabrik Gula Krebbe Baru.....	190
31. Kategori Biaya Transaksi di Pabrik Gula Kebon Agung.....	192

32.	Kategori Biaya Produksi Pabrik Gula.....	195
33.	Biaya Produksi pada Pabrik Gula Krebet Baru (Juta Rupiah).....	197
34.	Biaya Transaksi pada Pabrik Gula Krebet Baru (Juta Rupiah).....	199
35.	Biaya Produksi pada Pabrik Gula Kebon Agung (Juta Rupiah).....	202
36.	Biaya Transaksi pada Pabrik Gula Kebon Agung (Juta Rupiah).....	204
37.	Persen Perbandingan dari Biaya Produksi dan Biaya Transaksi untuk PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung, 2003 – 2004 (%).....	206
38.	Persen Perbandingan Tipe Biaya Transaksi di PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung, 2004 (%).....	209



Kuisisioner

**ANALISIS EKONOMI GULA:
SUATU PENDEKATAN KONSEP EKONOMI KELEMBAGAAN DAN MATRIKS
ANALISIS KEBIJAKAN**

**DAFTAR PERTANYAAN
PETANI TEBU BEBAS**

Nama Responden :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Malang

Nama Enumerator : Yustitia Asri Ertaningrum

Tanggal Wawancara :

I. Kondisi Rumah Tangga

No	Nama	Status dalam Keluarga	Umur	Pendidikan Terakhir / Yang sedang dijalani	Pekerjaan	
					Utama	Sampingan

II. Usahatani Tebu

- 1) Sudah Berapa lama bapak / ibu menjadi petani?
- 2) Tanaman apa sajakah yang sudah bapak / ibu tanam?
- 3) Kapan bapak / ibu mulai menanam tebu?
- 4) Kenapa bapak / ibu menanam tebu?
- 5) Agar usahatani bapak / ibu maksimal apa yang anda lakukan?
- 6) Apa alasan bapak / ibu tidak menjadi anggota KUD?
 - () Tidak mendapat bantuan kredit
 - () Produksi lebih tinggi dibandingkan kemitraan
 - () Keuntungan lebih tinggi dibandingkan kemitraan



b. Tanam Keprasan

No	Jenis Saprodi	Jumlah (Kw,lt)	Harga (Rp/Kw,lt)	Biaya (Rp)	Keterangan (Milik, Beli,dll)
1 .	Bibit
2 .	Pupuk
	a . Urea
	b. TSP
	c. KCL
	d
3 .	Pestisida / Obat-obatan				
	a
	b
	Jumlah

Biaya Alat

No.	Jenis Alat	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)	Milik, Beli	Umur Teknis (tahun)
1 .	Sprayer
2 .	Cangkul
3 .	Sabit
4 .	Garpu
5 .	Parang
6 .	Ember
7
8
	Jumlah

2 . Biaya Tenaga Kerja

Tanam Keprasan

No	Jenis Pekerjaan	Dari Keluarga					Dari Luar Keluarga						
		Σ Hari Kerja	Tenaga Kerja			Nilai (Rp/org)	Σ	Σ Hari Kerja	Tenaga Kerja			Nilai (Rp/org)	Σ
			u	s	Ternak				u	s	Ternak		
1 .	Pembuatan Leng	
2 .	Penanaman	
3 .	Pemeliharaan												
	❖Kepras	
	❖Pedhotoyot	
	❖Bubut	
	❖Sulam	
	❖Pemupukan I	
	❖Gulud	
	❖Blengkrah	
	❖Roges I	
	❖Pemupukan II	
	❖Gulud Akhir	
	❖Roges Njlok	
	❖Biaya Irigasi	
4 .	Penebangan	
5 .	Pengangkutan	
	Jumlah	

3 . Produksi dan Pendapatan

- 1) Produksi Tebu :Kw
- 2) Nilai Produksi
 Dijual bebas :Kw x Rp. = Rp.
 Dijual ke Pabrik Gula :Kw x Rp. = Rp.
- 3) Total biaya produksi : Biaya Sarana Produksi + Biaya Tenaga Kerja
- 4) Pendapatan usahatani : Nilai Produksi – Total biaya produksi = Rp.

II. Biaya Transaksi

1 . Pajak Tanah : Rp.

2 . Kemitraan

Biaya untuk mengurus kemitraan dengan Pedagang perantara

- ❖ Transport : Rp.
- ❖ Konsumsi : Rp.
- ❖ Rokok : Rp.
- ❖ Kertas Kerja : Rp.

3 . Kredit

Biaya untuk mengurus kredit

- ❖ Transport : Rp.
- ❖ Konsumsi : Rp.
- ❖ Kertas Kerja : Rp.
- ❖ Bunga kredit : Rp.
- ❖ Sistem bagi hasil : Rp.
- ❖ Fee untuk Pedagang perantara: Rp.

4 . Sumbangan untuk kelompok tani : Rp.

5 . Pajak Desa : Rp.

6 . Biaya Keamanan : Rp.

7 . Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA)

- ❖ Biaya mengurus SPTA : Rp.
- ❖ Ongkos Lelang : Rp.

8 . Tebang- Muat – Angkut (TMA)

- ❖ Biaya Tebang dan Muat
 - Ongkos Tebang : Rp.



- Uang makan penebang : Rp.
- Sewa jalan (tebu didalam) : Rp.
- Ongkos imbal(tebu didalam) : Rp.

❖ Biaya Angkut

- Ongkos Angkut/Truk : Rp.
- Uang makan sopir : Rp.
- Biaya Mandor : Rp.
- : Rp.

9 . Biaya Karung : Rp.

10. Biaya pesta adat : Rp.

III . Pemasaran Produksi Tebu

1 . Kemanakah bapak / ibu menjual hasil produksi (tebu)?

- a. Pabrik Gula
- b. Tengkulak
- c. Pedagang pengecer
- d. Pedagang pengumpul
- e. Lembaga pemasaran (KUD)
- f. Lainnya

2 . Apabila bapak / ibu menjual ke pabrik gula

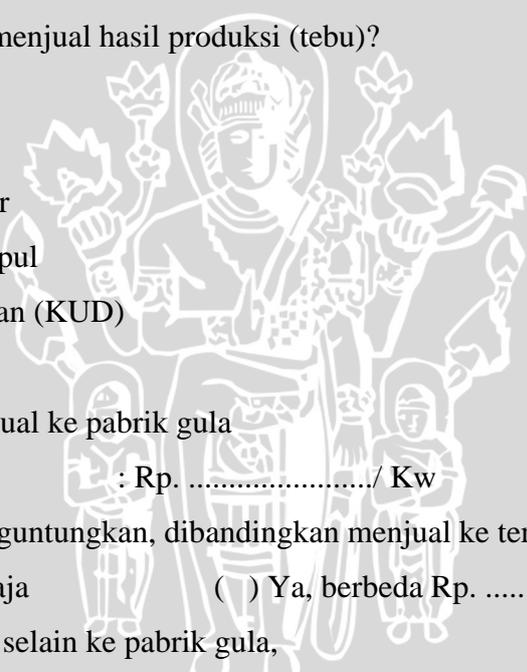
- a. Berapa harganya : Rp. / Kw
- b. Apakah lebih menguntungkan, dibandingkan menjual ke tempat lain?
 Tidak, sama saja Ya, berbeda Rp. / Kw

3 . Bilamana bapak menjual selain ke pabrik gula,

- a. Dijual kemana?
- b. Berapa harganya : Rp. / Kw
- c. Apakah lebih menguntungkan, dibandingkan menjual ke tempat lain?
 Tidak, sama saja Ya, berbeda Rp. / Kw

4 . Darimanakah bapak mengetahui informasi harga?

- a. Radio
- b. Tengkulak
- c. Pedagang pengecer
- d. Pedagang pengumpul



- e. Lembaga pemasaran (KUD)
- f. Pabrik gula
- g. Lainnya

IV . Persepsi

1 . Apakah bapak / ibu mengetahui tentang harga pokok tebu?

- () Ya
- () Tidak

2 . Bilamana mengenal tentang harga pokok, apakah berpengaruh terhadap usahatani bapak / ibu?

- () Ya, apa pengaruhnya

- 1
- 2
- 3

3 . Masalah yang dihadapi?

- a
- b



Kuisisioner

**ANALISIS EKONOMI GULA:
SUATU PENDEKATAN KONSEP EKONOMI KELEMBAGAAN DAN MATRIKS
ANALISIS KEBIJAKAN**

**DAFTAR PERTANYAAN
PETANI TEBU BEBAS**

Nama Responden :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Malang

Nama Enumerator : Yustitia Asri Ertaningrum

Tanggal Wawancara :

I. Kondisi Rumah Tangga

No	Nama	Status dalam Keluarga	Umur	Pendidikan Terakhir / Yang sedang dijalani	Pekerjaan	
					Utama	Sampingan

II. Usahatani Tebu

- 1) Sudah Berapa lama bapak / ibu menjadi petani?
- 2) Tanaman apa sajakah yang sudah bapak / ibu tanam?
- 3) Kapan bapak / ibu mulai menanam tebu?
- 4) Kenapa bapak / ibu menanam tebu?
- 5) Agar usahatani bapak / ibu maksimal apa yang anda lakukan?
- 6) Apa alasan bapak / ibu tidak menjadi anggota KUD?
 - () Tidak mendapat bantuan kredit
 - () Produksi lebih tinggi dibandingkan kemitraan
 - () Keuntungan lebih tinggi dibandingkan kemitraan



6.	Ember
7.
8.
	Jumlah

Lahan

- 1) Darimana Bapak / Ibu mendapatkan modal usahatani tebu?
 - () Pinjam dari Luar, dari siapa?
 - () Modal Sendiri
- 2) Apabila pinjam dari KUD, bagaimana cara bapak / ibu mengembalikannya?
 - () Dengan mengangsur beberapa kali
 - () Dengan memotong hasil panen
- 3) Apa jaminan yang dipakai untuk mendapatkan kredit?
 - () Sertifikat tanah
 - () BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
 - () Lain-lain, sebutkan

Jenis Lahan	Luas Garapan	Lahan yang diusahakan untuk usahatani tebu			
		Milik	Sewa	Bagi hasil	
				Dengan siapa	Berapa pembagiannya
Sawah					
Tegal					

b. Tanam Keprasan

No	Jenis Saprodi	Jumlah (Kw,lt)	Harga (Rp/Kw,lt)	Biaya (Rp)	Keterangan (Milik, Beli,dll)
1.	Bibit
2.	Pupuk



	a . Urea
	b. TSP
	c. KCL
	d
3 .	Pestisida / Obat-obatan				
	a
	b
	Jumlah

Biaya Alat

No.	Jenis Alat	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)	Milik, Beli	Umur Teknis (tahun)
1 .	Sprayer
2 .	Cangkul
3 .	Sabit
4 .	Garpu
5 .	Parang
6 .	Ember
7
8
	Jumlah

2 . Biaya Tenaga Kerja

a. Tanam Pertama (Ungaran)

No .	Jenis Pekerjaan	Dari Keluarga					Dari Luar Keluarga						
		Σ Hari Kerja	Tenaga Kerja			Nilai (Rp/ org)	Σ	Σ Hari Kerja	Tenaga Kerja			Nilai (Rp/ org)	Σ
			u	s	Ternak				u	s	Ternak		
1 .	Pembuatan Leng	
2 .	Penanaman	



3.	Pemeliharaan											
	❖ Kepras
	❖ Pedhot oyot
	❖ Bubut
	❖ Sulam
	❖ Pemupukan I
	❖ Gulud
	❖ Blengkrah
	❖ Roges I
	❖ Pemupukan II
	❖ Gulud Akhir
	❖ Roges Njlok
	❖ Biaya Irigasi
4.	Penebangan
5.	Pengangkutan
Jumlah	

b. Tanam Keprasan

No	Jenis Pekerjaan	Dari Keluarga					Dari Luar Keluarga						
		Σ Hari Kerja	Tenaga Kerja			Nilai (Rp/org)	Σ	Σ Hari Kerja	Tenaga Kerja			Nilai (Rp/org)	Σ
			u	s	Ternak				u	s	Ternak		
1.	Pembuatan Leng	
2.	Penanaman	
3.	Pemeliharaan												
	❖ Kepras	
	❖ Pedhot oyot	
	❖ Bubut	
	❖ Sulam	

❖ Pemupukan I
❖ Gulud
❖ Blengkrah
❖ Roges I
❖ Pemupukan II
❖ Gulud Akhir
❖ Roges Njlok
❖ Biaya Irigasi
4. Penebangan
5. Pengangkutan
Jumlah

3. Produksi dan Pendapatan

- 1) Produksi Tebu :Kw
- 2) Nilai Produksi
 - Dijual bebas :Kw x Rp. = Rp.
 - Dijual ke Pabrik Gula :Kw x Rp. = Rp.
- 3) Total biaya produksi : Biaya Sarana Produksi + Biaya Tenaga Kerja
- 4) Pendapatan usahatani : Nilai Produksi – Total biaya produksi = Rp.

II. Biaya Transaksi

1. Pajak Tanah : Rp.

2. Kemitraan

Biaya untuk mengurus kemitraan dengan Pedagang perantara

❖ Transport : Rp.

❖ Konsumsi : Rp.

❖ Rokok : Rp.

❖ Kertas Kerja : Rp.

3 . Kredit

Biaya untuk mengurus kredit

- ❖ Transport : Rp.
- ❖ Konsumsi : Rp.
- ❖ Kertas Kerja : Rp.
- ❖ Bunga kredit : Rp.
- ❖ Sistem bagi hasil : Rp.
- ❖ Fee untuk Pedagang perantara: Rp.

4 . Sumbangan untuk kelompok tani : Rp.

5 . Pajak Desa : Rp.

6 . Biaya Keamanan : Rp.

7 . Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA)

- ❖ Biaya mengurus SPTA : Rp.
- ❖ Ongkos Lelang : Rp.

8 . Tebang- Muat – Angkut (TMA)

- ❖ Biaya Tebang dan Muat
 - Ongkos Tebang : Rp.
 - Uang makan penebang : Rp.
 - Sewa jalan (tebu didalam) : Rp.
 - Ongkos imbal(tebu didalam) : Rp.
- ❖ Biaya Angkut
 - Ongkos Angkut/Truk : Rp.
 - Uang makan sopir : Rp.
 - Biaya Mandor : Rp.
 - : Rp.

9 . Biaya Karung : Rp.

10. Biaya pesta adat : Rp.

III . Pemasaran Produksi Tebu

1 . Kemanakah bapak / ibu menjual hasil produksi (tebu)?

- a. Pabrik Gula
- b. Tengkulak
- c. Pedagang pengecer



- d. Pedagang pengumpul
- e. Lembaga pemasaran (KUD)
- f. Lainnya

2 . Apabila bapak / ibu menjual ke pabrik gula

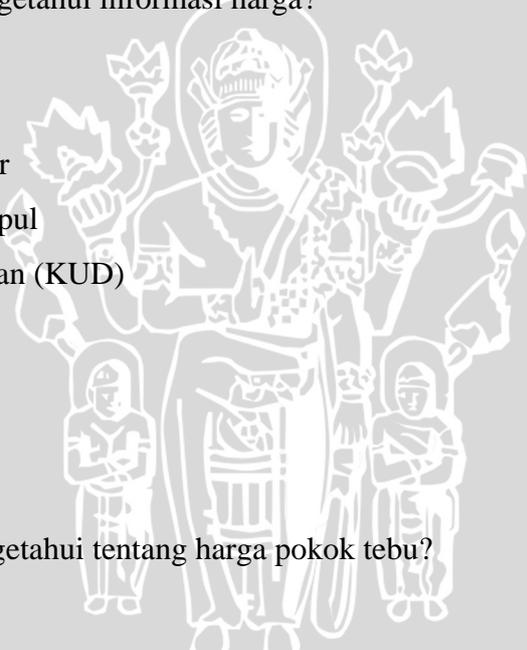
- a. Berapa harganya : Rp. / Kw
- b. Apakah lebih menguntungkan, dibandingkan menjual ke tempat lain?
 () Tidak, sama saja () Ya, berbeda Rp. / Kw

3 . Bilamana bapak menjual selain ke pabrik gula,

- a. Dijual kemana?
- b. Berapa harganya : Rp. / Kw
- c. Apakah lebih menguntungkan, dibandingkan menjual ke tempat lain?
 () Tidak, sama saja () Ya, berbeda Rp. / Kw

4 . Darimanakah bapak mengetahui informasi harga?

- a. Radio
- b. Tengkulak
- c. Pedagang pengecer
- d. Pedagang pengumpul
- e. Lembaga pemasaran (KUD)
- f. Pabrik gula
- g. Lainnya



IV . Persepsi

1 . Apakah bapak / ibu mengetahui tentang harga pokok tebu?

- () Ya
- () Tidak

2 . Bilamana mengenal tentang harga pokok, apakah berpengaruh terhadap usahatani bapak / ibu?

- () Ya, apa pengaruhnya

- 1
- 2
- 3

3 . Masalah yang dihadapi?

- a
- b



Kuisisioner
ANALISIS EKONOMI GULA:

SUATU PENDEKATAN KONSEP EKONOMI KELEMBAGAAN DAN MATRIKS
ANALISIS KEBIJAKAN

DAFTAR PERTANYAAN
PABRIK GULA Kebon Agung (Swasta)

I. Keadaan Umum PG

- 1) Berapakah usia PG ini?
- 2) Ada berapa banyak mesin produksi di PG Kebon Agung?
- 3) Berapa volume produksi per hari?
- 4) Sebagai PG Swasta, Bagaimana mekanisme pembuatan keputusan manajerial di PG Kebon Agung?
- 5) Ada berapa divisi di PG Kebon Agung? Bagaimana bentuk hirarki dan uraian pekerjaannya?
- 6) Menurut anda, biaya apa sajakah yang termasuk dalam biaya produksi? Biaya apa sajakah yang termasuk di dalam biaya transaksi?
- 7) Apakah informasi antar divisi berjalan sempurna? Apakah ada “overlapping” dalam melakukan satu pekerjaan?
- 8) Bagaimana mekanisme hubungan antara PG Kebon Agung dengan koperasi?
- 9) Bagaimana mekanisme hubungan antara PG Kebon Agung dengan pedagang perantara?
- 10) Bagaimana mekanisme hubungan antara PG Kebon Agung dengan petani baik kredit maupun bebas?
- 11) Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi petani tebu untuk menggilingkan tebunya di PG Kebon Agung? Berapakan biayanya?

II. Biaya Produksi

- ❖ Lahan :
 - Budidaya lahan :
 - Bibit :
 - Pupuk :
 - Tenaga Kerja :
 - Lain-lain, sebutkan.....
- ❖ Persiapan Giling
 - Persiapan Pabrik :
 - Mesin Giling :
 - Pompa air :
 - Tebu :
 - Bahan-bahan kimia :
 - Bahan bakar mesin :
 - Oli :

- Lain-lain, sebutkan.....
- ❖ Mesin giling
 - Persiapan mesin :
 - Spare part mesin :
- ❖ Tenaga Kerja
 - Upah buruh tetap :
 - Upah Lembur :
 - Upah buruh kontrak :
- ❖ Penyimpanan :
 - Biaya Karung :

III.

Biaya Transaksi :

❖ **Biaya Transaksi Pasar**

- Perluasan jaringan :
- Biaya transportasi :
- Subsidi transportasi :
- Tebang-Muat-Angkut :
- Biaya Kontrak :
- Bonus tebu baik :
- Biaya lain-lain, sebutkan

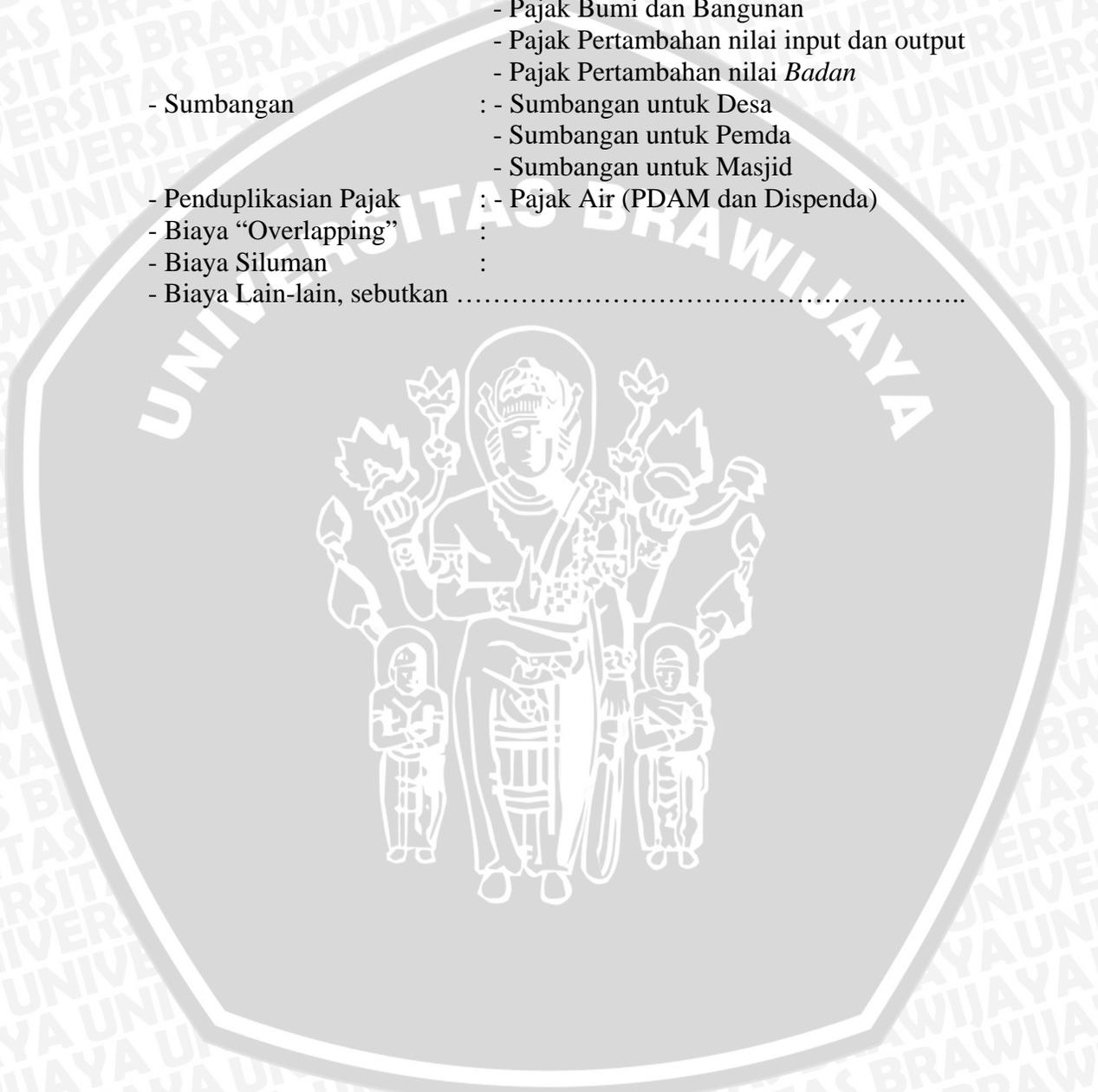
❖ **Biaya Transaksi Manajerial**

- Biaya di luar pabrik :
 - Alat Transportasi tebu(lori)
 - Alat pertanian
 - Divisi perbaikan
 - Garasi
- Biaya Perawatan dan Perbaikan
- Penelitian dan Pengembangan
- Pajak Tanah/lahan
- Pabrik :
 - Gedung
 - Fasilitas
- Biaya Listrik :
- Biaya Telekomunikasi :
- Transportasi :
 - Mobil kantor
 - Bus Kantor
 - Truk
 - Lokomotif dan lori
 - Sepeda motor
 - Traktor
- Gaji Pegawai Kantor :
- Uang Pensiun :
- Uang Kesehatan Pegawai :
- Asuransi pegawai :
- Asuransi buruh :
- Biaya keamanan (satpam) :

- Biaya keamanan tebu :
- Biaya Pemadam Kebakaran :
- Biaya pembuatan keputusan :
- Biaya lain-lain, sebutkan.....

❖ **Biaya Transaksi Politik**

- Pajak :
 - Pajak Penghasilan
 - Pajak Bumi dan Bangunan
 - Pajak Pertambahan nilai input dan output
 - Pajak Pertambahan nilai *Badan*
- Sumbangan :
 - Sumbangan untuk Desa
 - Sumbangan untuk Pemda
 - Sumbangan untuk Masjid
- Penduplikasian Pajak : - Pajak Air (PDAM dan Dispenda)
- Biaya "Overlapping" :
- Biaya Siluman :
- Biaya Lain-lain, sebutkan



Kuisisioner
ANALISIS EKONOMI GULA:

SUATU PENDEKATAN KONSEP EKONOMI KELEMBAGAAN DAN MATRIKS
ANALISIS KEBIJAKAN

DAFTAR PERTANYAAN
PABRIK GULA Krebet Baru (BUMN)

I. Keadaan Umum PG

- 1) Berapakah usia PG ini?
- 2) Ada berapa banyak mesin produksi di PG Krebet Baru?
- 3) Berapa volume produksi per hari?
- 4) Sebagai PG BUMN, PG Krebet Baru berada di bawah naungan Departemen apa? Bagaimana mekanisme pembuatan keputusan manajerialnya?
- 5) Ada berapa divisi di PG Krebet Baru? Bagaimana bentuk hirarki dan uraian pekerjaannya?
- 6) Menurut anda, biaya apa sajakah yang termasuk dalam biaya produksi? Biaya apa sajakah yang termasuk di dalam biaya transaksi?
- 7) Apakah informasi antar divisi berjalan sempurna? Apakah ada “overlapping” dalam melakukan satu pekerjaan?
- 8) Bagaimana mekanisme hubungan antara PG Krebet Baru dengan koperasi?
- 9) Bagaimana mekanisme hubungan antara PG Krebet Baru dengan pedagang perantara?
- 10) Bagaimana mekanisme hubungan antara PG Krebet Baru dengan petani baik kredit maupun bebas?
- 11) Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi petani tebu untuk menggilingkan tebunya di PG Krebet Baru? Berapakan biayanya?

II. Biaya Produksi

- ❖ Lahan :
- Budidaya lahan :
- Bibit :
- Pupuk :
- Tenaga Kerja :
- Lain-lain, sebutkan.....
- ❖ Persiapan Giling :
- Persiapan Pabrik :
- Mesin Giling :
- Pompa air :
- Tebu :
- Bahan-bahan kimia :
- Bahan bakar mesin :

- Oli :
- Lain-lain, sebutkan.....
- ❖ Mesin giling
 - Persiapan mesin :
 - Spare part mesin :
- ❖ Tenaga Kerja
 - Upah buruh tetap :
 - Upah Lembur :
 - Upah buruh kontrak :
- ❖ Penyimpanan
 - Biaya Karung :

III. Biaya Transaksi :

- ❖ **Biaya Transaksi Pasar**
 - Perluasan jaringan :
 - Biaya transportasi :
 - Subsidi transportasi :
 - Tebang-Muat-Angkut :
 - Biaya Kontrak :
 - Bonus tebu baik :
 - Biaya lain-lain, sebutkan
- ❖ **Biaya Transaksi Manajerial**
 - Biaya di luar pabrik :
 - Alat Transportasi tebu(lori)
 - Alat pertanian
 - Divisi perbaikan
 - Garasi
 - Biaya Perawatan dan Perbaikan
 - Penelitian dan Pengembangan
 - Pajak Tanah/lahan
 - Pabrik :
 - Gedung
 - Fasilitas
 - Biaya Listrik :
 - Biaya Telekomunikasi :
 - Transportasi :
 - Mobil kantor
 - Bus Kantor
 - Truk
 - Lokomotif dan lori
 - Sepeda motor
 - Traktor
 - Gaji Pegawai Kantor :
 - Uang Pensiun :
 - Uang Kesehatan Pegawai :
 - Asuransi pegawai :
 - Asuransi buruh :

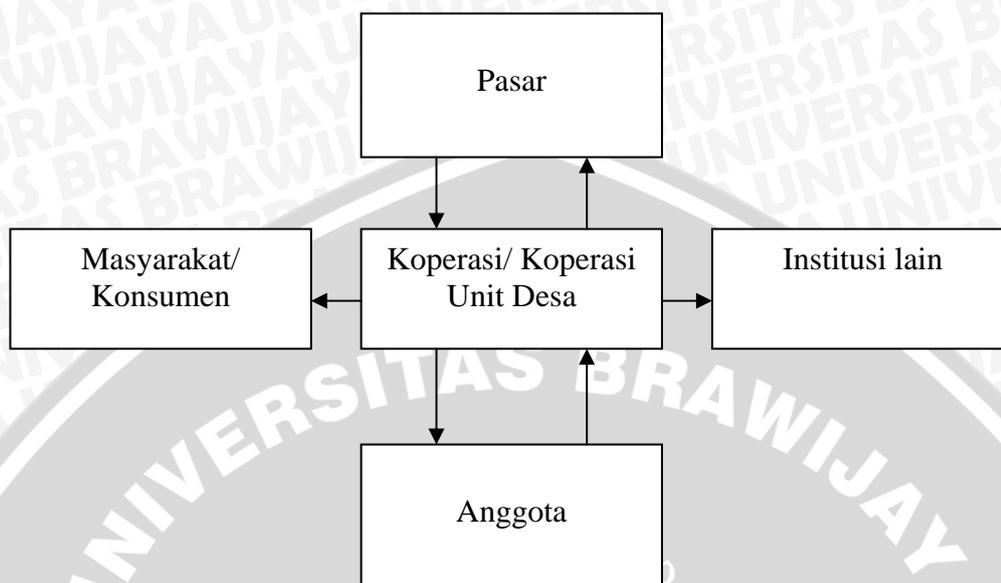
- Biaya keamanan (satpam) :
- Biaya keamanan tebu :
- Biaya Pemadam Kebakaran :
- Biaya pembuatan keputusan :
- Biaya lain-lain, sebutkan.....

❖ **Biaya Transaksi Politik**

- Pajak :
 - Pajak Penghasilan
 - Pajak Bumi dan Bangunan
 - Pajak Pertambahan nilai input dan output
 - Pajak Pertambahan nilai *Badan*
- Sumbangan :
 - Sumbangan untuk Desa
 - Sumbangan untuk Pemda
 - Sumbangan untuk Masjid
- Penduplikasian Pajak : - Pajak Air (PDAM dan Dispenda)
- Biaya “Overlapping” :
- Biaya Siluman :
- Biaya Lain-lain, sebutkan

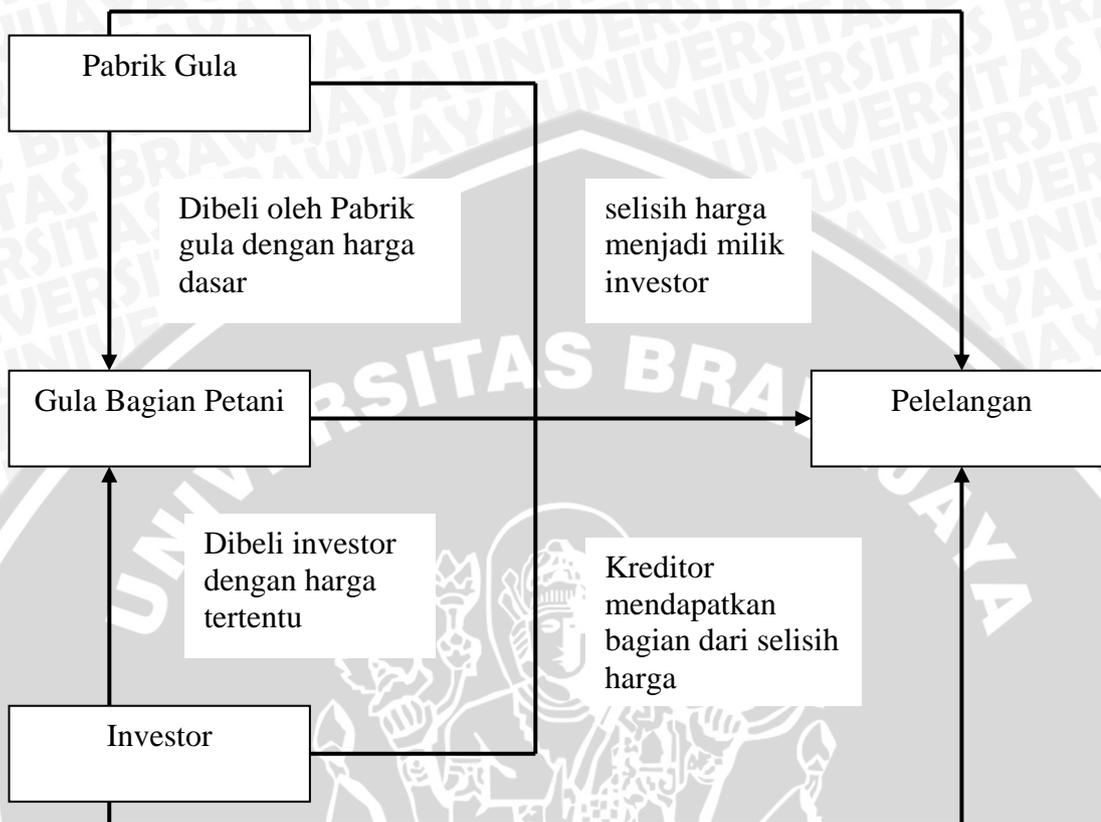


Lampiran 1. Peranan Ideal Koperasi/Koperasi Unit Desa



Sumber : Dimodifikasi dari Syafi'i, 2003

Lampiran 2. Skema Pemasaran Gula di Indonesia



Lampiran 3. Model Kemitraan di Pabrik Gula Kebon Agung

Pihak	Kewajiban	Keuntungan
Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Menanam tebu berdasarkan waktu yang telah dijadwalkan dan disetujui. • Tebang, angkut, dan pemrosesan tebu di pabrik gula berdasarkan waktu yang telah disetujui dan dijadwalkan. • Menjaga kualitas tebu sesuai standart yang ditetapkan • Membayar kredit 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima subsidi transportasi (Rp 200/ kuintal tebu) • Menerima bonus premium untuk tebu yang berkualitas (Rp 300/kuintal tebu) • Menerima kredit dari bank atau pinjaman dari pabrik gula.
Pabrik Gula	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur masa tanam dan panen tebu berkonsultasi dengan kelompok tani. • Memproses tebu petani • Memberikan subsidi transportasi dan bonus kepada tebu yang berkualitas premium. • Memproses kredit petani tebu di bank. • Jaminan penerimaan minimum dalam bentuk gula (4,4 kg/kuintal tebu) • Memfasilitasi lelang gula petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima bahan baku tebu dari petani
Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan kegiatan tanam, tebang, dan angkut. • Memilih petani penerima kredit dan membukukan distribusi kredit • Membantu koperasi untuk membukukan kredit dan pengembalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima fee dari petani sesuai kesepakatan (0,5% – 1 %)
Koperasi /KUD	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih petani penerima kredit dan membukukan distribusi kredit • Membukukan kredit dan pengembalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima fee dari petani (Rp 10/ kuintal tebu)

Lampiran 4. Perhitungan Nilai Shadow Exchange Rate (SER)

Ekspor – Impor (juta rupiah)		Pajak Ekspor – Impor (juta rupiah)		Standart Konversi Faktor (SKF)
Nilai Ekspor	Nilai Impor	Pajak Ekspor	Pajak Impor	
878.000.000,00	566.000.000,00	6.700.000	300.000	1,0066

Nilai Tukar Resmi (NTR) menurut Statistika Ekonomi Moneter Bulan September 2006 adalah Rp 9000,-

$$SER = \frac{NTR}{SKF} = \frac{9000}{1,0066} = 8940,98$$

$$= \text{Rp } 8940,98$$



Lampiran 5. Perhitungan harga Bayangan (Shadow Price) Gula Pada tingkat pelabuhan Pada Nilai Shadow Exchange Rate Sebesar Rp 8940,98

Uraian	Nilai
Harga FOB (US \$/Ton)	422
(+) Asuransi dan muatan (US \$/Ton)	80
Ekuivalen CIF di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta	\$ 502
Shadow Exchange Rate	Rp 8940,89
Harga CIF (Rp/Ton)	Rp 4.488.326,8
(x) Faktor Konversi (Kg/Ton)	Kg/1000Kg
Harga CIF (Rp/Kg)	Rp 4.488,32
(x) Faktor konversi	100 %
Harga CIF di pelabuhan (Rp/Kg)	Rp 4.488,32
Catatan : Harga pasar rata-rata 2006 Rp 6200/Kg	

Lampiran 6. Perhitungan Harga Bayangan (Shadow Price) Pupuk Urea pada Tingkat Pelabuhan Pada Nilai Shadow Exchange Rate Sebesar Rp 8940,98

Uraian	Nilai
Harga CIF (US \$/Ton)	206
(-) Asuransi dan muatan (US \$/Ton)	80
Ekuivalen FOB di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	\$ 126
Shadow Exchange Rate	Rp 8940,89
Harga FOB (Rp/Ton)	Rp 1.126.552,1
(x) Faktor Konversi (Ku/Ton)	Ku/10Ton
Harga FOB (Rp/Ku)	Rp 112.655
(x) Faktor konversi	100 %
Harga CIF di pelabuhan (Rp/Ku)	Rp 112.655
Catatan : Harga pasar rata-rata 2006 Rp 120.000/Ku	

Lampiran 7. Perhitungan Harga Bayangan (Shadow Price) Pupuk ZA pada Tingkat Pelabuhan Pada Nilai Shadow Exchange Rate Sebesar Rp 8940,98

Uraian	Nilai
Harga FOB (US \$/Ton)	98,23
(+) Asuransi dan muatan (US \$/Ton)	7,88
Ekuivalen CIF di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	\$ 90,35
Shadow Exchange Rate	Rp 8940,89
Harga CIF (Rp/Ton)	Rp 807.809,41
(x) Faktor Konversi (Ku/Ton)	Ku/10Ton
Harga CIF (Rp/Ku)	Rp 80.781
(x) Faktor konversi	100 %
Harga CIF di pelabuhan (Rp/Ku)	Rp 80.781
Catatan : Harga pasar rata-rata 2006 Rp 105.000/Ku	

Lampiran 8. Analisis Anggaran Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegal Petani Kredit Desa Tlogowaru di bawah PG Krebet Baru pada Harga Private/Pasar (Rupiah per ha)

Input – Output	Keterangan	Kuantitas	Total Biaya
Input	Pupuk Urea	7 ku	Rp. 840.000
Treadable	Pupuk Za	9 ku	Rp. 945.000
Input Domestik	Bibit	9 ton	Rp. 2.000.000
	Persiapan Lahan		Rp. 325.000
	Sewa Lahan		Rp. 4.500.000
	Pajak		Rp. 80.000
	Irigasi		Rp. 200.000
	Sewa Traktor		Rp. 1.100.000
	Tenaga Kerja		
	• Gulud		Rp. 500.000
	• Penanaman		Rp. 300.000
	• Penyiangan		Rp. 250.000
	• Roges I		Rp. 300.000
	• Pupuk		Rp. 1.290.000
	• Roges II		Rp. 150.000
	• Pupuk		Rp. 1.000.000
	Tebang Angkut		Rp. 2.961.840
Total Input			Rp. 16.741.840
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Rendemen 4,40 % • Harga Aktual Gula = Rp 6200 / kg • Total Gula = 4,40 % x 900ku • Total Gula Bagian Petani = 2,86% 900 ku • Output Total Petani= 25,74 ku x Rp 6200 • Premi Mutu 900 ku x Rp 275 • Nilai Tetes 900 ku x 2,5 kg x Rp 600 	900 ku tebu 39,6 ku gula 25,74ku*	Rp. 15.958.800 Rp. 247.500 Rp. 1.350.000
Total Output			Rp. 17.556.300
Profit (Output – Input)			Rp. 814.460

* Bagi Hasil Petani : PG adalah 65 % : 35% dan diasumsikan 35 % pabrik sebagai biaya proses produksi tebu menjadi gula dengan tingkat rendemen 4,4 % (petani : PG = 2,86% : 1,54%)

**Lampiran 9. Analisis Anggaran Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegal
Petani Kredit Desa Tlogowaru di bawah PG Krebet Baru pada Harga Sosial
(rupiah per ha)**

Input – Output	Keterangan	Kuantitas		Total Biaya
Input	Pupuk Urea	7 ku	Rp.	788.585
Treadable	Pupuk Za	9 ku	Rp.	717.029
Input Domestik	Bibit	9 ton	Rp.	2.000.000
	Persiapan Lahan		Rp.	325.000
	Sewa Lahan		Rp.	4.500.000
	Sewa Traktor		Rp.	1.100.000
	Irigasi		Rp.	200.000
	Tenaga Kerja			
	• Gulud		Rp.	500.000
	• Penanaman		Rp.	300.000
	• Penyiangan		Rp.	250.000
	• Roges I		Rp.	300.000
	• Pupuk		Rp.	1.290.000
	• Roges II		Rp.	150.000
	• Pupuk		Rp.	1.000.000
	Tebang Angkut		Rp.	2.961.840
Total Input			Rp.	16.382.454
Output	• Rendemen 4,40 %	900 ku tebu		
	• Harga Sosial Gula = Rp 4488,32 / kg			
	• Total Gula = 4,40 % x 900ku	39,6 ku		
	• Total Gula Bagian Petani = 2,86% 900 ku	25,74 ku*		
	• Output Total Petani= 25,74 ku x Rp 4488,32 2574 kg x Rp 4488,32		Rp.	11.552.936
	• Premi Mutu 900 ku x Rp 275		Rp.	247.500
	• Nilai Tetes 900 ku x 2,5 kg x Rp 600		Rp.	1.350.000
Total Output			Rp.	13.150.436
Profit (Output – Input)			Rp.	- 3.232.018

* Bagi Hasil Petani : PG adalah 65 % : 35% dan diasumsikan 35 % pabrik sebagai biaya proses produksi tebu menjadi gula dengan tingkat rendemen 4,4 % (petani : PG = 2,86% : 1,54%)

Lampiran 10. Analisis Anggaran Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegak Petani Bebas Desa Tlogowaru PG Krebet Baru pada Harga Private/Pasar (rupiah per ha)

Input – Output	Keterangan	Kuantitas	Total Biaya
Input Treadable	Pupuk Urea	7 ku	Rp. 840.000
	Pupuk Za	9 ku	Rp. 1.440.000
Input Domestik	Bibit	9 ton	Rp. 2.250.000
	Persiapan Lahan		Rp. 325.000
	Sewa Lahan		Rp. 4.500.000
	Pajak		Rp. 80.000
	Sewa Traktor		Rp. 1.100.000
	Irigasi		Rp. 200.000
	Tenaga Kerja		
	• Gulud		Rp. 500.000
	• Penanaman		Rp. 300.000
	• Penyiangan		Rp. 250.000
	• Roges I		Rp. 300.000
• Pupuk		Rp. 1.290.000	
• Roges II		Rp. 150.000	
• Pupuk		Rp. 1.000.000	
Tebang Angkut		Rp. 4.000.000	
Total Input			Rp. 18.525.000
Output	• Rendemen 4,40 %	900 ku tebu	
	• Harga Aktual Gula = Rp 6200 / kg		
	• Total Gula = 4,40 % x 900ku	39,6 ku gula	
	• Total Gula Bagian Petani = 2,86% 900 ku	25,74 ku gula*	
	• Output Total Petani= 25,74 ku x Rp 6200		Rp. 15.958.800
	• Premi Mutu 900 ku x Rp 275		Rp. 247.500
• Nilai Tetes 900 ku x 2,5 kg x Rp 600		Rp. 1.350.000	
Total Output			Rp. 17.556.300
Profit (Output – Input)			Rp. - 968.700

* Bagi Hasil Petani : PG adalah 65 % : 35% dan diasumsikan 35 % pabrik sebagai biaya proses produksi tebu menjadi gula dengan tingkat rendemen 4,4 % (petani : PG = 2,86% : 1,54%)

Lampiran 11. Analisis Anggaran Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegak Petani Bebas Desa Tlogowaru di bawah PG Krebbe Baru pada Harga Sosial (rupiah per ha)

Input – Output	Keterangan	Kuantitas		Total Biaya
Input	Pupuk Urea	7 ku	Rp.	788.585
Treadable	Pupuk Za	9 ku	Rp.	717.029
Input	Bibit	9 ton	Rp.	2.250.000
Domestik	Persiapan Lahan		Rp.	325.000
	Sewa Lahan		Rp.	4.500.000
	Sewa Traktor		Rp.	1.100.000
	Irigasi		Rp.	200.000
	Tenaga Kerja		Rp.	
	• Gulud			500.000
	• Penanaman		Rp.	300.000
	• Penyiangan		Rp.	250.000
	• Roges I		Rp.	300.000
	• Pupuk		Rp.	1.290.000
	• Roges II		Rp.	150.000
	• Pupuk		Rp.	1.000.000
	Tebang Angkut		Rp.	4.000.000
Total Input			Rp.	17.070.614
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Rendemen 4,40 % • Harga Sosial Gula = Rp 4488,32 / kg • Total Gula = 4,40 % x 900ku • Total Gula Bagian Petani = 2,86% 900 ku • Output Total Petani= 25,74 ku x Rp 4488,32 • Premi Mutu 900 ku x Rp 275 • Nilai Tetes 900 ku x 2,5 kg x Rp 600 	900 ku tebu 39,6 ku 25,74 ku*		
			Rp.	11.552.936
			Rp.	247.500
			Rp.	1.350.000
Total Output			Rp.	13.150.436
Profit (Output – Input)			Rp.	- 3.920.178

* Bagi Hasil Petani : PG adalah 65 % : 35% dan diasumsikan 35 % pabrik sebagai biaya proses produksi tebu menjadi gula dengan tingkat rendemen 4,4 % (petani : PG = 2,86% : 1,54%)

Lampiran 12. Analisis Anggaran Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegak Petani Kredit Desa Arjowinangun di bawah PG Kebon Agung pada Harga Privat/Pasar (rupiah per ha)

Input – Output	Keterangan	Kuantitas		Total Biaya
Input	Pupuk Urea	7,5 ku	Rp.	900.000
Treadable	Pupuk Za	8 ku	Rp.	840.000
Input	Bibit	9 ton	Rp.	2.000.000
Domestik	Persiapan Lahan		Rp.	325.000
	Sewa Lahan		Rp.	4.500.000
	Pajak		Rp.	80.000
	Sewa Traktor		Rp.	1.100.000
	Irigasi		Rp.	200.000
	Tenaga Kerja			
	• Gulud		Rp.	500.000
	• Penanaman		Rp.	300.000
	• Penyiangan		Rp.	250.000
	• Roges I		Rp.	300.000
	• Pupuk		Rp.	1.290.000
	• Roges II		Rp.	150.000
	• Pupuk		Rp.	1.000.000
	Tebang Angkut		Rp.	2.781.840
Total Input			Rp.	16.516.840
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Rendemen 4,90 % • Harga Aktual Gula = Rp 6200 / kg • Total Gula = 4,90 % x 900ku • Total Gula Bagian Petani = 3,185% x 900 ku • Output Total Petani= 28,665 ku x Rp 6200 • Premi Mutu 900 ku x Rp 275 • Nilai Tetes 900 ku x 2,5 kg x Rp 600 	900 ku tebu 44,1 ku gula 28,665 ku gula*		
			Rp.	17.772.300
			Rp.	247.500
			Rp.	1.350.000
Total Output			Rp.	19.396.800
Profit (Output – Input)			Rp.	2.852.960

* Bagi Hasil Petani : PG adalah 65 % : 35% dan diasumsikan 35 % pabrik sebagai biaya proses produksi tebu menjadi gula dengan tingkat rendemen 4,9 % (petani : PG = 3,185% : 1,715%)

**Lampiran 13. Analisis Anggaran Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegak
Petani Kredit Desa Arjowinangun di bawah PG Kebon Agung pada Harga
Sosial (rupiah per ha)**

Input – Output	Keterangan	Kuantitas		Total Biaya	
Input Treadable	Pupuk Urea	7,5 ku	Rp.	844.912,5	
	Pupuk Za	8 ku	Rp.	646.248	
Input Domestik	Bibit	9 ton	Rp.	2.000.000	
	Persiapan Lahan		Rp.	325.000	
	Sewa Lahan		Rp.	4.500.000	
	Sewa Traktor		Rp.	1.100.000	
	Irigasi		Rp.	200.000	
	Tenaga Kerja		Rp.		
	• Gulud				500.000
	• Penanaman			Rp.	300.000
	• Penyiangan			Rp.	250.000
	• Roges I			Rp.	300.000
	• Pupuk			Rp.	1.290.000
• Roges II		Rp.	150.000		
• Pupuk		Rp.	1.000.000		
Tebang Angkut		Rp.	2.781.840		
Total Input			Rp.	16.188.000,5	
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Rendemen 4,90 % • Harga Sosial Gula = Rp 4488,32 / kg • Total Gula = 4,90 % x 900ku • Total Gula Bagian Petani = 3,185% x 900 ku • Output Total Petani= 28,665 ku x Rp 4488,32 2866,5 kg x Rp 4488,32 • Premi Mutu 900 ku x Rp 275 • Nilai Tetes 900 ku x2,5 kg xRp 600 	900 ku tebu			
		44,1 ku gula			
		28,665 ku gula*			
			Rp.	12.865.769	
			Rp.	247.500	
Total Output			Rp.	1.350.000	
Profit (Output – Input)			Rp.	- 1.724.731,5	

* Bagi Hasil Petani : PG adalah 65 % : 35% dan diasumsikan 35 % pabrik sebagai biaya proses produksi tebu menjadi gula dengan tingkat rendemen 4,9 % (petani : PG = 3,185% : 1,715%)

Lampiran 14. Analisis Anggaran Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegak Petani Bebas Desa Arjowinangun di bawah PG Kebon Agung pada Harga Privat/Pasar (rupiah per ha)

Input – Output	Keterangan	Kuantitas		Total Biaya
Input	Pupuk Urea	7,5 ku	Rp.	975.000
Treadable	Pupuk Za	8 ku	Rp.	1.280.000
Input Domestik	Bibit	9 ton	Rp.	2.250.000
	Persiapan Lahan		Rp.	325.000
	Sewa Lahan		Rp.	4.500.000
	Pajak		Rp.	80.000
	Sewa Traktor		Rp.	1.100.000
	Irigasi		Rp.	200.000
	Tenaga Kerja			
	• Gulud		Rp.	500.000
	• Penanaman		Rp.	300.000
	• Penyiangan		Rp.	250.000
	• Roges I		Rp.	300.000
	• Pupuk		Rp.	1.290.000
	• Roges II		Rp.	150.000
	• Pupuk		Rp.	1.000.000
	Tebang Angkut		Rp.	4.000.000
Total Input			Rp.	18.500.000
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Rendemen 4,90 % • Harga Aktual Gula = Rp 6200 / kg • Total Gula = 4,90 % x 900ku • Total Gula Bagian Petani = 3,185% x 900 ku • Output Total Petani= 28,665 ku x Rp 6200 2866,5 kg x Rp 6200 • Premi Mutu 900 ku x Rp 275 • Nilai Tetes 900 ku x 2,5 kg x Rp 600 	900 ku tebu 44,1 ku gula 28,665 ku gula*		
			Rp.	17.772.300
			Rp.	247.500
			Rp.	1.350.000
Total Output			Rp.	19.396.800
Profit (Output – Input)			Rp.	896.800

* Bagi Hasil Petani : PG adalah 65 % : 35% dan diasumsikan 35 % pabrik sebagai biaya proses produksi tebu menjadi gula dengan tingkat rendemen 4,9 % (petani : PG = 3,185% : 1,715%)

Lampiran 15. Analisis Anggaran Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegak Petani Bebas Desa Arjowinangun di bawah PG Kebon Agung pada Harga Sosial (rupiah per ha)

Input – Output	Keterangan	Kuantitas		Total Biaya
Input	Pupuk Urea	7,5 ku	Rp.	844.912,5
Treadable	Pupuk Za	8 ku	Rp.	646.248
Input Domestik	Bibit	9 ton	Rp.	2.250.000
	Persiapan Lahan		Rp.	325.000
	Sewa Lahan		Rp.	4.500.000
	Sewa Traktor		Rp.	1.100.000
	Irigasi		Rp.	200.000
	Tenaga Kerja		Rp.	
	• Gulud			500.000
	• Penanaman		Rp.	300.000
	• Penyiangan		Rp.	250.000
	• Roges I		Rp.	300.000
	• Pupuk		Rp.	1.290.000
	• Roges II		Rp.	150.000
	• Pupuk		Rp.	1.000.000
	Tebang Angkut		Rp.	4.000.000
Total Input			Rp.	17.656.160,5
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Rendemen 4,90 % • Harga Sosial Gula = Rp 4488,32 / kg • Total Gula = 4,90 % x 900ku • Total Gula Bagian Petani = 3,185% x 900 ku • Output Total Petani= 28,665 ku x Rp 4488,32 2866,5 kg x Rp 4488,32 • Premi Mutu 900 ku x Rp 275 • Nilai Tetes 900 ku x2,5 kg xRp 600 	900 ku tebu 44,1 ku gula 28,665 ku gula*		
			Rp.	12.865.769
			Rp.	247.500
			Rp.	1.350.000
Total Output			Rp.	14.463.269
Profit (Output – Input)			Rp.	- 3.192.891,5

* Bagi Hasil Petani : PG adalah 65 % : 35% dan diasumsikan 35 % pabrik sebagai biaya proses produksi tebu menjadi gula dengan tingkat rendemen 4,9 % (petani : PG = 3,185% : 1,715%)

Lampiran 16. Matrik Analisis Kebijakan (PAM) Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegal Petani Tebu Kredit PG Krebet Baru Satu Masa Tanam Per Hektar Periode 2005/2006

Analisis (Rp)	Revenue (Rp)	Biaya		Profit (Rp)
		Input Treadable (Rp)	Input Domestik (Rp)	
Harga Pasar	17.556.840 (A)	1.785.000 (B)	14.956.840 (C)	814.460 (D)
Harga Sosial	13.150.436 (E)	1.505.614 (F)	14.876.840 (G)	- 3.232.018 (H)
Selisih	4.406.404 (I)	279.386 (J)	80.000 (K)	4.046.478 (L)

Keterangan :

- Profit Finansial (D) = A – B – C = Rp 814.460
- Profit Sosial (H) = E – F – G = Rp. - 3.312.015
- Transfer Output (I) = A – E = Rp. 4.406.404
- Transfer Input (J) = B – F = Rp. 279.386
- Transfer Faktor Domestik (K) = C – G = Rp. 80.000
- Transfer Bersih (L) = D – H = Rp. 4.046.478

$$\text{Koefisien PCR (Private Cost Resources)} = \left(\frac{C}{A - B} \right) = \left(\frac{14.956.840}{17.556.840 - 1.785.000} \right) = 0,948$$

$$\text{Koefisien DRC (Domestic Resources Cost)} = \left(\frac{G}{E - F} \right) = \left(\frac{14.876.840}{13.150.436 - 1.505.614} \right) = 1,277$$

$$\text{Koefisien EPC (Effective Protection Coefficient)} = \left(\frac{A - B}{E - F} \right) = \left(\frac{17.556.840 - 1.785.000}{13.150.436 - 1.505.614} \right) = 1,354$$

$$\text{Koefisien NPCI (No minimal Protection Coefficient Input)} = \left(\frac{B}{F} \right) = \left(\frac{1.785.000}{1.505.614} \right) = 1,185$$

$$\text{Koefisien NPCO (No minimal Protection Coefficient Output)} = \left(\frac{A}{E} \right) = \left(\frac{17.556.840}{13.150.436} \right) = 1,335$$

Lampiran 17 . Matrik Analisis Kebijakan (PAM) Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegol Petani Tebu Bebas PG Krebet Baru Satu Masa Tanam Per Hektar Periode 2005/2006

Analisis (Rp)	Revenue (Rp)	Biaya		Profit (Rp)
		Input Treadable (Rp)	Input Domestik (Rp)	
Harga Pasar	17.556.300 (A)	2.280.000 (B)	16.245.000 (C)	- 968.700 (D)
Harga Sosial	13.150.436 (E)	1.505.614 (F)	15.565.000 (G)	- 3.920.178 (H)
Selisih	4.405.864 (I)	774.386 (J)	80.000 (K)	- 2.951.478 (L)

Keterangan :

- Profit Finansial (D) = A – B – C = Rp - 968.700
- Profit Sosial (H) = E – F – G = Rp. - 4.000.178
- Transfer Output (I) = A – E = Rp. 4.405.864
- Transfer Input (J) = B – F = Rp. 774.386
- Transfer Faktor Domestik (K) = C – G = Rp. 80.000
- Transfer Bersih (L) = D – H = Rp. - 2.951.478

$$\text{Koefisien PCR (Private Cost Resources)} = \left(\frac{C}{A - B} \right) = \left(\frac{16.245.000}{17.556.300 - 2.280.000} \right) = 1,063$$

$$\text{Koefisien DRC (Domestic Resources Cost)} = \left(\frac{G}{E - F} \right) = \left(\frac{15.565.000}{13.150.436 - 1.505.614} \right) = 1,344$$

$$\text{Koefisien EPC (Effective Protection Coefficient)} = \left(\frac{A - B}{E - F} \right) = \left(\frac{17.556.300 - 2.280.000}{13.150.436 - 1.505.614} \right) = 1,311$$

$$\text{Koefisien NPCI (No minimal Protection Coefficient Input)} = \left(\frac{B}{F} \right) = \left(\frac{2.280.000}{1.505.614} \right) = 1,514$$

$$\text{Koefisien NPCO (No minimal Protection Coefficient Output)} = \left(\frac{A}{E} \right) = \left(\frac{17.556.300}{13.150.436} \right) = 1,335$$

Lampiran 18. Matrik Analisis Kebijakan (PAM) Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegal Petani Tebu Kredit PG Kebon Agung Satu Masa Tanam Per Hektar Periode 2005/2006

Analisis (Rp)	Revenue (Rp)	Biaya		Profit (Rp)
		Input Treadable (Rp)	Input Domestik (Rp)	
Harga Pasar	19.396.800 (A)	1.740.000 (B)	14.776.840 (C)	2.852.960 (D)
Harga Sosial	14.463.269 (E)	1.491.160,5 (F)	14.696.840 (G)	- 1.724.731,5(H)
Selisih	4.932.731 (I)	248.839,5 (J)	80.000 (K)	4.577.691,5 (L)

Keterangan :

- Profit Finansial (D) = A – B – C = Rp 2.852.960
- Profit Sosial (H) = E – F – G = Rp. - 1.804.731,5
- Transfer Output (I) = A – E = Rp. 4.932.731
- Transfer Input (J) = B – F = Rp. 248.839,5
- Transfer Faktor Domestik (K) = C – G = Rp. 80.000
- Transfer Bersih (L) = D – H = Rp. 4.577.691,5

$$\text{Koefisien PCR (Private Cost Resources)} = \left(\frac{C}{A - B} \right) = \left(\frac{14.776.840}{19.396.800 - 1.740.000} \right) = 0,836$$

$$\text{Koefisien DRC (Domestic Resources Cost)} = \left(\frac{G}{E - F} \right) = \left(\frac{14.696.840}{14.463.269 - 1.491.160,5} \right) = 1,132$$

$$\text{Koefisien EPC (Effective Protection Coefficient)} = \left(\frac{A - B}{E - F} \right) = \left(\frac{19.396.800 - 1.740.000}{14.463.269 - 1.491.160,5} \right) = 1,359$$

$$\text{Koefisien NPCI (No minimal Protection Coefficient Input)} = \left(\frac{B}{F} \right) = \left(\frac{1.740.000}{1.491.160,5} \right) = 1,166$$

$$\text{Koefisien NPCO (No minimal Protection Coefficient Output)} = \left(\frac{A}{E} \right) = \left(\frac{19.396.800}{14.463.269} \right) = 1,341$$

Lampiran 19. Matrik Analisis Kebijakan (PAM) Usahatani Tebu Ungaran Lahan Tegal Petani Tebu Bebas PG Kebon Agung Satu Masa Tanam Per Hektar Periode 2005/2006

Analisis (Rp)	Revenue (Rp)	Biaya		Profit (Rp)
		Input Treadable (Rp)	Input Domestik (Rp)	
Harga Pasar	19.396.800 (A)	2.255.000 (B)	16.245.000 (C)	896.800 (D)
Harga Sosial	14.463.269 (E)	1.491.160,5 (F)	16.165.000 (G)	- 3.192.891,5 (H)
Selisih	4.933.531 (I)	763.839,5 (J)	80.000 (K)	4.089.691,5(L)

Keterangan :

- Profit Finansial (D) = A – B – C = Rp 896.800
- Profit Sosial (H) = E – F – G = Rp. 3.272.891,5
- Transfer Output (I) = A – E = Rp. 4.933.531
- Transfer Input (J) = B – F = Rp. 763.839,5
- Transfer Faktor Domestik (K) = C – G = Rp. 80.000
- Transfer Bersih (L) = D – H = Rp. 4.089.691,5

$$\text{Koefisien PCR (Private Cost Resources)} = \left(\frac{C}{A - B} \right) = \left(\frac{16.245.000}{19.369.800 - 2.255.000} \right) = 0,941$$

$$\text{Koefisien DRC (Domestic Resources Cost)} = \left(\frac{G}{E - F} \right) = \left(\frac{16.165.000}{14.463.269 - 1.491.160,5} \right) = 1,25$$

$$\text{Koefisien EPC (Effective Protection Coefficient)} = \left(\frac{A - B}{E - F} \right) = \left(\frac{19.369.800 - 2.255.000}{14.463.269 - 1.491.160,5} \right) = 1,319$$

$$\text{Koefisien NPCI (No minimal Protection Coefficient Input)} = \left(\frac{B}{F} \right) = \left(\frac{2.255.000}{1.491.160,5} \right) = 1,512$$

$$\text{Koefisien NPCO (No minimal Protection Coefficient Output)} = \left(\frac{A}{E} \right) = \left(\frac{19.369.800}{14.463.269} \right) = 1,339$$